



Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

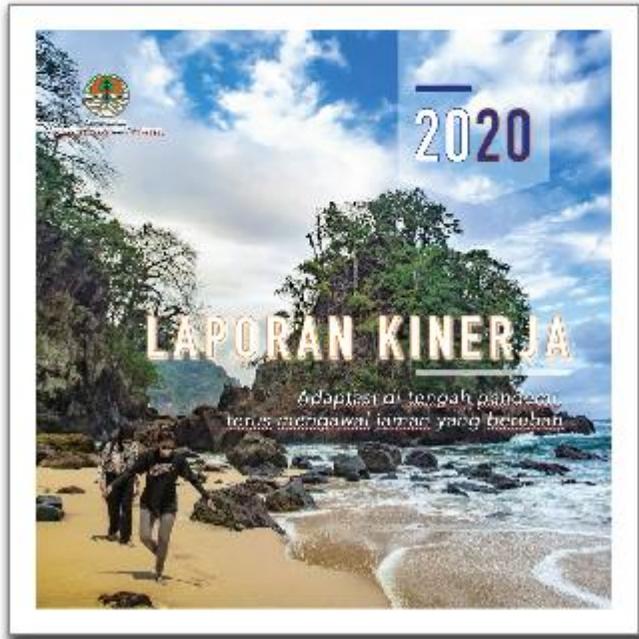
2020

# LAPORAN KINERJA

*Adaptasi di tengah pandemi,  
terus mengawal jaman yang berubah*



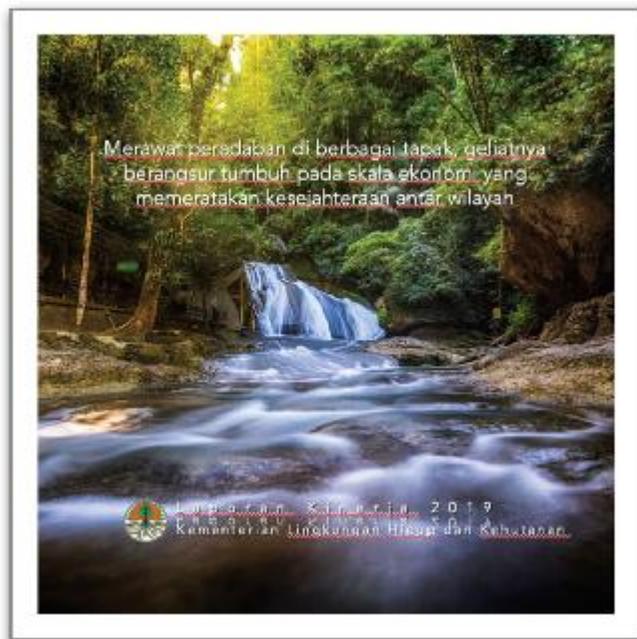
# KEBERLANJUTAN TEMA LAPORAN KINERJA



## 2020

Adaptasi di tengah pandemi, terus mengawal jaman yang berubah

Tahun yang penuh berkah, mengajarkan kepada dunia bahwa di balik segala kesulitan yang dialami, terlahir kesempatan dan peluang baru bagi insan yang mampu beradaptasi pada perubahan peradaban. Kementerian LHK mengabdikan diri turut mengawal paradigma baru dalam mengelola lingkungan hidup dan hutan sebagai lompatan besar menuju bangsa pemenang.



## 2019

Merawat peradaban di berbagai tapak, geliatnya berangsur tumbuh pada skala ekonomi yang memeratakan kesejahteraan antar wilayah

Tahun transisi pemerintahan dimana target-target rencana jangka menengah menjadi titik ukur. Kementerian LHK tidak hanya menyelesaikan tugas tersebut, tetapi juga turut menurunkan kesenjangan antar wilayah dengan kerja-kerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilabuhkan pada kesejahteraan masyarakat.



*Bekerja dalam sunyi menyelamatkan generasi*

*Di tengah hiruk pikuk penanganan wabah Covid-19, alam menemukan kesempatan untuk melakukan recovery dengan caranya sendiri. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sadar bahwa penurunan aktivitas manusia di seluruh penjuru dunia merupakan momentum untuk mengakselerasi tugas tugas KLHK dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dan hutan. Alam, lingkungan dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya adalah warisan bagi para penerus bangsa.*

*Dalam sunyi pandemi, KLHK bekerja menyelamatkan generasi*

*Foto ini diambil di Teluk Permisian Taman Nasional Meru Betiri oleh Arihadi Purnomo*

# LAPORAN KINERJA 2020

## Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Disusun dan diterbitkan oleh Biro Perencanaan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ©2021  
ISBN 978-623-96048-2-0

Penerbit mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah menyumbangkan tenaga, kreativitas dan keahliannya untuk menghias Laporan Kinerja ini melalui bidikan lensa yang merekam cerita dari seluruh penjuru negeri.

Sesuai urutan abjad, mereka adalah:

**A G Darda** (BBTN Betung Kerihun), **Abdul Kholik** (Biro Perencanaan), **Afiyan Eko** (BTN Meru Betiri), **Agung Kriswiyanto** (BPSKL Kalimantan), **Akhmad David Kurnia Putra** (BTN Aketajawe Lolobata), **Amsyar Setiawan** (KPH Amplang Plampang), **Arie Prasetyowati** (P3E Jawa), **Arihadi Purnomo** (BTN Meru Betiri), **Asri** (BTN Taka Bonerate), **Bambang Agus Kusyanto**, **Bayu Hendra** (Bali Birding Tour), **Benediktus Rio Wibawanto** (BTN Gunung Rinjani), **Bontor L. Tobing** (BPDASHL Sei Jang Duriangkang), **Chaeril** (BTN Bantimurung Bulusaraung), **Daffa Ulhaq Adabi**, **Danial Idris** (BBKSDA Papua), **Donny Heru Kristianto** (BTN Lore Lindu), **Dwi Suryana** (BTN Gunung Ciremai), **Dwi Putro Notonegoro** (BTN Matalawa), **Emi Hayati Danis** (BTN Kerinci Seblat), **Faizal Riza** (BTN Gunung Palung), **Farid Fauzan** (Seditjen PSLB3), **Faturrahman** (KPHL Kapuas Kahayan), **Firli Azhar** (Biro Humas), **Galeh Primadani** (BTN Rawa Aopa Watumohai), **Hamka** (BBKSDA Sulawesi Selatan), **Hardiyan Agustin** (BTN Kepulauan Seribu), **Haryadi** (BTN Kutai), **Hendrawan** (BTN Wakatobi), **Hendy Noordianto** (BPDASHL Sei Jang Duriangkang), **Heri Andri** (BTN Matalawa), **Heri K** (BPDASHL Ketahun), **Ikhwan Fajrin** (BTN Rawa Aopa Watumohai), **Indra Pradana** (BTN Bantimurung Bulusaraung), **Indra Anggrana Wijaya** (BTN Rawa Aopa Watumohai), **Ineke Tya Claudya Sarwono Putri** (Biro Perencanaan), **Iskandar** (Setditjen KSDAE), **Janur Wibisono** (Biro Humas), **Junaedi Sam** (BTN Bantimurung Bulusaraung), **Kartika Puspitasari** (BPPIKHL Sulawesi), **Luh Dinawati** (Biro Umum), **Mahardhika Cahaya Utama** (Biro Perencanaan), **Mansur** (BTN Bantimurung Bulusaraung), **Marwedhi Nurratyo** (Biro Perencanaan), **M. Luthfi** (Biro Humas), **M. Ryan Sandria** (Biro Humas), **Musyafa Ahmad** (Badan Restorasi Gambut), **Nensi Sulendri** (Biro Kepegawaian dan Organisasi), **Neny J. Andin** (KPHP Kahayan), **Piko Shorea** (Setditjen PDASHL), **Puji Firmansyah** (BTN Meru Betiri), **Putu Sutarya** (BTN Rawa Aopa Watumohai), **Rahadin Saputra** (BTN Rawa Aopa Watumohai), **Rahmat Tio Kosasih** (Forclime DPMU Berau), **Ramli** (BTN Rawa Aopa Watumohai), **Ramli** (BTN Bantimurung Bulusaraung), **Raysapta** (Biro Humas), **Ruspiatin** (Pusat Litbang Hasil Hutan), **Sandi Kusuma** (Biro Perencanaan), **Samsir** (Manggala Agni Daops Tinanggea), **Sumali** (BTN Gunung Merbabu), **Taufan Kharis** (BKSDA Sumatera Selatan), **Taufik Ismail** (BTN Bantimurung Bulusaraung), **Yanuar Fanca Kusuma** (Manggala Agni Daops Tinanggea), **Yayan Kristanto** (BPDASHL Solo), **Yunita Aprilia** (BBTN Gunung Leuser).

Foto cover depan dan belakang :  
Pantai Teluk Hijau di TN. Merubetiri, foto oleh Afiyan Eko.

Dokumen digital Laporan Kinerja ini dapat diakses dengan memindai QR code berikut:



<http://bit.ly/LKJ-KLHK-2020>

*Pomacentrus coelestis* adalah spesies ikan betook (damselfish) yang merupakan jenis ikan karang. Spesies ini banyak dijumpai di perairan TN Wakatobi Sulawesi Tenggara. Menurunnya jumlah wisatawan ke kawasan konservasi akibat penutupan beberapa destinasi wisata membawa berkah bagi keanekaragaman hayati yang hidup di bawah laut, tak terkecuali ikan karang ini yang tampak menikmati karang yang masih alami di TN Wakatobi

Dijumpai di site Pak Kasim's TN Wakatobi  
Foto oleh Hendrawan



# MENGAWAL yang

Menurunnya aktivitas manusia akibat pandemi, adalah masa bahagia bagi bumi untuk mengembalikan daya dukungnya, terbukti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencatatkan angka 70,27 dari target 68,71

Hutan sosial sebagai salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan terus diakselerasi dengan diterbitkannya izin hutan sosial seluas 409.934 hektare, jauh melebihi dari target 125.000 hektare

Menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi melalui redistribusi kawasan hutan dengan program TORA terus dilakukan. 72.956 hektare kawasan hutan telah dilepaskan untuk masyarakat, jauh melebihi target 46.500 hektare

Di tengah restriksi transportasi antar negara, Ekspor Hasil Hutan dan Tumbuhan Satwa Liar mencatatkan nilai yang tinggi sejumlah 11,83 miliar dolar Amerika

Efektivitas pengelolaan kawasan hutan yang semakin baik, ditandai dengan indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan yang mencapai 2,40 atau 114,29 persen dari target 2,10

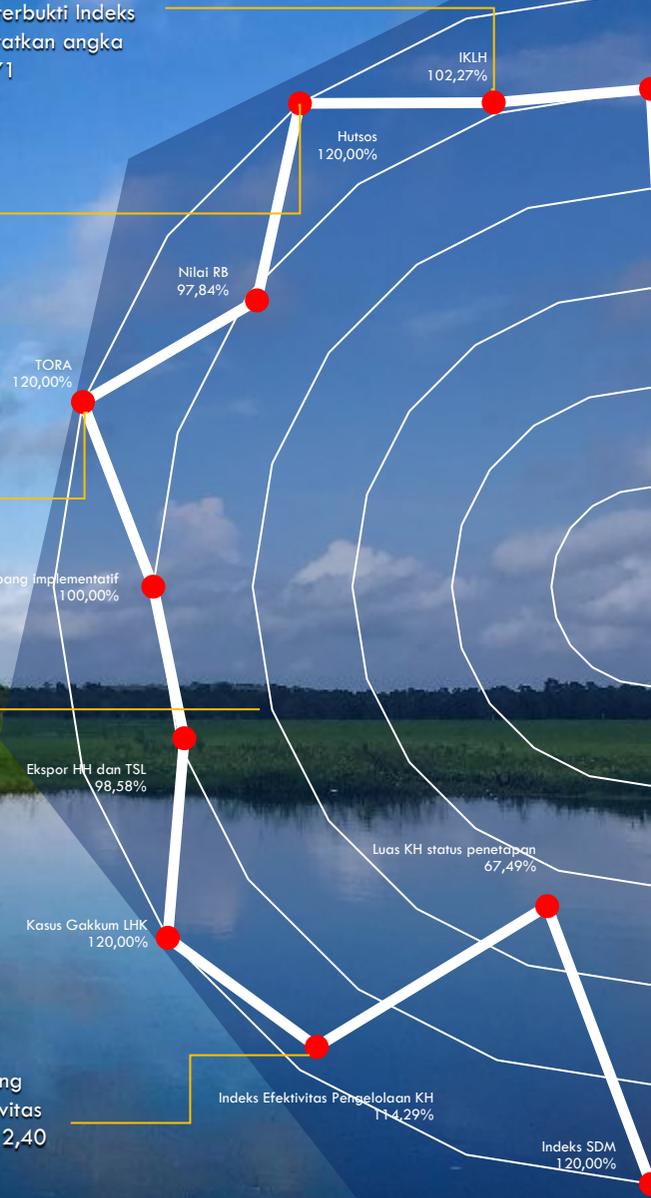


Foto oleh Taufan Kharis

# PERADABAN berubah

Keberhasilan Indonesia dalam menekan laju deforestasi mendapatkan imbal dari Norwegia sebesar 840 Miliar rupiah melalui skema *Result Based Payment*

Beberapa pekerjaan rumah tentunya harus menjadi pelecut untuk percepatan perbaikan kinerja. Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah yang masih di angka 49,44

Rehabilitasi Hutan dan Lahan menjadi istimewa pada tahun pandemi ini karena selain menyelamatkan DAS seluas 112.973 hektare melalui penyediaan bibit 28 juta batang bibit, juga turut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program padat karya penanaman mangrove

Resesi yang terjadi di sebagian besar negara di dunia berdampak juga terhadap konsumsi dalam negeri. Di tengah-tengah kondisi ini, sektor LHK mampu mencatatkan kontribusi sebesar 108,63 Triliun Rupiah dari target awal sebesar 103 Triliun Rupiah

Aksi koreksi juga dilakukan di dalam, perbaikan kinerja birokrasi terus ditingkatkan, ditandai dengan opini WTP dari BPK, Nilai RB yang telah mencapai BB, indeks produktivitas SDM di angka 89,50, Indeks SPBE yang mencapai 3,61, jumlah kasus penegakan hukum LHK yang mencapai 235 kasus, dan hasil litbang yang diimplementasikan sebanyak 16 terapan.

Sebagai alternatif pendapatan selain pajak yang lesu dikarenakan penurunan realisasi pajak, PNBP menunjukkan performa yang baik dengan capaian 90,78% atau 4,63 Triliun Rupiah, dari target awal sebesar 5,1 Triliun Rupiah

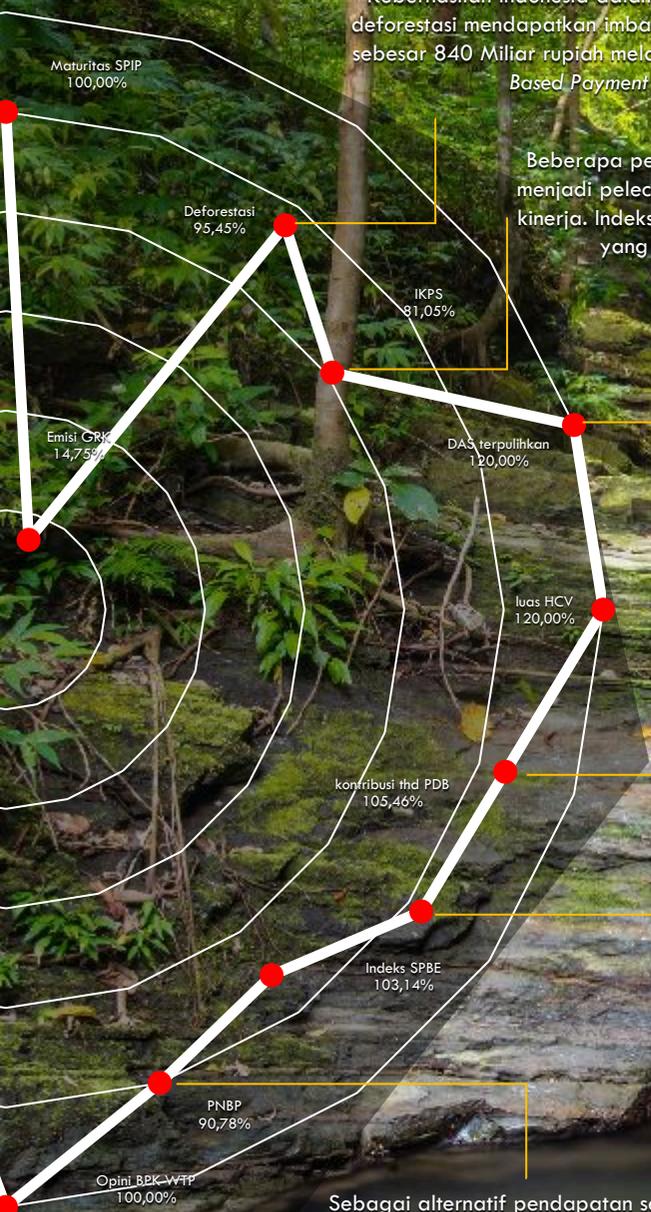


Foto oleh Chaeril

# LINGKUNGAN HIDUP DAN 2015-

**2,9** juta ha

Penghutanan kembali  
hutan dan lahan

**3,69** juta ha

Pembasahan lahan  
gambut

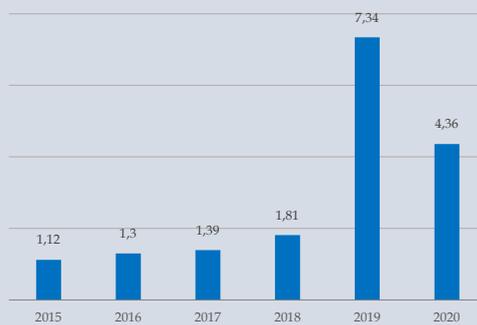
**0,46** juta ha

Laju penyusutan hutan

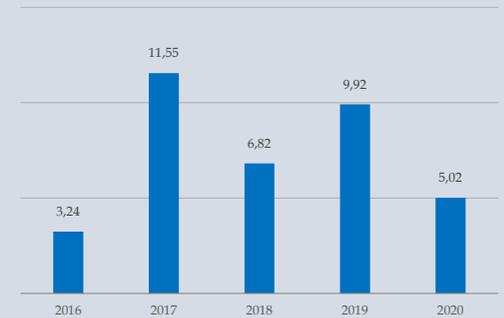
**2.890** izin

Pengawasan usaha untuk  
penurunan beban  
lingkungan

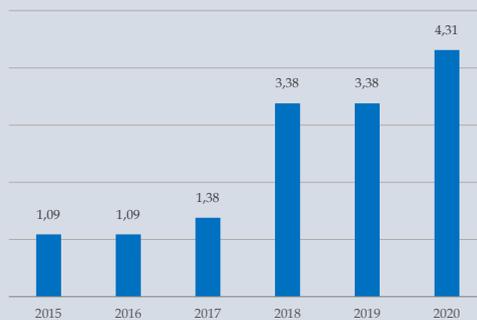
Pengurangan  
timbunan  
sampah  
(juta ton)



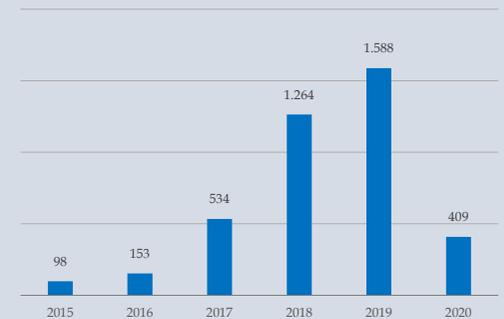
Penurunan  
limbah padat  
non B3  
(juta ton)



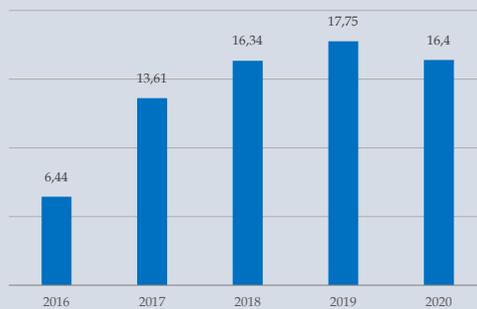
Pengelolaan  
bank sampah  
(juta ton)



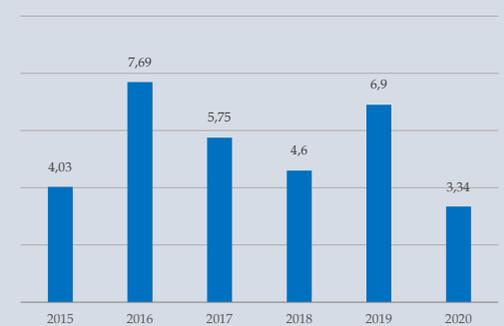
Luas akses  
kelola hutan  
oleh  
masyarakat  
(ribu ha)



Penurunan  
limbah B3  
(juta ton)



Wisatawan  
nusantara  
(juta orang)



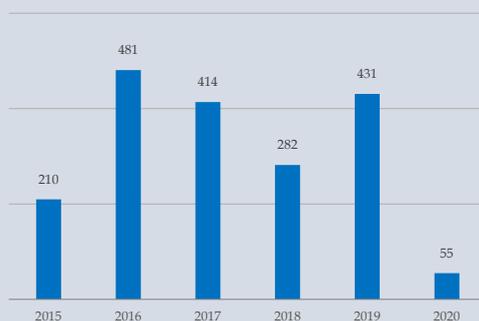
# KEHUTANAN DALAM ANGKA 2020

**38.985** unit  
Bangunan konservasi tanah dan air untuk mengurangi erosi

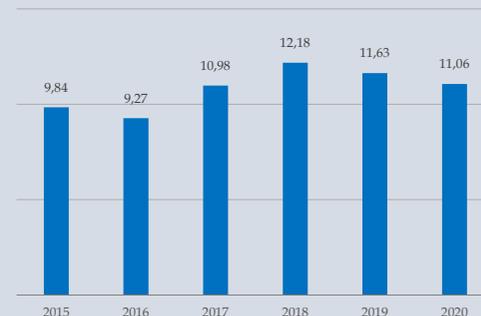
**292** perusahaan  
Sanksi administrasi yang dikenakan

” *Mengurangi beban lingkungan dan terus bergerak memanfaatkan potensi sumber daya hutan untuk memmeratakan pembangunan wilayah*

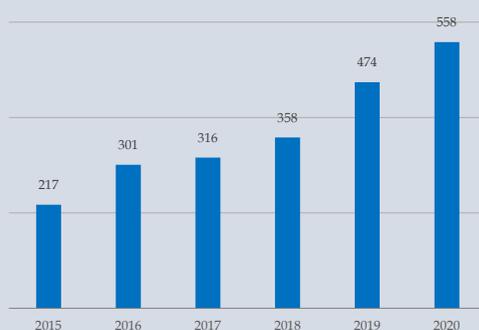
Wisatawan mancanegara (ribu orang)



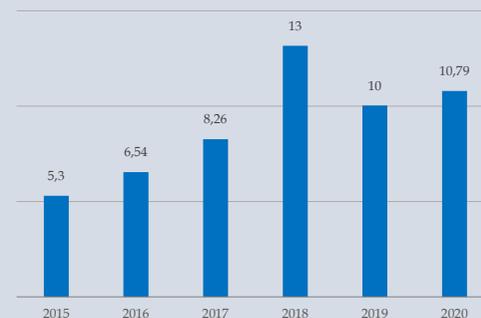
Ekspor kayu olahan (US\$ miliar)



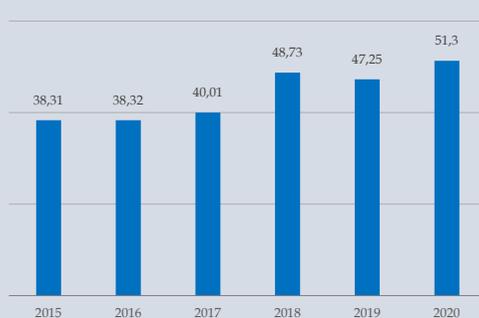
Produksi hasil hutan bukan kayu (ribu ton)



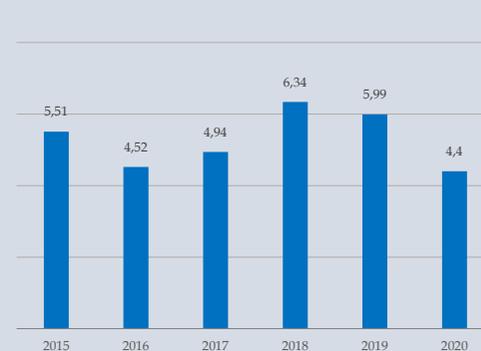
Ekspor tumbuhan dan satwa (Rp. triliun)



Produksi kayu bulat (juta ton)



Penerimaan negara bukan pajak (Rp. triliun)



# KALEIDOSKOP 2020

## JANUARI



8 JANUARI

Penyerahan Anugerah PROPER Oleh Wapres



13 JANUARI

KLHK utamakan penanganan bencana berbasis DAS

## FEBRUARI



28 FEBRUARI

Rapat Kerja Nasional 2020 KLHK. Tema: "Cinta Kita Untuk Bumi"



21 FEBRUARI

Penyerahan SK Perhutanan Sosial dan Hutan Adat kepada rakyat Riau

## MARET



6 MARET

Aksi bersih pantai di Labuan Bajo pada rangkaian hari peduli sampah Nasional



19 MARET

Penutupan wisata alam di taman nasional



9 MARET

KLHK berduka atas kehilangan jajaran dalam musibah speedboat di TN. Sebangau



24 APRIL

Antisipasi karhutla di tengah pandemi

## APRIL



16 APRIL

KLHK alokasikan Rp. 1,01 T untuk masyarakat dari petani hutan terdampak korona saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI

## JUNI

20 MEI

Berhasil tekan deforestasi, Indonesia terima dana dari Norwegia 840 Miliar rupiah

## MEI



6 JUNI

Global Landscape Forum 2020

## JULI



19 JULI

Menteri LHK mantapkan upaya pencegahan permanen Karhutla



22 JULI

KLHK raih predikat opini WTP kali ketiga secara berturut-turut

## AGUSTUS



14 AGUSTUS

Penetapan teknologi modifikasi cuaca efektif mengendalikan Karhutla



# KEMENTERIAN LHK

## OKTOBER



**1 OKTOBER**

Pertemuan Tingkat Tinggi Keanekaragaman Hayati di sidang majelis umum PBB



**20 SEPTEMBER**

Dua anak Badak Jawa lahir di Taman Nasional Ujung Kulon



**1 SEPTEMBER**

Pelaku tambang ilegal dihukum pidana berlapis untuk pertama kali di Indonesia, di kawasan hutan lindung Lubuk Besar Bangka Tengah

## SEPTEMBER



**27 AGUSTUS**

Deforestasi turun, Indonesia terima USD 103,8 juta dari Green Climate Fund



**27 OKTOBER**

Penataan Sarpras di Pulau Rinca TN Komodo tetap patuhi kaidah konservasi



**22 OKTOBER**

Padat Karya Penanaman mangrove untuk pulihkan ekonomi nasional



**23 OKTOBER**

KLHK berikan penghargaan kepada pelaksana program kampung iklim/PROKLIM pada puncak festival iklim 2020

## NOVEMBER



**21 DESEMBER**

Anugerah KALPATARU 2020 dan NIRWASITA TANTRA 2019



**14 DESEMBER**

Anugerah PROPER 2020

## DESEMBER



**25 NOVEMBER**

Lagi, KLHK raih penilaian Badan Publik Informatif



**25 NOVEMBER**

SIMONTANA KLHK raih top 45 inovasi pelayanan publik 2020



**11 NOVEMBER**

Litbang KLHK raih anugerah inovasi Indonesia tahun 2020



*Menjaga lanskap bumi memetik hasil*

*Sektor pertanian menjadi satu-satunya sektor yang mampu tumbuh dalam masa resesi tahun 2020. Ketahanan Pangan tidak hanya menjadi kunci untuk dapat bertahan di era deglobalisasi saat ini tapi juga menunjukkan fondasi yang kuat dalam menopang perekonomian negeri.*

*Foto oleh Bambang Agus Kusyanto*

# PENGANTAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Pandemi yang menghantam bumi bukanlah suatu nestapa yang selalu meminta diratapi. Ia adalah suatu panitia seleksi yang memilih jiwa-jiwa yang mandiri dan penuh inovasi dalam usaha membangun negeri. Akibat dari pandemi ini sungguh sangat terasa di setiap lapisan insani, karena memang tak pernah dikaji dan memaksa harus dihadapi. Tak hanya krisis kesehatan yang menghantui, tapi momok resesi yang justru menjadi ancaman ekonomi. Sesiapa yang bekerja dengan hati dan nurani tentu dapat jernih membaca hal ini, lalu membajak ujian abad ini guna menjadi bangsa pemenang di tengah fenomena deglobalisasi.

Nukilan sajak di atas mencerminkan sikap pemerintah RI dalam menangani situasi pandemi. Hal yang sama disampaikan oleh Yth. Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan di depan MPR/DPR/DPD pada tanggal 14 Agustus 2020 dimana beliau sampaikan bahwa krisis akibat pandemi ini justru menjadi momentum untuk dibajak dan melakukan lompatan-lompatan besar menuju kemajuan bangsa.

Pesan yang kuat tersebut menjadi modal semangat dan pelecut bagi seluruh sektor di penjuru negeri, tak terkecuali para penyelenggara pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Meskipun seluruh sektor sempat mengalami penurunan aktivitas, tapi seiring berjalannya waktu seluruh komponen negeri belajar bagaimana beradaptasi untuk tetap menghasilkan karya terbaik di tengah-tengah pandemi. Berikut kisah-kisah dari penjuru negeri.

Hutan sosial sebagai salah satu program unggulan pemerintah Kabinet Indonesia Maju menemukan caranya sendiri untuk turut berkontribusi di masa pandemi ini. Bila sebelumnya hutan sosial selalu diukur dari aspek numerik berupa luas izin yang diterbitkan, pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju peningkatan kualitas hutan sosial juga menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat desa hutan. Sebut saja, ketika di awal pandemi negeri ini dilanda *overstock* komoditas karena pembatasan sosial yang menyebabkan transaksi menjadi terhambat termasuk para petani hutan yang kesulitan memasarkan produknya. Pada kondisi seperti inilah pemerintah hadir dengan kebijakan terobosan dengan jalan membeli produk-produk HHBK antara lain produk herbal seperti madu, empon-empon, jamu-jamuan dan vitamin penambah daya tahan tubuh untuk disumbangkan kepada para tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan Covid-19 dengan tak lupa menyampaikan salam dari para petani di pinggir-pinggir hutan yang juga terbantu karena produknya berhasil terjual seraya memberikan semangat bagi para dokter dan perawat dalam menangani pasien. Cerita hutan sosial tak berhenti di sini. Tata kelola birokrasi untuk terus mendorong redistribusi lahan hutan melalui program hutan sosial terus berjalan dengan penerapan protokol kesehatan. Di luar perkiraan, pada tahun 2020 izin hutan sosial telah diterbitkan 409.934 hektare, tercapai lebih dari 300 persen dari target 125 ribu hektare.



Seorang petani hutan sosial sedang memperlihatkan hasil panen Udang Galah di Desa Katimpun, Kalimantan Tengah. Udang Galah merupakan salah satu produk hutan sosial. Sedangkan foto dibawahnya adalah hasil produk kopi dari kelompok tani hutan Betara Bersatu binaan BTN Bantimurung Bulusaraung. Perhutanan Sosial pada milestone 2020-2024 dikembangkan untuk mendorong keberdayaan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan. Hal ini melanjutkan milestone 2015-2019 yang lebih berfokus terhadap akses kelola kawasan.

Foto panen Udang Galah oleh Faturrahman dan foto produk Kopi oleh Ramil.



*Ketenangan jalur pendakian menuju interior TN. Gandang Dewata, Sulawesi Barat. Tahun 2020 menawarkan kesempatan untuk sadar dan tumbuh lebih dekat dengan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus bekerja secara nyata meringankan beban ekonomi masyarakat yang terimbas karena pandemi Covid-19 melalui Pemulihan Ekonomi Nasional.*

Foto oleh Hamka



Tak cukup dengan cerita hutan sosial, berkah lain masih di seputaran program redistribusi lahan, progres Tanah Objek Reforma Agraria dari kawasan hutan melampaui target, dimana pada tahun 2020 telah didistribusikan kawasan hutan seluas 72.958 hektare dari target seluas 46.500 hektare atau 156,90%. Capaian ini menjadikan pelajaran bahwa situasi pandemi bukan alasan untuk berhenti berkarya, justru pada situasi seperti ini banyak terobosan dan inovasi tercipta guna meningkatkan kinerja tata kelola birokrasi.

Tahun 2020 diwarnai dengan jalanan yang lengang akibat pembatasan sosial berskala besar. Fenomena ini berdampak juga pada kualitas udara di kota-kota besar yang semakin baik, dimana indeks kualitas udara menjadi 87,21 atau meningkat dari 86,56 di tahun sebelumnya. Kualitas anasir lain seperti kualitas air yang juga menunjukkan tren perbaikan dimana tahun 2020 tercatat sebesar 53,53 meningkat dibanding 52,62 pada tahun 2019. Secara agregat, indeks kualitas lingkungan hidup meningkat menjadi 70,27 melebihi dari target 68,71, atau lebih tinggi daripada IKLH tahun 2019 sebesar 66,55.

Perbaikan kualitas lingkungan hidup ini juga berbanding lurus dengan usaha pemerintah RI untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, dimana untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerima pembayaran hasil kerja penurunan emisi GRK dari Norwegia, sebesar proyeksi 56 juta US\$ atau lebih dari 840 milyar rupiah. Dana tersebut dibayarkan dengan skema *Result Based Payment* (RBP) dan diserahkan melalui Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BP-DLH). Ini merupakan pembayaran pertama kalinya atas prestasi penurunan emisi karbon dari kehutanan tahun 2016/2017. Keberhasilan mengurangi emisi ini tidak terlepas dari komitmen, dukungan dan upaya korektif pemerintah secara kolektif di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Data Climate Change Performance Index juga mengamini hal tersebut, pada tahun 2020 (atas kinerja tahun 2019) CCPI merilis peringkat Indonesia di kisaran 39 dari 61 negara, yang berarti kinerja upaya mitigasi Indonesia masih dianggap rendah. Pada tahun 2021 ini (atas kinerja 2020) peringkat Indonesia meningkat signifikan menjadi 24 atau sudah masuk ke kategori rating medium. Upaya menekan gas rumah kaca juga tak terlepas dari keberhasilan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Karhutla berhasil ditekan 82,01% dibandingkan tahun 2019, atau turun 1,3 juta hektare luas lahan terbakar.

Sebagai Kementerian yang bertugas menjaga aset lingkungan di negeri ini, KLHK terus berupaya melakukan perbaikan kualitas lingkungan. Pada tahun 2020, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) terus digalakkan. Lahan yang berhasil ditanam mencapai 112.973 hektare. Tak cukup dengan hal itu, dalam usaha pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi, diluncurkan juga program Padat Karya Penanaman Mangrove dengan tujuan untuk menyelamatkan ekosistem mangrove dan pesisir pantai. Program ini melibatkan masyarakat kelompok tani mangrove dengan pemberian bantuan upah tanam dan pengadaan bibit yang langsung ditransfer di rekening masing-masing petani. Tercatat sebanyak 39.970 rekening petani berhasil dibuka untuk program padat karya ini. Hasilnya sungguh sangat diapresiasi masyarakat, terutama mereka yang terdampak penurunan aktivitas perekonomian dan bahkan beberapa yang terkena pemutusan hubungan kerja. Areal mangrove seluas 17.703 hektare berhasil ditanami dengan berbagai species tahan gelombang. Metode padat karya terbukti sangat efektif dan capaiannya jauh melesat dibandingkan capaian penanaman mangrove sebelumnya yang hanya seluas 1.000 hektare per tahun. Terbukti, dengan metode pelibatan masyarakat melalui transfer langsung ke rekening RHL menjadi lebih efektif dan terjamin akuntabilitasnya.



*Dua putri petani kelompok tani hutan berikut dengan sukacita turut menanam mangrove dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional. Di sela-sela waktu Pembelajaran Jarak Jauh dimana mereka harus bersekolah dari rumah akibat pandemi Covid-19, mereka turut membantu orang tuanya menanam mangrove di pantai. Program Padat Karya Penanaman Mangrove seperti ini selain diapresiasi masyarakat karena sangat membantu perekonomian di tengah penurunan pendapatan akibat berbagai macam pembatasan, juga merupakan suatu wahana edukasi bagi para generasi Z penerus bangsa. Melalui aktivitas luar ruangan yang memberikan pengetahuan bidang lingkungan dan kehutanan seperti ini, akan terbentuk generasi-generasi cinta bumi sebagai modal dasar pembangunan pada masa depan. Foto di halaman sebelumnya merupakan pembukaan buku rekening tabungan dalam program padat karya penanaman mangrove untuk masyarakat dan kelompok tani hutan di daerah pesisir.*

*Foto oleh Piko Shorea.*

Upaya perbaikan pengelolaan hutan khususnya konservasi juga tak lepas dari sentuhan KLHK. Upaya konservasi tidak hanya dilakukan pada kawasan-kawasan konservasi yang ditetapkan sebagai kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam. Areal yang memiliki nilai konservasi tinggi di luar kawasan konservasi terus diperluas, tujuannya adalah menjaga habitat satwa liar dan membangun koridor hidupan satwa liar agar satwa-satwa kebanggaan Indonesia dan dunia tersebut dapat terus dijaga eksistensinya dan tidak berakhir pada dongeng dan hikayat semata. Dari target 3,3 juta hektare luas kawasan bernilai konservasi tinggi (*high conservation value/HCV*) tercapai 13,9 juta hektare yang telah ditetapkan sebagai HCV, dimana pada kawasan tersebut, prinsip-prinsip konservasi diterapkan untuk menjamin eksistensi spesies kunci maupun lanskap unik yang dilestarikan pada kawasan tersebut.

Selain urusan konservasi keanekaragaman hayati, efektivitas pengelolaan kawasan hutan pada umumnya juga menjadi perhatian pada tahun 2020. Sebuah ukuran indeks ditentukan untuk mengukur sejauh mana pengelolaan hutan dinilai efektif atau tidak. Ketiga fungsi hutan (konservasi, lindung, produksi) menjadi penentu nilai ini, ditambah dengan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) yang umumnya digunakan sebagai hutan penelitian dan hutan praktik. Dari target yang ditetapkan sebesar 2,1 poin diperoleh indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan sebesar 2,40 poin. Tentunya, meskipun indeks ini menunjukkan bahwa sejauh ini efektivitas pengelolaan kawasan hutan relatif sudah efektif, tapi peluang untuk perbaikan efektivitas pengelolaan terus diupayakan menuju hutan lestari yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Urusan lingkungan hidup pun menjadi salah satu sasaran yang ingin diwujudkan. Salah satunya adalah perbaikan pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya beracun. Tahun 2020 adalah tahun pertama kalinya digunakan indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS). Indeks ini tidak hanya mengukur pada sisi efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan pengurangan timbunan sampah, melainkan juga dari sisi tata kelola (*governance*) yang meliputi kebijakan, SDM, anggaran serta tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Dari target sebesar 61 poin, dicapai nilai IKPS sebesar 49,44 yang artinya pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan ke depannya. Banyaknya pihak yang terkait dengan hal ini menjadi faktor yang harus diselesaikan dan disinergikan melalui kolaborasi dan kerja sama antar *stakeholder*.

Segala upaya perbaikan lingkungan hidup dan kehutanan di atas, tentu tidak akan berjalan sedemikian efektif tanpa upaya penegakan hukum bidang LHK di sepanjang tahun 2020. Terbukti, di masa pandemi kinerja penegakan hukum LHK justru mengalami peningkatan dengan mencatatkan 235 kasus yang berhasil ditetapkan dengan status P21, dengan rincian 220 kasus pidana dan 15 kasus perdata. Capaian itu jauh melebihi target yang dirancang yaitu 153 kasus. Angka tersebut bukan untuk dimaknai bahwa di masa pandemi kejahatan lingkungan dan pidana kehutanan meningkat, melainkan upaya penegakan hukum yang terencana dan *smart* berujung pada pengungkapan kasus-kasus besar di bidang LHK.

Sejurus dengan perbaikan kualitas lingkungan dan hutan, cerita berkah berlanjut pada aspek perekonomian. Di tengah kondisi resesi ekonomi sektor Pertanian dan Kehutanan masih mencatatkan pertumbuhan 1,75 persen. Sektor LHK sendiri tercatat berkontribusi 108,63 Triliun Rupiah terhadap perekonomian nasional. Restriksi perdagangan antar negara akibat pandemi berdampak langsung pada nilai ekspor bidang LHK. Produk hasil hutan dan tumbuhan satwa liar yang diekspor mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, tahun 2020 angkanya mencapai 11,83 Miliar Dolar Amerika, atau mengalami penurunan 4,90 persen untuk produk ekspor kayu olahan, sedangkan produk TSL justru mengalami peningkatan 7,58 persen. Di sisi lain, pendapatan nasional bukan pajak (PNBP) mampu memberi kontribusi pada pendapatan negara yang menurun akibat realisasi pajak tidak sesuai target. Tercatat 4,63 Triliun Rupiah berhasil dipungut dan masuk ke kas negara. Tentunya kontribusi ini akan sangat bermakna demi menjaga kesehatan fiskal di saat pengeluaran negara untuk mengatasi pandemi dan dampak ikutannya juga meningkat.



Program reaktivasi wisata alam menjadi salah satu sumber pendapatan petugas kebersihan dan masyarakat sekitar.  
Foto oleh Hardiyanto Agustin

Seluruh cerita berkah pandemi di atas tentu tidak akan terjadi tanpa perbaikan tata kelola birokrasi. Kreativitas para birokrat di masa pancaroba perubahan zaman telah melahirkan inovasi-inovasi demi perbaikan kinerja melayani negeri. Tercatat dari sisi administrasi keuangan KLHK kembali meraih opini WTP, kemudian nilai Reformasi Birokrasi yang telah memasuki kategori BB sehingga KLHK berhak untuk mengajukan peningkatan tunjangan kinerja menjadi 80 persen. Nilai produktivitas SDM LHK pun mencapai 89,50 jauh melebihi target 70 poin. Kementerian LHK juga diganjar sebagai badan publik yang informatif yang merupakan anugerah tertinggi dari Komisi Informasi Pusat. Seiring dengan gelombang digitalisasi, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KLHK juga mengalami kemajuan dengan diraihnya nilai 3,61 (sangat baik) dari KemenPAN&RB. Dari sisi pengawasan, tingkat maturitas SPIP juga mencapai 3,37 melebihi target yaitu 3 poin.

Rangkuman cerita-cerita berkah dari pandemi tersebut, menghiasi perjalanan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dalam satu tahun terakhir, tentu tak terlepas dari izin Tuhan Yang Maha Kuasa yang memang tidak pernah berhenti menurunkan nikmat dan kasih sayang kepada makhluk-Nya. Apresiasi tertinggi juga untuk seluruh jajaran LHK dari Sabang sampai Merauke yang telah bekerja keras dan cerdas di masa yang menuntut kreativitas tinggi ini. Akhirnya, izinkan kami menutup pengantar ini dengan satu keyakinan bahwa berbekal dengan pengalaman di tahun yang penuh tantangan, KLHK melangkah dengan optimis mengawal peradaban yang berubah ini dengan selalu menghadirkan prioritas pelayanan pada masyarakat Indonesia, sang Tuan pemilik negeri yang kita cintai ini.

Jakarta, Februari 2021



Dr. Sri Nurbaya, M. Sc



*Pengecekan suhu badan sebelum memasuki area TN. Kepulauan Seribu sebagai protokol kesehatan (atas). Pembuatan gula aren dari air nira oleh warga Desa Benteng (tengah). Inventarisasi Potensi Keanekaragaman Hayati di HSA Gumai Tebing Tinggi dilakukan untuk memperoleh data terbaru terkait potensi yang ada (bawah)*

Foto oleh Hardian Agustin, Taufik Ismail dan Taufan Kharis



# PERNYATAAN REVIU

## Laporan Kinerja KLHK 2020

Laporan kinerja ini telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK.



Untuk melihat dokumen hasil Reviu LKJ KLHK 2020 oleh Inspektorat Jenderal silahkan memindai QR code di samping.

# DAFTAR ISI

---

KEBERLANJUTAN TEMA	i
KEHUTANAN DALAM ANGKA 2015-2020	vii
KALEDOSKOP	ix



1



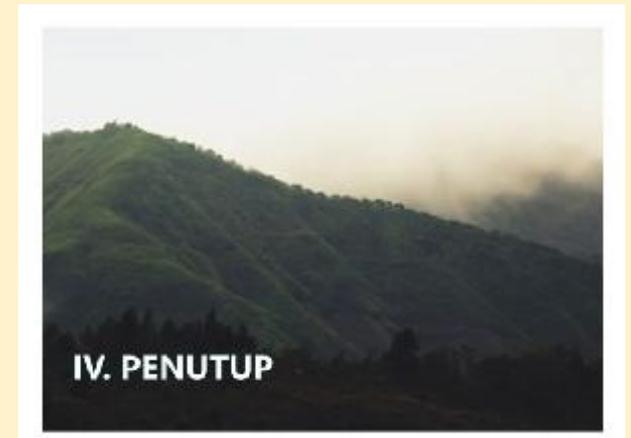
21

---

KATA PENGANTAR	xii
PERNYATAAN REVIU	xix
DAFTAR ISI	Xx



29



311



*Hutan Aketajawe, rumah sunyi Suku Tobelo*

*Tobelo Dalam merupakan suku asli yang mendiami kawasan hutan TN. Aketajawe Lolobata, Maluku Utara. Suku ini hidup tenang dan damai dengan berburu babi hutan dan rusa serta mengolah getah damar. Orang Togutil begitu biasa mereka dipanggil merupakan sang penjaga hutan ini. Keberadaan mereka dirangkul oleh Balai TN Aketajawe Lolobata yang tengah gencar mengembangkan ekowisata di kawasan konservasi di Pulau Halmahera ini.*

*Foto oleh Akhmad David Kurnia Putra*



# I. PENDAHULUAN

## Menjaga ekosistem kehidupan

*Gugusan terumbu karang yang menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan di TN. Wakatobi. Ragam hayati baik di daratan maupun lautan Indonesia potensial untuk terus dikembangkan dan menjadi identitas bangsa.*

*Foto oleh Hendrawan*

Mengawal tujuan pembangunan nasional dengan keselarasan sasaran strategis kementerian

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, yang secara rinci diatur dalam Peraturan MenPAN RBN Nomor 53 Tahun 2014 mengenai petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja memuat ikhtisar kinerja instansi yang meliputi nilai kinerja, realisasi anggaran, dan efisiensi kinerja.

Sesuai mandat dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a) perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan

penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan; b) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan; c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; d) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; e) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; f) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah; dan g) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Capaian kinerja KLHK tahun 2020 didasarkan atas pengukuran 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK yang terbentuk sesuai Keputusan Menteri LHK No. 333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020. IKU tersebut memuat sasaran strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), beserta target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2020- 2024, ke-20 IKU tersebut yaitu: 1) Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH); 2) Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor

Kehutanan dan Limbah; 3) Penurunan laju deforestasi; 4) Indeks kinerja pengelolaan sampah; 5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; 6) Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Values*); 7) Kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB Nasional; 8) Nilai ekspor hasil hutan, TSL dan *Bioprospecting*; 9) Peningkatan nilai Penerimaan Negara Bukah Pajak (PNBP) fungsional KLHK;.

10) Luas kawasan hutan dengan status penetapan; 11) Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria); 12) Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat; 13) Indeks efektifitas pengelolaan kawasan hutan; 14) Jumlah kasus LHK yang ditangani melalui penegakan hukum; 15) Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE); 16) Hasil Litbang yang inovatif dan/atau implementatif; 17) Indeks produktifitas dan daya saing SDM LHK; 18) Nilai kinerja Reformasi Birokrasi; 19) Opini WTP atas laporan Keuangan KLHK; dan 20) Level Maturitas SPIP KLHK

Laporan Kinerja Kementerian LHK ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kementerian LHK atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban Kementerian LHK untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

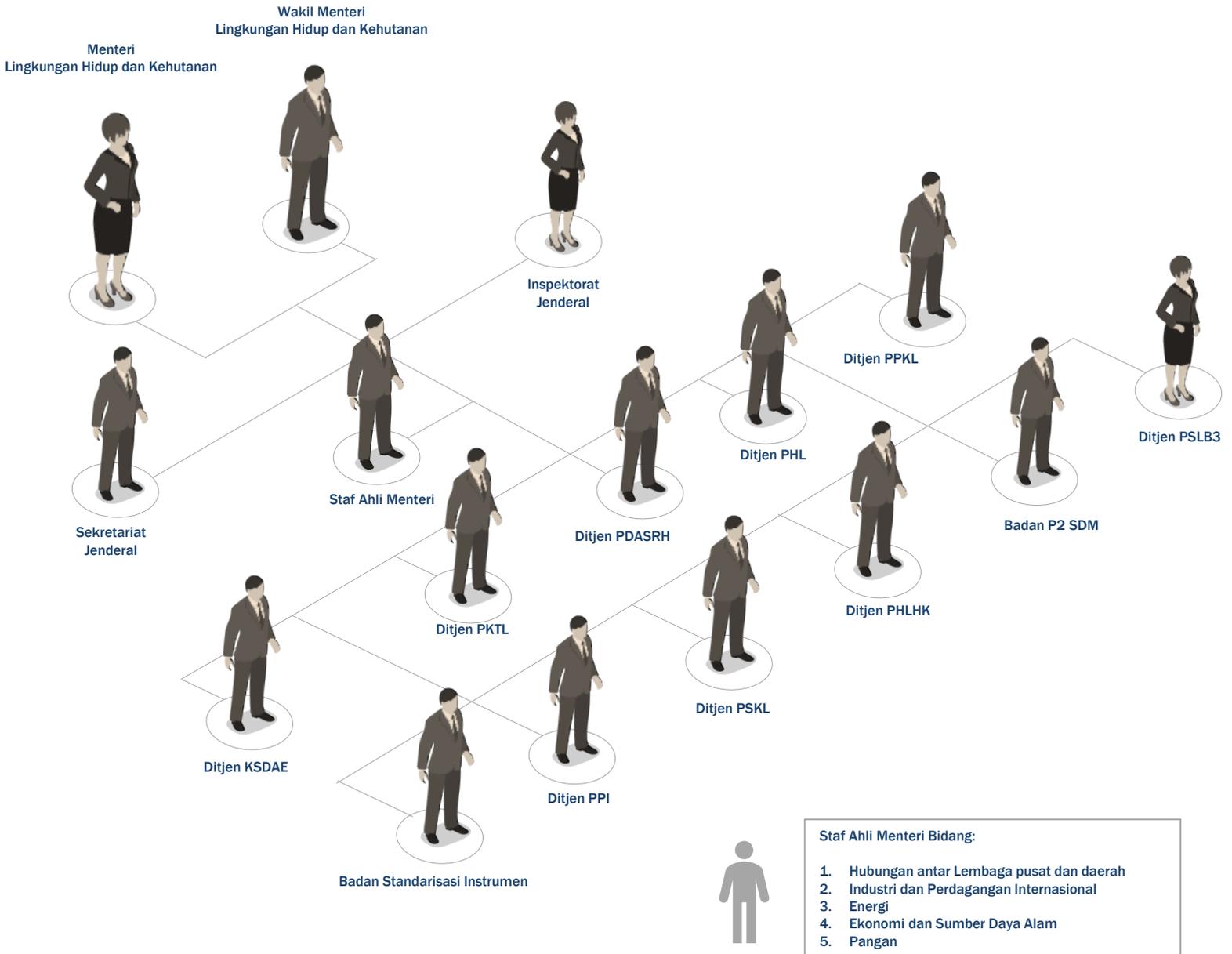
---

*Hujan bersemi, anggrek lagaligo pun bersemi. Eulophia lagaligo, anggrek Wallacea yang baru ditemukan oleh peneliti LIPI melalui publikasinya pada November 2019 lalu. Anggrek ini mudah dijumpai di lantai hutan TN. Bantimurung Bulusaraung. Anggrek tanah yang mekar pada awal musim penghujan bersemi.*

Foto oleh Taufiq Ismail

# STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

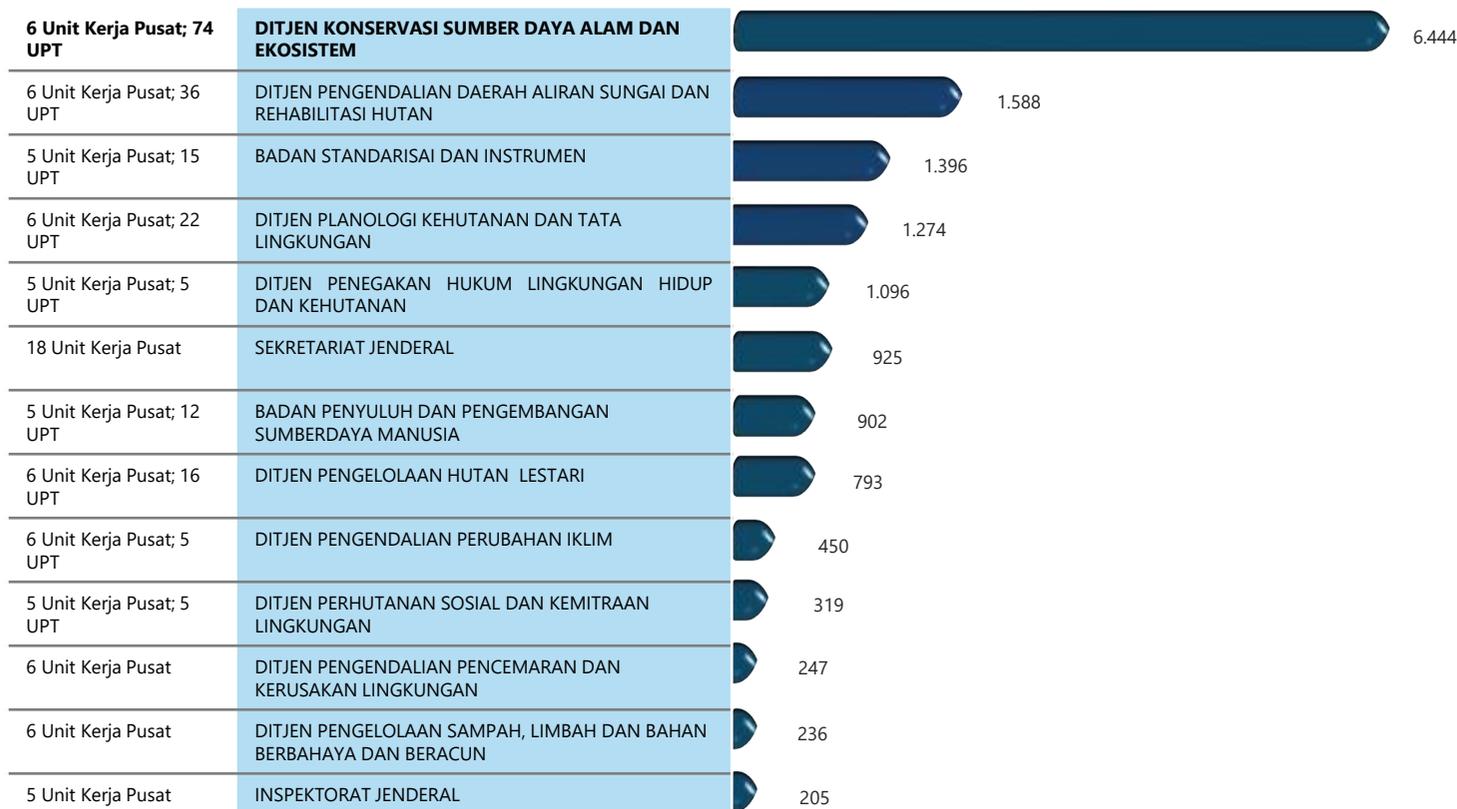


Kinerja Kementerian LHK diarahkan untuk memenuhi tugas dan fungsi Kementerian dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020. Enam program pembangunan disusun untuk memenuhi tugas dan fungsi Kementerian LHK yang didukung oleh 15.875 Aparatur Sipil Negara yang tersebar di 13 unit Eselon I. Sebaran terbesar terdapat di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan

Ekosistem sebanyak 6.444 pegawai. Berturut-turut berikutnya Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan 1.588 pegawai; Badan Standarisasi dan Instrumen LHK 1.396 pegawai; dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 1.274 pegawai. Sedangkan Inspektorat Jenderal memiliki jumlah ASN paling sedikit sebanyak 205 pegawai.

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem memiliki unit kerja terbanyak dengan 80 unit kerja. Berturut-turut Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan sebanyak 42 unit kerja; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 28 unit kerja; serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebanyak 22 unit kerja. Sedangkan Inspektorat Jenderal hanya memiliki 5 unit kerja.

Berdasarkan unit kerja, Direktorat Jenderal



## SUMBER DAYA MANUSIA



**70%**

### PEGAWAI PRIA

Jumlah pegawai KLHK pria sejumlah 11.169 orang



**30%**

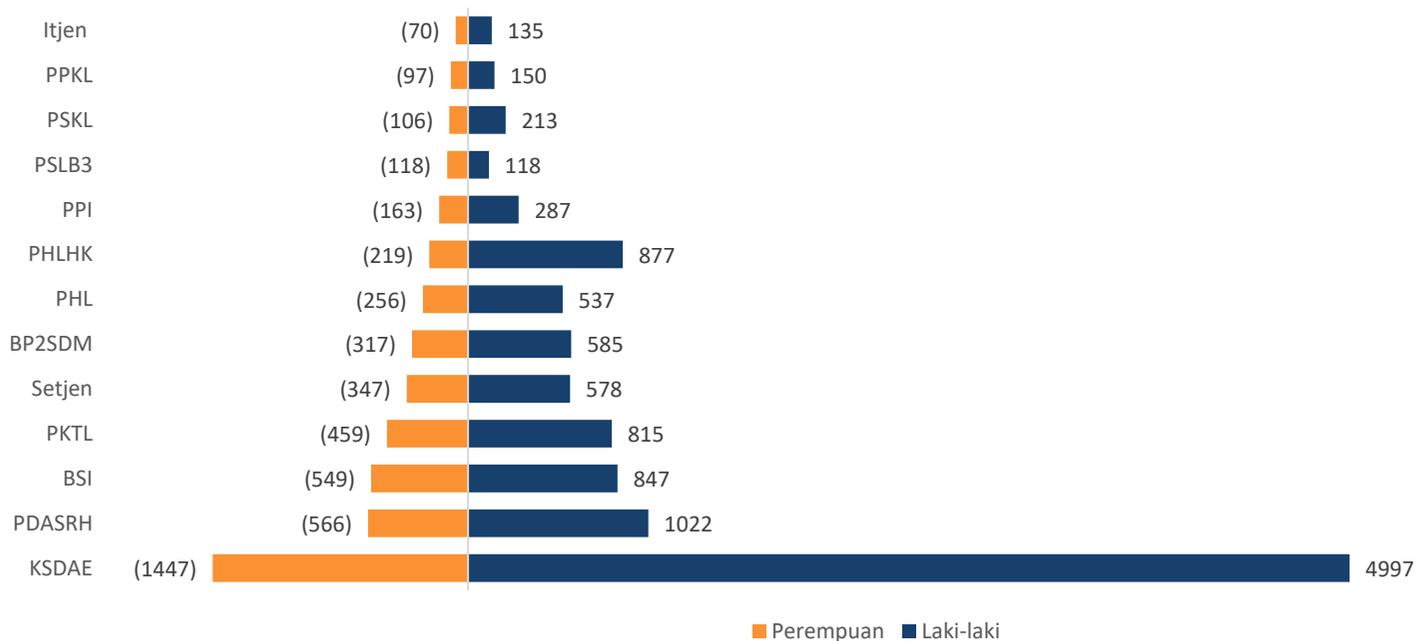
### PEGAWAI WANITA

Jumlah pegawai KLHK wanita sejumlah 4.766 orang

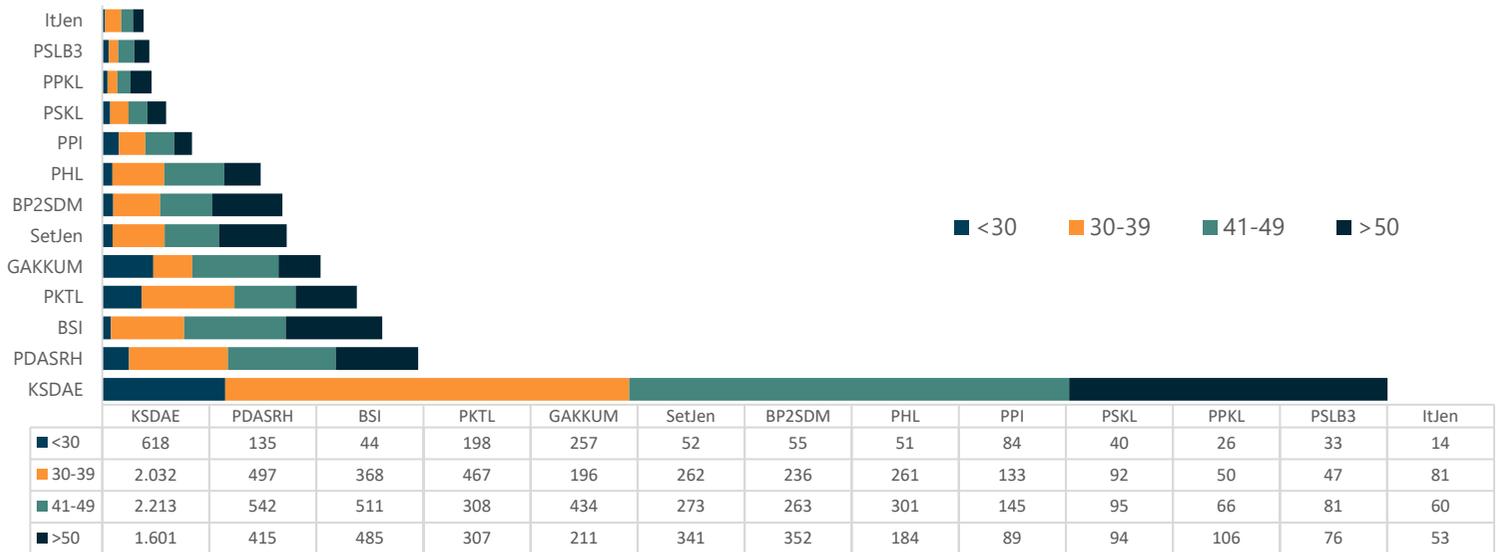
Sumber daya manusia merupakan salah satu aset utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Memetakan keadaan dan potensi SDM dalam lingkup Kementerian merupakan jalan awal untuk merencanakan keberhasilan. Seluruh pegawai Kementerian LHK tersebar dalam 13 Unit Kerja Eselon 1.

Dari total 15.875 Aparatur Sipil Negara di Kementerian LHK, pegawai dengan jenis kelamin laki-laki masih mendominasi sebesar 70%, dan pegawai berjenis kelamin perempuan memiliki proporsi sebesar 30%. Persebaran jenis kelamin pegawai Kementerian LHK berdasarkan Unit Kerja Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Sebaran ASN Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Per Eselon I Perjenis Kelamin



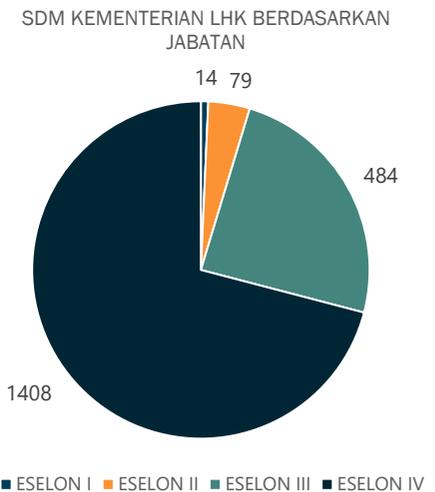
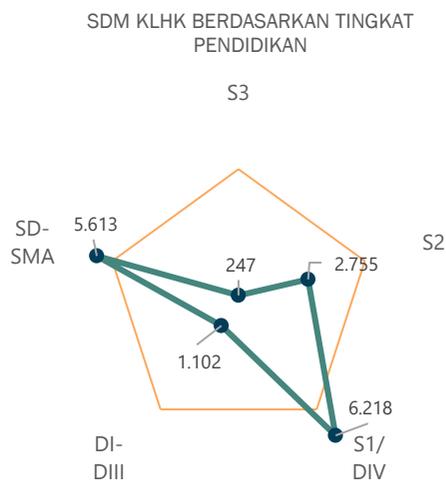
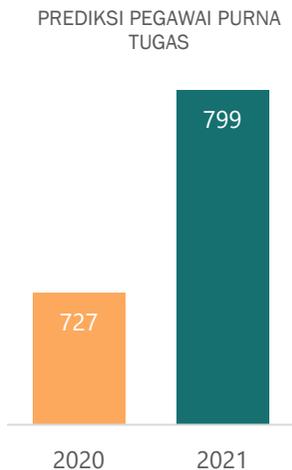
# SEBARAN UMUR SDM KEMENTERIAN LHK



Berdasarkan kelas umur, ASN Kementerian LHK didominasi oleh kelas umur 41-49 sebanyak 5.292 orang (33,21%), diikuti oleh kelas umur 30-39 sebanyak 4.722 orang

(29,63%), kelas umur >50 sebanyak 4.314 orang (27,07%), dan kelas umur <30 sebagai minoritas sejumlah 1.607 orang (10,08%). Sebagai gambaran, nilai tengah

(median) umur dari ASN di Kementerian LHK adalah 43,6 tahun yang diharapkan menunjukkan kematangan serta kedewasaan dalam mengambil keputusan



Berdasarkan tingkat pendidikan mayoritas pegawai Kementerian LHK adalah lulusan S1 sebanyak 6.218 orang (39%), diikuti oleh SMA sebanyak 5.277 orang (33%), dan S2 sebanyak 2.755 orang (17%). Lulusan D1 menjadi minoritas dengan persentase 0,04% atau sejumlah 6 orang

saja. Sebanyak 1.985 ASN menjabat sebagai eselon I-IV di Kementerian LHK, dengan rincian 14 orang eselon I (0,7%), 79 orang eselon II (4%), 484 orang eselon III (24,4%), dan 1.408 eselon IV (71%).

Dari data kepegawaian, tahun 2020 sebanyak 727 ASN telah memasuki masa purna tugas, dan pada tahun 2021 diprediksi sejumlah 799 ASN memasuki masa purna tugas. Hal ini perlu dipersiapkan agar kelangsungan kegiatan KLHK tidak terganggu.



*Menjaga kawasan hutan dan lingkungan hidup tidak sekedar mencegah kerusakan ekosistem akan tetapi bagaimana daya dukung dan daya tampungnya dapat dimanfaatkan secara optimal*

*Air terjun yang menjadi sumber mata air di Kawasan TN Gunung Ciremai, Sebagian dimanfaatkan untuk produksi air minum dalam kemasan yang beriringan dengan bergeraknya roda ekonomi dikawasan TN Gunung Ciremai*

*Foto oleh Dwi Suryana*

# Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon I Kementerian LHK

Sekretariat Jenderal

12

Unit Kerja Biro dan Pusat

6

Pusat Regional

925

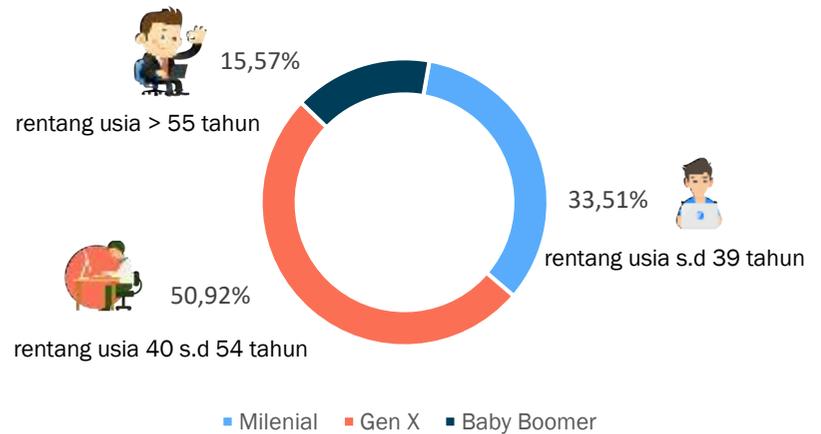
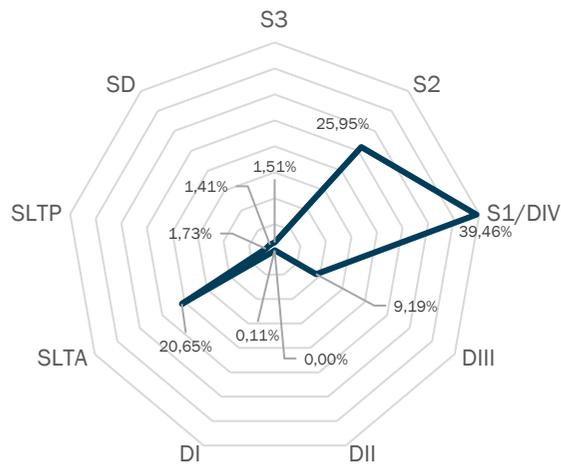
ASN



528 ASN Pria



347 ASN Wanita



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 966 orang dengan jumlah sebaran per jenis kelamin pria sebanyak 62,49% atau 528 orang dan wanita

sebanyak 37,51% atau 347 orang. Berdasarkan rentang usia, ASN Setjen terbanyak masuk kedalam katagori Gen X dengan rentang 40 sampai 54 tahun. Untuk tingkat pendidikan, ASN Setjen didominasi oleh strata-I sebanyak

39,46% atau 365 orang kemudian setingkat strata-II sebanyak 25,95% atau 240 orang dan terbanyak ketiga tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 20,65% atau 191 orang.



*Sebagai dukungan manajemen, Sekretariat Jenderal memastikan semua unsur yang mendukung sasaran strategis Kementerian bergerak hingga ke tingkat tapak.*

*Foto oleh Dwi Suryana*

## Inspektorat Jenderal

5

Unit Kerja Pusat

-

UPT

205

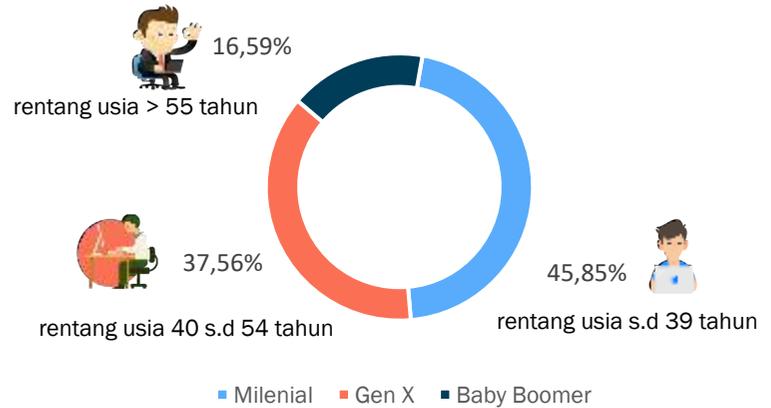
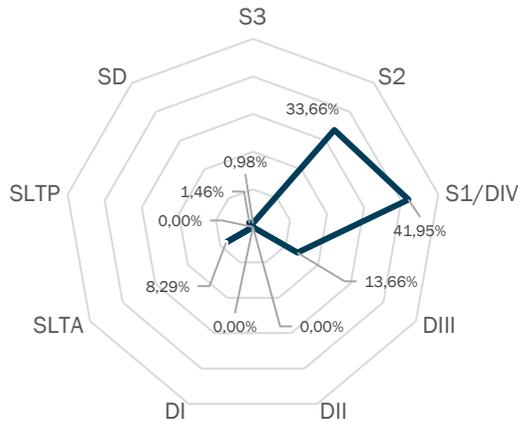
ASN



135 ASN Pria



70 ASN Wanita



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 205 orang dengan jumlah sebaran per jenis kelamin pria sebanyak 135 orang dan wanita sebanyak 70

orang. Berdasarkan rentang usia, ASN Inspektorat terbanyak masuk ke dalam katagori milenial dengan rentang usia sampai dengan 39 tahun sebanyak 45,85% atau 94 orang. Untuk tingkat pendidikan, ASN ltjen didominasi oleh

tingkat strata-I sebanyak 41,95% atau 86 orang kemudian setingkat strata-II sebanyak 33,63% atau 69 orang dan terbanyak ketiga dengan tingkat pendidikan Diploma III sebanyak 13,66% atau 28 orang.

## Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

6

Unit Kerja Pusat

22

UPT

1.274

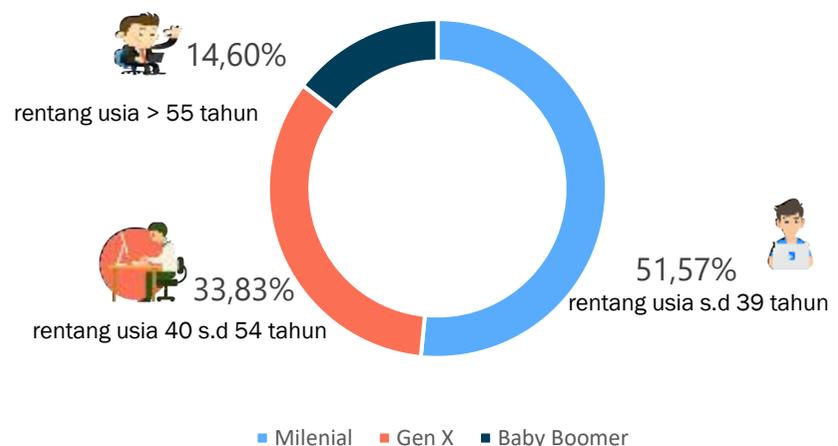
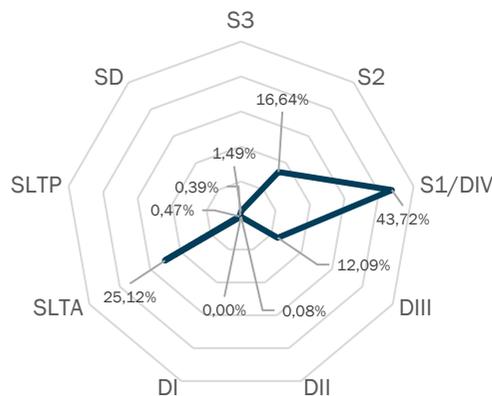
ASN



815 ASN Pria



459 ASN Wanita



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebanyak 1.274 orang dengan jumlah sebaran per jenis kelamin pria sebanyak 63,97% atau 528 orang dan wanita sebanyak 36,03%

atau 347 orang. Dari segi usia, 51,57% ASN Ditjen PKTL atau 657 orang masuk ke dalam kategori milenial. Untuk tingkat pendidikan, ASN terbanyak pada tingkat strata-I sebanyak 43,72% atau 557 orang kemudian setingkat SLTA sebanyak

25,12% atau 320 orang dan terbanyak ketiga dengan tingkat pendidikan strata II sebanyak 16,64% atau 19 orang.

## Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

6

Unit Kerja Pusat

74

UPT

6.444

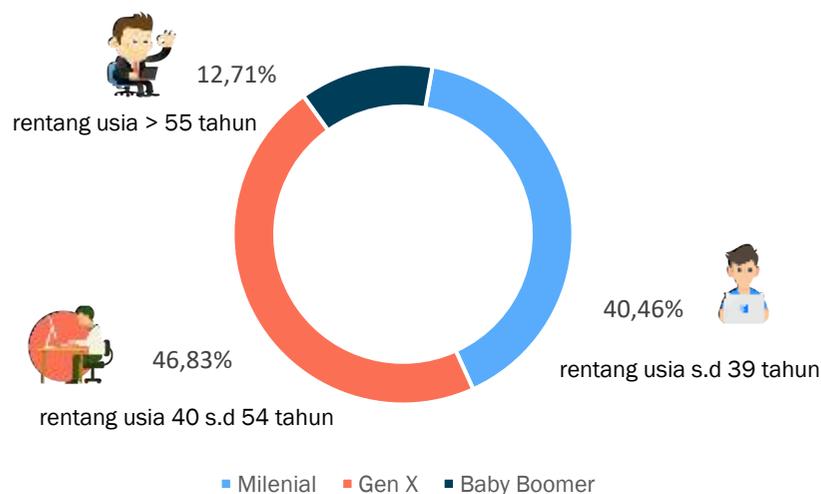
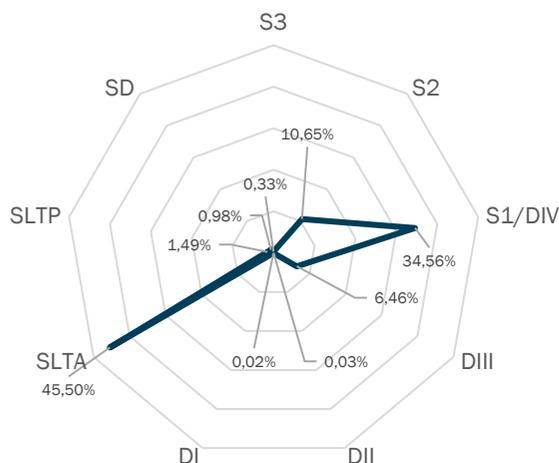
ASN



4.997 ASN Pria



1.447 ASN Wanita



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebanyak 6.444 orang dengan jumlah sebaran per jenis kelamin pria sebanyak 77,55% atau 4.997 orang dan wanita sebanyak

22,45% atau 1.447 orang. Berdasarkan rentang usia, ASN Ditjen KSDAE didominasi kategori Gen X dengan jumlah 46,83% atau 3.018 orang. Untuk tingkat pendidikan, ASN terbanyak pada tingkat setara SLTA 45,50% atau 2.932 orang

kemudian strata-I sebanyak 34,56% atau 2.227 orang menyusul yang ketiga tingkat strata-II sebanyak 10,65% atau 686 orang.

## Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan

6

Unit Kerja Pusat

36

UPT

1.588

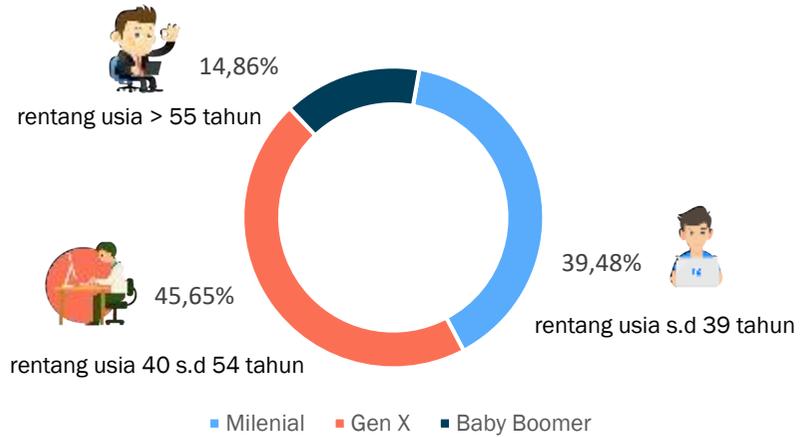
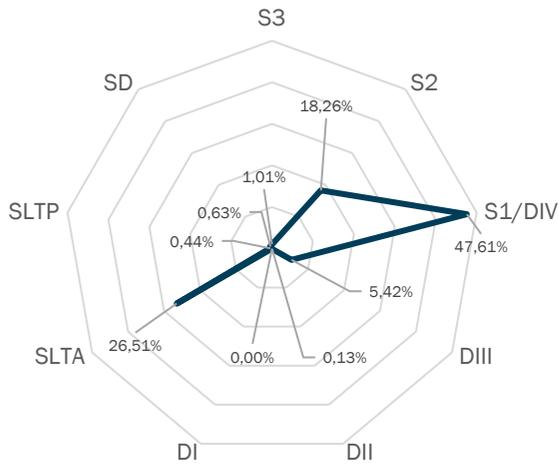
ASN



1.022 ASN Pria



566 ASN Wanita



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebanyak 1.588 orang, mengelola 6 unit kerja di pusat dan 36 pelaksana teknis di tingkat tapak. Jumlah sebaran unit

pelaksana teknis per jenis kelamin pria sebanyak 64,36% atau 1.022 orang dan wanita sebanyak 35,64% atau 566 orang. Berdasarkan rentang usia, ASN Ditjen PDASHL didominasi kategori Gen X dengan jumlah 46,65% atau 725 orang.

Untuk tingkat pendidikan, ASN terbanyak pada tingkat strata I 47,61% atau 756 orang kemudian setara SMA sebanyak 26,51% atau 421 orang menyusul yang ketiga tingkat strata II sebanyak 18,26% atau 290 orang.

## Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

6

Unit Kerja Pusat

-

UPT

247

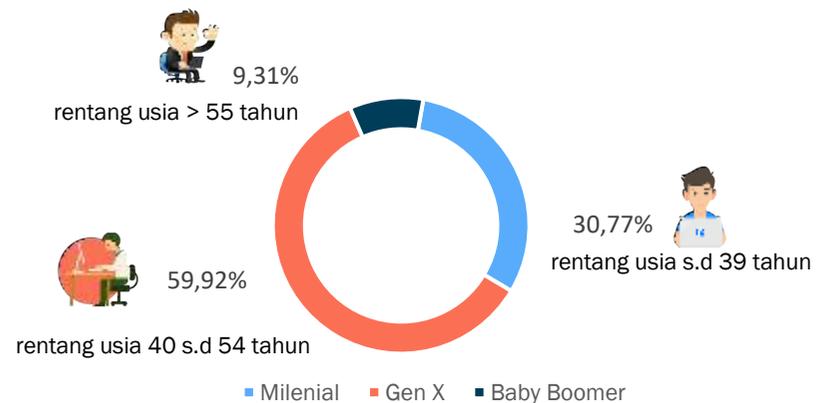
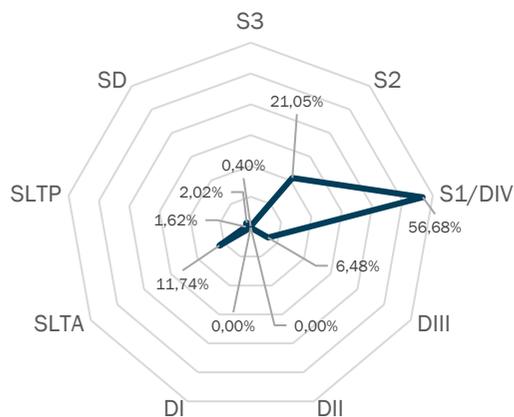
ASN



150 ASN Pria



97 ASN Wanita



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebanyak 247 orang, dengan sebaran per jenis kelamin pria sebanyak 60,73% atau 150 orang dan wanita sebanyak 39,27%

atau 97 orang. Berdasarkan rentang usia, ASN Ditjen PPKL didominasi kategori Gen X sebanyak 59,92% atau 148 orang. Untuk tingkat pendidikan, ASN terbanyak pada tingkat strata I 56,68% atau 140 orang kemudian strata II sebanyak

21,05% atau 52 orang. Urutan ketiga terbanyak pada tingkat Pendidikan setara SLTA yaitu 11,74% atau 29 Orang

### Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

6

Unit Kerja Pusat

16

UPT

793

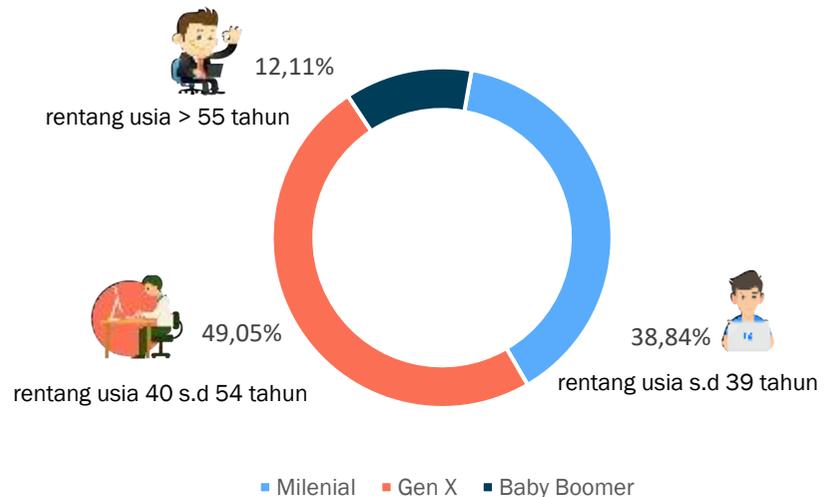
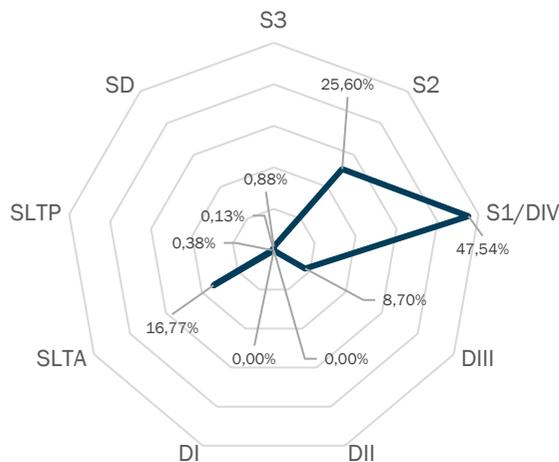
ASN



537 ASN Pria



256 ASN Wanita



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebanyak 793 orang dengan sebaran perjenis kelamin pria sebanyak 67,72% atau 537 orang dan wanita sebanyak 32,28% atau 246 orang.

Berdasarkan rentang usia, ASN Ditjen PHL terbanyak masuk kedalam kategori Gen X dengan rentang 40 sampai 54 tahun sebanyak 49,05% atau 389 orang. Untuk tingkat pendidikan, didominasi oleh strata-I sebanyak 47,54% atau 377

orang kemudian setingkat strata-II sebanyak 25,60% atau 203 orang dan terbanyak ketiga tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 16,77% atau 133 orang.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun

6

Unit Kerja Pusat

-

UPT

236

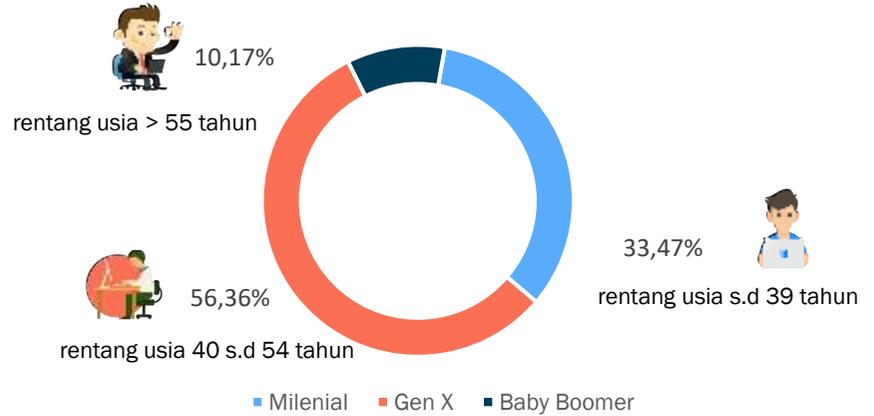
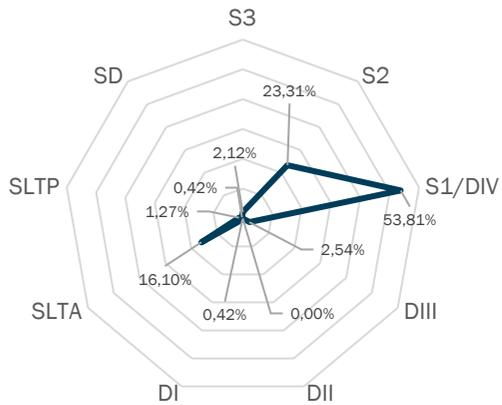
ASN



118 ASN Pria



118 ASN Wanita



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun sebanyak 236 orang dengan sebaran per jenis kelamin sama rata antara pria dan wanita yaitu sebesar 50% atau 118 orang

pria dan 118 orang wanita. Berdasarkan rentang usia, ASN Ditjen PSLB3 terbanyak masuk kedalam kategori Gen X dengan rentang 40 sampai 54 tahun sebanyak 56,36% atau 133 orang. Untuk tingkat pendidikan, didominasi oleh

strata-I sebanyak 53,81% atau 127 orang kemudian setingkat strata-II sebanyak 23,31% atau 55 orang dan terbanyak ketiga pada tingkat pendidikan setara SLTA sebanyak 16,10% atau 38 orang.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

6

Unit Kerja Pusat

5

UPT

450

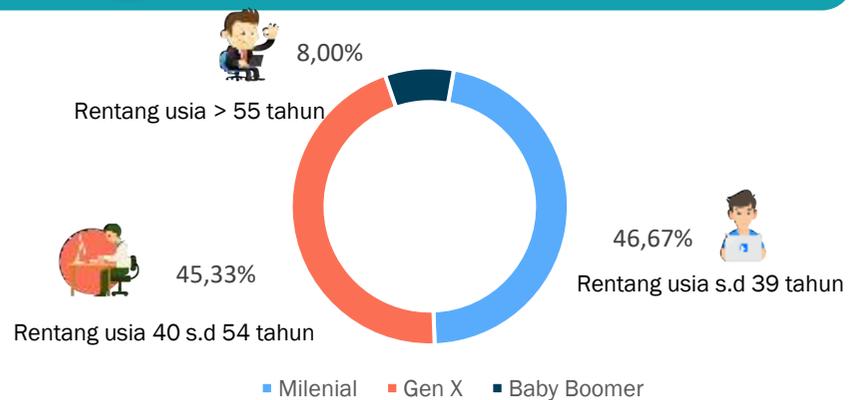
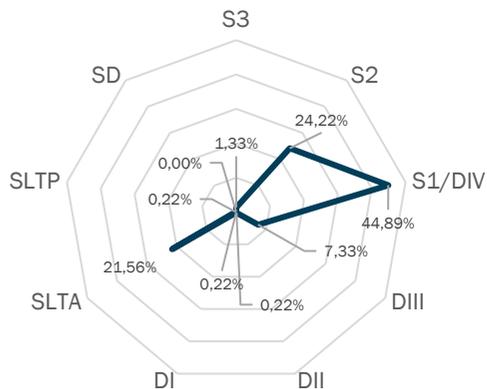
ASN



287 ASN Pria



163 ASN Wanita



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 450 orang dengan jumlah sebaran per jenis kelamin pria sebanyak 63,78% atau 287 orang, sedang wanita

sebanyak 36,22% atau 163 orang. Berdasarkan rentang usia, ASN PPI terbanyak masuk ke dalam kategori Milenial dengan rentang usia di bawah 39 tahun. Untuk tingkat pendidikan, ASN PPI didominasi oleh strata-I sebanyak 44,89% atau 202 orang kemudian

setingkat strata-II sebanyak 24,22% atau 109 orang dan terbanyak ketiga tingkat SLTA sebanyak 21,56% atau 97 orang.

## Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

5

Unit Kerja Pusat

5

UPT

319

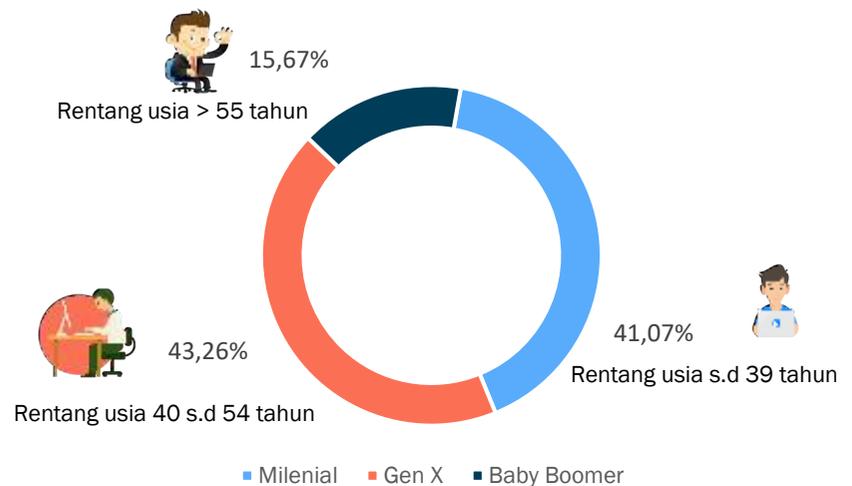
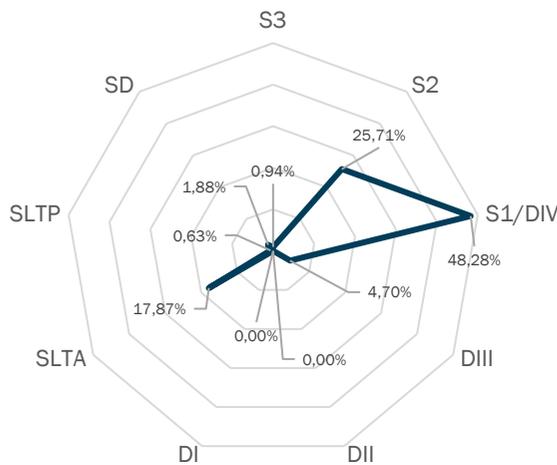
ASN



213 ASN Pria



106 ASN Wanita



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 319 orang dengan jumlah sebaran per jenis kelamin pria sebanyak 66,77% atau 213 orang dan wanita

sebanyak 33,23% atau 106 orang. Berdasarkan rentang usia, ASN PSKL terbanyak masuk ke dalam kategori Gen X dengan rentang usia antara 40 sampai dengan 54 tahun. Untuk tingkat pendidikan, ASN PSKL didominasi oleh strata-I sebanyak 48,28% atau 154

orang kemudian setingkat strata-II sebanyak 25,71% atau 82 orang dan terbanyak ketiga tingkat SLTA sebanyak 17,87% atau 57 orang.



### *Sukses rehabilitasi melalui Inovasi*

Harapan tumbuh dilahan bekas tambang yang gersang dan miskin hara (kanan). Petugas persemaian permanen memastikan bibit yang dihasilkan berkualitas baik (kiri). Untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi BPDAS Baturusa curucuk Kepulauan Bangka Belitung memanfaatkan teknologi terapan kompos blok. Yang berawal dari masalah kotoran gajah, mejadi harapan rehabilitasi eks tambang timah.

Foto. Abdul Kholik





## Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

5

Unit Kerja Pusat

5

UPT

1096

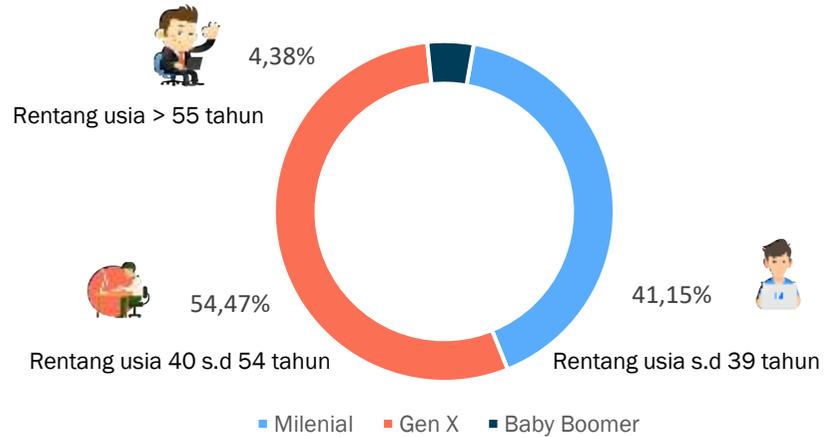
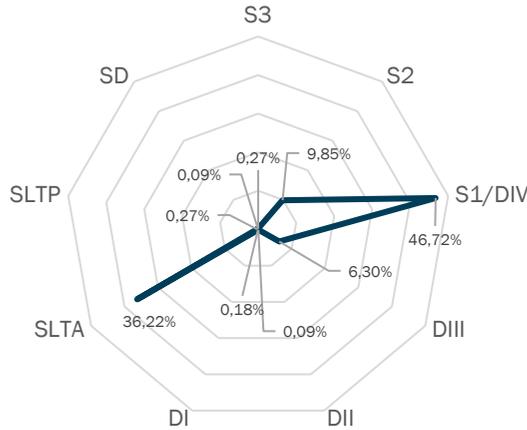
ASN



877 ASN Pria



219 ASN Wanita



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1096 orang dengan jumlah sebaran per jenis kelamin pria

sebanyak 80,02% atau 877 orang dan wanita sebanyak 19,98% atau 219 orang. Berdasarkan rentang usia, ASN Gakkum terbanyak masuk ke dalam kategori Gen X dengan rentang usia antara 40 sampai dengan 54 tahun. Untuk tingkat pendidikan,

ASN Gakkum didominasi oleh strata-I sebanyak 46,72% atau 512 orang kemudian setingkat SLTA sebanyak 36,22% atau 397 orang dan terbanyak ketiga tingkat strata-II sebanyak 9,85% atau 108 orang

## Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

5

Unit Kerja Pusat

12

UPT

902

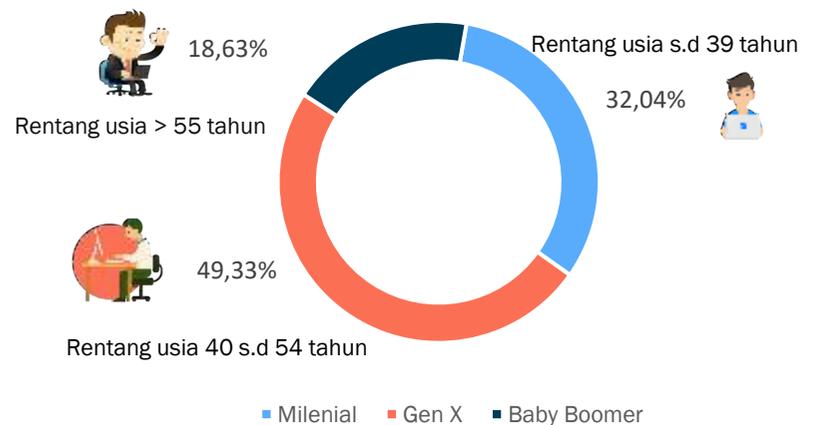
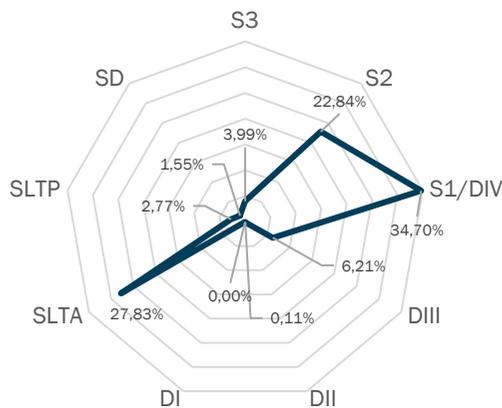
ASN



585 ASN Pria



317 ASN Wanita

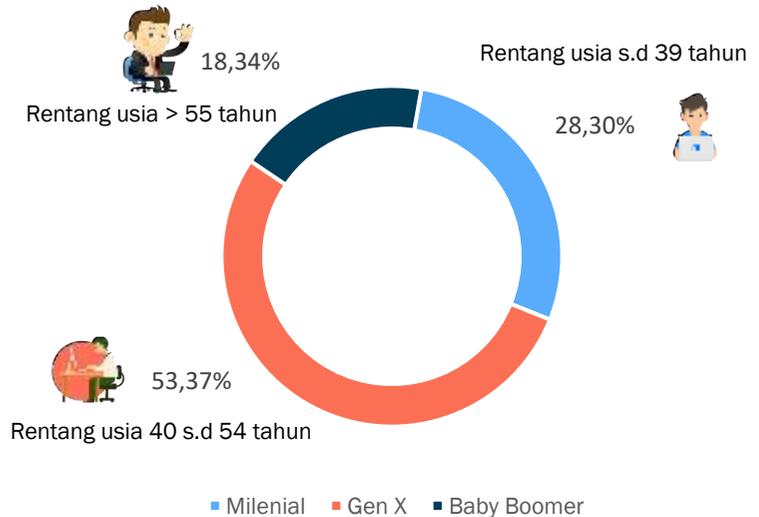
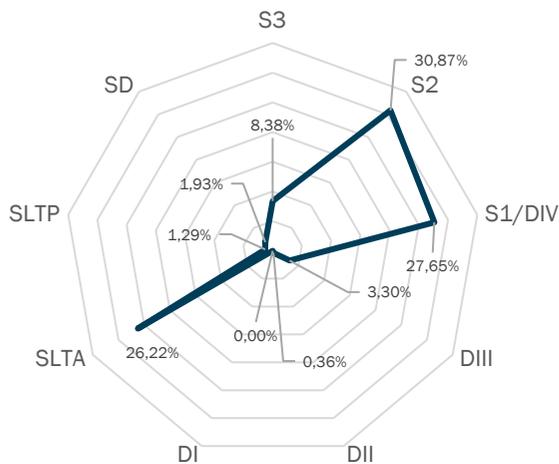


Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 902 orang dengan jumlah sebaran per jenis kelamin pria sebanyak 64,86% atau 585 orang dan wanita

sebanyak 35,14% atau 317 orang. Berdasarkan rentang usia, ASN BP2SDM terbanyak masuk ke dalam kategori Gen X dengan rentang usia antara 40 sampai dengan 54 tahun. Untuk tingkat pendidikan, ASN BP2SDM didominasi oleh strata-I sebanyak 34,7% atau 313

orang kemudian setingkat SLTA sebanyak 27,83% atau 251 orang dan terbanyak ketiga tingkat strata-II sebanyak 22,84% atau 206 orang.

### Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1396 orang dengan jumlah sebaran per jenis

kelamin pria sebanyak 60,67% atau 847 orang dan wanita sebanyak 39,33% atau 549 orang. Berdasarkan rentang usia, ASN BSI terbanyak masuk ke dalam kategori Gen X dengan rentang usia antara 40 sampai dengan 54 tahun.

Untuk tingkat pendidikan, ASN BSI didominasi oleh strata-II sebanyak 30,87% atau 431 orang kemudian setingkat strata-I sebanyak 27,65% atau 386 orang dan terbanyak ketiga tingkat SLTA sebanyak 26,22% atau 366 orang.



Anggota dari Manggala Agni Daops Tinanggea, Sulawesi Tenggara melatih ketangkasan dan keterampilan dalam menggunakan fire hose. Keterampilan ini penting untuk selalu disegarkan dan diperbarui agar siap sewaktu-waktu dibutuhkan. Persiapan dan kesiagaan adalah kunci.

Foto oleh Kartika Puspitasari



## II. PERENCANAAN KINERJA

### Membentuk pengelolaan tapak yang berkelanjutan

*Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terukur dan berkomitmen untuk selalu berkembang untuk menuju kesuksesan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan.*

*Foto oleh Taufan Kharis*

# RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

## 2024

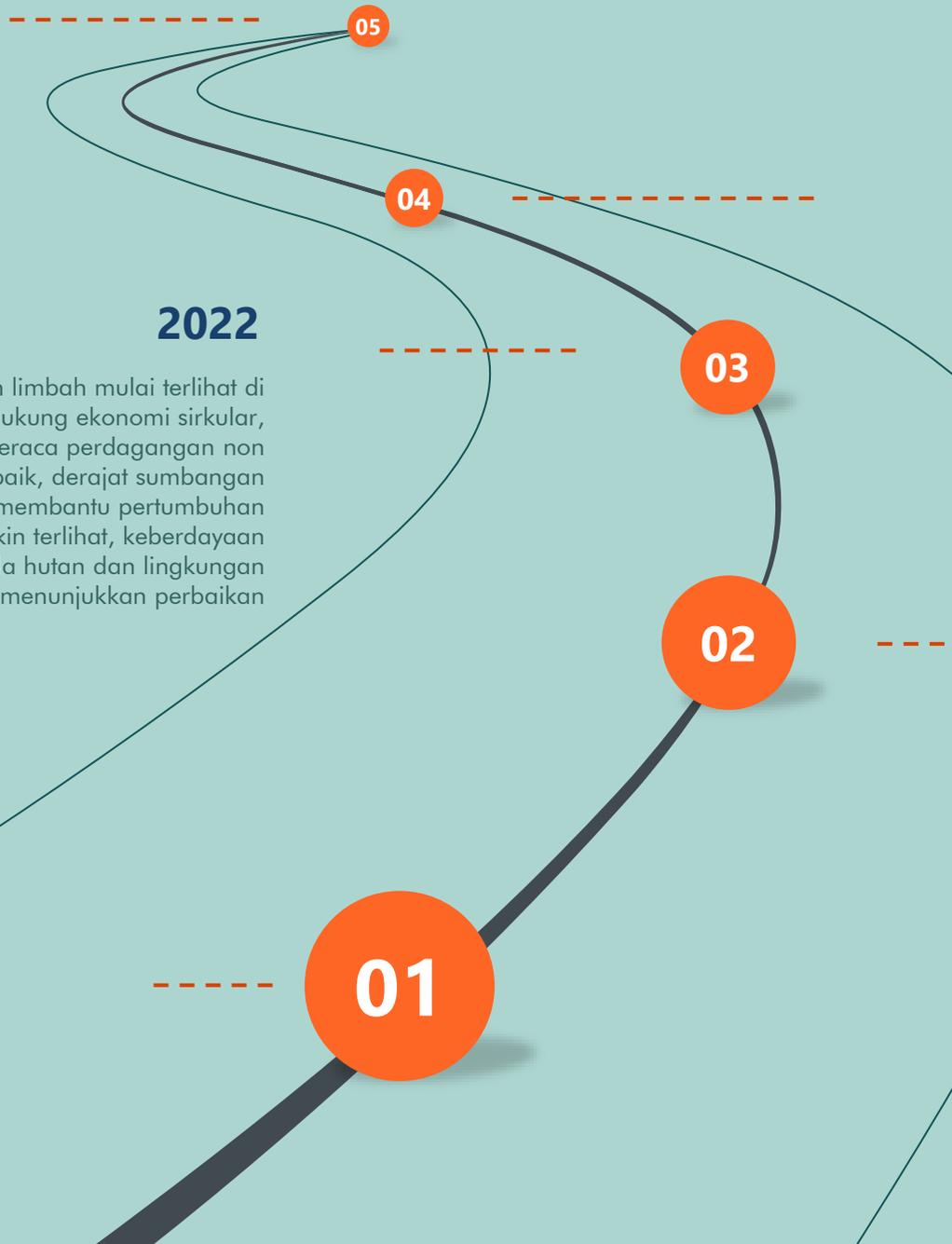
Sirkular ekonomi dan keberdayaan masyarakat akses kelola telah menjangkau di seluruh provinsi, seiring perbaikan kondisi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin merata

## 2022

Pemanfaatan sampah dan limbah mulai terlihat di beberapa titik untuk mendukung ekonomi sirkular, sumbangan PDB dan neraca perdagangan non migas yang semakin baik, derajat sumbangan entitas tapak untuk membantu pertumbuhan ekonomi wilayah semakin terlihat, keberdayaan masyarakat dientitas kelola hutan dan lingkungan semakin menunjukkan perbaikan

## 2020

Intervensi tapak untuk menurunkan beban lingkungan, secara berangsur mengembangkan keberdayaan masyarakat dan menyiapkan landasan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lingkungan untuk membantu pengembangan ekonomi wilayah



## 2023

Derajat pemanfaatan sampah dan limbah semakin besar untuk meyakinkan bergulirnya ekonomi sirkular, keberdayaan masyarakat semakin merata di seluruh entitas tapak, dan gambaran sumbangan pembangunan LHK bagi makro ekonomi pembangunan wilayah mulai terlihat di sebagian besar provinsi

## 2021

Neraca perdagangan non migas dan pertumbuhan PDB yang semakin baik, beberapa titik entitas pembangunan LHK mulai terlihat membantu pembangunan wilayah, seiring perbaikan lingkungan hidup dan keberdayaan masyarakat

### Tujuan Pembangunan

Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Perencanaan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didasarkan pada tujuan besar kementerian yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim; meningkatkan kemampuan sumber daya hutan untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional; mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan; meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik. Berdasarkan tujuan tersebut, Sasaran Strategis Kementerian tahun 2020-2024 yang diusung adalah: (1) terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim; (2) tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; (3) terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; (4) terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.



Untuk melihat dokumen Rencana Strategis KLHK 2020-2024 silahkan memindai QR code disamping

# RENCANA KERJA 2020

Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diukur melalui indikator kinerja yang dipertajam untuk mendorong perbaikan pengelolaan di tingkat tapak. Hasilnya dituangkan dalam Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, yang bersifat indikatif. Sedangkan penentuan kinerja tahunan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Perbedaan target dari Rencana Strategis KLHK 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja KLHK 2020 dikarenakan adanya penyesuaian target berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia.



Untuk melihat dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja KLHK tahun 2020 silahkan memindai QR Code di samping.

IKU	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja 2020
<b>SS-1 (Pilar Lingkungan) : Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim</b>				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	66,56	68,71
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	%	-	16,28
3	Penurunan Laju Deforestasi	Juta Ha	0,44	0,44
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	50,9	61
5	Luas Lahan dalam Das yang Dipulihkan Kondisinya	Ribu Ha	207	56
6	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	Juta Ha	28	3,34
<b>SS-2 (Pilar Ekonomi) : Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber daya Hutan dan Lingkungan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan</b>				
7	Kontributor Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional	Rp. Triliun	104,12	103
8	Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting	US\$ Miliar	12	12
9	Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK	Rp. Triliun	5,0	5,1
<b>SS-3 (Pilar Sosial) : Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan</b>				
10	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	Juta Ha	88	0,5
11	Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)	Juta Ha	1,57	0,0465
12	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	Ha	4.000.000	125.000
<b>SS-4 (Pilar Tata Kelola): Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing</b>				
13	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	Poin	2,0	2,1
14	Jumlah Kasus LHK yang Ditangani Melalui Penegakan Hukum	Kasus	586	153
15	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,43	3,50
16	Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif	Produk	23	16
17	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	Poin	-	70
18	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Poin	75,34	77
19	Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK	Opini WTP	1	1
20	Level Maturitas SPIP KLHK	Level	3	3

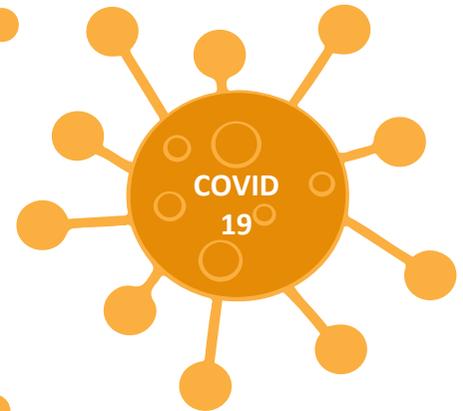
# ISU-ISU STRATEGIS

## Pemulihan Ekonomi

KemenLHK sebagai representasi negara hadir, berempati dan merasakan beban ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada menurunnya kesehatan masyarakat dan ekonomi, untuk itu Kementerian LHK melaksanakan 2 langkah strategis sebagai upaya pemulihan ekonomi, yakni padat karya penanaman mangrove, dan food estate.

Langkah strategis Kementerian LHK menggerakkan ekonomi nasional dengan memberikan stimulus ekonomi, insentif kepada masyarakat, penciptaan kesempatan akses lahan pangan, serta membantu membuka akses jalur ekonomi, khususnya bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Kementerian LHK memfokuskan program pemulihan ekonomi di 4 wilayah yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Papua. Pengelolaan dilakukan secara lanskap dalam satu kesatuan ekosistem.



## Limbah Medis

Data tahun 2019 menunjukkan jumlah rumah sakit di seluruh Indonesia sebanyak 2.877 rumah sakit, namun sampai dengan November 2020, hanya terdapat 117 Rumah Sakit yang memiliki izin pengolahan limbah B3, dan 111 Rumah Sakit menggunakan Insinerator, serta 6 Rumah Sakit menggunakan Autoklaf.

Dengan minimnya jumlah Rumah Sakit yang telah mendapatkan izin operasional Insinerator dan jumlah jasa pengolah limbah medis yang masih terbatas serta belum terdistribusi secara merata, timbunan limbah medis yang belum dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan jumlahnya masih sangat besar.

Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan limbah medis yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh pihak terkait, baik pemerintah pusat maupun daerah.

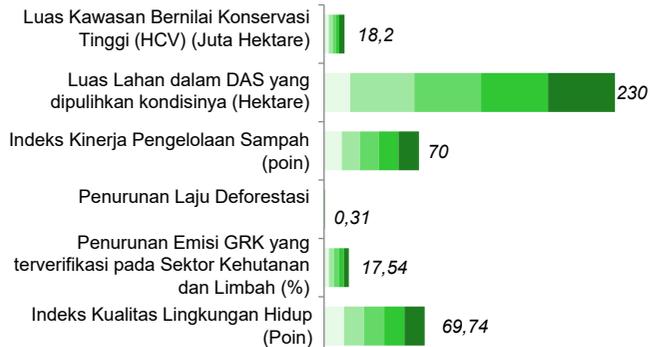
Kementerian LHK telah membangun 32 unit fasilitas pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan di 32 lokasi berupa Insinerator dengan fasilitas pendukungnya. Pada tahun ini telah dilaksanakan pembangunan fasilitas sebanyak 5 (lima) unit di 5 (lima) lokasi yakni Provinsi Aceh, Sumatera Barat Kalimantan Selatan, NTT, dan NTB



# Pohon Kinerja Rencana Strategis KLHK 2020-2024

KEMENTERIAN LINGKUNGAN

## Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim



Sasaran Program 1  
Meningkatnya Kualitas Udara

Sasaran Program 2  
Meningkatnya Kualitas Air

Sasaran Program 3  
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut

Sasaran Program 4  
Meningkatnya Kualitas Air Laut

Sasaran Program 5  
Terwujudnya tata kelola adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Sasaran Program 6  
Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun

Sasaran Program 7  
Penguatan IPTEK bidang Lingkungan Hidup

Sasaran Program 8  
Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang baik

Sasaran Program 9  
Meningkatnya Kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup dan menurunkan resiko akibat paparan B3 dan limbah B3

Sasaran Program 10  
Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan

Sasaran Program 11  
Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Sasaran Program 12  
Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan konservasi

Sasaran Program 13  
Meningkatnya luas penutupan vegetasi

Sasaran Program 14  
Pulihnya kondisi lahan dalam DAS

## Sasaran Strategis 2 Tercapainya Optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan



Sasaran Program 1  
Meningkatnya ragam usaha kehutanan

Sasaran Program 2  
Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan

Sasaran Program 3  
Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu

Sasaran Program 4  
Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan

Sasaran Program 5  
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan

Sasaran Program 6  
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya nilai ekonomi pemanfaatan sampah dan limbah B3

Sasaran Program 7  
Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan TSL

Sasaran Program 8  
Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari

Sasaran Program 9  
Peningkatan IPTEK nilai tambah hasil hutan

Sasaran Program 10  
Tersedianya perencanaan kehutanan yang kompherensif, utuh dan berkesinambungan

# HIDUP DAN KEHUTANAN

UNTUK MELIHAT  
DOKUMEN POHON  
KINERJA SILAHKAN  
PINDAI QR CODE  
BERIKUT



## Sasaran Strategis 3

Terjaganya Keberadaannya, Fungsi, dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

## Sasaran Strategis 4

Terseleenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing

Luas Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat (Ribu Hektare) 500



Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA (Ribu Hektare) 600



Luas Kawasan Hutan dengan Status penetapan (Juta Hektare) 3



Sasaran Program 1  
Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual

Sasaran Program 5  
Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi

Sasaran Program 2  
Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan

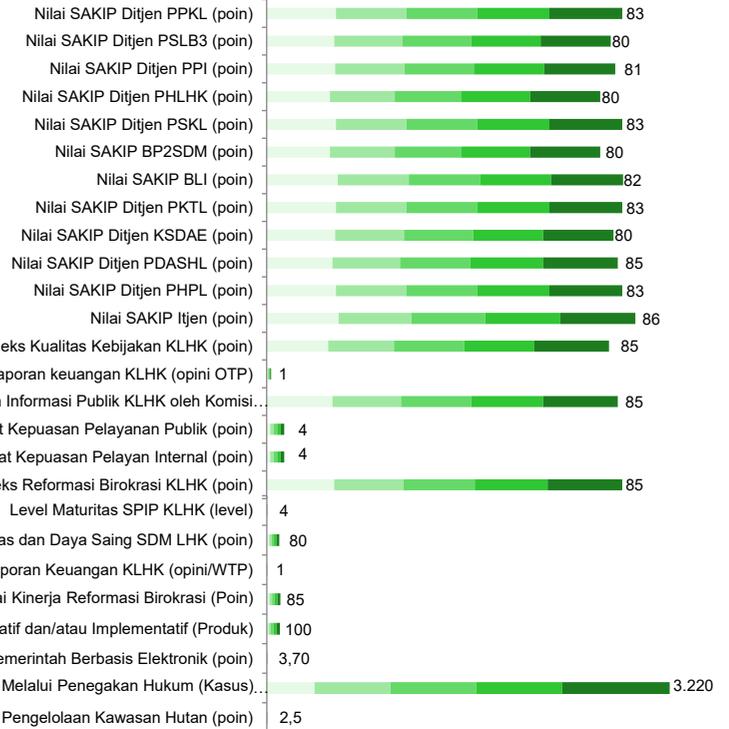
Sasaran Program 6  
Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi

Sasaran Program 3  
Terkendalinya penggunaan kawasan hutan

Sasaran Program 7  
Meningkatnya akses kelola hutan oleh masyarakat

Sasaran Program 4  
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA

Sasaran Program 8  
Meningkatnya jumlah kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang mampu memanfaatkan dan melestarikan hutan dan lingkungan



Sasaran Program 1  
Pengawasan intern yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi

Sasaran Program 4  
Indeks efektifitas pengelolaan KHDTK yang dikelola sebagai laboratorium riset lapangan

Sasaran Program 7  
Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman

Sasaran Program 10  
Meningkatnya kinerja pengelolaan hutan di tingkat tapak

Sasaran Program 2  
Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima

Sasaran Program 5  
Hasil litbang bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang inovatif dan implementatif

Sasaran Program 8  
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan

Sasaran Program 11  
Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari

Sasaran Program 3  
Meningkatnya produktivitas dan daya saing SDM LHK

Sasaran Program 6  
Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) / hutan diklat

Sasaran Program 9  
Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Sasaran Program 12  
Meningkatnya efektifitas pengelolaan hutan konservasi



Identifikasi potensi fauna gua dalam perut bumi di TN. Bantimurung Bulusuarung.

Foto oleh Chaeril



# III. AKUNTABILITAS KINERJA

Mengawal pemenuhan pembangunan  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

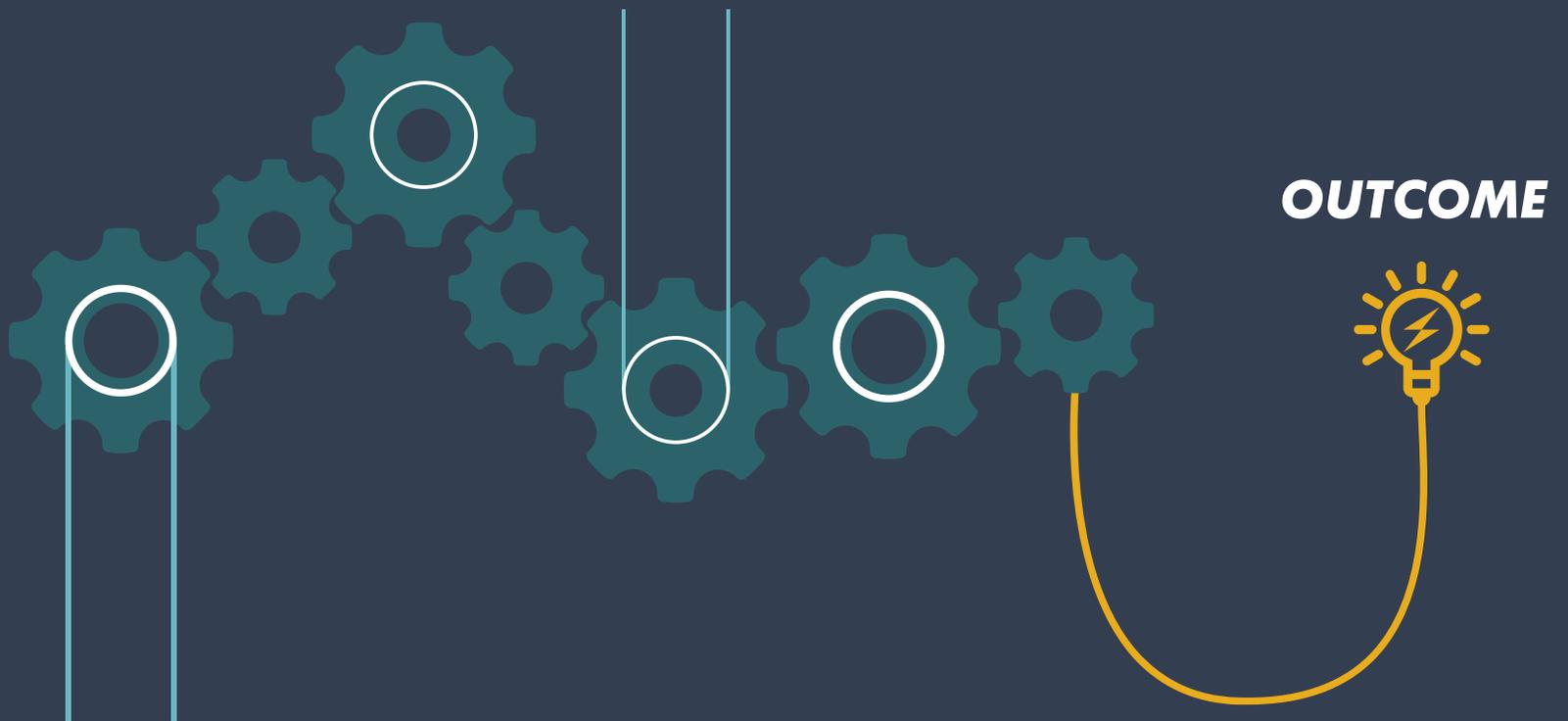
*Pagi dari balik bukit Kassi Kebo, laksana secercah harapan dalam menapaki kenormalan baru di  
TN. Bantimurung Bulusaraung.*

*Foto oleh Chaeril*



*Pohon Saninten (Castanopsis argentea Blume A.DC) memiliki tinggi 35 hingga 40 meter. arena daun dan buahnya mirip rambutan, maka masyarakat setempat menjulukinya "Rambutan Hutan". Dalam bahasa Inggris buah itu disebut juga "sweet chesnut". Lantaran wanginya harum, rasanya manis gurih dan empuk. Sangat khas sekali rasanya. Di gunung Ciremai, Saninten dianggap punya "pasangan hidup" yakni pohon Pasang (Arthocarpus sp). Masyarakat setempat meyakini pohon Pasang sebagai "suami" dari Saninten. Diduga, pohon Pasang memiliki peran penting dalam proses pembuahan Saninten.*

*Foto oleh Dwi Suryana*



# A. PEMENUHAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

# PEMENUHAN SASARAN STRATEGIS

Nilai kinerja pembangunan berada pada angka 99,15 persen. Angka ini dibangun dari nilai capaian sasaran strategis Pilar Lingkungan sebesar 88,92 persen, Pilar Ekonomi 98,27 persen, Pilar Sosial 102,49 persen dan Pilar Tata Kelola 106,9 persen. Bersanding dengan realisasi anggaran sebesar 93,96 persen untuk membentuk nilai efisiensi, Kementerian memperoleh nilai sebesar 0,95. Angka ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran dalam pemenuhan kinerja pembangunan dipandang efisien.

Pemenuhan sasaran strategis memberikan gambaran bahwa proses bisnis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bertolak dari perbaikan tata kelola selama masa pandemi. Beradaptasi menuju transformasi digital dan lebih berpihak kepada kondisi tapak, utamanya kondisi masyarakat selama pandemi. Hal ini tercermin dari pemenuhan Pilar Tata Kelola paling tinggi disusul oleh Pilar Sosial. Menguntai intervensi sosial langsung kepada masyarakat yang memberikan ekspresi penting setidaknya kepada dua hal utama, yaitu perbaikan lingkungan dan perbaikan ekonomi. Kedua hal ini beriringan tercermin dari pemenuhan Pilar Ekonomi dan Pilar Lingkungan.

**Pilar Tata Kelola.** Nilai rerata Pilar IV ini berada pada angka 106,9 persen. Menguntai pada kisaran 120 persen untuk pemenuhan kinerja indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK sebagai batas atas dan nilai reformasi birokrasi sebesar 97,84 persen sebagai batas bawah. Keduanya mengungkit kemampuan Kementerian untuk mengurus kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Termasuk didalamnya adalah mulai menghadirkan kepastian hukum untuk tapak lingkungan hidup dan kehutanan. Nilai pemenuhan indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan sebesar 114,29 persen sedangkan penanganan kasus lingkungan hidup dan kehutanan sebesar 120 persen. Menopang perbaikan tata kelola ini adalah semakin tingginya level maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang mengungkit semakin terbukanya sistem pemerintahan Kementerian. Nilai pemenuhan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebesar 103,14 persen dan pendapat Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kementerian dengan predikat wajar tanpa pengecualian.

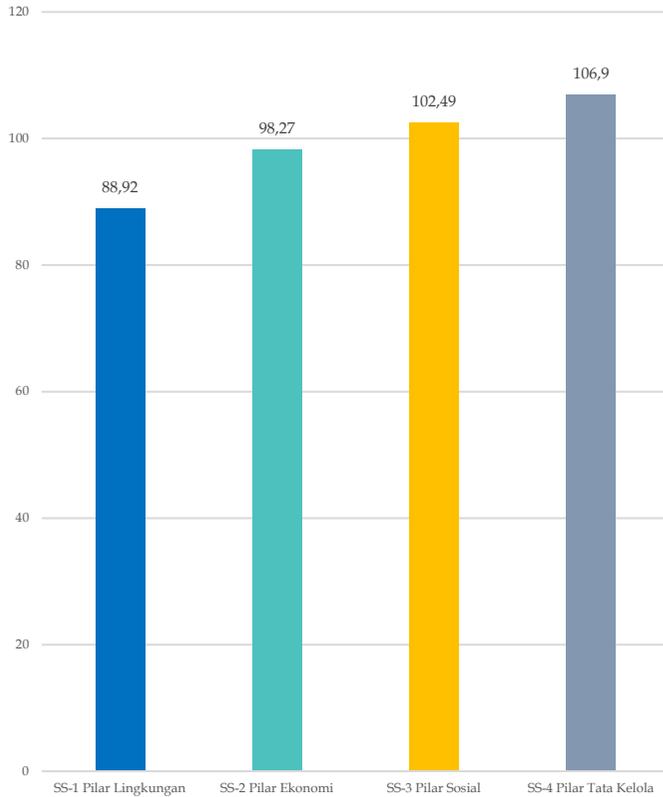


*Menjaga TN. Meru Betiri meski pandemi melanda. Upaya para petugas balai ini membantu Kementerian memenuhi indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan sebesar 2,4 poin. Langkah ini mengungkit pemenuhan Pilar Tata Kelola.*

*Foto oleh Afiyan Eko.*

## PROFILE PEMENUHAN SASARAN STRATEGIS 2020

Angka dalam persen



## PERHITUNGAN PEMENUHAN KINERJA 2020

Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 memiliki empat sasaran strategis. Mereka dikenal dengan empat pilar pembangunan, yaitu : (1) Pilar Lingkungan, lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan; (2) Pilar Ekonomi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; (3) Pilar Sosial, keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan (4) Pilar Tata Kelola, tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Keberhasilan pemenuhan sasaran strategis diurai dalam indikator kinerja utama. Pilar lingkungan memiliki 6 indikator kinerja utama yang dibangun untuk memenuhi pencapaian sasaran strategis pertama. Selanjutnya, pilar ekonomi memiliki 3 indikator kinerja utama, pilar sosial sebanyak 3 indikator dan pilar tata kelola menguntai 8 indikator kinerja utama. Mekanisme penghitungan pemenuhan sasaran dibangun dengan melihat rerata capaian indikator kinerja utama, membentuk nilai rerata setiap sasaran strategis selanjutnya nilai kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dibangun dari rerata nilai sasaran strategis.

**Pilar Sosial.** Langkah koreksi pembangunan Kementerian diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah. Energi besar yang digunakan membuahakan nilai sasaran strategis sebesar 102,49 persen. Dibentuk dari pelaksanaan kinerja luas akses kelola masyarakat dalam pengelolaan hutan dan pelepasan kawasan hutan sebagai tanah obyek reforma agraria. Keduanya terpenuhi sebesar 120 persen.

**Pilar Ekonomi.** Mempertahankan produktivitas selama pandemi untuk tetap berkinerja positif adalah hasil yang paling terlihat dalam pilar ekonomi. Pertumbuhan produk domestik bruto kehutanan mencatat tumbuh positif saat sektor lainnya berkontraksi negatif. Pemenuhan kinerjanya pada angka 105,46 persen. Mengikuti di belakangnya adalah nilai ekspor produk kayu olahan bersama dengan tumbuhan dan satwa liar untuk menyumbang devisa dan peningkatan nilai penerimaan negara bukan pajak fungsional Kementerian. Angka keduanya dipenuhi berturut turut 98,58 persen dan 90,78 persen. Ketiganya menyumbang sasaran Pilar Ekonomi pada angka 98,27 persen.

**Pilar Lingkungan.** Pemenuhan sasaran strategis ini didukung oleh perbaikan kondisi lingkungan yang dicirikan oleh indeks kualitas lingkungan hidup. Angka pemenuhan kinerja sebesar 102,27 persen. Rentang pemenuhan sasaran strategis ini melebar dari angka 120 persen untuk kinerja luas lahan dalam DAS yang dipulihkan dan luas kawasan bernilai konservasi tinggi pada batas atas. Di batas bawahnya adalah kinerja penurunan emisim gas rumah kaca (sebesar 14,75 persen), kinerja pengelolaan sampah (81,05 persen) dan penurunan laju deforestasi (95,45 persen). Capaian sasaran strategis Pilar Lingkungan ini sebesar 88,92 persen.

# 99,15%

NILAI PEMENUHAN SASARAN STRATEGIS

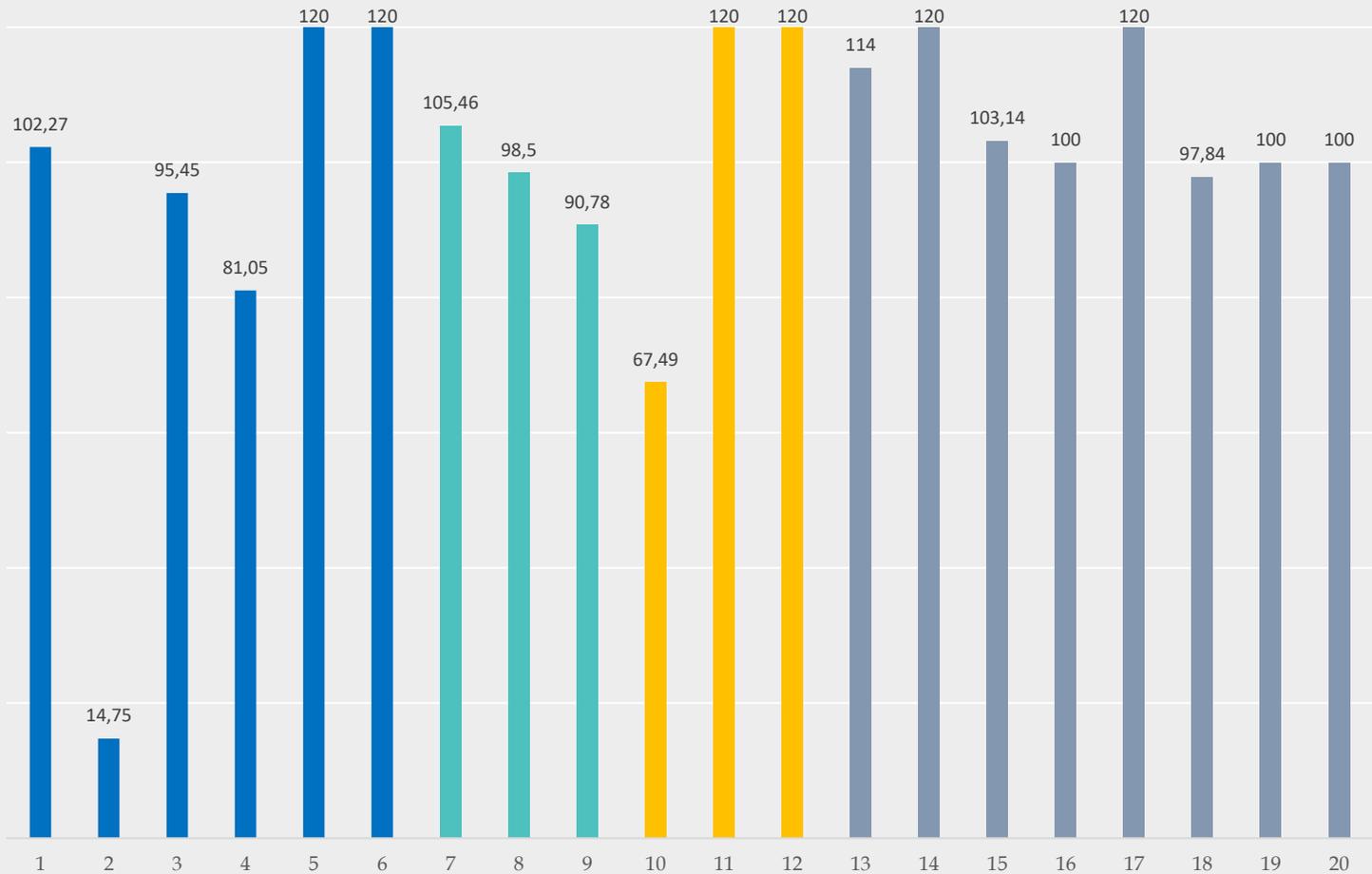
# 93,96%

REALISASI ANGGARAN

# 0,95

NILAI EFISIENSI

PROFILE PEMENUHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 (%)



No.	Keterangan
1.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
2.	Penurunan emisi (GRK) pada sektor kehutanan dan limbah
3.	Penurunan laju deforestasi
4.	Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS)
5.	Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya
6.	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi
7.	Kontributor sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB nasional
8.	Nilai ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting
9.	Peningkatan nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) fungsional KLHK
10.	Luas kawasan hutan dengan status penetapan

No.	Keterangan
11.	Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA
12.	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
13.	Indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan
14.	Jumlah kasus LHK yang ditangani melalui penegakan hukum
15.	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
16.	Hasil litbang yang inovatif dan/atau implementatif
17.	Indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK
18.	Nilai kinerja reformasi birokrasi
19.	Opini WTP atas laporan keuangan KLHK
20.	Level maturitas SPIP KLHK

# PEMENUHAN SASARAN PEMBANGUNAN 2020

Analisis kualitatif terhadap indikator kinerja dan sasaran strategis memberikan gambaran bahwa pembangunan Kementerian tahun 2020 dapat dipenuhi. Secara umum pembangunan 2020 bertujuan untuk meningkatkan daya daya saing produk kehutanan dan memperkuat sirkular ekonomi pembangunan lingkungan hidup didukung dari upaya mempertahankan dan mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan termasuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan, mengurangi beban lingkungan untuk menyiapkan landasan pembangunan rendah karbon, pengurangan emisi dan secara bertahap memperbaiki kondisi lingkungan.

Pilar Tata Kelola menjadi kunci untuk mengungkit keberhasilan Pilar Sosial, seterusnya mengungkit Pilar Lingkungan dan Pilar Ekonomi sebagai stakeholder perspektif. Angka pemenuhan indikator kinerja utama menunjukkan bahwa perbaikan cara kerja yang tak hanya pada luas akses kelola (milestone 2015-2019), namun didorong pada akses modal, kapasitas kelembagaan dan akses pasar telah membentuk modal sosial yang tinggi. Dari sini kondisi tapak hutan kembali membaik seiring produktivitas rekyat. Demikian halnya dengan pengelolaan bank sampah yang didorong untuk menggeliatkan sirkular ekonomi termasuk pemanfaatan limbah non B3 di berbagai tempat. Keduanya berkelindan membentuk daya saing produk yang semakin meningkat.

NO.	SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI TERHADAP PEMENUHAN MILESTONE 2020	
I.	<b>Pilar Lingkungan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan hutan</b>		
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terpenuhi	
2.	Menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang terverifikasi pada sektor kehutanan dan limbah	Cenderung terpenuhi	
3.	Menurunkan laju deforestasi	Terpenuhi	
4.	Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah	Cenderung terpenuhi	
5.	Memulihkan lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya	Terpenuhi	
6.	Meningkatkan perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi	Terpenuhi	
II	<b>Pilar Ekonomi : Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan</b>		
7.	Meningkatkan sumbangan sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB nasional	Terpenuhi	
8.	Meningkatkan nilai ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting	Terpenuhi	
9.	Meningkatkan nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) fungsional KLHK	Cenderung terpenuhi	
III	<b>Pilar Sosial : Menjaga keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan</b>		
10.	Meningkatkan kawasan hutan dengan status penetapan	Cenderung terpenuhi	
11.	Meningkatkan kawasan hutan yang dilepas untuk TORA (tanah obyek reforma agraria)	Terpenuhi	
12.	Meningkatkan luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Terpenuhi	
IV	<b>Pilar Tata Kelola : Meningkatkan tata kelola dan inovasi pembangunan</b>		
13.	Meningkatkan nilai efektivitas pengelolaan kawasan hutan	Terpenuhi	
14.	Meningkatkan jumlah kasus lhk yang ditangani melalui penegakan hukum	Terpenuhi	
15.	Meningkatkan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Terpenuhi	
16.	Meningkatkan hasil litbang yang inovatif dan/atau Implementatif	Terpenuhi	
17.	Meningkatkan indeks produktivitas dan daya saing	Terpenuhi	
18.	Meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi	Terpenuhi	
19.	Mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK	Terpenuhi	
20.	Meningkatkan level maturitas SPIP KLHK	Terpenuhi	



Pulau Lantigiang, luasnya tak lebih dari 5,6 Ha. Pulau kecil ini masuk dalam zona pemanfaatan TN Taka Bonerate. Pasir putih dan lautnya yang jernih menjadi daya Tarik untuk menjadi kunjungan wisatawan. Pulau ini juga rumah bagi Penyu yang dilindungi dan tempat mencari ikan para nelayan di TN Taka Bonerate.

Foto oleh Asri

An aerial photograph showing a wide river winding through a lush green valley. In the center, a small village with colorful roofs is nestled between the river and a road. The background features rolling green hills and mountains under a cloudy sky. A green rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing white text.

## Indikator Kinerja Utama 01

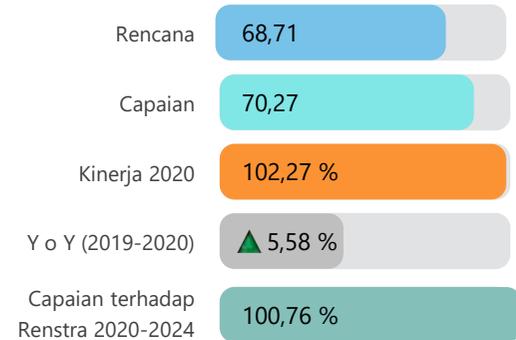
## Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

*Sungai Mewe yg melintasi Desa Lawua di tepi kawasan TN Lore Lindu tetap terawat keindahannya. Masyarakat Desa Lawua melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengaman kawasan hutan secara partisipatif, Penanganan kasus Kehutanan dilakukan melalui mekanisme sidang adat Desa. Selain itu Masyarakat juga mengembangkan kegiatan Eko Wisata secara partisipatif.*

*Foto oleh Donny Heru Kristianto*

# IKHTISAR KINERJA

Nilai IKLH bukan semata-mata memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di wilayah provinsi dan nasional. Oleh karena itu, IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup serta dapat juga digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



## Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup tercermin dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai IKLH menggambarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan terutama yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Nilai IKLH nasional adalah generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Nilai IKLH bukan semata-mata memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di wilayah provinsi dan nasional.

Nilai indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2020 yaitu sebesar 70,27 secara numerik meningkat dibanding pada tahun 2019 sebesar 66,55. Nilai IKLH menunjukkan tren peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Jika dilihat dari capaian nilai IKLH tahun 2020 yaitu 70,27 termasuk ke dalam kategori “baik”. Apabila dibandingkan terhadap target 2020, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 102,27%. Nilai IKLH tahun 2020 sudah melebihi target Renstra selama 5 (lima) tahun, sehingga jika dibandingkan terhadap target Renstra yakni pada tahun 2020 sebesar 68,71 maka diperoleh capaian sebesar 100,76%.



# Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

## Indeks Kualitas Air



### Pemantauan

563 Titik

80 Sungai

563 Provinsi

### Parameter

Dissolved Oxygen (DO)

Power of Hydrogen (pH)

Total Suspended Solid

Biological Oxygen Demand (BOD)

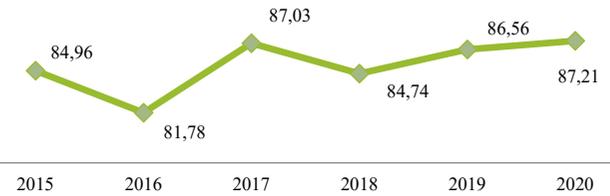
Chemical Oxygen Demand (COD)

Total Phosphat

Nitrat (NO3-n)

Focal Coliform

## Indeks Kualitas Udara



### Pemantauan

2.000 Titik Pantau

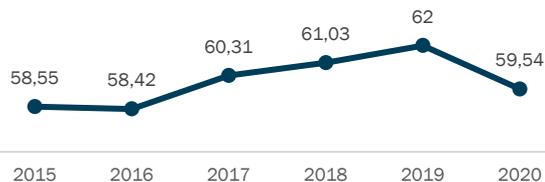
500 Kabupaten/Kota

### Parameter

Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>)

Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>)

## Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Lahan



### Metode Pengukuran

Sejak tahun 2020 parameter Indeks Kualitas Lahan dikembangkan dengan mempertimbangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan dampak pembangunan sekat kanal serta kebakaran yang terjadi di lahan gambut

### Parameter

Tutupan Hutan (TH) dan Tutupan Vegetasi Non-Hutan (TnH)

## Indeks Kualitas Air Laut

68,94

### Parameter

TSS

DO

Minyak dan Lemak

Orto-Fosfat

Amonia Total

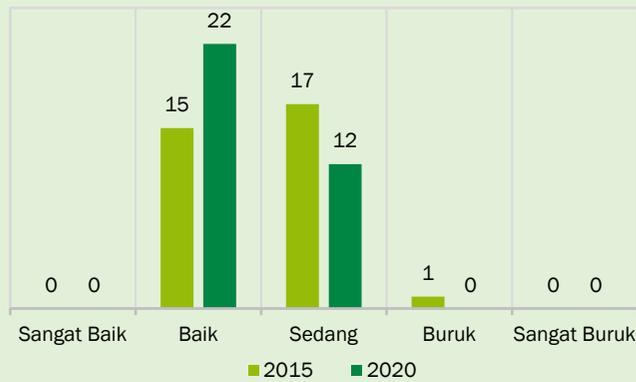
### Pemantauan

801 Titik Pantau

34 Provinsi

Sejak Tahun 2020, Indeks Kualitas Air Laut menjadi bagian dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

## Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2015-2020 per Provinsi



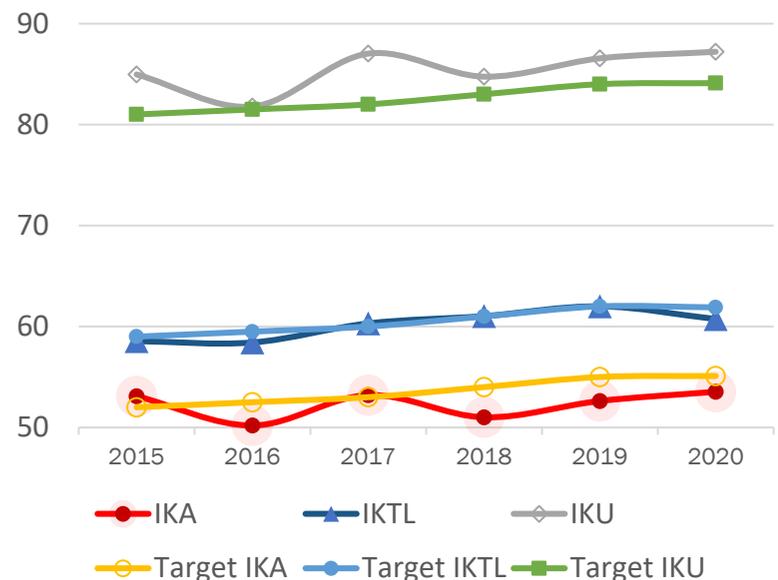
Kondisi lingkungan pada tahun 2015 didominasi oleh kategori Baik dan meningkat pesat pada tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan kondisi lingkungan di tingkat provinsi semakin membaik. Kondisi lingkungan hidup di tingkat provinsi pada kategori Sedang dan Buruk semakin mengecil.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup terukur dari IKLH seluruh kab/kota di provinsi tersebut. Terdapat 4 Indikator yang digunakan untuk menghitung nilai IKLH di tahun 2020 yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Jika dilihat dari capaian IKLH per provinsi tahun 2020, terdapat 22 provinsi dengan predikat baik dan 12 provinsi dengan predikat sedang. Apabila dilihat dari capaian masing-masing indikator per provinsi tahun 2020 sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Air (IKA), terdapat 32 provinsi dengan predikat sedang dan 2 provinsi dengan predikat buruk
- Indeks Kualitas Udara (IKU), terdapat 21 provinsi dengan predikat sangat baik, 12 provinsi dengan predikat baik, dan 1 provinsi dengan predikat buruk
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), terdapat 3 provinsi dengan predikat sangat baik, 9 provinsi dengan predikat baik, 10 dengan predikat sedang dan 12 provinsi dengan predikat buruk
- Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), terdapat 16 provinsi dengan predikat baik dan 18 provinsi dengan predikat sedang

## Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Keceriaan anak-anak yang berkunjung dan menikmati wisata di Kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung.

Foto oleh Chaeril



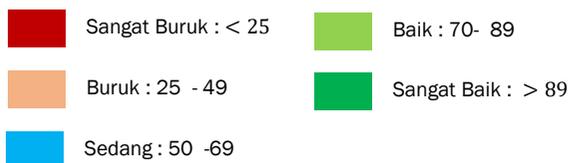
## Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020 per Provinsi

Papua	79,75
Papua Barat	78,65
Kalimantan Utara	78,49
Sulawesi Tengah	77,53
Kalimantan Timur	76,46
Maluku	75,98
Aceh	75,61
Gorontalo	75,31
Maluku Utara	74,71
Sulawesi Barat	73,60
Bangka Belitung	73,50
Nusa Tenggara Timur	73,28
Sulawesi Tenggara	72,82
Sumatera Barat	72,79
Kalimantan Tengah	72,74
Bali	71,99
Jambi	70,87
Nusa Tenggara Barat	70,83
Sulawesi Selatan	70,70
Sulawesi Utara	70,69
Kepulauan Riau	70,51
Nasional	70,27
Kalimantan Barat	70,07
Bengkulu	69,92
Sumatera Utara	69,90
Sumatera Selatan	69,71
Riau	69,41
Kalimantan Selatan	68,43
Jawa Tengah	67,62
Lampung	67,46
Jawa Timur	67,07
DI Yogyakarta	66,65
Jawa Barat	59,40
Banten	59,37
DKI Jakarta	52,98

## Sebaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2015-2020 per Provinsi



Kategori IKLH:



Kondisi lingkungan hidup di tingkat provinsi dengan kategori sedang semakin berkurang dan bergeser ke kategori baik pada tahun 2020.

## Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2015-2020 per Provinsi

No.	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	74,83	73,55	77,70	79,36	76,12	75,61
2	Sumatera Utara	69,37	66,47	69,77	64,41	62,49	69,90
3	Riau	53,07	56,73	68,64	68,43	62,47	69,41
4	Kepulauan Riau	73,11	70,19	70,34	66,50	67,00	70,51
5	Jambi	61,85	64,01	64,98	71,00	68,06	70,87
6	Bengkulu	76,92	72,43	70,18	74,32	64,41	69,92
7	Sumatera Barat	59,07	60,06	68,16	78,69	69,64	72,79
8	Sumatera Selatan	69,06	67,27	69,18	68,11	61,41	69,71
9	Bangka Belitung	71,26	66,88	67,85	67,68	64,85	73,50
10	Lampung	63,04	60,34	59,72	59,89	57,37	67,46
11	Banten	55,36	60,00	51,58	57,00	51,09	59,37
12	DKI Jakarta	43,79	38,69	35,78	45,21	42,84	52,98
13	Jawa Barat	63,49	51,87	50,26	56,98	51,64	59,40
14	Jawa Tengah	60,78	58,75	58,15	68,27	60,97	67,62
15	DI Yogyakarta	50,99	51,37	49,80	62,98	49,24	66,65
16	Jawa Timur	62,67	58,98	57,46	67,08	60,25	67,07
17	Bali	73,71	72,59	70,11	66,62	63,09	71,99
18	Nusa Tenggara Barat	58,82	56,53	56,99	75,16	64,56	70,83
19	Nusa Tenggara Timur	63,79	59,23	61,92	69,01	69,67	73,28
20	Kalimantan Barat	75,88	72,24	74,17	73,09	65,92	70,07
21	Kalimantan Selatan	57,47	59,07	69,38	68,78	61,94	68,43
22	Kalimantan Tengah	74,09	74,71	71,47	75,71	74,20	72,74
23	Kalimantan Timur			75,65	85,90	80,87	76,46
24	Kalimantan Utara	81,15	76,85	81,87	86,88	78,98	78,49
25	Sulawesi Selatan	67,01	70,54	73,24	74,83	67,61	70,70
26	Sulawesi Tenggara	75,18	75,24	70,86	83,17	72,03	72,82
27	Sulawesi Tengah	76,43	68,78	69,39	83,34	80,23	77,53
28	Sulawesi Barat	68,78	64,54	74,47	79,89	72,03	73,60
29	Gorontalo	71,08	69,30	67,46	84,09	74,97	75,31
30	Sulawesi Utara	66,27	67,07	70,81	74,95	65,15	70,69
31	Maluku	76,33	71,66	75,12	81,23	79,55	75,98
32	Maluku Utara	75,97	72,46	74,55	88,25	78,44	74,71
33	Papua Barat	82,33	83,01	85,69	91,50	83,96	78,65
34	Papua	81,01	81,35	81,47	83,88	81,79	79,75

## Indeks Kualitas Air 2015-2020 per Provinsi

No.	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	71,32	70,36	80,00	75,71	60,56	61,43
2	Sumatera Utara	76,00	75,43	78,33	63,06	51,11	53,33
3	Riau	46,39	50,75	65,23	73,68	53,55	53,24
4	Kepulauan Riau	84,67	80,00	66,67	57,85	54,00	50,00
5	Jambi	57,50	61,00	57,50	81,21	58,49	56,75
6	Bengkulu	88,33	80,97	80,80	82,08	47,64	50,83
7	Sumatera Barat	31,04	40,00	64,56	83,98	53,19	53,50
8	Sumatera Selatan	88,67	84,05	77,62	88,15	64,45	63,33
9	Bangka Belitung	81,67	82,08	72,50	82,13	69,29	65,63
10	Lampung	71,85	68,10	55,56	68,73	55,74	56,21
11	Banten	72,75	80,00	35,98	67,32	43,11	50,56
12	DKI Jakarta	22,35	24,62	21,33	51,93	41,94	42,73
13	Jawa Barat	75,30	32,86	29,00	65,77	45,59	41,50
14	Jawa Tengah	47,45	46,73	45,43	77,77	51,64	55,21
15	DI Yogyakarta	21,84	26,97	20,19	81,63	35,37	50,00
16	Jawa Timur	48,25	40,08	37,08	74,43	50,79	53,85
17	Bali	87,67	89,09	79,50	77,67	65,33	64,33
18	Nusa Tenggara Barat	23,59	27,19	79,50	74,63	40,23	50,98
19	Nusa Tenggara Timur	55,19	35,18	39,63	58,09	59,48	59,19
20	Kalimantan Barat	82,33	80,80	80,00	69,38	50,00	51,67
21	Kalimantan Selatan	36,00	43,78	73,57	75,80	55,31	51,67
22	Kalimantan Tengah	70,89	82,22	62,35	61,15	56,80	53,61
23	Kalimantan Timur			73,33	86,19	62,01	60,00
24	Kalimantan Utara	77,90	79,77	72,96	81,86	52,22	51,82
25	Sulawesi Selatan	72,43	75,44	77,62	82,62	58,40	52,38
26	Sulawesi Tenggara	80,00	80,00	64,67	86,17	50,55	51,60
27	Sulawesi Tengah	73,33	49,33	56,44	75,95	62,59	61,67
28	Sulawesi Barat	56,00	45,13	73,89	82,43	56,15	52,44
29	Gorontalo	49,67	52,62	40,00	81,93	57,20	53,00
30	Sulawesi Utara	50,46	59,62	57,69	78,50	45,48	50,53
31	Maluku	78,61	58,81	71,33	67,40	57,56	55,67
32	Maluku Utara	65,19	64,62	63,64	88,01	53,61	50,00
33	Papua Barat	76,67	76,67	82,50	81,25	53,89	52,22
34	Papua	80,00	76,00	77,33	61,78	47,29	55,00

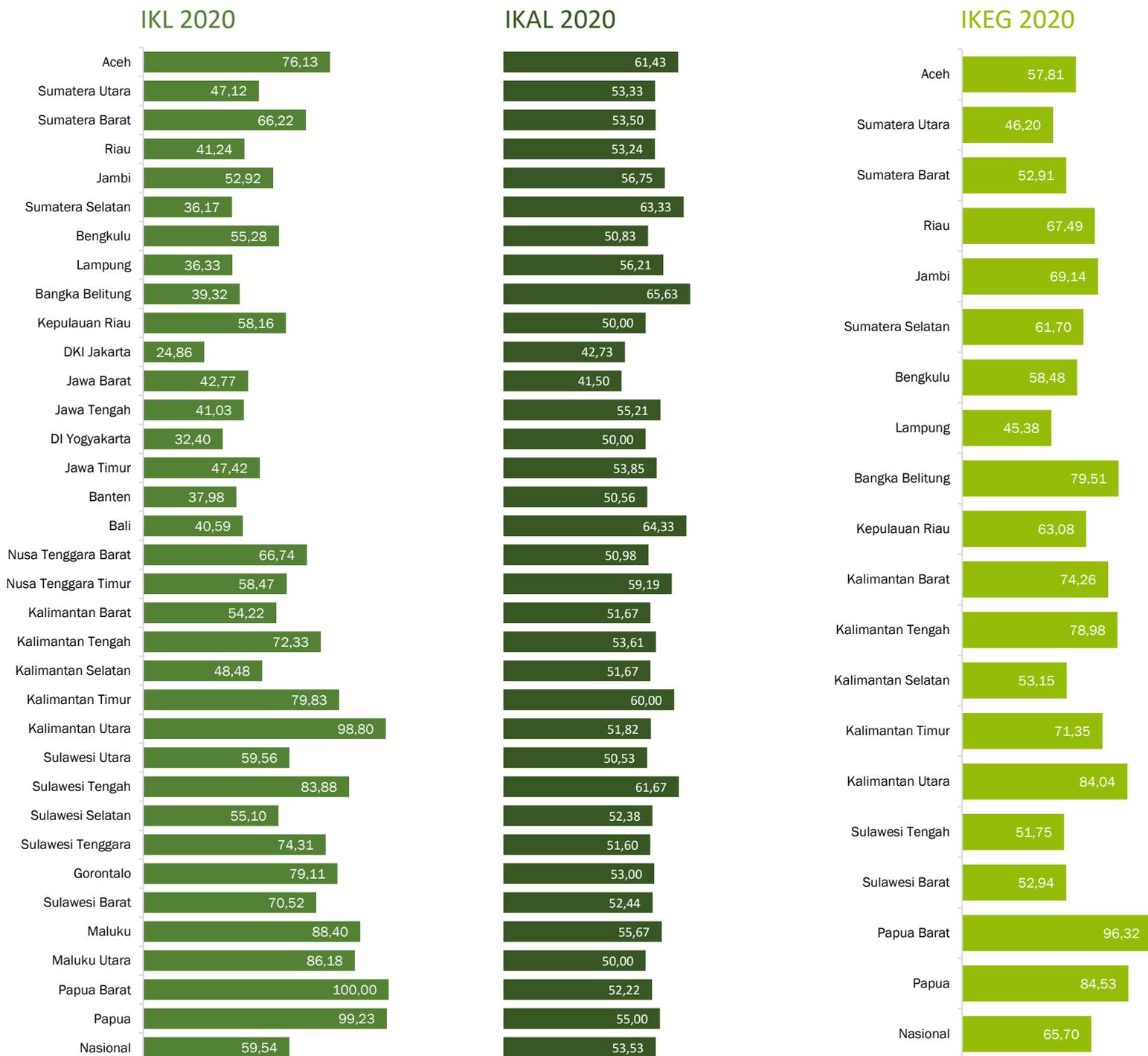
## Indeks Kualitas Udara 2015-2020 per Provinsi

No.	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	89,44	86,30	89,84	88,33	91,08	89,51
2	Sumatera Utara	88,15	79,20	87,32	85,72	86,58	89,22
3	Riau	60,30	72,40	90,90	89,91	90,47	90,42
4	Kepulauan Riau	86,61	78,60	95,47	90,83	90,59	90,80
5	Jambi	82,93	88,10	89,39	88,04	87,17	85,65
6	Bengkulu	92,51	85,40	92,55	91,63	92,69	90,52
7	Sumatera Barat	88,48	82,90	89,87	88,37	89,40	90,39
8	Sumatera Selatan	79,64	81,60	88,88	85,32	87,13	86,57
9	Bangka Belitung	95,61	80,40	94,97	89,09	91,94	91,03
10	Lampung	82,26	77,50	85,02	82,98	86,63	85,45
11	Banten	50,65	58,80	75,36	71,63	74,98	72,83
12	DKI Jakarta	78,78	56,40	53,50	66,57	67,97	66,69
13	Jawa Barat	74,63	78,60	77,85	72,80	74,93	78,46
14	Jawa Tengah	81,32	77,30	83,91	82,97	84,81	84,73
15	DI Yogyakarta	90,58	87,60	88,08	84,25	85,19	89,55
16	Jawa Timur	89,21	83,20	85,49	81,80	83,06	84,06
17	Bali	92,35	88,30	91,40	88,97	89,85	88,34
18	Nusa Tenggara Barat	92,27	81,20	88,02	87,17	87,40	88,63
19	Nusa Tenggara Timur	77,13	82,70	91,18	86,83	88,18	89,80
20	Kalimantan Barat	91,57	81,50	89,12	88,68	90,07	88,88
21	Kalimantan Selatan	87,60	85,60	89,02	87,75	88,78	88,93
22	Kalimantan Tengah	89,87	83,80	92,25	87,07	88,83	89,84
23	Kalimantan Timur			88,87	83,36	90,31	89,02
24	Kalimantan Utara	96,20	80,20	95,83	90,95	93,79	94,23
25	Sulawesi Selatan	76,80	85,80	88,66	93,56	89,56	88,73
26	Sulawesi Tenggara	83,61	83,50	91,04	89,85	90,01	91,21
27	Sulawesi Tengah	89,12	87,90	94,38	89,09	92,98	91,80
28	Sulawesi Barat	89,21	86,40	91,45	89,26	89,97	89,72
29	Gorontalo	96,20	88,30	94,79	92,17	86,88	93,89
30	Sulawesi Utara	92,72	86,70	94,32	91,07	92,41	90,53
31	Maluku	82,33	87,30	85,64	84,99	88,72	90,41
32	Maluku Utara	96,94	86,20	96,00	90,77	92,38	92,10
33	Papua Barat	91,03	93,40	95,63	90,41	92,64	94,83
34	Papua	84,24	89,60	90,01	89,89	92,56	94,57

## Indeks Kualitas Tutupan Lahan 2015-2020 per Provinsi

No.	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	66,50	66,38	66,87	75,37	76,57	76,76
2	Sumatera Utara	50,32	50,21	50,18	49,44	52,95	47,69
3	Riau	52,66	49,45	54,51	48,37	48,15	49,71
4	Kepulauan Riau	54,31	56,53	54,24	54,75	59,06	58,24
5	Jambi	49,29	48,21	52,29	50,56	60,90	55,93
6	Bengkulu	56,68	56,31	45,44	55,52	55,78	55,28
7	Sumatera Barat	58,04	57,97	54,58	67,46	67,16	66,35
8	Sumatera Selatan	47,92	43,93	48,08	40,17	39,84	42,37
9	Bangka Belitung	45,20	45,33	44,01	40,78	41,21	39,64
10	Lampung	42,01	41,66	43,87	35,93	36,65	36,66
11	Banten	45,85	45,91	45,44	38,28	39,16	37,98
12	DKI Jakarta	33,62	35,97	33,32	24,14	24,66	24,86
13	Jawa Barat	46,29	46,09	45,50	38,51	38,70	42,77
14	Jawa Tengah	55,38	53,86	48,38	50,12	50,08	41,03
15	DI Yogyakarta	43,16	42,49	43,30	33,03	32,69	32,40
16	Jawa Timur	53,59	54,99	51,71	50,52	50,23	47,42
17	Bali	49,25	48,44	47,11	41,56	41,34	40,59
18	Nusa Tenggara Barat	60,15	60,03	61,27	66,56	65,67	66,74
19	Nusa Tenggara Timur	60,25	59,67	56,70	63,84	63,42	58,47
20	Kalimantan Barat	59,28	58,87	58,58	64,19	59,76	59,49
21	Kalimantan Selatan	50,97	50,64	51,50	49,29	46,78	50,13
22	Kalimantan Tengah	64,66	62,25	62,72	78,12	76,27	75,11
23	Kalimantan Timur			67,48	87,59	87,94	80,85
24	Kalimantan Utara	72,30	72,14	78,07	87,59		99,84
25	Sulawesi Selatan	55,59	55,43	58,40	54,94	58,06	55,10
26	Sulawesi Tenggara	65,25	65,48	60,37	75,91	74,67	74,31
27	Sulawesi Tengah	69,23	69,03	60,37	84,58	83,89	84,10
28	Sulawesi Barat	63,03	62,69	62,17	70,96	70,48	70,53
29	Gorontalo	68,30	67,56	60,37	79,64	79,37	79,11
30	Sulawesi Utara	58,30	57,93	63,02	60,19	59,45	59,56
31	Maluku	70,13	69,57	70,08	88,78	89,17	88,40
32	Maluku Utara	68,34	68,03	66,65	86,54	86,61	86,18
33	Papua Barat	80,05	79,98	80,63	100,00	100,00	100,00
34	Papua	79,35	79,17	78,18	95,94	99,58	99,86

## Indeks Kualitas Lahan, Air Laut Dan Ekosistem Gambut 2020 per Provinsi



## Upaya Pengendalian Pencemaran Air

Ketersediaan informasi kualitas air diperlukan untuk menentukan program prioritas dan kegiatan, selain sebagai informasi dini terhadap pencemaran yang terjadi di sumber air.

Kualitas air diperoleh dengan melakukan pemantauan air sungai secara manual dan otomatis kontinu. Pemantauan kualitas air secara manual dapat dilakukan pada lebih banyak lokasi, sedangkan pemantauan menggunakan alat otomatis dapat dilakukan secara terus menerus, sesaat dan data yang diperoleh lebih banyak dalam satu titik pemantauan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum, maka pengawasan berada di hilir. Pengendalian pencemaran air merupakan kegiatan yang mencakup:

- Inventarisasi kualitas dan kuantitas air pada sumber air menurut sistem wilayah tata pengairan;
- Penetapan golongan air menurut peruntukannya, baku mutu air dan baku beban dari pencemaran air tersebut serta baku mutu limbah cair untuk setiap jenis kegiatan

- penetapan mutu limbah cair yang boleh dibuang oleh setiap kegiatan kedalam air pada sumber air dan pemberian izin pembuangannya;
- pemantauan perubahan kualitas air pada sumber air dan mengevaluasi hasilnya;
- pengawasan terhadap penataan peraturan pengendalian pencemaran air, termasuk penataan mutu limbah cair, serta penegakan hukumnya.

Pemantauan Kualitas Air Sungai Ciliwung dan Citarum

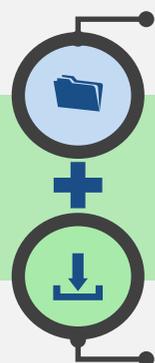


### Restorasi Sempadan Sungai

Pembangunan Ekoriparian sempadan sungai yang terbengkalai menjadi taman terbuka hijau serta sarana edukasi lingkungan bagi masyarakat sekitar dengan bangunan IPAI Wetland biocord kapasitas 2000 Kepala Keluarga di Teluk Jambe, Kabupaten Karawang

### Penyediaan sistem informasi status kualitas air

Sejak Tahun 2015 telah dilakukan upaya penyediaan sistem pemantauan kualitas air secara otomatis, kontinu, dan *online* atau *online monitoring system (onlimo)* pada 13 sungai prioritas, hingga saat ini telah tersedia 40 unit *onlimo* dimana 14 unit diantaranya berasal dari anggaran pembangunan tahun 2020



- Pemantauan kualitas air pada 11 titik di Sungai Citarum dan Ciliwung menunjukkan kualitas air yang semakin memenuhi standar baku mutu.
- Pada periode 2015 hingga 2020 telah dibangun 652 unit IPAL yang dapat menurunkan beban pencemaran BOD sebesar 846,57 BOD (ton/tahun). Memberikan manfaat Biogas sebesar 890.928,65 m<sup>3</sup>/tahun dan manfaat ekonomi sebesar Rp 2.242.711.658 per tahun.

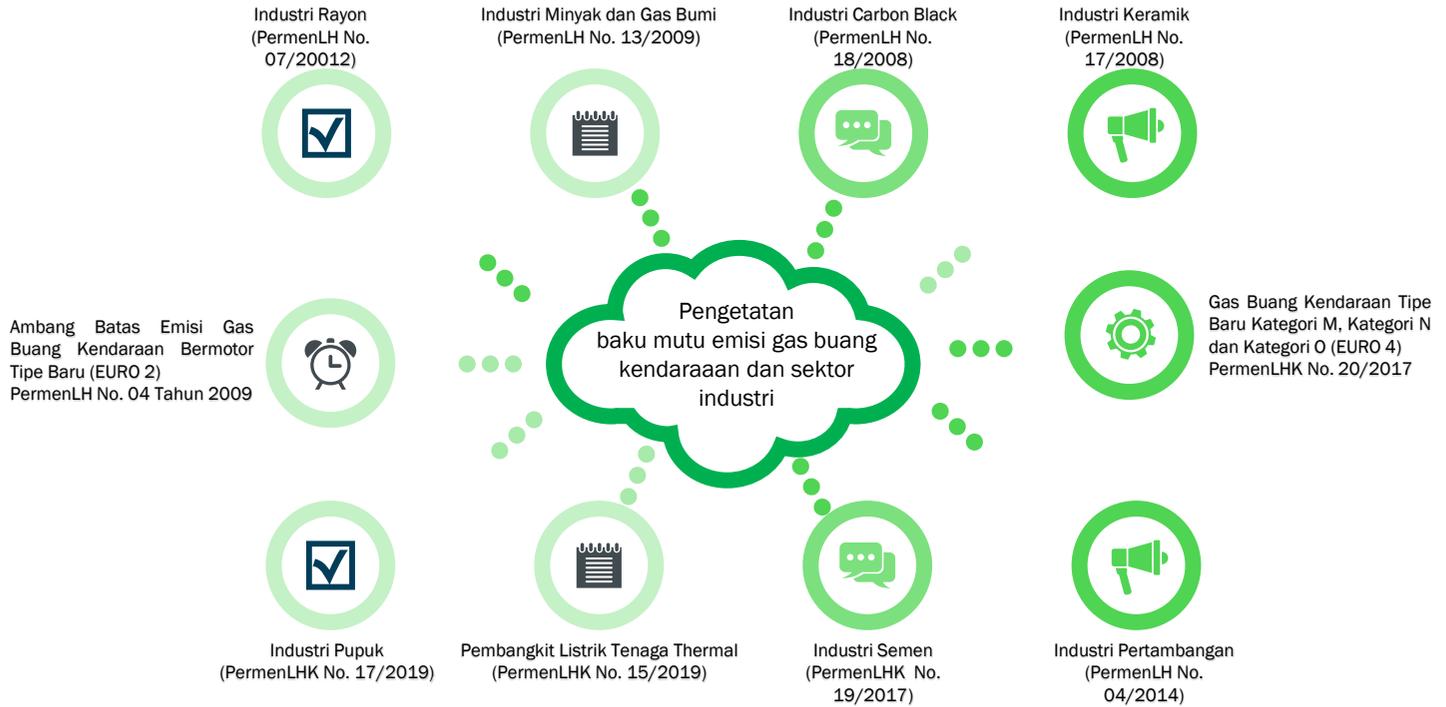
### Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik dan Usaha Skala Kecil Tahun 2020

- Pembangunan IPAL Domestik telah menurunkan beban pencemaran air yang berasal dari limbah domestik dengan rata-rata penurunan BOD sebesar 25,70 ton/tahun. Masyarakat juga memperoleh beberapa manfaat diantaranya Biogas untuk keperluan rumah tangga sebesar 2.190 m<sup>3</sup>/tahun dan manfaat ekonomi lainnya dengan nilai sebesar Rp12.592.500 per tahun.
- Pembangunan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) telah menurunkan beban pencemaran air yang berasal dari limbah usaha skala kecil dengan rata-rata penurunan BOD sebesar 20,04 ton/tahun. Masyarakat juga memperoleh beberapa manfaat diantaranya Biogas untuk keperluan rumah tangga sebesar 5.256 m<sup>3</sup>/tahun dan manfaat ekonomi lainnya dengan nilai sebesar Rp12.088.800 per tahun.

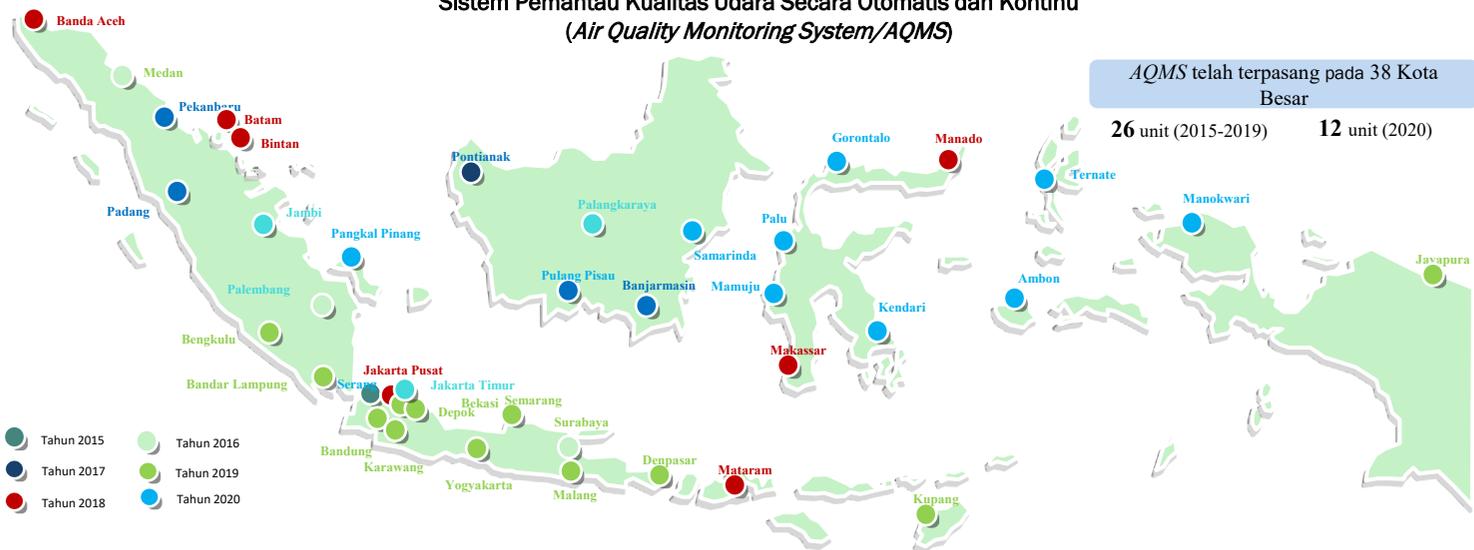
## Upaya Pengendalian Pencemaran Udara

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2020 dalam upaya mengendalikan pencemaran udara melalui: (1) pemantauan kualitas udara ambien di 500

kab/kota dilaksanakan sebanyak 2 kali pada 4 titik yang mewakili industri, permukiman, transportasi dan perkantoran (2) pembangunan AQMS sebanyak 12 unit, dan (3) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi sebanyak 1.875 industri dari target 1.668 industri.



## Sistem Pemantau Kualitas Udara Secara Otomatis dan Kontinu (Air Quality Monitoring System/AQMS)



## Upaya Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Pemulihan kerusakan LAT adalah upaya yang dilakukan untuk mengembalikan dan/atau memperbaiki kualitas lingkungan agar dapat berfungsi sesuai dengan peruntukan tata ruang.

Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2020 sebagai upaya pemulihan kerusakan lahan akses terbuka meliputi:

- Pemulihan lahan akses terbuka sebesar 11,67 Ha
- Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya sebanyak 80 perusahaan

- Penyusunan FS-DED pemulihan lahan akses terbuka di 3 lokasi, yaitu: 7,6 Ha di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, 0,81 Ha di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan 8,3 Ha di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
- Capaian Indeks Kualitas Lahan 59,54 poin dari target 61,6 poin. Nilai IKL mempresentasikan kondisi kualitas tutupan lahan yang dipengaruhi oleh dampak kebakaran (DK) dan kanal (DKK) pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan.



### Paser

Lubang bekas penambangan emas di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Seluas 1,175 Ha di pulihkan menjadi kawasan Agroforestri Sendawai Jaya yang ditanami dengan berbagai macam tumbuhan produktif dan penghijauan

### Buton

Lahan bekas tambang pasir seluas 0,98 hektar disulap menjadi taman kota Pasarwajo yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan dapat mencegah abrasi pantai serta intrusi air laut. Kawasan ini juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar melalui pengelolaan kawasan di bawah BUMDes

### Malang

Terletak di kawasan agropolitan di kaki gunung semeru, lahan bekas tambang pasir seluas 22 Ha ini di pulihkan dengan wisata agro dan edukasi. Mengusung nama Njulung Agropedu Tourism, diharapkan kawasan dapat menjadi tujuan wisata favorit di Kabupaten Malang, sehingga mampu memberikan manfaat secara ekonomi.

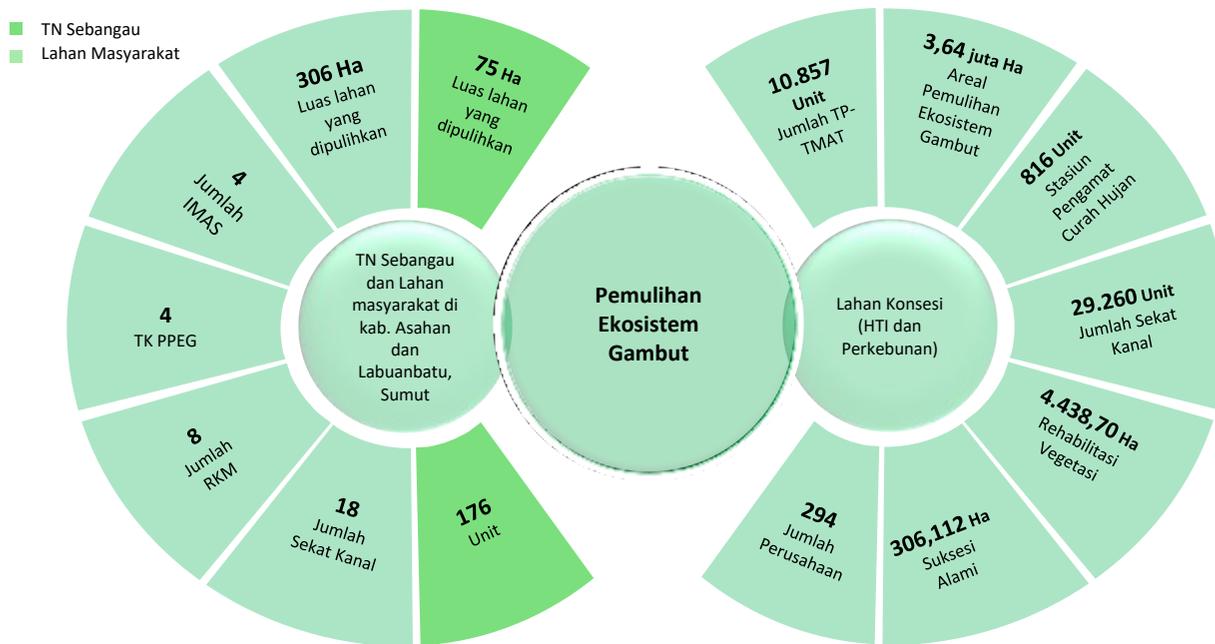


Persiapan bibit untuk penanaman di lahan akses terbuka. Foto oleh M. Luthfi (kiri) dan Raysapta (kanan).

## Pemulihan Ekosistem Gambut

Kualitas ekosistem gambut diukur menggunakan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), yang dihitung berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu keberadaan kanal, areal yang terbakar dan tutupan lahan. Gambut berfungsi sebagai tempat penyimpanan karbon, sumber makanan, habitat atau tempat tinggal untuk satwa liar dan tumbuhan, mengatur tata air, tempat rekreasi dan edukasi, dan lain-lain. Salah satu upaya untuk pemulihan ekosistem gambut di lahan masyarakat disertai dengan pembentukan kemandirian

masyarakat. Lokasi pembangunan sekat kanal ditentukan oleh masyarakat setempat yang akan menerima manfaat langsung dan sekaligus dapat melakukan pemeliharaan. Pelaksanaan program RKM atau Rencana Kemandirian Masyarakat ini disesuaikan dengan daerah yang menjadi lokasi pembangunan sekat kanal. Hal ini sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga ekosistem gambut.



### Sekat Kanal di Lahan Masyarakat

Tahun 2015-2019 : 627 unit;  
 Tahun 2020 : 681 unit;  
 Total 2015-2020 : 1.308 unit

### Pemulihan Lahan Masyarakat

Tahun 2015-2019 : 9.950 Ha;  
 Tahun 2020 : 36.604,7 Ha;  
 Total tahun 2015-2020 : 46.554,7 Ha

### Desa Gambut

Tahun 2015-2019 : 71 desa;  
 Tahun 2020 : 56 desa;  
 Total tahun 2015-2020 : 127 desa



**Sekat Kanal di Lahan Konsesi**  
 Tahun 2015-2019 : 27.889 unit;  
 Tahun 2020 : 1.371 unit;  
 Total 2015-2020 : 29.260 unit



**Pemulihan di Lahan Konsesi**  
 Tahun 2015-2019 : 3.474.687,72 Ha;  
 Tahun 2020 : 169.111,54 Ha;  
 Total tahun 2015-2020 : 3.643.799,26 Ha



**inventarisasi KHG**  
 Tahun 2015-2019 : 71 KHG;  
 Tahun 2020 : 136 KHG;  
 Total tahun 2015-2020 : 207 KHG

## Upaya Pengendalian Pencemaran Air Laut

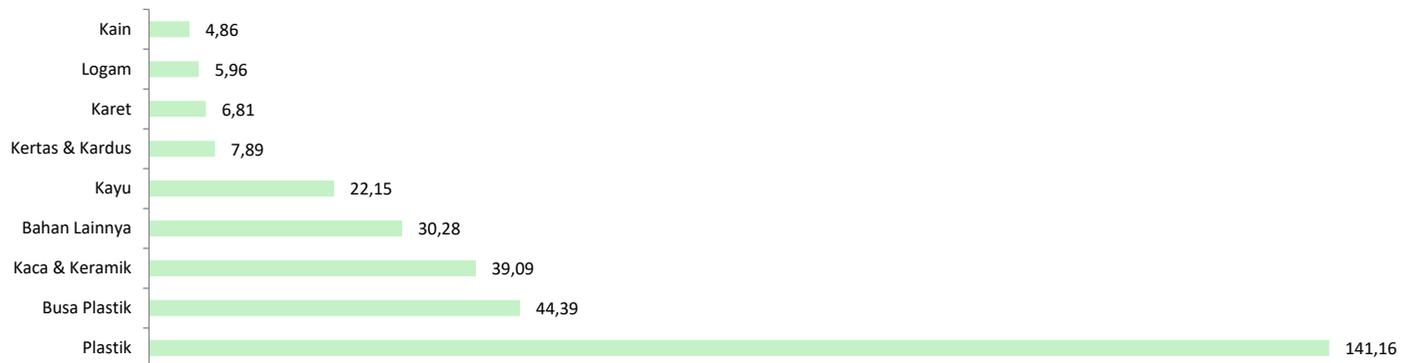
Indonesia memiliki ± 13.487 pulau yang tersebar di seluruh nusantara, dimana setiap pulau dikelilingi laut. Sebagian besar pencemaran laut berasal dari aktivitas di darat, yang menghasilkan sampah laut seperti sampah plastik, busa plastik, logam, karet, dan kayu. Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2020 sebagai upaya pengendalian pencemaran air laut meliputi:

1. Pemantauan sampah laut di 17 lokasi pada 16 provinsi dan *coastal clean up* sebanyak 4 lokasi
2. Pemulihan ekosistem terumbu karang sebanyak 3 lokasi,
3. Penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir dan laut, dilaksanakan di 2 lokasi
4. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut yang diterbitkan sebanyak 89 izin.

### Gerakan Bersih Pantai, Pemantauan Sampah Laut Dan Penanganan Tumpahan Minyak



### Komposisi Sampah Laut (pcs/m<sup>2</sup>)





*Salah satu pengunjung sedang mendokumentasikan dan berenang bersama kawanan ikan Hiu di pulau Tinabo TN. Taka Bonerate*

*Foto oleh Asri*

## Pemulihan terumbu Karang

Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai satwa laut dan menjadi penjaga keanekaragaman hayati di lautan. Dalam kondisi fisik yang baik, terumbu karang dapat berfungsi secara optimal sebagai sumber penghidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan.

Berdasarkan fungsinya yaitu fungsi ekologis dan ekonomi maka manfaat dari terumbu karang dapat dibedakan menjadi nilai ekonomi dan nilai ekologi. Transplantasi terumbu karang adalah salah satu metode dalam pelestarian (pemulihan ekosistem) terumbu karang dengan teknik pencangkakan.

Guna meningkatkan pengelolaan terumbu karang dengan kondisi memperhatikan karena terdegradasi, maka dilakukan upaya transplantasi terumbu karang dengan memperbanyak koloni karang melalui teknologi transplantasi yang sudah teruji dengan melibatkan kelompok masyarakat setempat. Usaha rehabilitasi karang juga membawa berbagai manfaat lain. Berikut ini

adalah manfaat dari adanya transplantasi terumbu karang:

1. Mempercantik ekosistem laut suatu perairan dan membuatnya lebih hidup
2. Menjaga keseimbangan alam perairan mulai dari ikan kecil hingga ikan yang lebih besar
3. Mendukung industri pariwisata dan perdagangan ikan
4. Menjaga keanekaragaman hayati di perairan

Total lokasi pemulihan sejak 2015-2020 yaitu sebanyak 33 lokasi. Pemulihan pada tahun 2020 dilaksanakan di tiga lokasi diantaranya:

1. Perairan Dusun Luk, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (NTB) yang memiliki luasan 200 m<sup>2</sup>
2. Perairan Banteng, Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luasan wilayah 720 m<sup>2</sup>
3. Perairan Pantai Kastela dan Desa Tobololo, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara yang memiliki luasan wilayah 520 m<sup>2</sup>



Bersama komunitas pemuda melakukan transplantasi terumbu karang di Zona Rehabilitasi Resor Jinato TN. Taka Bonerate, Kepulauan Selayar (Foto : Asri)

## Sebaran Lokasi Transplantasi Karang 2015-2020





Areal transplanti terumbu karang di Zona Rehabilitasi Resort Jinato TN. Taka Bonerate, Kepulauan Selayar saat usia satu minggu (atas). Pengecekan terumbu karang dilakukan setiap minggu untuk mengawasi pertumbuhan populasinya. Keberhasilan kegiatan transplanti terumbu karang yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya pemulihan terumbu karang di kawasan konservasi saat ini telah menjadi salah satu spot diving dengan pesona bawah laut yang indah (kanan).

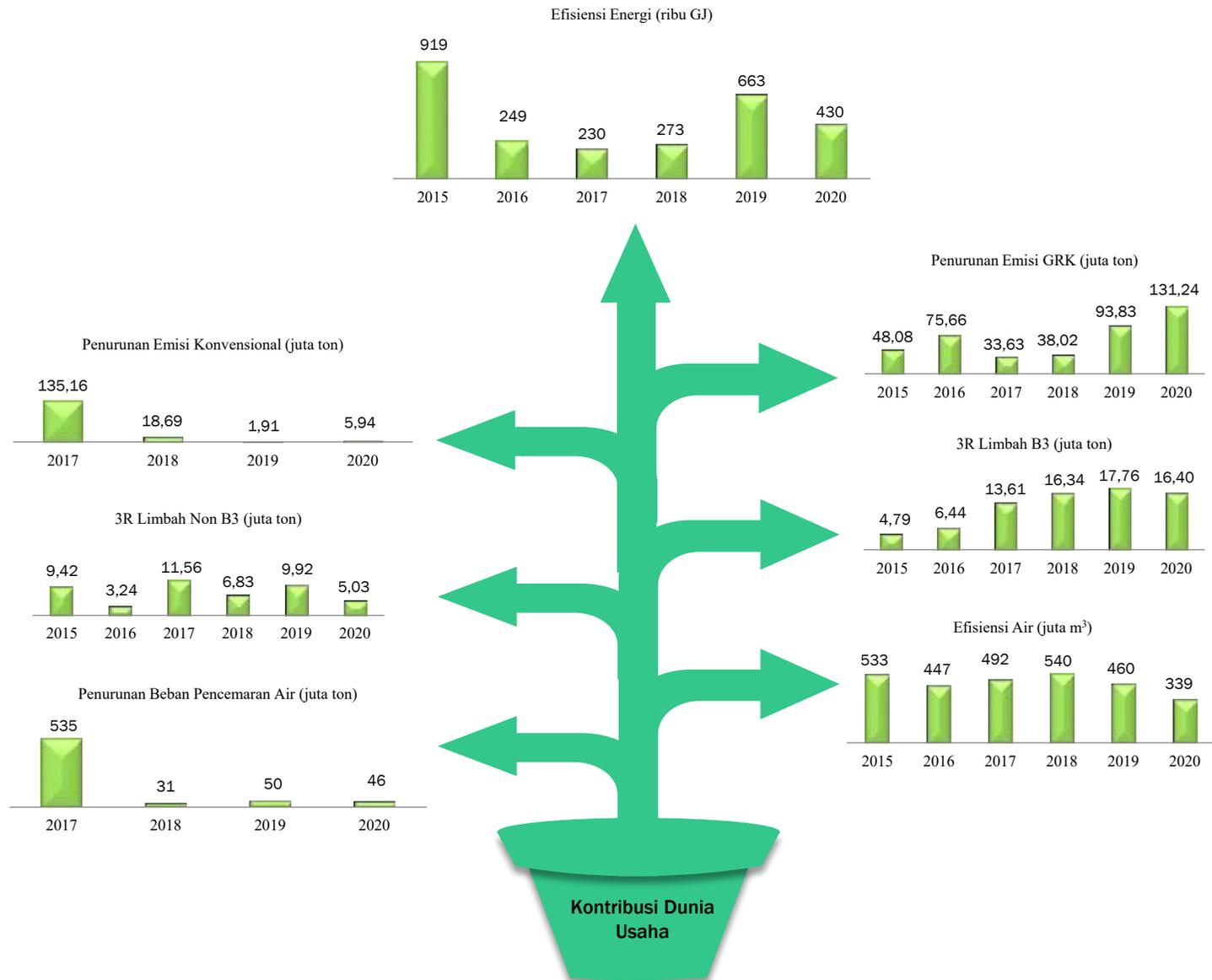
Foto oleh Asri

## Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)

Kontribusi dari dunia usaha dalam perbaikan lingkungan dinilai melalui program penilaian peringkat kerja perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup (PROPER). Tahun 2020 jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROPER sebanyak 2039 perusahaan.

Hasil evaluasi PROPER Tahun 2020 mengalami peningkatan ketaatan dari tahun ke tahun, sehingga tahun ini menjadi 87,6%. Jika dibandingkan dengan persentase ketaatan periode evaluasi sebelumnya mencapai 85%.

Berdasarkan data hasil evaluasi PROPER juga dapat dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai absolut kontribusi terhadap perbaikan lingkungan yang meliputi efisiensi energi, penurunan emisi GRK, penurunan emisi konvensional, 3R limbah B3, 3R limbah Non B3, efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air.





## Indikator Kinerja Utama 02

### Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

*Ni Luh, Srikandi Manggala Agni Daops Tinanggea bersama kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.*

*Foto oleh Samsir, Manggala Agni Daops Tinanggea*



*Untuk melihat dokumen Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, silahkan memindai QR code berikut*

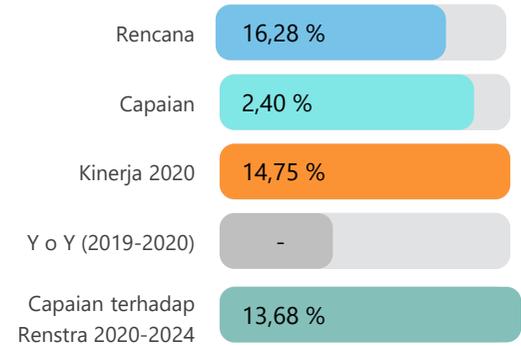
## IKHTISAR KINERJA

Membangkitkan komitmen dan sinergitas dalam pengendalian perubahan iklim merupakan kunci sukses pencapaian target NDC 2030.

Analisis besaran emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dilakukan setelah data tersedia pada tahun setelahnnya atau T-1. Capaian penurunan emisi belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena target NDC mulai dimonitor tahun 2020.

Tingkat penurunan emisi GRK pada tahun 2019 adalah sebesar 1.866 juta tCO<sub>2</sub>e atau 2,04% dari target 16,28%.

Target kinerja tersebut hanya tercapai 14,75% karena tingginya sumber emisi utama yang berasal dari kebakaran pada lahan gambut (*Peat Fire*), dan dekomposisi gambut.



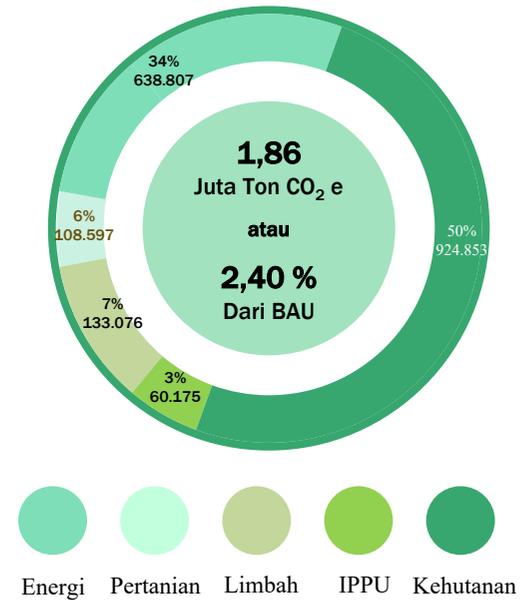
Memantau kawasan untuk melihat kondisi lingkungan di TN. Rawa Aopa Watumohai. Kegiatan yang memberikan input berharga untuk menjaga simpanan karbon di dalam hutan.

Foto oleh Indra Anggrana Wijaya.

## Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Indonesia telah menyatakan komitmennya pada *Conference of Parties* (COP) 15 tahun 2009 untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% (dengan usaha sendiri) dan sebesar 41% (jika mendapat bantuan internasional) pada tahun 2020. Komitmen Indonesia tersebut diperkuat melalui dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) Republik Indonesia yang pertama pada bulan November 2016 dengan ditetapkannya target *unconditional* sebesar 29% dan target *conditional* sampai dengan 41% dibandingkan skenario *business as usual* (BAU) di tahun 2030. Secara nasional, target penurunan emisi pada tahun 2030 berdasarkan NDC adalah sebesar 834 juta ton CO<sub>2</sub>e pada target *unconditional* (CM1) dan sebesar 1,081 juta ton CO<sub>2</sub>e pada target *conditional* (CM2). Untuk memenuhi target tersebut, secara nasional telah dilakukan berbagai aksi mitigasi pada semua sektor oleh penanggung jawab aksi mitigasi.

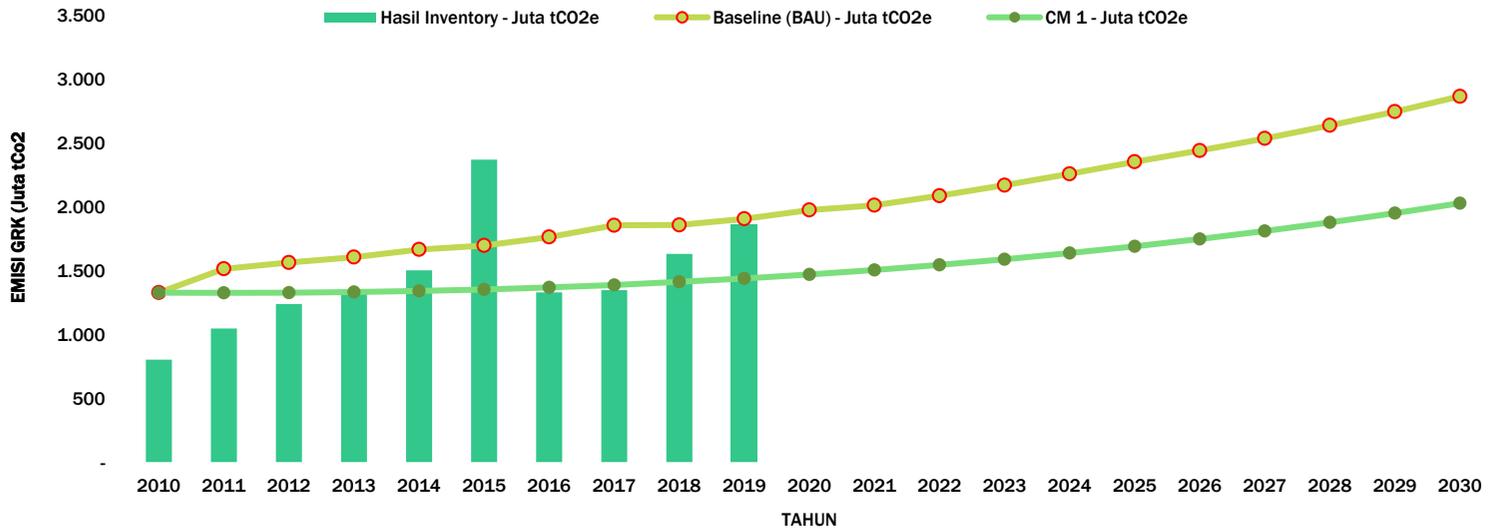
Aksi mitigasi untuk sektor Kehutanan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen NDC antara lain: (1) Pencegahan Penurunan Tutupan Hutan Alam atau Konversi Hutan Alam (Penurunan Laju Deforestasi dan Degradasi), (2) Pengelolaan Hutan Lestari Berkelanjutan (*Sustainable Forest Management*), (3) Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), (4) Rehabilitasi Kawasan Hutan (Regenerasi/tanpa penebangan), (5) Rehabilitasi Hutan Produksi dan Lahan (Dengan Restorasi), (6) Restorasi Gambut, (7) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, (8) Pemulihan Lahan Gambut.



## Pendanaan REDD+ Berbasis Kinerja



## Emisi Gas Rumah Kaca Hasil Inventarisasi GRK Nasional



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baseline (BAU) - Juta tCO2e	1.334	1.520	1.569	1.611	1.671	1.702	1.769	1.860	1.863	1.911	1.980	2.018	2.092	2.174	2.263	2.357	2.445	2.540	2.642	2.750	2.869
CM 1 - Juta tCO2e	1.334	1.332	1.333	1.338	1.347	1.359	1.375	1.394	1.418	1.445	1.476	1.511	1.551	1.595	1.643	1.696	1.753	1.816	1.883	1.956	2.034
ER CM 1 - Juta tCO2e	0	188	236	273	324	343	394	466	445	466	504	507	541	579	620	661	692	724	759	794	835
ER CM 1 - %	0,0	12,4	15,1	17,0	19,4	20,2	22,3	25,1	23,9	24,4	25,5	25,1	25,9	26,6	27,4	28,1	28,3	28,5	28,7	28,9	29,1
Hasil Inventory - Juta tCO2e	810	1.054	1.245	1.331	1.509	2.374	1.336	1.354	1.637	1.866											
Capaian ER - %	39,28	30,65	20,70	17,37	9,70	39,48	24,50	27,23	12,13	2,40											

### Keterangan:

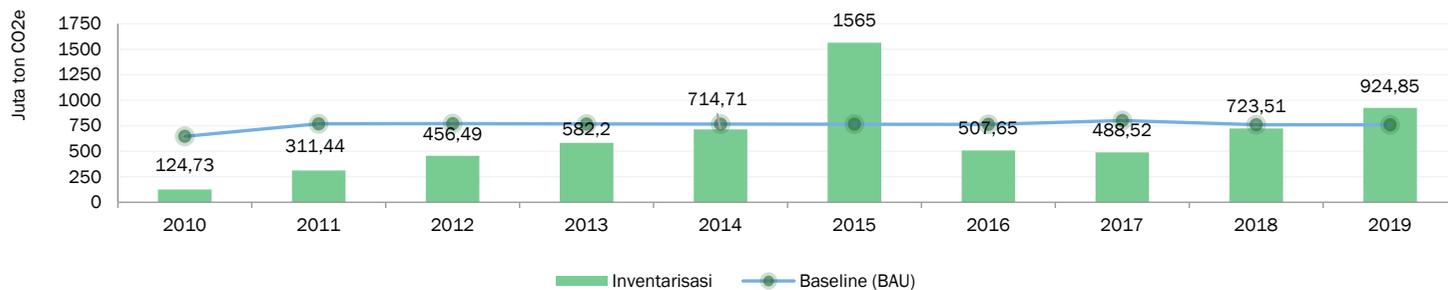
- Target NDC merupakan target single year, yaitu target 29% (CM1) di 2030, dan bukan nilai kumulatif dari 2020-2030.
- Sesuai model yang dibangun maka target NDC (CM1) di 2020 adalah 26% (25,5%) dari BAU 2020.
- Target CM1 2019 adalah 24,4% dari BAU 2019 (sesuai model).
- Hasil IGRK menunjukkan emisi 2019 sebesar 1.865,51 juta ton CO2e atau turun hanya 2,4% dari BAU 2019. Jadi emisi GRK 2019 hampir menyentuh emisi BAU 2019.
- Target NDC (CM1), tahun 2019 capaian NDC (CM1) sebesar 10% (yaitu 2,4% dari 24% yang diharapkan).



Untuk melihat informasi pengaruh perubahan iklim terhadap konservasi penyu di TN Kepulauan Seribu, silahkan memindai QR code berikut

## Perbandingan Hasil Inventarisasi GRK terhadap Baseline (BaU) pada Sektor Kehutanan dan Limbah

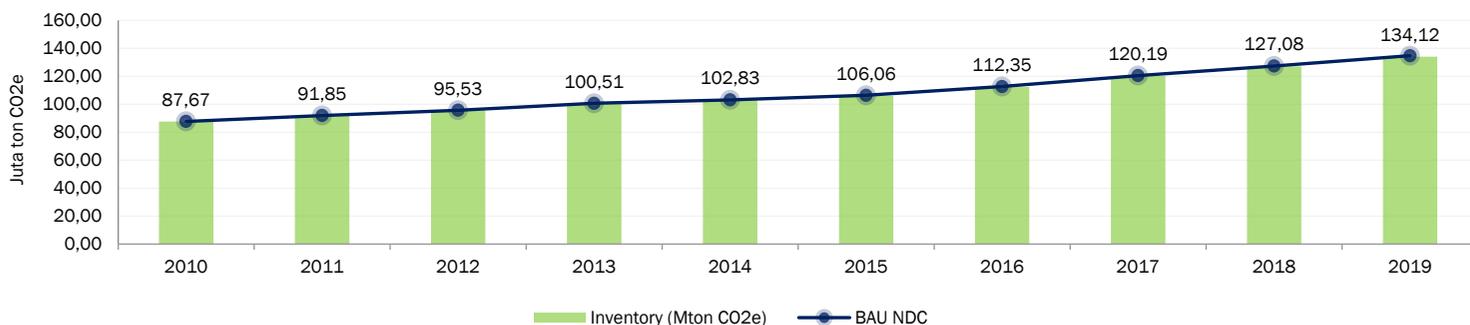
Perbandingan Hasil Inventarisasi GRK terhadap Baseline Emisi GRK (BaU) Sektor Kehutanan



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Inventarisasi	124,73	311,44	456,49	582,82	714,71	1.565,58	507,65	488,52	723,51	924,85
Baseline (BAU)	646,55	769,25	770,84	767,69	766,42	765,09	763,7	801,26	760,76	759,2
Penurunan emisi	521,82	457,81	314,35	184,87	51,71	-800,49	256,05	312,74	37,25	-165,66
Kontribusi NDC 2030 (%)	18,06	15,84	10,88	6,4	1,79	-27,7	8,86	10,82	1,29	-5,73

Sumber emisi sektor kehutanan berasal dari perubahan stok karbon pada biomass atas permukaan, dekomposisi gambut, dan kebakaran gambut

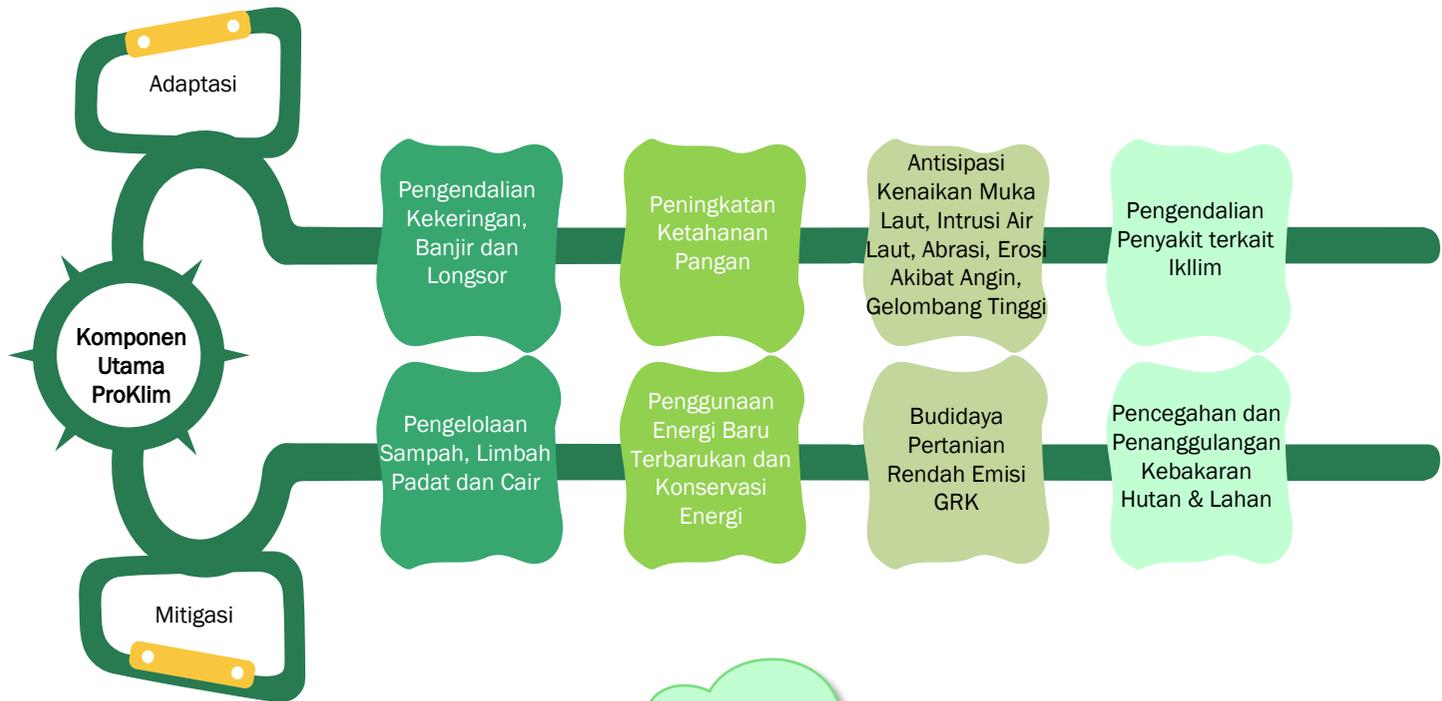
Perbandingan Hasil Inventarisasi GRK terhadap Baseline Emisi GRK (BaU) Sektor Limbah



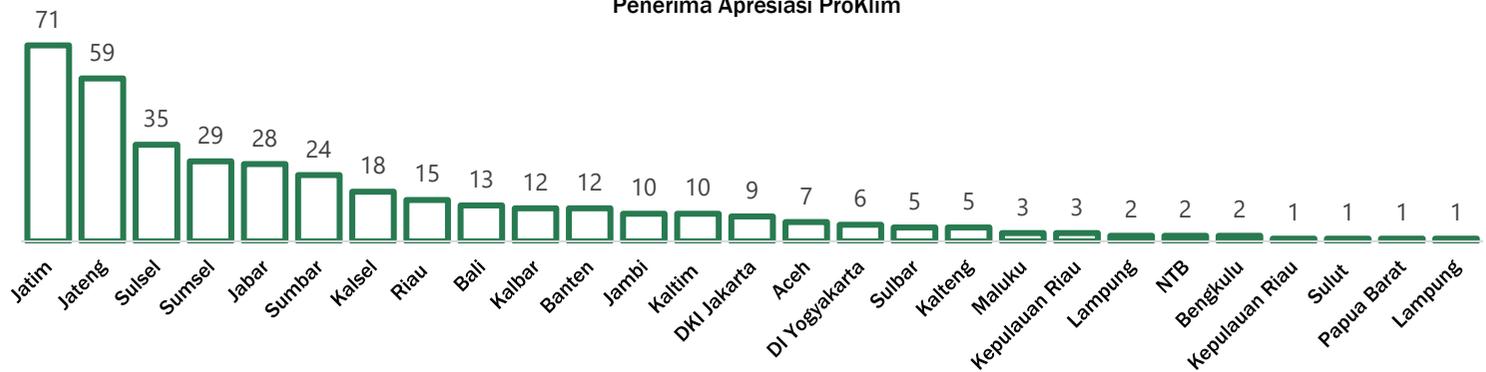
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Inventory	87,67	91,85	95,53	100,51	102,83	106,06	112,35	120,19	127,08	134,12
BAU NDC	87,73	91,97	95,75	100,73	103,16	106,46	112,75	120,55	127,39	134,81
Penurunan dari BAU	0,06	0,12	0,22	0,22	0,33	0,40	0,40	0,36	0,31	0,62



# Program Kampung Iklim (Proklam)



Penerima Apresiasi Proklam

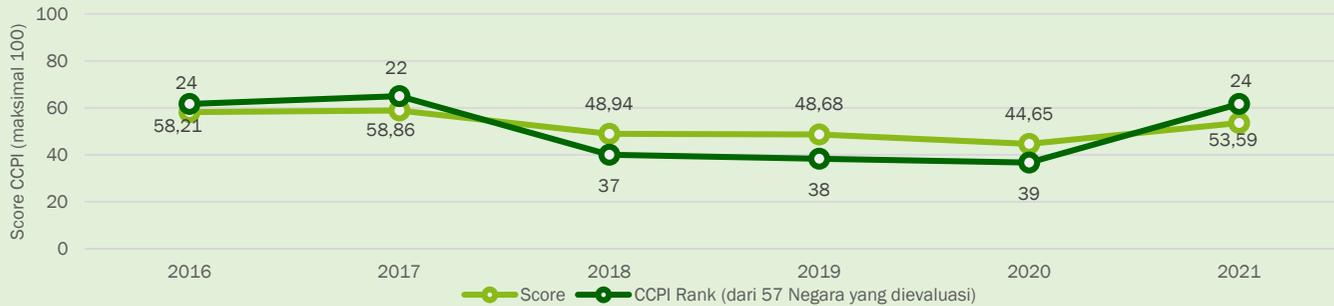


# BOX INFORMASI

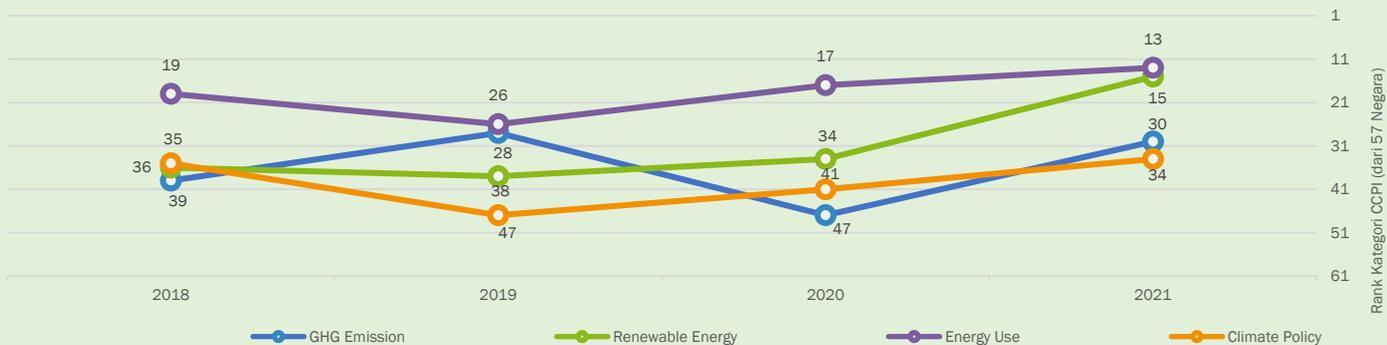
## Indeks Kinerja Perubahan Iklim 2021

Indonesia menempati peringkat ke-24 dalam Indeks Kinerja Perubahan Iklim 2021. Negara yang dikenal dengan julukan negara kepulauan ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana Indonesia menempati peringkat ke-39. Laporan tersebut dikeluarkan oleh sejumlah lembaga iklim, seperti Newclimate Institute, Climate Action Network, serta Germanwatch. Terdapat empat indeks penilaian yang digunakan, yaitu emisi, energi terbarukan, penggunaan energi, dan kebijakan iklim. Berdasarkan keempat indeks tersebut, Indonesia menempati peringkat 24 dengan nilai rata-rata sebesar 53,59.

Climate Change Performance Index (CCPI) Indonesia



Peringkat Indonesia per Kategori Penilaian CCPI



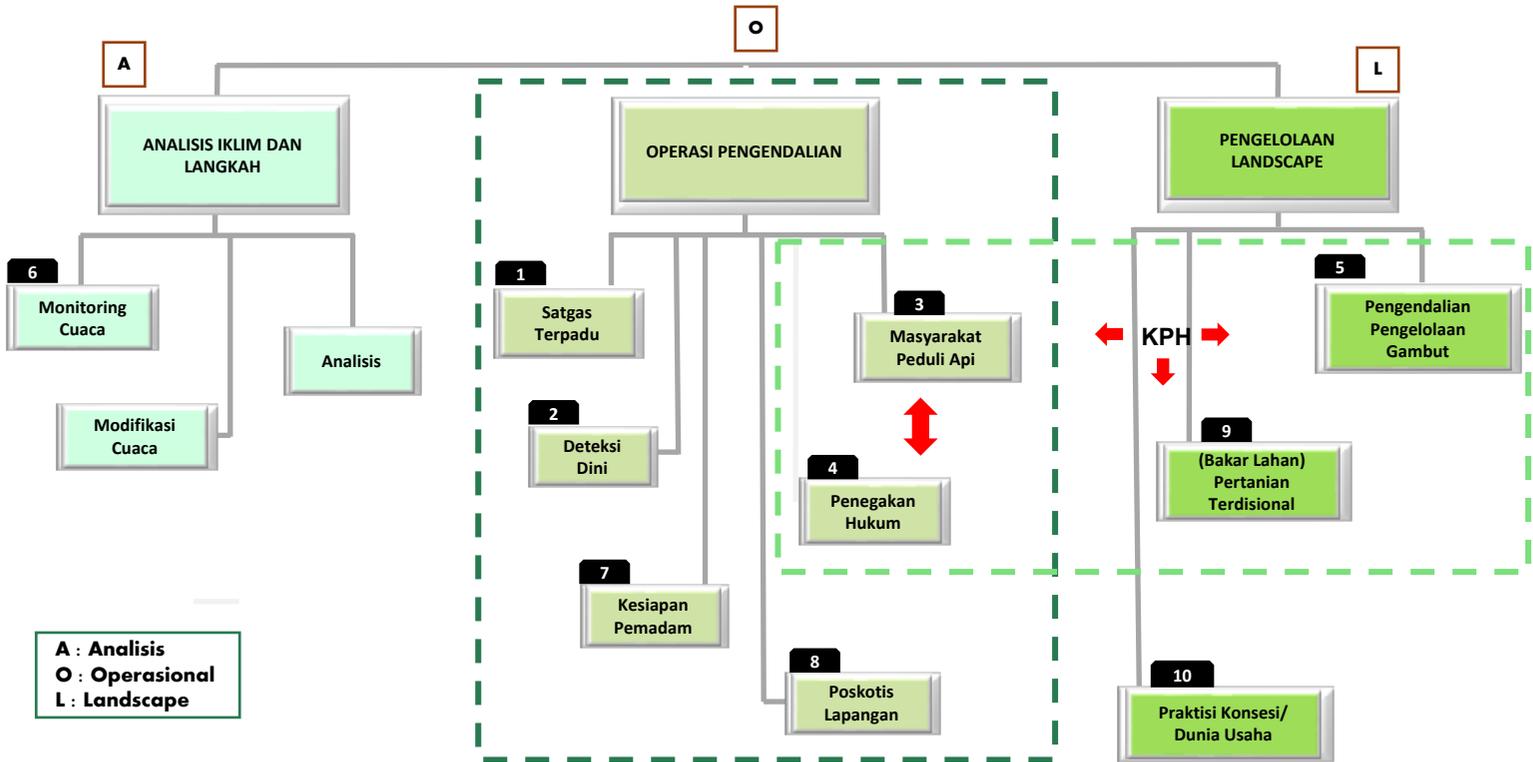
Hasil Penilaian CCPI per Kategori



Untuk informasi penilaian Indeks Kinerja Perubahan Iklim secara detail, silahkan memindai QR code berikut



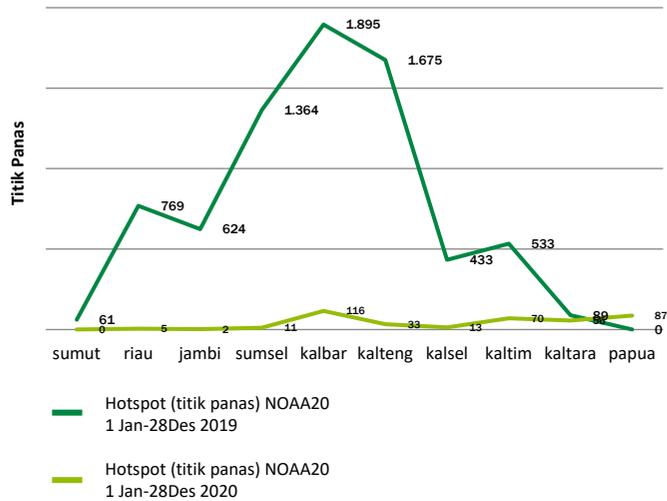
# Upaya Pencegahan Karhutla Secara Permanen



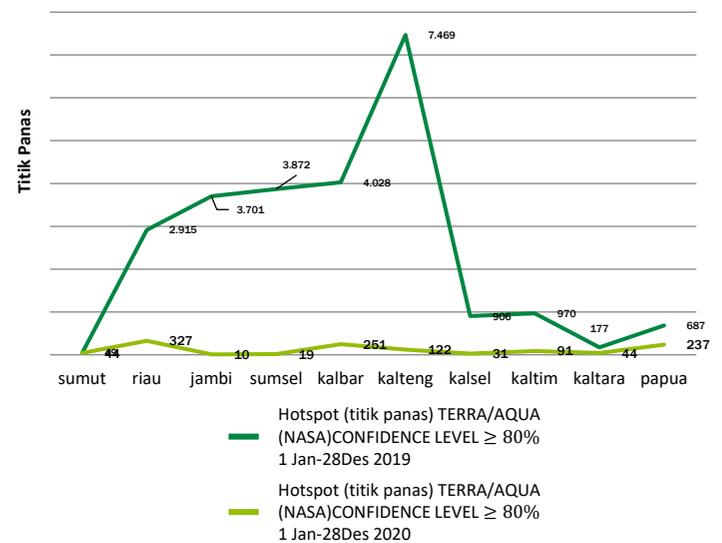
Program Kampung Iklim yang terletak di Kelurahan Lantebung, Kota Makassar.

Foto oleh Kartika Puspitasari

## Penurunan Hotspot



- Perbandingan Total Jumlah Hotspot Tahun 2019 dan 2020 : (tanggal 1 Januari 28 Desember 2020, berdasarkan **SATELIT NOAA** Conf. Level >80% : 1.114 titik, pada periode yang sama tahun 2019 jumlah hotspot sebanyak 8.944 titik (terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 7.830 titik / 87,54%).
- Keterangan Data jumlah hotspot dari satelit NOAA18 (Tahun 2015 s.d. 17 Mei 2016) II NOAA 19 (17 Mei 2016-2019) NOAA 20 tahun 2020 s.d. tanggal 28 Desember 2020 Pukul 07.00 WIB.



- Perbandingan Total Jumlah Hotspot Tahun 2019 dan 2020 : (tanggal 1 Januari-28 Desember 2020 berdasarkan SATELIT TERRA/AQUA (NASA) Conf. Level >80% : 2.565 titik, pada periode yang sama tahun 2019 jumlah hotspot sebanyak 29.337 titik (terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 26.772 titik / 91,26%)
- Keterangan : Data jumlah hotspot dari satelit Terra/Aqua tahun 2020 s.d. tanggal 28 Desember 2020 Pukul 07.00 WIB.



Latihan gabungan TNI, POLRI, dan Manggala Agni guna mempersiapkan pencegahan Karhutla.

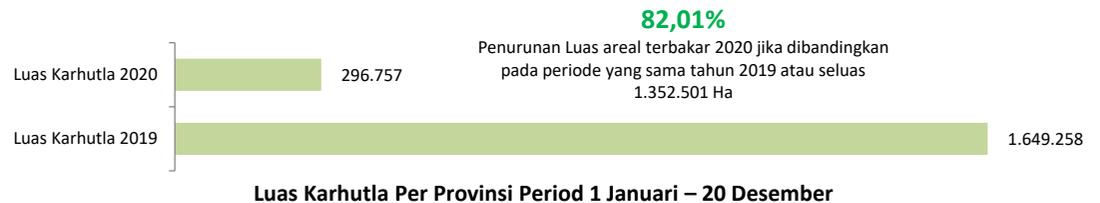
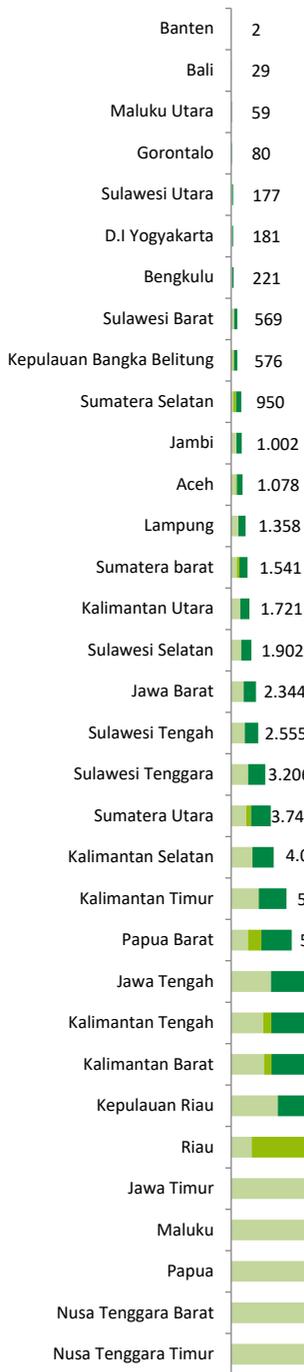
Foto oleh Samsir, Manggala Agni Daops Tinanggea

## Persentase Penurunan Areal Kebakaran Hutan dan Lahan

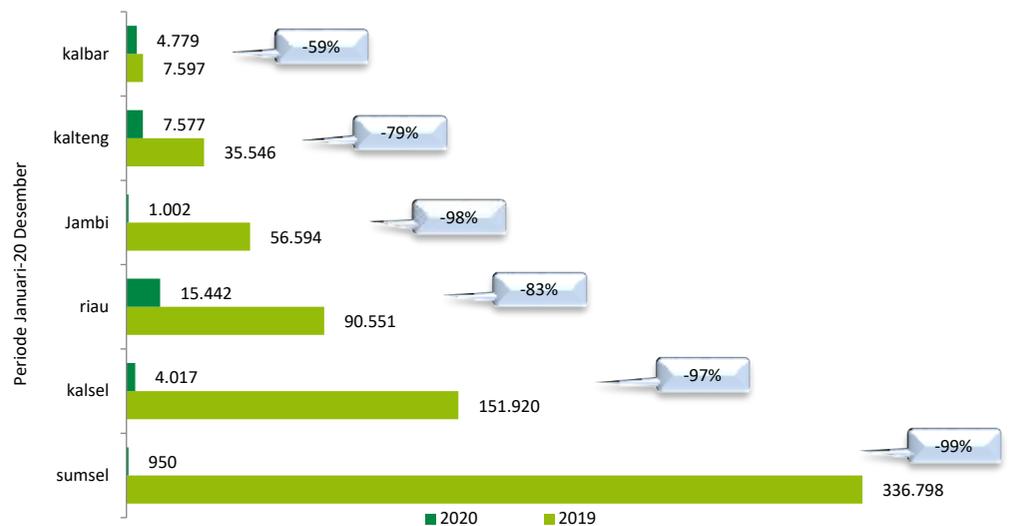
Kebakaran hutan di Indonesia telah dikelola sejak sebelum negara ini merdeka. Pemerintah Hindia Belanda juga telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang Kehutanan dan kebakaran hutan. Sesudah proklamasi kemerdekaan, masalah kebakaran hutan ditangani oleh Jawatan Kehutanan dan selanjutnya oleh Direktorat Jenderal Kehutanan, Dep. Pertanian.

Pada tahun 1988, Direktorat Jenderal Kehutanan berubah menjadi Departemen Kehutanan. Kebakaran hutan ditangani oleh seksi Kebakaran Hutan (Eselon IV) pada Direktorat Perlindungan Hutan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA).

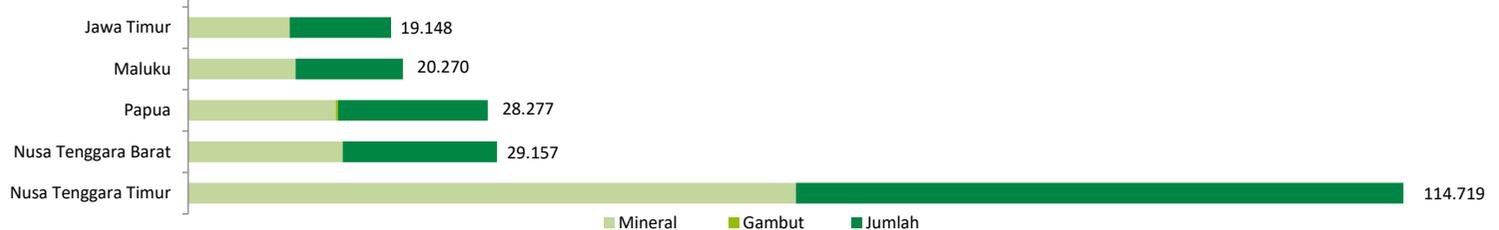
Pada masa itu sistem pengendalian kebakaran hutan mulai berkembang, meliputi pengembangan SDM melalui berbagai pelatihan bagi personil Kehutanan dan masyarakat serta pengadaan peralatan pengendalian kebakaran hutan. Sistem pemadaman kebakaran dan udara dikembangkan dengan pesawat helikopter dan bambu bucket serta 2 unit FFK yang dioperasikan dengan pesawat Transall C-60.



Luas Karhutla Per Provinsi Period 1 Januari – 20 Desember



Perbandingan Luas Karhutla Per Provinsi Rawan 2019 vs 2020

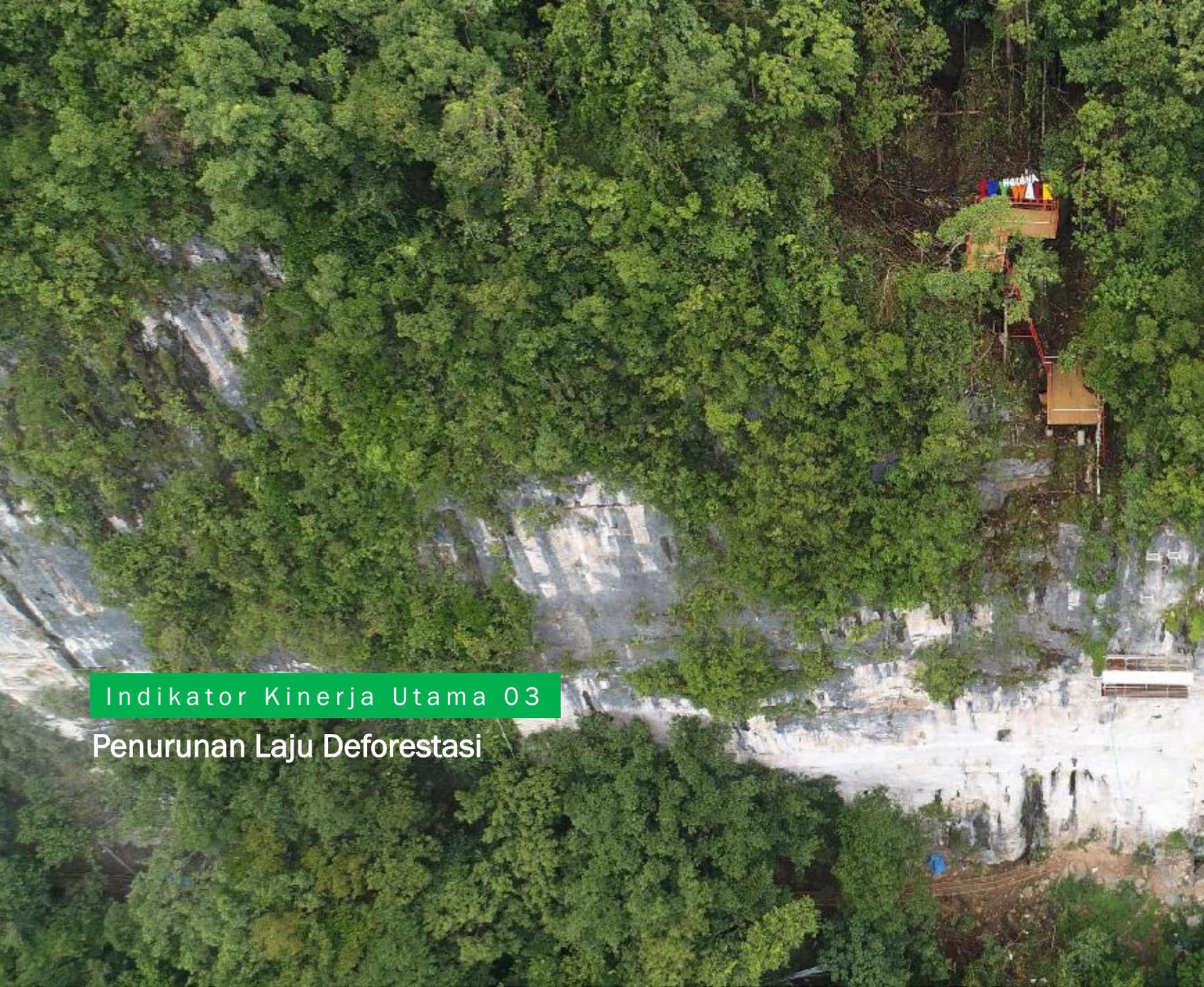


Luas Karhutla (Ha)



Kegiatan pemadaman Karhutla oleh Manggala Agni di wilayah Daops Tinanggea

Foto oleh Samsir



## Indikator Kinerja Utama 03 Penurunan Laju Deforestasi

Lanskap karst di TN. Bantimurung Bulusaraung mengundang wisatawan untuk berkunjung dan swafoto.

Foto oleh Indra Pradana



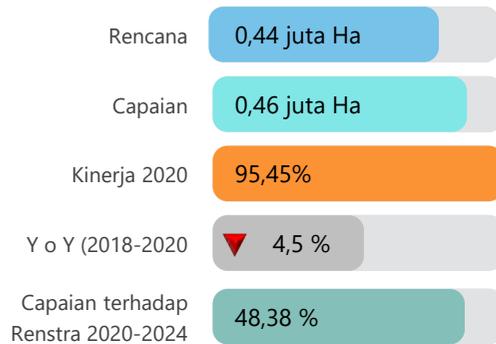
Untuk mengetahui informasi  
tentang Penurunan Laju  
Deforestasi

*Pindai aku!*



## IKHTISAR KINERJA

Laju deforestasi diakui oleh berbagai pihak telah mengalami penurunan yang drastis dari 3,51 juta hektar pada tahun 1996-2000, kemudian 1,09 juta hektar pada tahun 2014-2015, selanjutnya turun lagi menjadi 0,479 juta hektar pada tahun 2016- 2017 hingga menjadi 0,440 juta hektar pada tahun 2017-2018, yang berada di bawah target penurunan deforestasi yang ditetapkan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution (NDC)* yaitu sebesar 0,450 juta hektar sampai dengan tahun 2020 dan akan menjadi 0,325 juta hektar pada tahun 2030.



Pengukuran laju deforestasi dilakukan setiap periode 2 (dua) tahun. Deforestasi bruto mencakup semua perubahan tutupan dari berhutan menjadi non berhutan. Angka Deforestasi netto diperoleh dari angka deforestasi bruto dikurangi reforestasi. Periode pengukuran laju deforestasi yang terakhir adalah di tahun 2018-2019 dengan hasil 0,46 juta Ha/tahun, dimana deforestasi di Kawasan hutan sebesar 0,37 juta Ha dan deforestasi di Kawasan non hutan sebesar 0,09 juta Ha.



*Burung Walik Rawamanu (Ptilinopus dohertyi) sedang bertengger di ranting pohon yang merupakan satwa endemik pulau Sumba.*

*Foto oleh Heri Andri*

## Penurunan Laju Deforestasi

Program pembangunan di segala aspek yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali pembangunan di bidang kehutanan. Perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan sangat mungkin terjadi demi tercapainya target pembangunan.

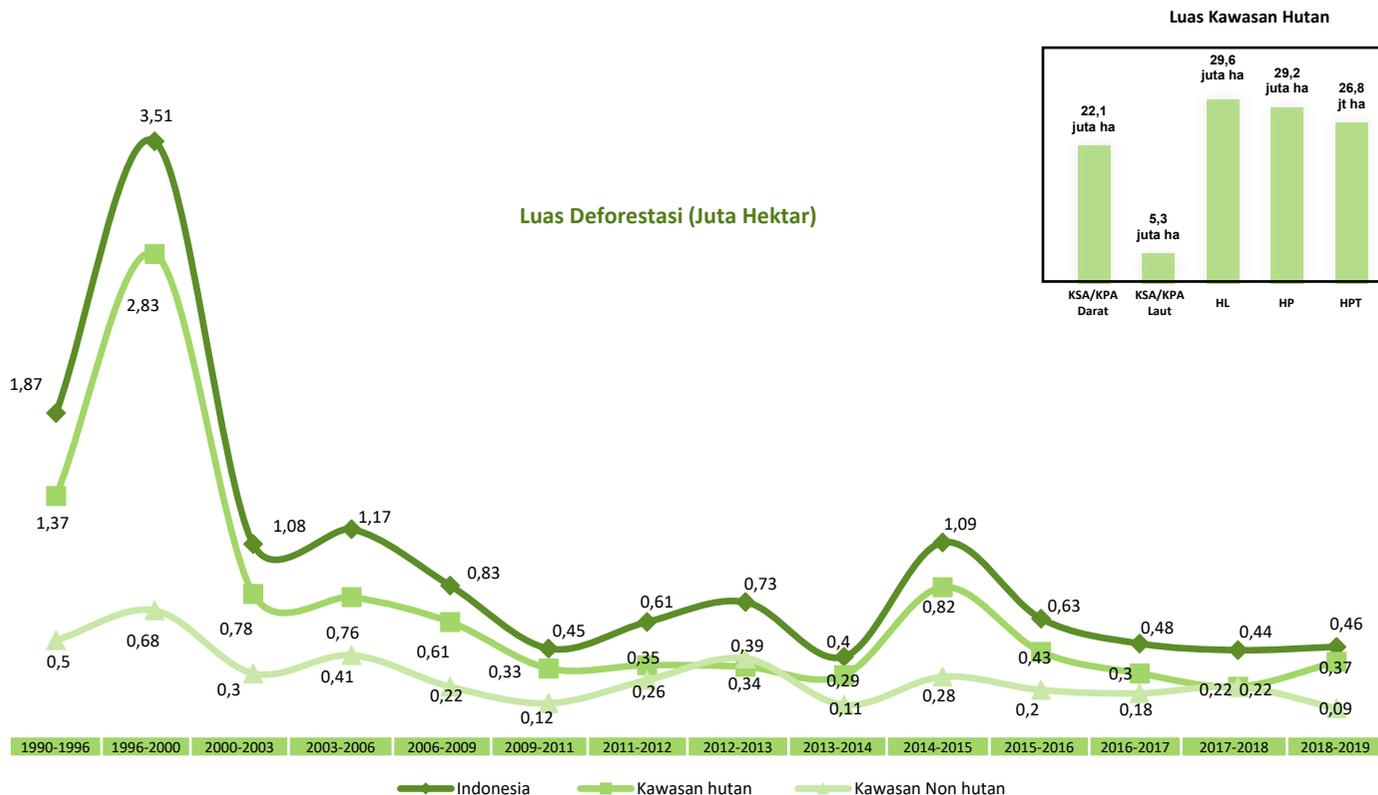
Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan tutupan lahan dari berhutan menjadi tidak berhutan. Begitu juga sebaliknya, dimana Kementerian LHK secara konsisten melaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan untuk meningkatkan tutupan lahan.

Berdasarkan grafik tingkat deforestasi selama beberapa periode terakhir memperlihatkan angka yang relatif menurun.

Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan Kementerian LHK sebagai bentuk *corrective action*, menuai hasil yang signifikan. Berbagai upaya tersebut antara lain penerapan Inpres penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan gambut, pengendalian perubahan iklim, pembatasan perubahan alokasi kawasan hutan untuk sektor non kehutanan (HPK), penyelesaian konflik hutan dan lahan, penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH/TORA),

pengelolaan hutan lestari, perhutanan sosial, serta rehabilitasi hutan.

Deforestasi tertinggi terjadi pada kurun waktu tahun 1996-2000 dan terlihat adanya penurunan pada periode selanjutnya. Pengukuran laju deforestasi dilakukan setiap periode 2 (dua) tahun. Periode pengukuran laju deforestasi yang terakhir adalah di tahun 2018-2019 dengan hasil 0,46 juta Ha/tahun, dimana deforestasi di Kawasan hutan sebesar 0,37 juta Ha dan deforestasi di Kawasan non hutan sebesar 0,09 juta Ha.



Laju deforestasi kembali menurun dari 2015 hingga 2016, deforestasi tahunan mencapai 0,63 juta hektar. Pada tahun 2016 hingga 2017, proses penghitungan deforestasi berdasarkan interpretasi citra yang berasal dari LDCM (Landsat Data Continuity Mission) 8 OLI dan data luas kawasan hutan tahun 2017. Proses ini menunjukkan bahwa selama tahun tersebut, laju deforestasi tahunan menurun lagi menjadi 0,48 juta hektar. Pada tahun 2016 hingga 2017 luasan deforestasi di Kawasan Hutan mencapai 0,30 juta hektar (61,9 persen dari total), menurun dari angka 0,43 juta hektar yang tercatat pada tahun 2015 hingga 2016. Demikian pula pada tahun 2016 hingga 2017 luasnya deforestasi di lahan publik (Kawasan Bukan Hutan) yang diperuntukkan bagi tujuan lain (APL) juga menurun menjadi 0,18 juta hektar (38,1 persen dari total). Dalam kurun waktu 2017 hingga 2018, total deforestasi bersih kembali turun menjadi 0,44 juta hektare, dengan keseimbangan yang relatif sama antara deforestasi di Kawasan Hutan dan APL.

Dalam kurun waktu 2018 hingga 2019, total deforestasi bersih kembali meningkat menjadi 0,46 juta ha. Luas deforestasi di kawasan hutan mencapai 0,37 juta hektare, dan luas deforestasi di kawasan non-hutan 0,09 juta hektare.

Rincian luasan (netto) deforestasi berdasarkan tipe hutan pada tahun 2018 hingga 2019 sebagai bagian dari pemantauan sumber daya hutan, penggunaan penting data tutupan lahan yang terjadi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan beberapa kementerian terkait dan kementerian koordinator termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi baru-baru ini menyelesaikan dua KLHS yang penting, terutama KLHS untuk Ibu Kota Baru Indonesia (selanjutnya disebut 'KLHS Ibu Kota Baru') dan KLHS untuk Program Nasional Pengembangan Kawasan Pangan (selanjutnya *Food Estate*).

Deforestasi Netto (Dalam jutaan hektar)										
Tipe Hutan	kawasan hutan						HPK	Jumlah	APL	Total Akhir
	Kawasan Hutan Permanen					Total				
	HK	HL	HPT	HP						
Deforestasi Netto hutan Alam (A+B)	10,1	20,8	31,6	39,1	101,6	6,1	107,7	79,0	186,7	
A. Hutan Primer	3,8	4,3	5,3	3,2	16,6	0,5	17,1	6,8	23,9	
B. Hutan Sekunder	6,3	16,5	26,3	35,9	85,0	5,7	90,6	72,2	162,8	
Deforestasi Netto (A+B+C)	11,0	21,9	37,8	298,4	369,1	6,7	375,9	86,6	462,5	
C. Hutan Tanaman	1,0	1,1	6,2	259,3	267,5	0,6	268,1	7,6	275,8	

No	Fungsi Kawasan dan Bukan Kawasan Hutan (APL)	Deforestasi Netto		Deforestasi Netto Hutan Alam	
		Luas (ribu Ha)	%	Luas (ribu Ha)	%
1	Kawasan Hutan Konservasi	11,0	2,4	10,0	5,4
2	Kawasan Hutan Lindung	21,9	4,7	20,8	11,2
3	Kawasan Hutan Prooduksi	343,0	74,2	76,9	41,2
	a. HPT	37,8	8,2	31,6	16,9
	b. HP	298,4	64,5	39,1	21,0
	c. HPK	6,7	1,5	6,1	3,3
	Sub Total (a+b+c)	343,0	74,2	76,9	41,2
	Total Kawasan Hutan (1+2+3)	375,9	81,3	107,7	57,7
4	Areal Penggunaan Lain	86,6	18,7	79,0	42,3
	Total (1+2+3+4)	462,5	100,0	186,7	100,0

Berdasarkan pulau/kepulauan besar, angka deforestasi bruto di dalam kawasan hutan tertinggi terjadi di Pulau Sumatera sebesar 249 ribu Ha, dan terendah di Pulau Maluku sebesar 3 ribu Ha. Sedangkan angka deforestasi bruto di luar Kawasan hutan (APL) tertinggi di Pulau Kalimantan sebesar 45,6 ribu Ha dan terendah di Pulau Maluku sebesar 0,6 ribu Ha.

Jika dilihat dari angka deforestasi bruto hutan alam berdasarkan pulau/kepulauan besar, angka tertinggi terjadi di Pulau Sumatera sebesar 43,8 ribu Ha dan terendah di Pulau Jawa sebesar 1,7 ribu Ha. Sedangkan angka deforestasi bruto hutan alam di luar Kawasan hutan (APL) tertinggi di Pulau Kalimantan sebesar 44,5 ribu Ha dan terendah di Pulau Jawa sebesar 0,3 ribu Ha.

**Angka Deforestasi Bruto (ribu Ha)**

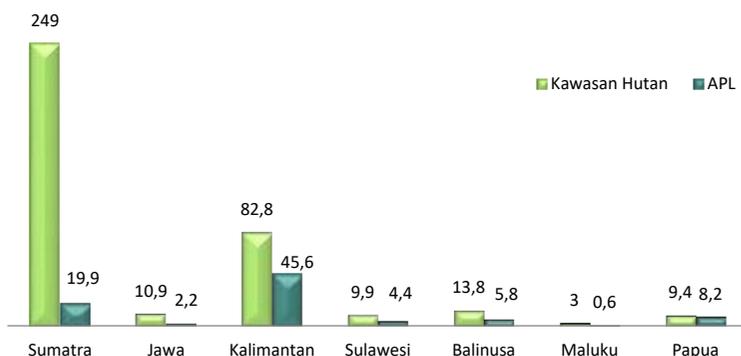


Diagram deforestasi bruto indonesia tahun 2018-2019 (ribu ha) pada 7 kelompok Pulau/Kepulauan besar di dalam dan di luar kawasan hutan

**Angka Deforestasi Bruto Hutan Alam (ribu Ha)**

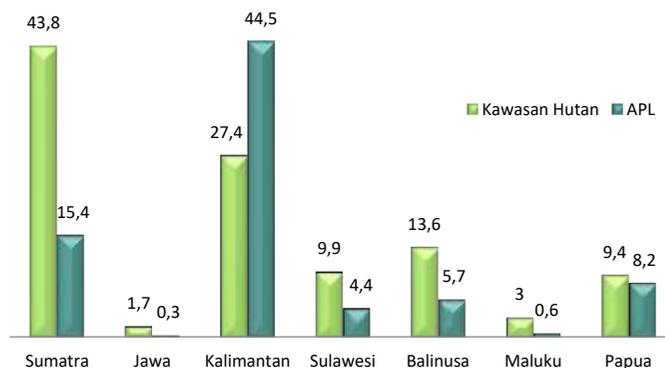


Diagram deforestasi bruto hutan alam tahun 2018-2019 (ribu ha) pada 7 kelompok Pulau/Kepulauan besar di dalam dan di luar kawasan hutan

Reforestasi terjadi karena adanya aktivitas penanaman, baik yang dilakukan dalam upaya produksi hasil hutan kayu, pertumbuhan tanaman (*regrowth*) atau upaya rehabilitasi Hutan dan Lahan. Angka reforestasi tertinggi di dalam Kawasan hutan berdasarkan pulau/kepulauan besar terjadi di Pulau Sulawesi sebesar 1,5 ribu Ha diikuti Pulau Papua sebesar 1 ribu Ha dan Pulau Kalimantan sebesar 0,4 ribu Ha. Sedangkan untuk di luar Kawasan hutan (APL) tidak teridentifikasi reforestasi di tahun 2018-2019.

Angka reforestasi hutan alam tahun 2018-2019 di dalam Kawasan hutan hanya terjadi di Pulau Sulawesi sebesar 1 ribu Ha. Begitu juga di luar Kawasan hutan (APL), angka reforestasi hutan alam hanya terjadi di Pulau Sulawesi sebesar 0,1 ribu Ha. Reforestasi hutan alam tidak teridentifikasi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali Nusra Maluku dan Papua.

**Angka Reforestasi (ribu Ha)**

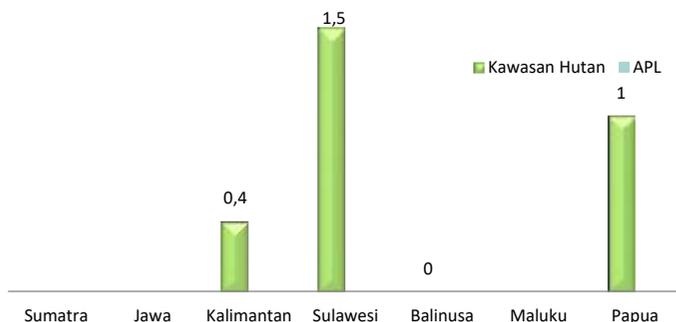


Diagram Reforestasi tahun 2018-2019 (ribu Ha) pada 7 (tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan

**Angka Reforestasi Hutan Alam (ribu Ha)**

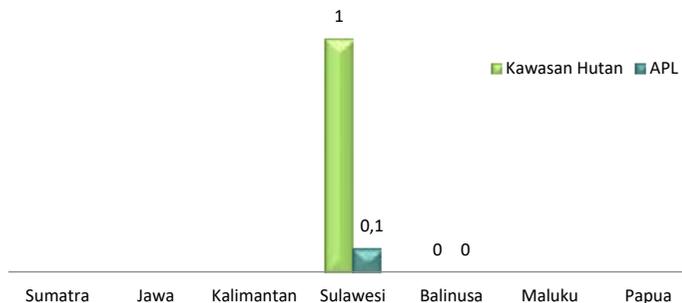
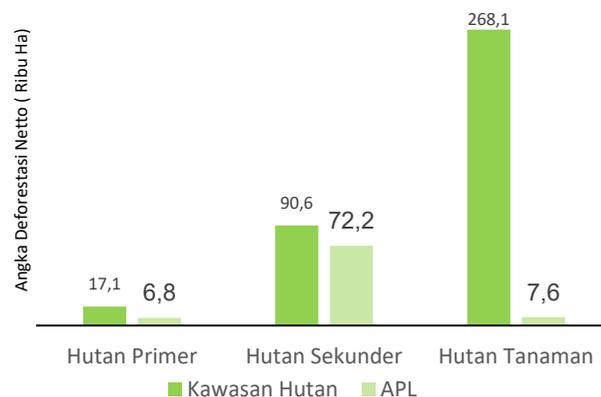
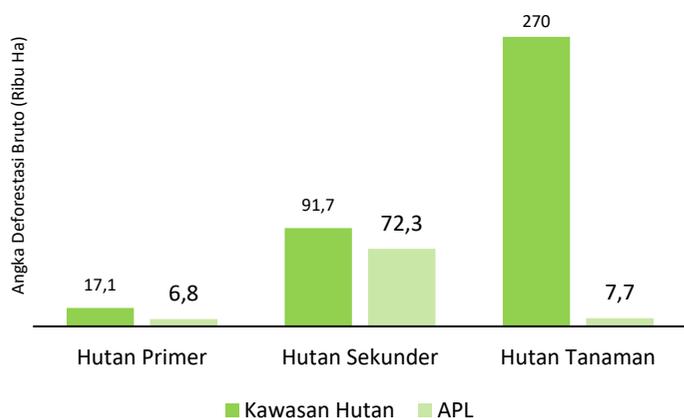


Diagram Reforestasi Hutan Alam tahun 2018-2019 (ribu Ha) pada 7 (tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan

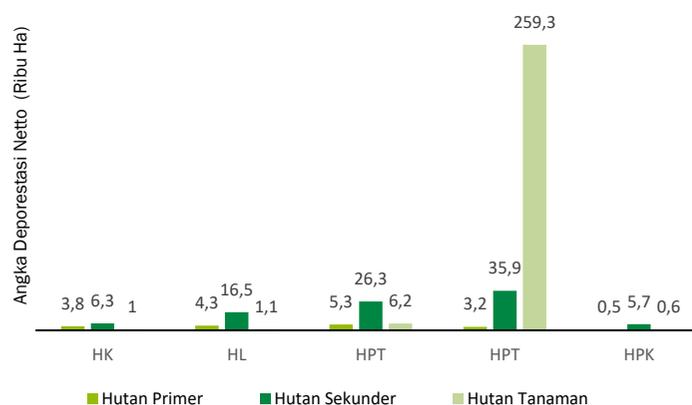
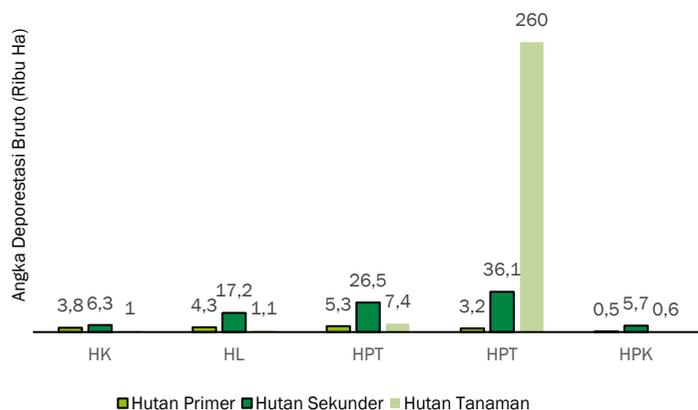
## Deforestasi Bruto dan Netto Indonesia Tahun 2018 -2019 (Ribu ha)

Deforestasi bruto mencakup semua perubahan tutupan dari berhutan menjadi non berhutan. Angka deforestasi bruto yang terjadi di dalam Kawasan hutan sebesar 378,8 ribu Ha atau 81,4% dari total deforestasi bruto 465,6 ribu Ha, sedangkan di luar Kawasan hutan (APL) sebesar 86,8 ribu Ha 18,64% dari total deforestasi bruto. Deforestasi bruto di dalam Kawasan hutan paling tinggi terjadi pada Hutan Tanaman sebesar 270 ribu Ha, sedangkan di luar Kawasan hutan paling tinggi terjadi di hutan sekunder sebesar 72,3 ribu Ha.

Angka Deforestasi netto diperoleh dari angka deforestasi bruto dikurangi *reforestasi*. Deforestasi netto yang terjadi di dalam Kawasan hutan sebesar 375,8 ribu Ha atau 81,27% dari total deforestasi netto 462,4 ribu Ha, sedangkan di luar Kawasan hutan (APL) sebesar 86,6 ribu Ha 18,73% dari total deforestasi netto. Deforestasi netto di dalam Kawasan hutan paling tinggi terjadi pada Hutan Tanaman sebesar 268,1 ribu Ha, sedangkan di luar Kawasan hutan paling tinggi terjadi pada hutan sekunder sebesar 72,2 ribu Ha



## Diagram Deforestasi Bruto dan Netto Indonesia Tahun 2018 -2019 (Ribu ha) pada Hutan Primer, Sekunder dan Tanaman di Luar Kawasan Hutan





*Pelajar sekolah dasar melaksanakan kegiatan bersih pantai di TN. Taka Bonerate. Kegiatan bersih pantai ini merupakan salah satu upaya untuk menurunkan laju deforestasi.*

*Foto oleh Asri.*

# PENYERAHAN PENGHARGAAN PENGURANGAN SAMPAH OLEH PRODUSEN

JAKARTA, 9 JUNI 2020



Indikator Kinerja Utama 04

Indeks Kinerja Pengelolaan  
Sampah (IKPS)

Penyerahan penghargaan atas kinerja dalam pengurangan sampah oleh Ibu Siti Nurbaya Menteri LHK.

Foto oleh M. Luthfi

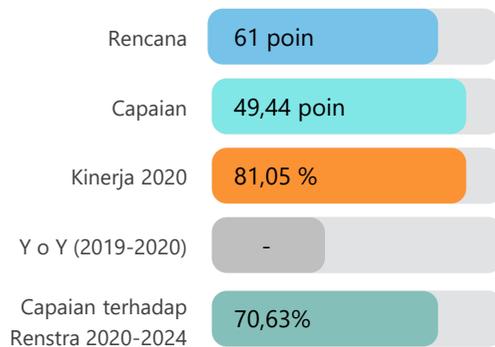


Untuk mengetahui  
dokumen pedoman  
perhitungan IKPS  
silahkan memindai  
QR code disamping  
*Pindai aku!*



## IKHTISAR KINERJA

Kinerja pengelolaan sampah sangat menentukan wajah suatu kota/kabupaten dan provinsi hingga akhirnya penilaian terhadap kinerja pengelolaan sampah secara nasional. Semakin baik sistem kinerja pengelolaan persampahan, maka semakin bersih dan sehat kota dan sebaliknya semakin buruk kinerja pengelolaan sampah, maka semakin buruk dan tidak sehat kota tersebut.



\* Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah mulai diukur pada tahun 2020

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Nasional merupakan rerata dari IKPS masing-masing Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Capaian target IKPS dihitung menggunakan data capaian target Pengurangan dan Penanganan Sampah Kabupaten/Kota berdasarkan Laporan Neraca Kebijakan dan Strategi Daerah Pengurangan dan Penanganan Sampah yang telah disusun oleh masing-masing daerah. Pada tahun 2020 IKPS sebesar 49,44 poin dimana angka ini memenuhi 81,05% dari target 61 poin. Sedangkan dilihat dari target Renstra 2020-2024 sudah mencapai 70,63% dari target 70 poin.

*Peresmian operasional pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.*

*Foto oleh Farid Fauzan*

# Peresmian Operasional Menjadi Bahan Bakar Yan



# Rasionalisasi Pengolahan Sampah Bakar Alternatif (*Refuse Derived Fuel*) yang Ramah Lingkungan

Cilacap 21 Juli 2020



## Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik tentang pencapaian pengelolaan sampah, dan juga sebagai instrument untuk mengukur keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola sampah.

Entitas pengukuran IKPS dimulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional baik yang berkenaan dengan lingkup pengelolaan (penanganan dan pengurangan sampah) maupun yang berkenaan dengan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaannya. Dari jumlah 514 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, dikelompokkan menjadi 4 kategori Kabupaten/Kota yaitu Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang dan Kota kecil.

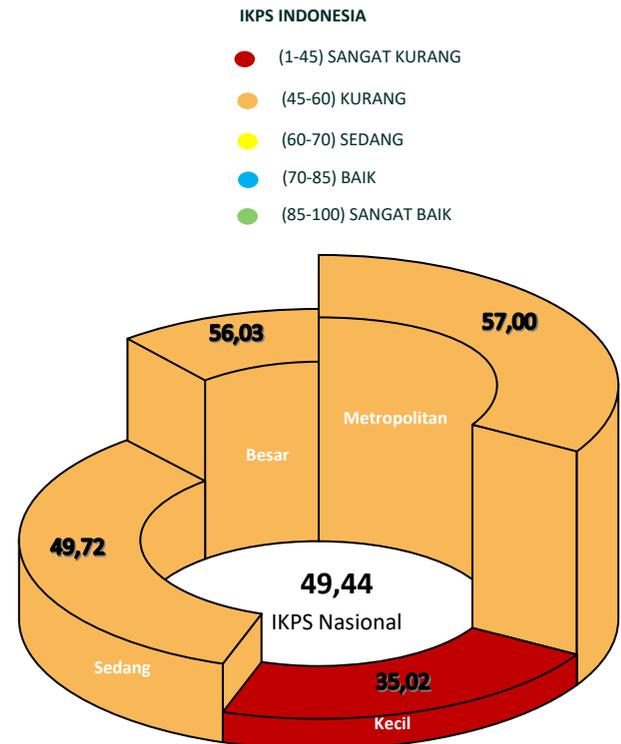
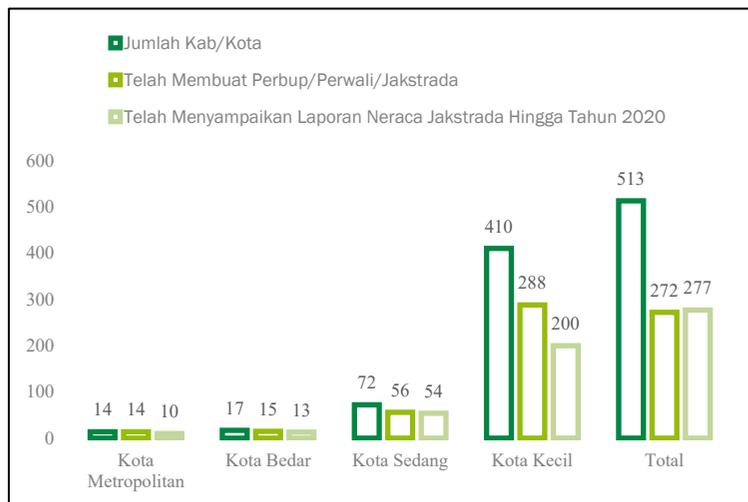
Jumlah kab/kota yang telah menyampaikan laporan neraca Jakstrada tahun 2020 sebanyak 277 kab/kota.

Hasil penghitungan nilai IKPS untuk kategori Kota Metropolitan sebesar 57 poin, Kota Besar 56,03 poin, Kota sedang 49,72 poin, kota kecil 35,02 poin. Berdasarkan nilai per kategori Kabupaten/Kota tersebut, maka diperoleh nilai rata-rata Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional adalah sebesar 49,44 artinya capaian target IKPS Tahun 2020 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KLHK tahun 2020 sebesar 61 poin.

Apabila dilihat berdasarkan nilai kategori, IKPS Nasional termasuk ke dalam kategori "Kurang".

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah tahun 2020 sebesar 49,44 poin menurun 2,87% YoY dimana pada tahun 2019 capaian IKPS sebesar 50,9 poin.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target 5 (lima) tahun Renstra sebesar 70 poin maka diperoleh capaian kinerja sebesar 70,63%.



# Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah

**Bank Sampah Induk**  
(Kab Kubu Raya, dan Kota Banda Aceh)

**Rumah Kompos**  
(Kab Purwakarta, Kab. Cianjur)



**Pusat Daur Ulang**  
(Kab. Morowali, Kab. Bengkulu Utara, Kab Purwakarta)

**Biogester**  
(Kab. Cianjur, Kab. Sumedang)

## Sirkular Ekonomi Pengelolaan Sampah



### PLASTIC TAR ROAD

Mengolah *low value plastics* menjadi bahan campuran aspal jalan raya untuk meningkatkan kekuatan aspal dengan biaya yang lebih murah. Target: 77 Lokasi (setara 700 km jalan) . Mendaur ulang setidaknya 2100 ton sampah kantong plastik.



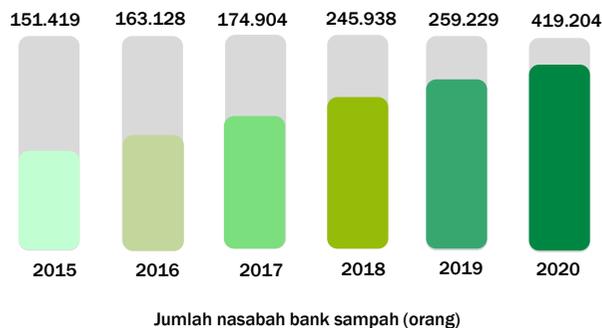
### WASTE TO ENERGY

Memusnahkan sampah sembari mendapatkan tenaga listrik dari hasil pembakaran sampah. Target di 12 kota. Diperkirakan akan mengolah 16 ribu ton plastik per hari.

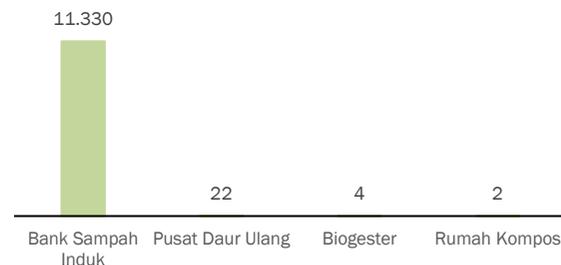


### PLASTIC TO FUEL

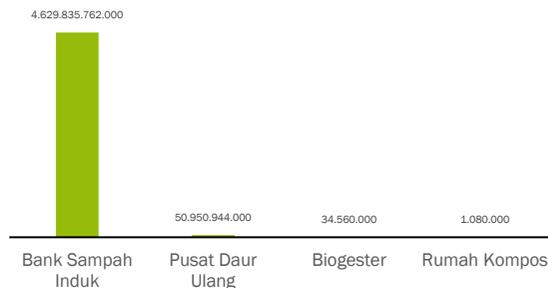
Mengembalikan plastik ke bentuk asalnya dengan mengolah *low value plastics* menjadi bahan bakar minyak. Target di 2 kota dengan target mengolah 100.000 ton plastik /tahun



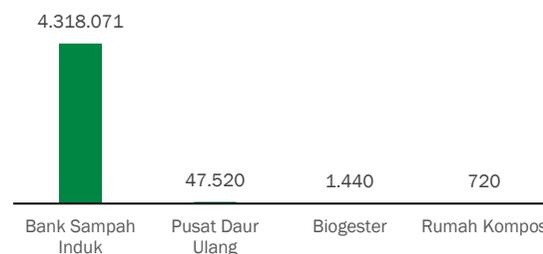
Jumlah Sarana Pengelolaan Sampah (Unit)



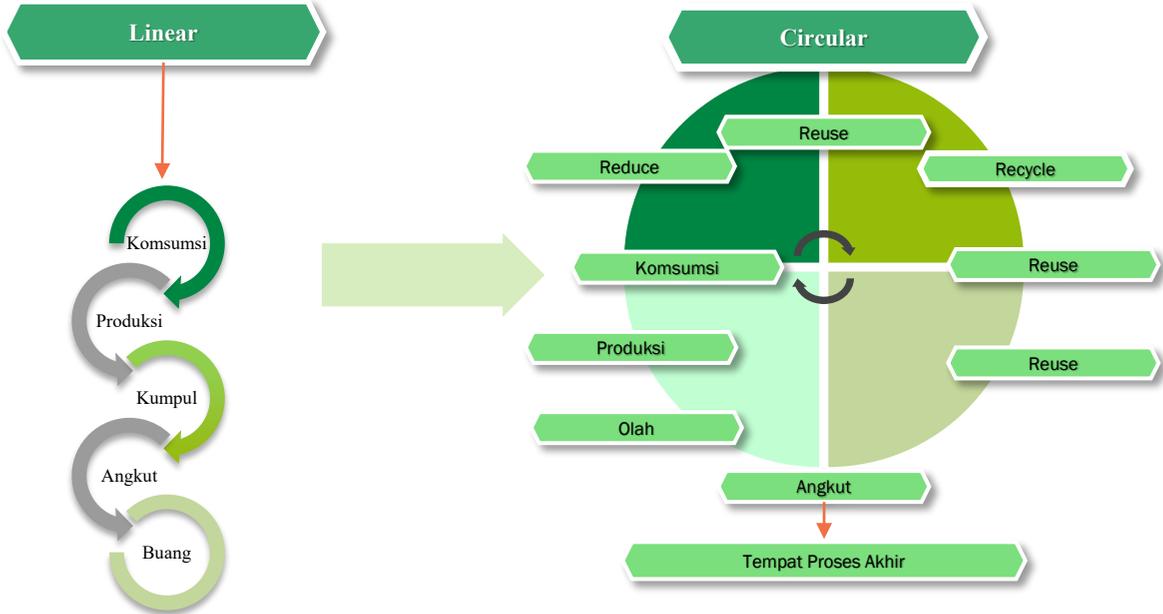
Perputaran Uang (Rupiah/Tahun)



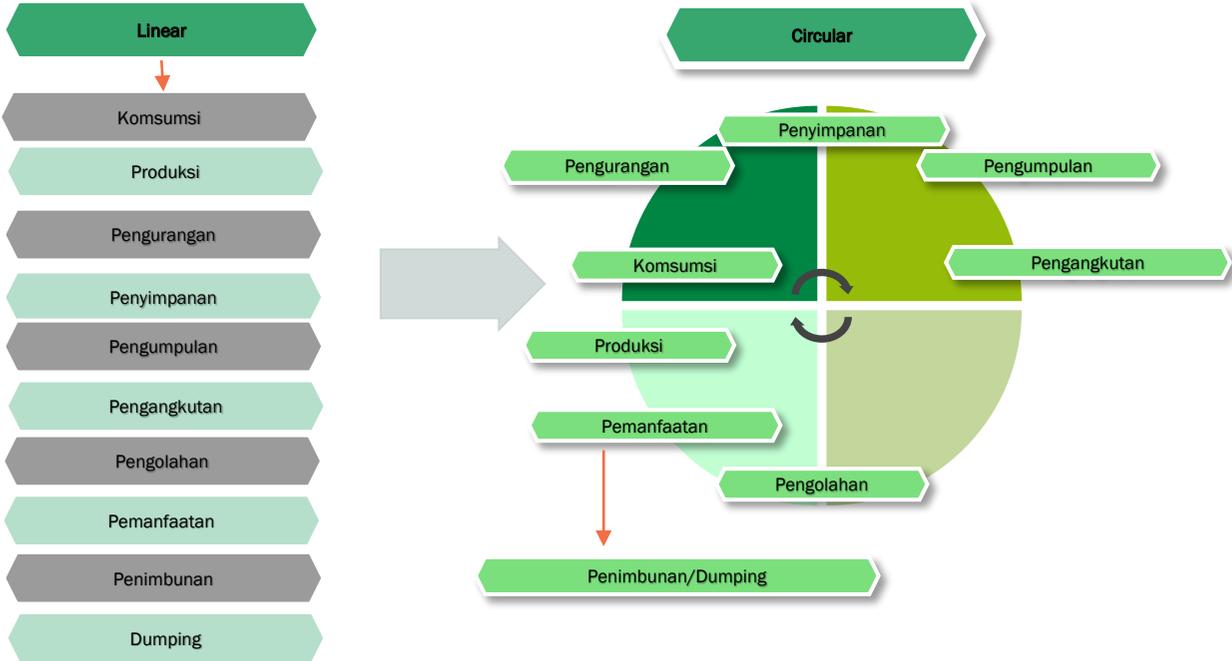
Sampah yang Dikelola (Ton/Tahun)



# Implementasi Sirkular Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat



## Penerapan *Cradle to Cradle* dengan meningkatkan pemanfaatan limbah B3



# Sirkular Ekonomi Dalam Pemanfaatan Limbah B3



**Pemanfaatan di Industri Semen**

- FaBa sebagai *Alternative Material* pembuatan klinker
- Kapasitas Pemanfaatan 6 juta ton/tahun
- Menghemat biaya Produksi semen ± Rp. 118 Milyar

**Pemanfaatan Sebagai Produk Precast: Batako, Paving Block Dan Yang Sejenis**

- FaBa mendistribusi **Semen dan Pasir**
- Kapasitas Pemanfaatan : ± 250.000 ton/tahun
- Menghemat belanja bahan baku semen dan pasir hingga 70% dari biaya produksi

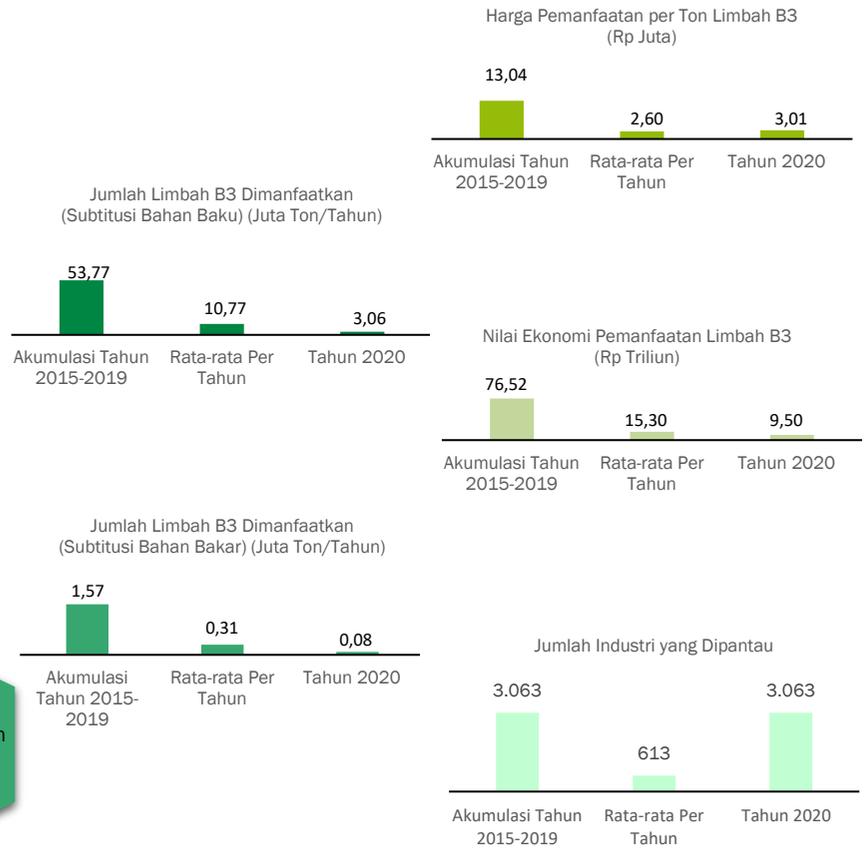
**Pemanfaatan di Bekas Lubang Tambang**

- FaBa mendistribusi lapisan Non Acid Forming untuk mencegah terjadinya air asam tambang
- Kapasitas Pemanfaatan 3 juta ton/lubang tambang
- Menghemat biaya pengelolaan LB3 ± Rp. 2 Milyar

**Pemanfaatan di Industri Batching Plant**

- Fly Ash mendistribusi **Semen**
- Kapasitas Pemanfaatan ± 1.050.000 ton/tahun
- Menghemat belanja bahan baku semen sebesar 10-12 Milyar/tahun dari biaya produksi

## Manfaat Reaktor Pemanfaatan Limbah Biomassa Menjadi Energi



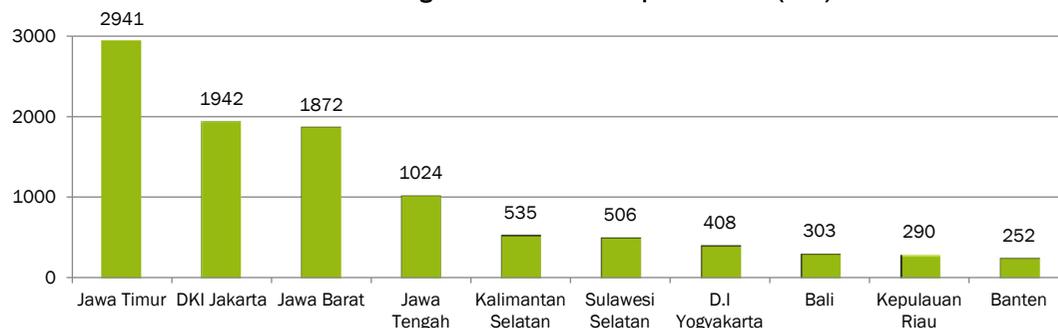
## Bank Sampah

Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat akan isu sampah. Bank sampah tersebar sebanyak 11.330 unit di beberapa kab/kota di Indonesia dengan jumlah nasabah 419 ribu orang dengan perputaran uang sebanyak 54 miliar rupiah/tahun. Dengan jumlah tersebut, sampah yang terkelola dari bank sampah hingga tahun 2020 cukup signifikan yaitu mencapai 4 juta ton/tahun.

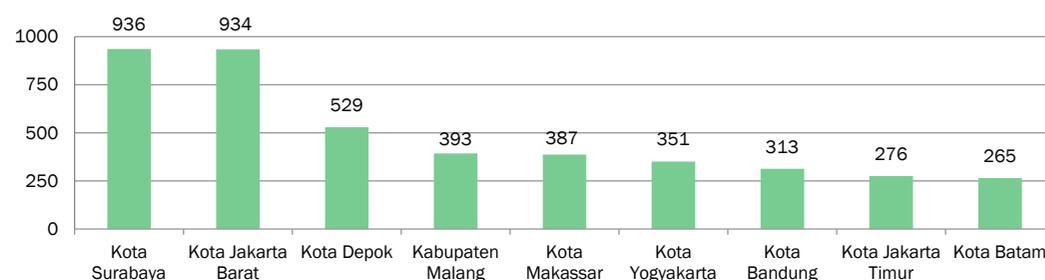
Sebagai bentuk upaya mengendalikan sampah di daerah aliran sungai atau DAS, KLHK memberikan bantuan fasilitas pengelolaan sampah di kabupaten/kota yang dialiri DAS Citarum berupa 10 unit Pusat daur ulang sampah, 3 unit biodigester dan 9 unit bank sampah induk.

Jumlah Bank Sampah	<b>11.330</b>
Jumlah Nasabah	<b>419.204</b>
Sampah Terkelola (kg/bulan)	<b>431.807.101</b>
Perputaran Uang/Bulan (Rp)	<b>4.503.843.611</b>
Perputaran Uang Per Tahun (Rp)	<b>54.046.123.329</b>
Keaktifan	<b>37,18%</b>

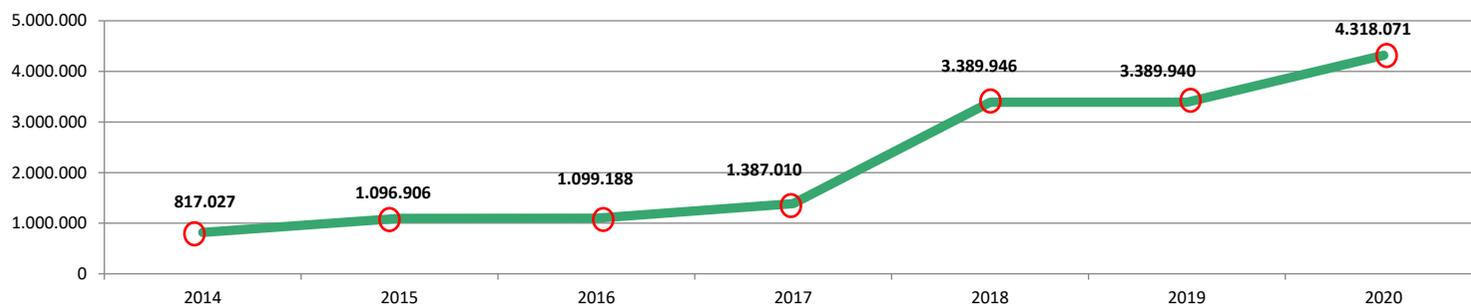
10 Provinsi dengan Jumlah bank sampah terbesar (Unit)



Kabupaten/Kota dengan Jumlah Bank Sampah terbesar (Unit)



Sampah Yang Terkelola (Ton/Tahun)





*Ibu Direktur Jenderal PSLB3, Rosa Vivien Ratnawati, menyerahkan bantuan motor sampah kepada Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia, Sudirman Said. Motor pengangkut sampah ini adalah motor baru yang dimodifikasi untuk turut melakukan disinfeksi dalam rangka pencegahan penularan virus Covid-19.*

*Foto oleh Firli Azhar*

# Penyelesaian Lahan Terkontaminasi

## Sebaran Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi



### Kabupaten / kota

1. Kab. Deli Serdang	12. Kab. Banyuasin	23. Kab. Bekasi	34. Kab. Kota Kartanegara
2. Kab. Batubara	13. Kab. Muara Enim	24. Kab. Kawang	35. Kab. Kulai Timur
3. Kab. Rokan Hilir	14. Kota Palembang	25. Kab. Purwakarta	36. Kab. Jeneponto
4. Kota Dumai	15. Kab. Lampung Tengah	26. Kab. Bandung	37. Kab. Barru
5. Kab. Bengkalis	16. Kab. Lampung Timur	27. Kab. Majalengka	38. Kab. Konawe
6. Kab. Siak	17. Kab. Serang	28. Kab. Indramayu	39. Kab. Bonebolango
7. Kab. Pelalawan	18. Kab. Tangerang	29. Kab. Demak	40. Kab. Minahasa Selatan
8. Kab. Kampar	19. Kota Tangerang	30. Kab. Kudus	41. Kota Bitung
9. Kota Padang	20. Kota Jakarta Timur	31. Kab. Mojokerto	42. Kab. Sorong
10. Kab. Tanjung J.T	21. Kota Depok	32. Kota Surabaya	43. Kota Batam
11. Kab. Musi Banyu A.	22. Kab. bogor	33. Kota Balikpapan	44. Kabupaten Bintan

Rekapitulasi Data SSPLT per sektor	2017		2018		2019		2020	
	Tonase (Ton)	Luas Lahan (M2)						
Manufaktur	3.600,00	1.958,40	11.481,99	13.538,60	371.013,88	61.736,03	2.437,78	7.626,50
Agroindustri	621.082,40	40.000,00	0	0	5.324,18	1.865,00	46.746,20	10.676,79
Jasa	6.755,00	2.250,00	780,51	2.730,00	14.546,31	3.196,49	3.580,98	5.585,28
Energi	0	0	3.816,00	1600,00	876,66	322,54	76.520,00	33.035,78
Migas	129.210,16	272.130,36	461.496,18	455.068,13	377.409,14	389.151,72	542.859,76	485.855,28
Non Institusi	139,56	1.900,00	503,09	720,00	2.266,90	949,30	1.896,51	2.416,20
<b>Total</b>	<b>762.804,12</b>	<b>318.238,76</b>	<b>480.095,77</b>	<b>473.656,73</b>	<b>773.456,07</b>	<b>457.221,08</b>	<b>676.061,23</b>	<b>545.195,83</b>

## Regulasi Pendukung Penerapan Sirkular Ekonomi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi sampah plastik dan Limbah B3. Salah satunya dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Hal ini dinilai dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan proses pengelolaan sampah dan limbah B3. Ekonomi sirkular digambarkan sebagai jalan mengatasi persoalan kerusakan lingkungan. Ekonomi sirkular merupakan sebuah alternatif untuk ekonomi linier tradisional

dengan menjaga agar sumber daya dapat dipakai selama mungkin, menggali nilai maksimum dari penggunaan, kemudian memulihkan dan meregenerasi produk dan bahan pada setiap akhir umur layanan. Selain itu, ekonomi sirkular juga memungkinkan satu negara tidak ketergantungan bahan baku terhadap negara lain akibat menipisnya stok. Selain itu, ekonomi sirkular bermanfaat untuk membantu mengurangi dampak lingkungan

akibat penggunaan bahan baku dan menurunkan emisi karbondioksida. Penerapan sirkular ekonomi ini dilakukan oleh KLHK sebagai cara mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah. KLHK memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, terutama kabupaten/kota untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah.

PP No.101 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

PermenLHK No. P.12 tentang Penyimpanan LB3

PermenLHK No. P.56 tentang Fasyankes

PermenLHK No. P. 18 tentang Pemanfaatan LB3

PermenLHK No. 10 tentang Tata Cara Uji Karakteristik LB3

PermenLHK No. P. 20 tentang Perubahan P. 12/2018 tentang Tata Cara Dumping LB3

Pengelolaan Limbah B3

Sirkular Ekonomi

PP.27 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

PermenLHK tentang Pengelolaan Abu Dasar dan Abu Terbang Hasil Pengolahan Sampah Secara Ternal

Permen LHK No P.75 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen

PermenLHK tentang Perubahan PermenLH tentang Bank Sampah serta Kegiatan 3R

SKB 3 Menteri dan Kapolri terkait Roadmap Penyediaan Bahan Baku Scrap Kertas dan Plastik dari Dalam Negeri



Wakil Menteri LHK meresmikan Bank Sampah Induk di Kabupaten Sumedang

Foto oleh M. Ryan Sandria.



## Indikator Kinerja Utama 05

### Luas Lahan Dalam Das Yang Dipulihkan Kondisinya

Menteri LHK memastikan kondisi dan ketersediaan bibit dalam rangka program rehabilitasi hutan dan lahan di Jawa Barat dan Banten. Selama tahun 2020, kawasan hutan dan lahan seluas 112.973 hektare berhasil direhabilitasi. Program rehabilitasi dilakukan untuk mengurangi laju deforestasi dan dampak perubahan iklim serta menurunkan risiko bencana hidrologis pada akhir dan awal tahun

Foto oleh Raysapta

## IKHTISAR KINERJA

Pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan merupakan hal penting dalam pengelolaan DAS karena kesejahteraan masyarakat dan kelestarian ekosistem DAS adalah cita-cita yang harus diwujudkan bersama



\*) Capaian kinerja maksimal 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat

Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya pada tahun 2020 seluas 112.973 ha. Capaian kinerja tahun 2020 sebesar 201,73 % dengan target 56.000 ha. Capaian terhadap renstra yaitu 12,14%. Lahan dalam DAS yang dipulihkan ini merupakan 94,263,5 ha di luar kawasan hutan dan 18.709,5 ha di dalam kawasan. Luas kawasan hutan terdiri dari kebun bibit rakyat, kebun bibit desa, persemaian permanen, bibit produktif, rehabilitasi DAS dan reklamasi. Sedangkan, penanaman mangrove terdiri dari penanaman mangrove reguler dan PKPM.





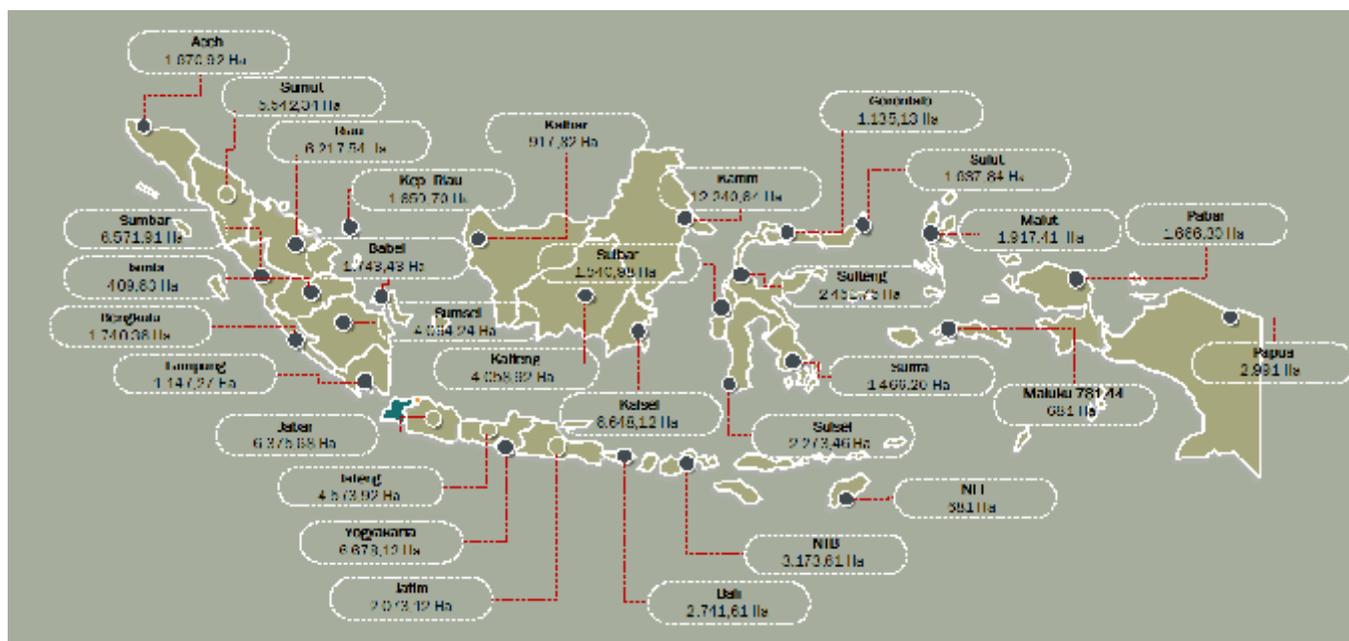
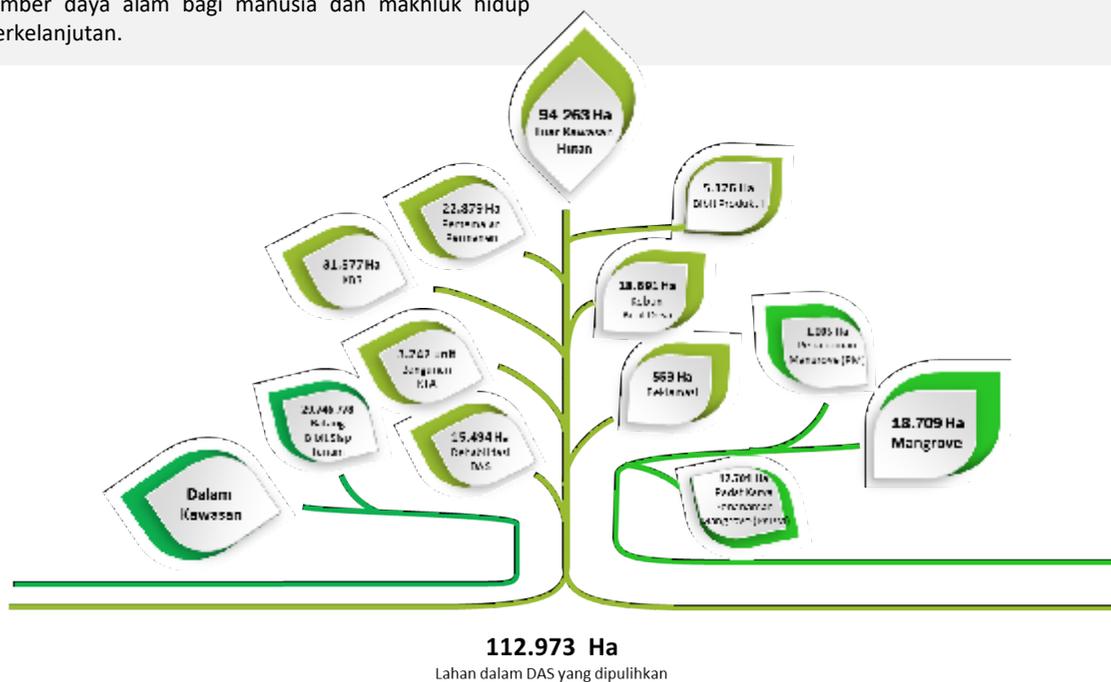
Seorang pegawai persemaian modern sedang melakukan penyulaman bibit tanaman. Pemeliharaan bibit menjadi kunci penting keberhasilan produksi bibit di persemaian modern. Persemaian modern diperlukan untuk menunjang pembangunan calon Ibukota Negara yang berkonsep ramah lingkungan. Persemaian modern ini terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Foto oleh Raysapta

## Luas Lahan Dalam DAS Yang Dipulihkan Kondisinya

Indonesia memiliki 17.076 DAS dengan luas daerah tangkapan air 189.278.753 hektare, yang tersebar di 7 pulau-pulau besar Indonesia yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.

DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kuantitas, kualitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan yang perlu dipertahankan adalah yang masih berfungsi sebagaimana mestinya.



## Lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya

No	Provinsi	Lahan dalam DAS yang dipulihkan (Ha)						JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	DI Aceh	5.594	1.830	4.673	4.109	14.218	1.670	32.094
2	Sumatera Utara	5.348	6.753	7.232	8.016	17.332	4.250	48.931
3	Riau	2.178	4.386	5.456	5.181	14.824	1.631	33.656
4	Sumatera Barat	5.136	6.648	4.528	6.245	1.551	2.407	26.515
5	Kep. Riau	890	398	4.329	1.012	400	8.386	15.415
6	Jambi	3.279	3.490	5.540	3.462	1.000	2.377	19.148
7	Bengkulu	4.577	6.308	4.628	5.841	771	503	22.628
8	Bangka Belitung	466	1.953	4.523	1.667	575	1.743	10.927
9	Sumatera Selatan	4.367	9.311	6.073	7.456	17.679	4.423*	49.309
10	Lampung	14.273	12.411	5.370	9.594	16.500	1.147	59.295
11	Banten	-	7	3.943	2.862	9	-	6.821
12	DKI Jakarta	-	-	3.943	-	-	-	3.943
13	Jawa Barat	10.484	19.853	29.180	19.584	18.291	13.607	110.999
14	Jawa Tengah	30.686	20.805	8.001	16.958	12.057	11.140	99.647
15	DI Yogyakarta	4.866	52	6.728	6.066	-	4.656	22.368
16	Jawa Timur	21.269	13.233	8.486	12.349	19.368	4.548	79.253
17	Kalimantan Barat	4.730	5.397	5.447	5.719	11.000	3.044	35.337
18	Kalimantan Tengah	1.510	3.539	4.424	4.245	475	4.724	18.917
19	Kalimantan Utara	52	-	3.943	-	-	-	3.995
20	Kalimantan Timur	2.417	4.074	5.343	3.977	3.750	8.129	27.690
21	Kalimantan Selatan	2.341	18.732	6.508	6.762	8.300	4.957	47.600
22	Bali	5.687	4.259	4.913	4.706	750	1.823	22.138
23	Nusa Tenggara Barat	6.712	6.220	4.748	5.727	3.750	4.126	31.283
24	Nusa Tenggara Timur	9.932	8.562	4.553	7.927	6.000	1.187	38.161
25	Sulawesi Utara	6.792	4.287	4.388	5.374	450	1.525	22.816
26	Gorontalo	3.208	3.556	4.357	4.020	12.375	3.269	30.785
27	Sulawesi Tengah	2.290	3.485	4.413	3.665	200	5.893	19.946
28	Sulawesi Barat	6.136	3.472	4.566	3.470	-	2.041	19.685
29	Sulawesi Tenggara	9.381	3.658	4.974	3.642	375	2.993	25.023
30	Sulawesi Selatan	12.323	11.385	5.693	10.469	19.600	1.464*	60.934
31	Maluku Utara	3.420	978	4.361	1.339	500	1.917	12.515
32	Maluku	445	2.599	4.518	1.969	2.150	964	12.645
33	Papua Barat	3.741	1.920	5.281	2.179	350	1.716	15.187
34	Papua	5.922	4.784	5.916	2.235	1.050	701,00	20.608
<b>JUMLAH</b>		<b>200.452</b>	<b>198.345</b>	<b>200.979</b>	<b>187.827</b>	<b>207.650</b>	<b>112.973</b>	<b>1.108.227</b>

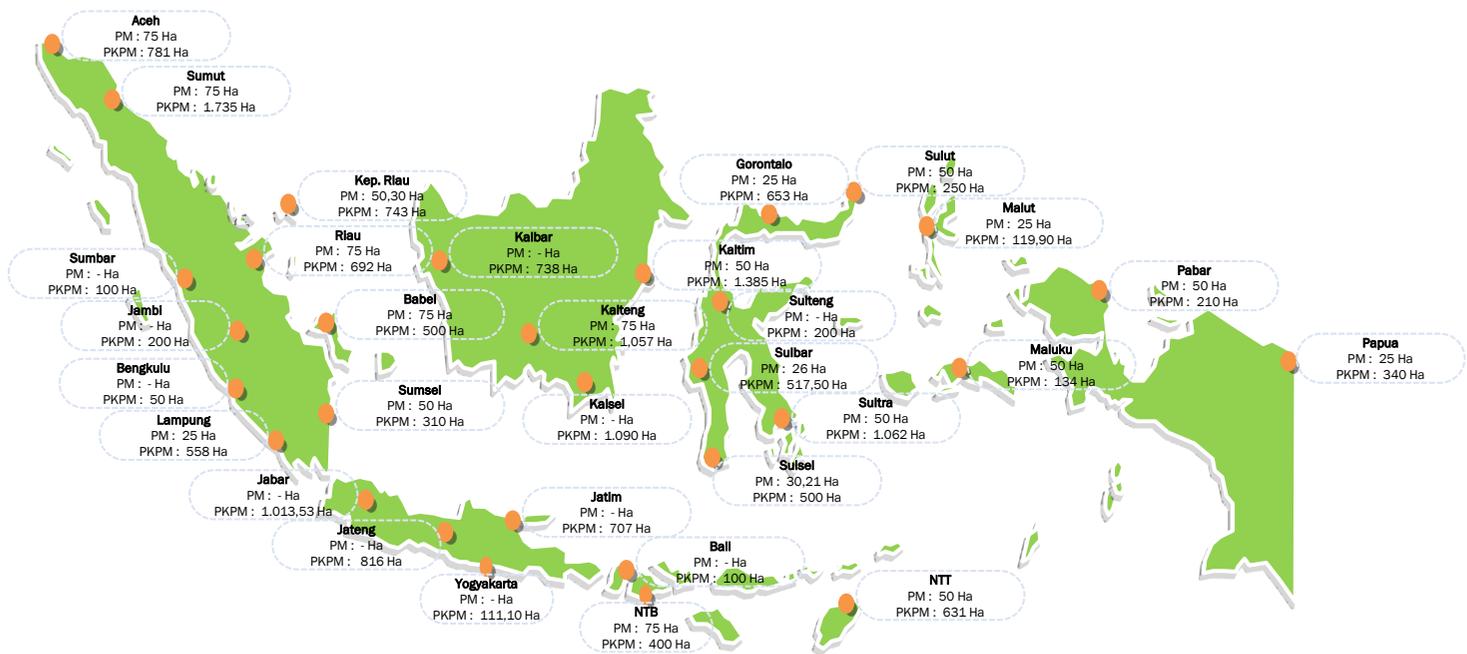
\* Data sudah termasuk BPTH Wilayah 1 dan 2



*Mangrove membentang di pesisir TN. Rawa Aopa Watumohai. Ekosistem ini bermanfaat untuk menjaga peri kehidupan masyarakat dalam hal penyediaan sumber pangan, melindungi pemukiman dari badai/angin laut, mencegah intrusi air laut, dan juga menyerap karbon.*

*Foto oleh Indra Anggrana Wijaya*

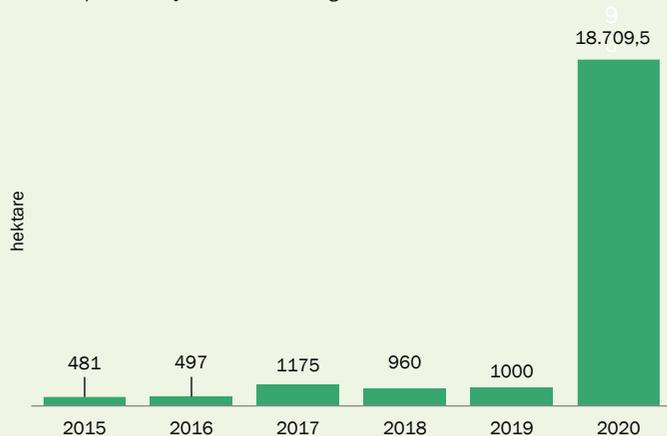
## Sebaran Penanaman Mangrove



PM Penanaman Mangrove = 1.005,51 hektare

PKPM : Padat Karya Penanaman Mangrove = 17.704,03 hektare

Capaian Kinerja Penanaman Mangrove dan PKPM Tahun 2015-2020



Penanaman mangrove di seluruh Kawasan pesisir Indonesia merupakan salah satu upaya pemulihan daya dukung DAS di bagian hilir. Program ini tersebar di 34 provinsi Indonesia dengan target seluas 15.000 ha. Keberhasilan program ini tercapai dengan realisasi luas lahan yang ditanami sebesar 18.709,5 ha.

Penanaman mangrove ini juga bertujuan untuk memulihkan ekonomi nasional terutama di daerah pesisir dengan membentuk program Padat Karya Penanaman Mangrove (PPKM). Program ini berhasil melakukan penanaman mangrove seluas 17.704,03 ha.

Sebaran penanaman mangrove terbesar terdapat di provinsi Kalimantan Timur dengan luasan 1.435 ha. Penanaman mangrove di lahan 50 ha dilakukan melalui program rehabilitasi mangrove dan 1.385 ha dilakukan melalui program PPKM.

## Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM)

Program PKPM ini bertujuan untuk memberi kesempatan masyarakat untuk mengembalikan daya beli dan menggulirkan aktivitas perekonomian. Masyarakat terlibat secara aktif dalam melakukan pembibitan, penanaman mangrove, dan pemeliharaan tanaman. Untuk menjadikan pesisir sebagai tempat pemulihan ekonomi nasional.

Terdapat sekitar 3,3 juta ha luasan ekosistem mangrove di Indonesia. Target dari kegiatan padat karya penanaman mangrove adalah luas tanaman hasil rehabilitasi mangrove seluas 15.000 ha. Selain itu, sasaran PKPM memiliki total target kelompok tani pelaksana sebanyak 863 kelompok dengan total pembukaan rekening sejumlah 35.000 buku.

Realisasi luasan lahan yang berhasil ditanami mangrove yaitu sebesar 17.704,03 ha dan sebanyak 40.984 buku rekening yang terdiri dari 39.970 rekening perorangan dan 1.014 rekening kelompok telah dibuka. Nilai capaian program padat karya penanaman mangrove (PKPM) secara keseluruhan memiliki nilai capaian luas penanaman sebesar 116,5%.

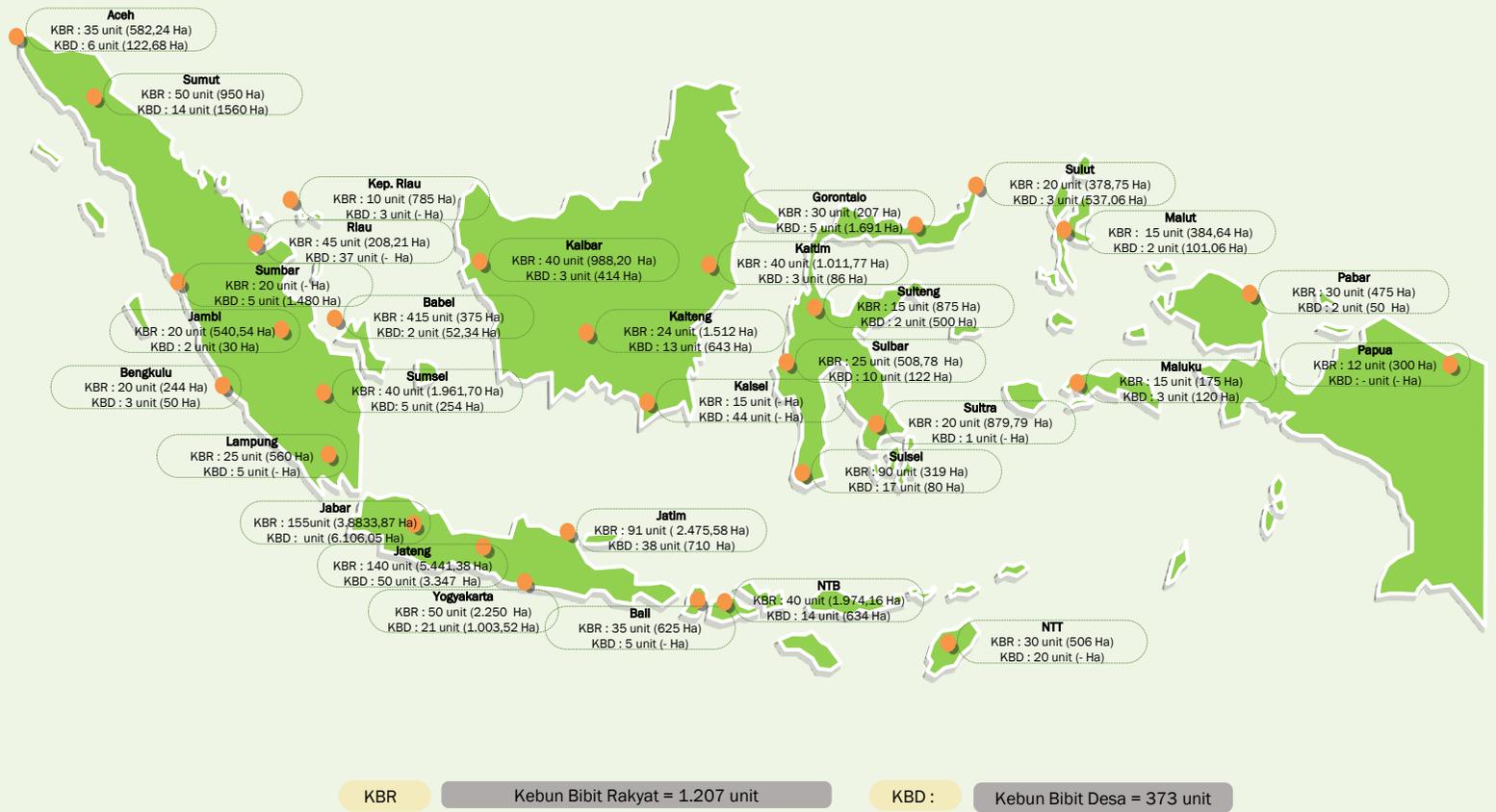
Sasaran kelompok masyarakat yang terlibat dalam program ini yaitu mencakup 22 kelompok perhutanan sosial, 436 kelompok tani hutan, 34 program kampung iklim, 16 kemitraan konservasi dan 355 komunitas kelompok lain.



Penanaman mangrove oleh warga pesisir dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional

Foto oleh Yayan Kristanto

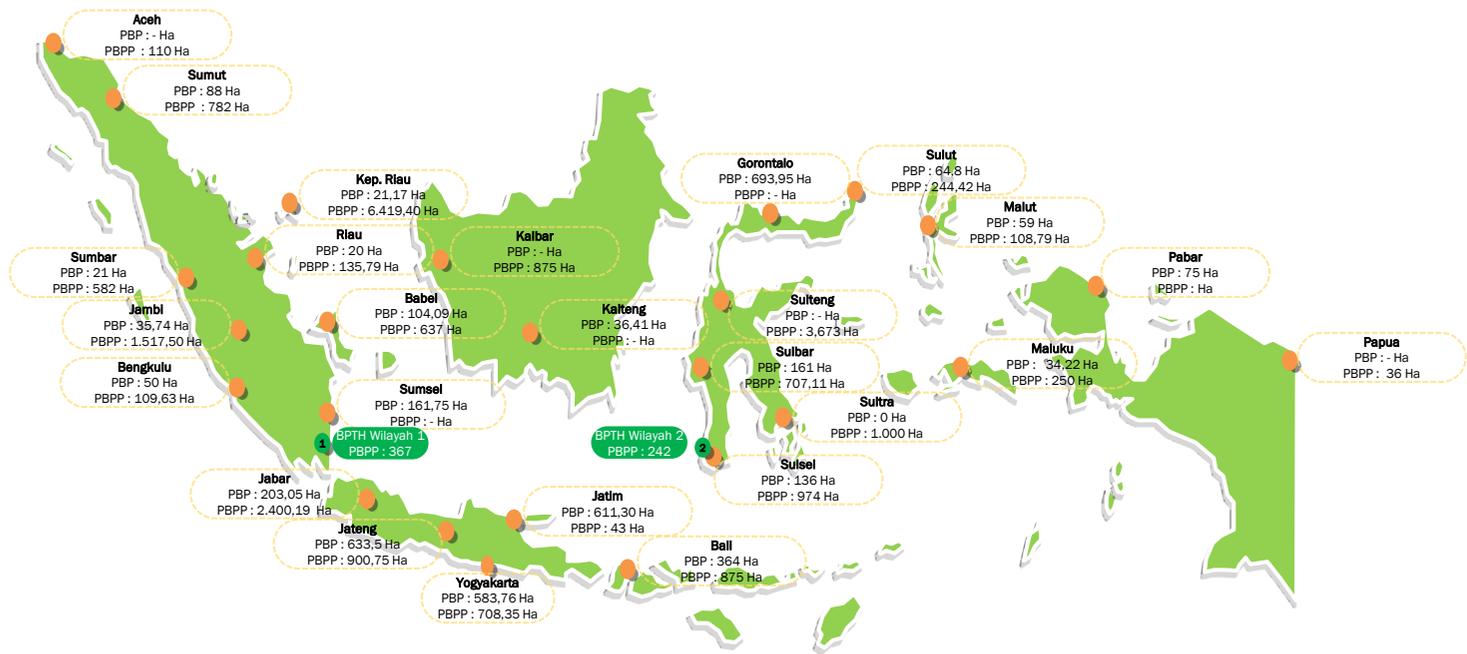
# Sebaran Penanaman Kebun Bibit Desa dan Kebun Bibit Rakyat



Capaian Kinerja Penanaman Bibit Kebun Rakyat 2015-2020



# Sebaran Penanaman Bibit Produktif dan Persemaian Permanen



**PBP** Penanaman Bibit Produktif = 7.006,69 Ha

**PBPP** Penanaman Bibit Persemaian Permanen = 20.829,78 Ha

Capaian Kinerja Penanaman Bibit Persemaian Permanen 2015-2020



## Peta Sebaran Rehabilitasi DAS dan Reklamasi (Ha)



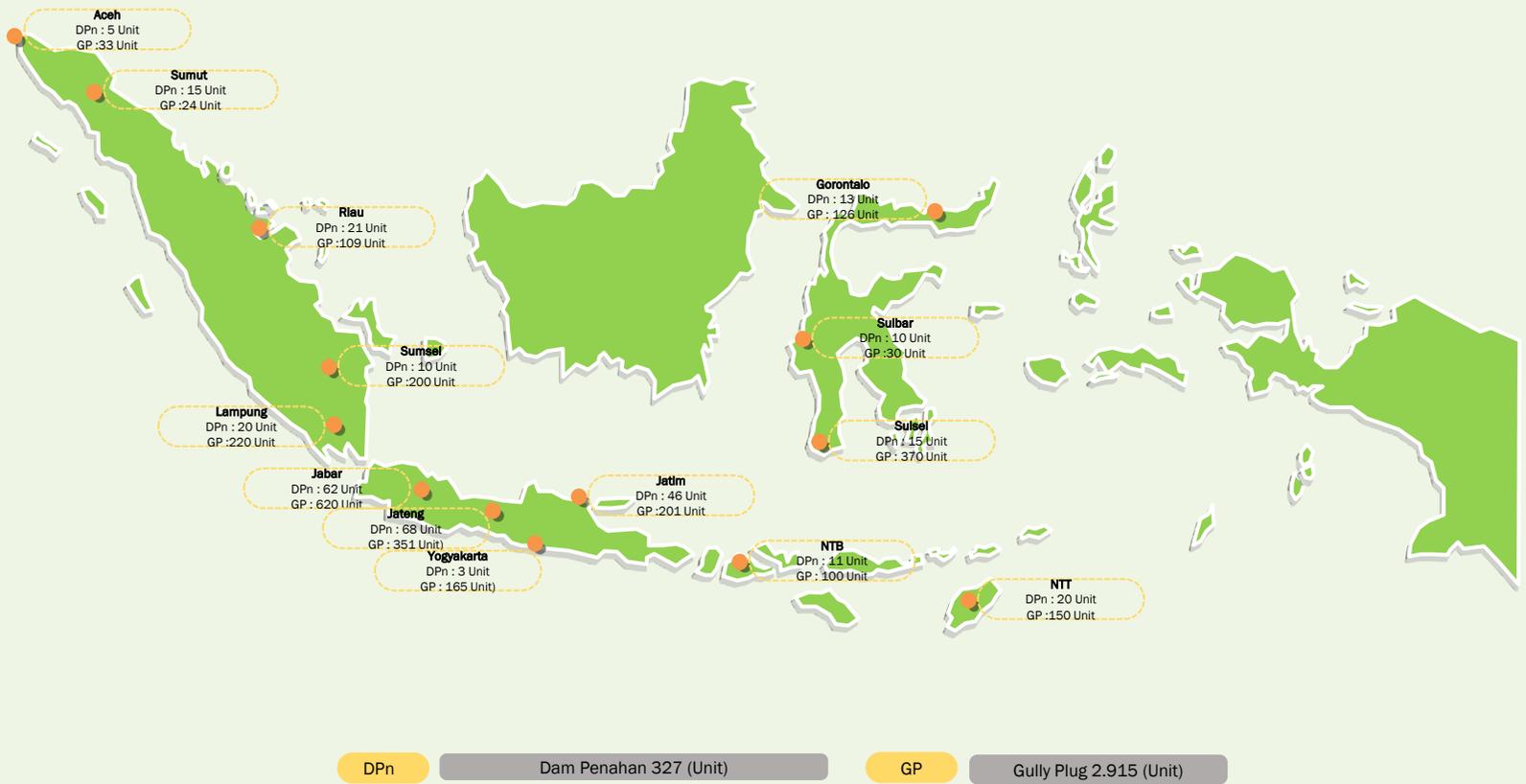
Salah satu warga kelompok tani Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kab. Seluma Provinsi Bengkulu mengangkut ajir menggunakan perahu. Ajir ini digunakan untuk melindungi tanaman mangrove dalam rangkaian Padat Karya Penanaman Mangrove Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Foto oleh Heri K.

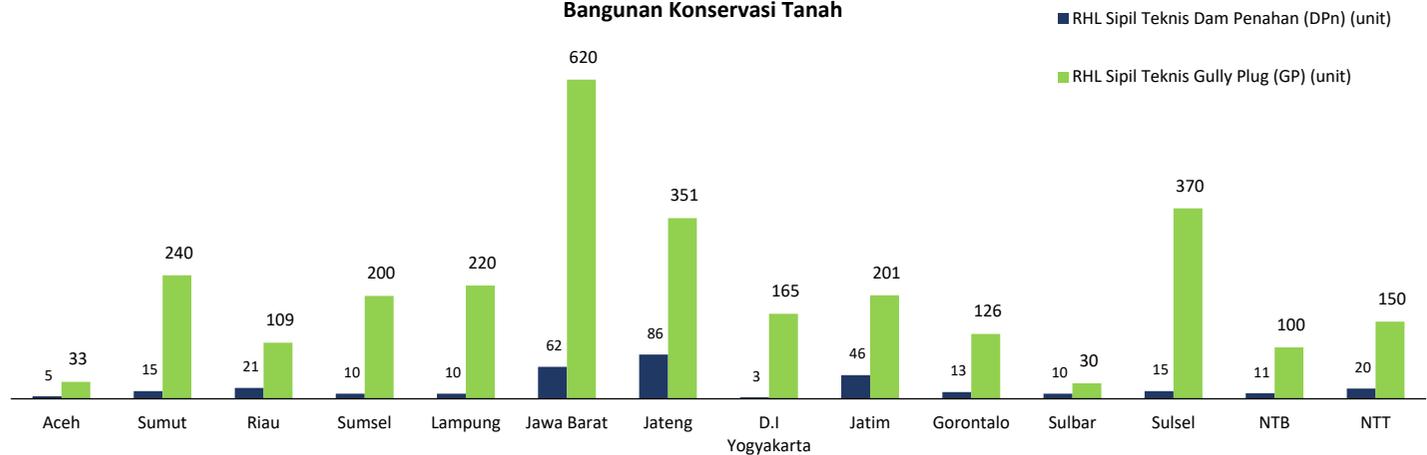
## Konservasi Tanah dan Air

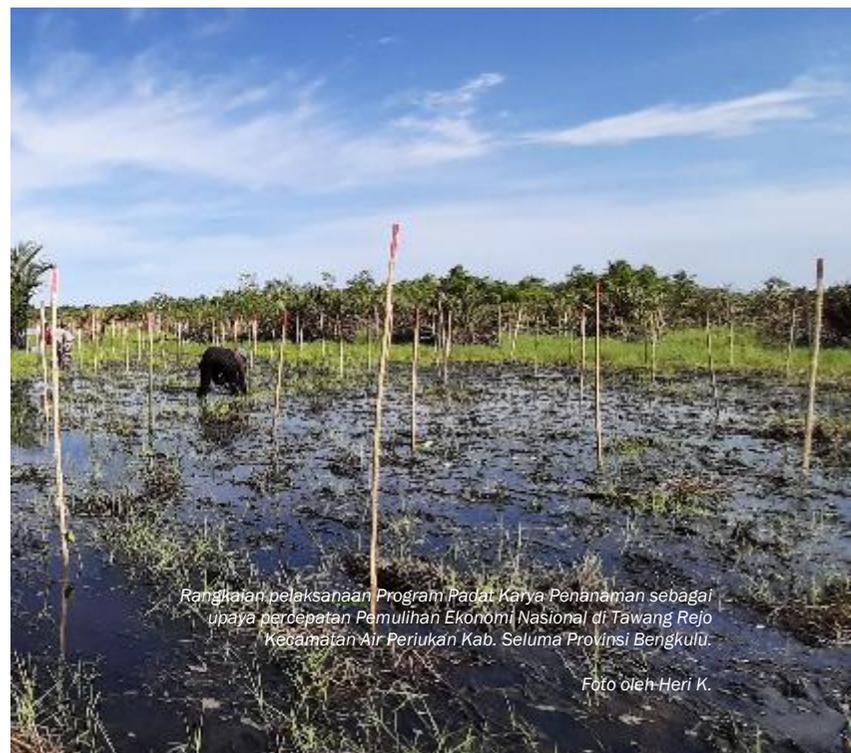
No	Provinsi	Bangunan KTA (Unit)					JUMLAH	
		2015	2016	2017	2018	2019		2020
1	Bali	50	-	194	37	10	-	291
2	Banten	-	-	-	-	-	-	0
3	Bengkulu	-	-	-	60	-	-	60
4	DI Aceh	100	-	248	230	20	38	636
5	DI Yogyakarta	560	249	2.146	670	10	168	3803
6	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	0
7	Gorontalo	38	90	200	159	247	139	873
8	Jambi	-	7	10	50	60	-	127
9	Jawa Barat	4.048	738	2.292	1.786	522	682	10068
10	Jawa Tengah	934	40	2.121	479	790	437	4801
11	Jawa Timur	289	70	2.660	2.495	320	247	6081
12	Kalimantan Barat	-	-	400	84	10	-	494
13	Kalimantan Selatan	-	-	231	25	60	-	316
14	Kalimantan Tengah	-	-	-	40	-	-	40
15	Kalimantan Timur	105	-	250	64	10	-	429
16	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	0
17	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	0
18	Kep. Riau	-	-	-	40	-	-	40
19	Lampung	-	-	750	260	150	230	1390
20	Maluku	-	-	-	15	10	-	25
21	Maluku Utara	-	-	-	50	-	-	50
22	Nusa Tenggara Barat	7	-	775	305	88	111	1286
23	Nusa Tenggara Timur	-	-	250	175	110	170	705
24	Papua	-	-	-	-	-	-	0
25	Papua Barat	-	-	-	25	-	-	25
26	Riau	-	-	260	266	140	130	796
27	Sulawesi Barat	-	-	-	90	-	40	130
28	Sulawesi Selatan	285	12	1.473	797	230	385	3182
29	Sulawesi Tengah	5	-	20	121	-	-	146
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	25	-	-	25
31	Sulawesi Utara	5	-	250	72	-	-	327
32	Sumatera Barat	-	-	-	304	41	-	345
33	Sumatera Selatan	-	-	224	380	20	210	834
34	Sumatera Utara	56	-	709	320	320	255	1660
<b>J u m l a h</b>		<b>6.482</b>	<b>1.206</b>	<b>15.463</b>	<b>9.424</b>	<b>3.168</b>	<b>3.242</b>	<b>38.985</b>

# Peta Sebaran Bangunan Konservasi Tanah



## Bangunan Konservasi Tanah







## Indikator Kinerja Utama 06

### Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi

Hutan Suaka Alam (HSA) Kelompok Hutan Gumai Tebing Tinggi seluas 46.122,60 ha yang dikelilingi oleh 29 desa-desa penyangga dari 8 wilayah administrasi kecamatan menjadikannya rentan akan tekanan oleh aktivitas masyarakat. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan dengan nilai konservasi tinggi yang perlu untuk dikelola secara kolaboratif mengingat kawasan ini di luar kawasan konservasi. Di kawasan seperti ini, prinsip-prinsip konservasi hendaknya ditegakkan secara partisipatif oleh kelompok masyarakat yang berinteraksi dengan kawasan ini, dengan bimbingan UPT Ditjen KSDAE setempat.

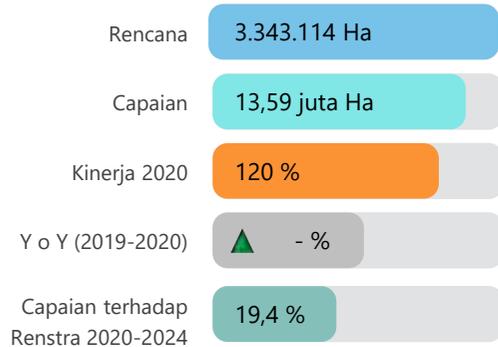
Foto oleh Taufan Kharis.

## IKHTISAR KINERJA

Luas Kawasan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value/HCV*) adalah luas kawasan hutan konservasi dan hutan di luar konservasi termasuk areal penggunaan lain (APL) yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik dari level ekosistem, populasi hingga ke tingkat spesies, terutama daerah-daerah yang merupakan kantung-kantung satwa prioritas yang kemudian masuk ke dalam kawasan ekosistem esensial. Entitas yang diukur adalah luasan kawasan yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati yang tinggi secara partisipatif di dalam maupun di luar kawasan konservasi.

Benteng terakhir keanekaragaman hayati tinggi di Indonesia saat ini mayoritas dikelola hanya di kawasan konservasi saja, padahal hutan produksi, hutan lindung dan APL masih memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi dengan luasan sekitar 43 juta ha (identifikasi dari RKTN dan *background study* RPJMN 2020-2024).

Pada tahun 2020 telah dicapai luasan kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati baik diluar maupun di dalam kawasan konservasi seluas 13.590.505,91 hektare dari target 3.343.114 hektare . Capaian ini sudah tercapai 19,4 % dari target Renstra 2020-2024 seluas 70 juta hektare yang mencakup 27 juta hektare di dalam kawasan konservasi dan 43 juta hektare di luar kawasan konservasi.



Jenis Kawasan	Luas (ha)
Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi	6.927.214,25
Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi	6.663.291,66
<b>Jumlah</b>	<b>13.590.505,91</b>

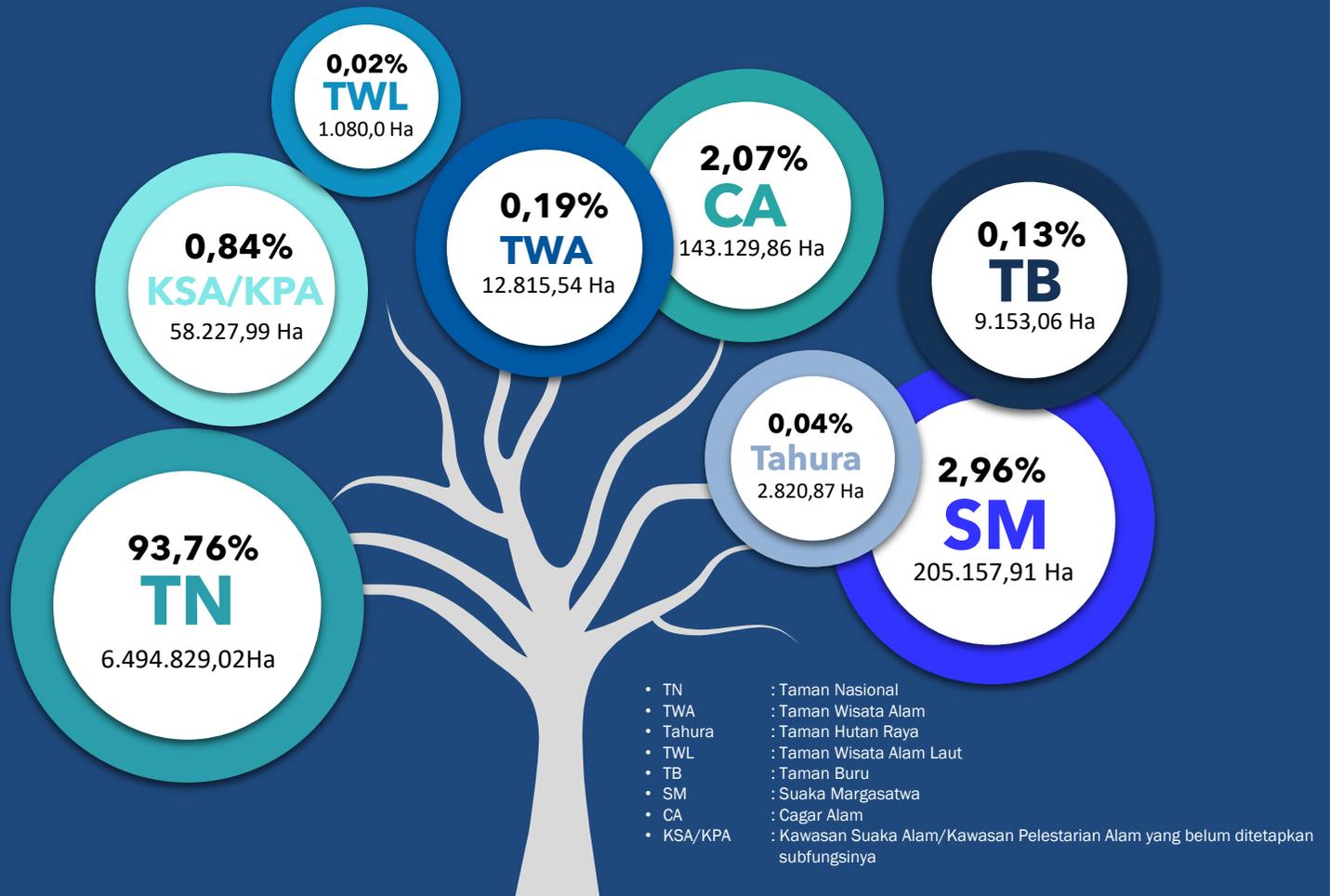




*Burung Dara Laut (Thalasseus bergii)* merupakan salah satu jenis burung migrasi yang singgah di kawasan konservasi Raja Ampat. Hal inilah yang menjadi alasan kawasan Raja Ampat sebagai kawasan yang dilindungi.

Foto oleh Dwi Suryana

## Luas Kawasan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi di Dalam Kawasan Konservasi



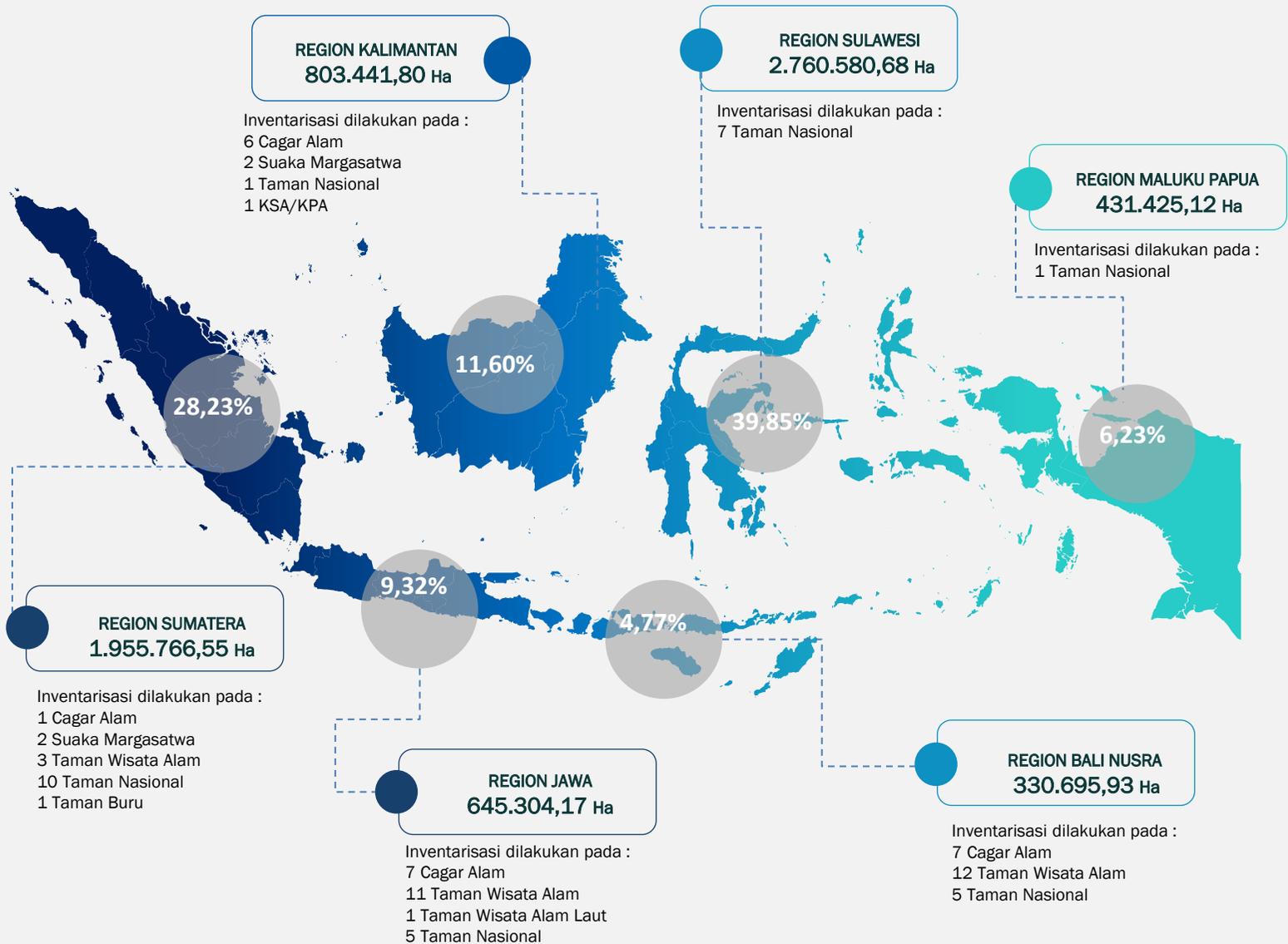
Kawasan yang telah diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi pada tahun 2020 seluas 6,93 juta ha yang dilakukan pada 98 unit kawasan konservasi di seluruh Indonesia. Luasan kawasan HCV pada kawasan konservasi tersebut merupakan 50,97 persen dari total luas kawasan HCV (baik di luar maupun di dalam kawasan konservasi) yang diinventarisasi pada tahun 2020.

Kawasan tersebut terdiri atas 23 Cagar Alam; 9 Suaka Margasatwa; 19 Taman Wisata Alam; 1 Taman Wisata Alam Laut; 37 Taman Nasional; 5 Tahura; 2 Taman Buru dan 2 KSA/KPA.

Berdasarkan region, Sulawesi menjadi region dengan kawasan konservasi bernilai HCV terluas sebesar 39,85 persen diikuti oleh region Sumatera sebesar 28,23 persen.

Upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan keanekaragaman hayati di dalam kawasan konservasi antara lain dilakukan dengan intervensi pengelolaan populasi dan habitat tumbuhan dan satwa liar melalui pembinaan habitat, pembinaan populasi, perlindungan kawasan, pencegahan dan penanganan konflik satwa liar serta pelepasliaran satwa ke habitat alaminya.

## Sebaran Kawasan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi di Dalam Kawasan Konservasi



## Luas Kawasan Hutan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Secara Partisipatif di Dalam Kawasan Konservasi

NO	UPT/UPTD PENGELOLA	KAWASAN KONSERVASI	LUAS (ha)
1	BTN Ujung Kulon	TN Ujung Kulon	112.164,00
2	BKSDA DKI	CA Pulau Bokor	18,46
		SM Muara Angke	24,58
		SM Pulau Rambut	93,67
		TWA Angke Kapuk	164,9
3	BBTN Gunung Leuser	TN Gunung Leuser	833.546,00
4	BBTN Bromo Tengger Semeru	TN Bromo Tengger Semeru	51.493,00
5	BTN Baluran	TN Baluran	30.266,10
6	BTN Kelimutu	TN Kelimutu	5.451,21
7	BTN Gunung Palung	TN Gunung Palung	108.245,00
8	BTN Siberut	TN Siberut	177.633,00
9	BTN Rawa Aopa Watumohai	TN Rawa Aopa Watumohai	108.089,00
10	BTN Meru Betiri	TN Meru Betiri	66.833,10
11	BTN Gunung Tambora	TN Gunung Tambora	80.383,00
12	BTN Bukit Tiga Puluh	TN Bukit Tiga Puluh	144.223,00
13	BTN Bukit Baka Bukit Raya	TN Bukit Baka Bukit Raya	236.677,00
14	BTN Taka Bonerate	TN Taka Bonerate	567.159,00
15	BBTN Bukit Barisan Selatan	TN Bukit Barisan Selatan	318.267,00
16	BTN Way Kambas	TN Way Kambas	129.300,00
17	BBKSDA Jawa Barat	TWA Gunung Papandayan	2,32
		TWA Kawah Kamojang	4,65
		CA Gunung Papandayan	498,01
		TWA Papandayan Gunung Drajat / TWA Darajat	64,98
18	BTN Gunung Halimun Salak	TN Gunung Halimun Salak	88.922,20
19	BTN Gunung Ciremai	TN Gunung Ciremai	15.044,10
20	BBTN Gunung Gede Pangrango	TN Gunung Gede Pangrango	24.619,60
21	BTN Karimunjawa	TN Karimunjawa	120.245,00
22	BKSDA Jawa Tengah	CA Nusakambangan Barat	667,78
		CA Nusakambangan Timur	214,74

NO	UPT/UPTD PENGELOLA	KAWASAN KONSERVASI	LUAS (ha)
23	BKSDA DIY	CA Gunung Batu Gamping	0,06
		CA Imogiri	12,06
		SM Paliyan	443,49
		SM Sermo	188,57
		TWA Gunung Batu Gamping	103,23
24	BTN Bunaken	TN Bunaken	74.001,50
25	BTN Gunung Merbabu	TN Gunung Merbabu	5.923,50
26	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Tahura Ir. H. Djuanda	535,23
27	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang	Tahura Gunung Kunci Gunung Palasari	35,31
28	Pemerintah Daerah Provinsi Banten	Tahura Banten	1.615,93
29	Pemerintah Daerah Provinsi DIY	Tahura Gunung Bunder	627,4
30	BTN Kepulauan Seribu	TN Kepulauan Seribu	114.039,00
31	BKSDA Kalimantan Timur	CA. Teluk Apar	50.102,60
		CA Padang Luway	4.786,95
		CA Muara Kaman Sedulang	65.355,70
32	BKSDA Sumatera Selatan	SM Padang Sugihan	88.447,40
		SM Dangku	48.095,60
		TN Gunung Maras	16.887,20
33	BTN Bogani Nani Wartabone	TN Bogani Nani Wartabone	283.429,00
34	BTN Komodo	TN Komodo	123.414,00
35	BTN Bali Barat	TN Bali Barat	18.414,90
36	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Tahura Pancoran Mas	7
37	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	TWA Baumata	734,76
		CA Kemang Boleng I	158,49
		CA Kemang Boleng II	827,12
38	BBKSDA Riau	twa muka kuning	64,78
		twa buluh cina	3.566,70
39	BTN TN Gunung Merapi	TN Gunung Merapi	6.559,16
40	BKSDA Bali	CA Batukahu	1.964,15

NO	UPT/UPTD PENGELOLA	KAWASAN KONSERVASI	LUAS (ha)
41	BBKSDA Jawa Timur	CA Ceding	2
42	BBKSDA Jawa Timur	CA Curah Manis Sempolan	17,34
43	BBKSDA Jawa Timur	CA Watangan Puger	2,1
44	BBKSDA Jawa Timur	SM Bawean	3.851,60
45	BBKSDA Riau	CA Pulau Berkey	7.454,77
46	BBKSDA Riau	TN Zamrud	31.435,20
47	BBKSDA Riau	TWA Sungai Dumai	4.712,50
48	BBKSDA Sumatera Utara	SM Karang Gading Langkat Timur Laut	2.588,00
49	BKSDA Bengkulu dan Lampung	TB Semidang Bukit Kabu	8.683,00
50	BKSDA Kalimantan Selatan	CA Gunung Kentawan	246,24
		CA Sungai Lulan Sungai Bulan	3.017,53
51	BKSDA NTB	KSA Jereweh	462,99
		CA Pulau Panjang	63,2
		CA Pulau Sangiang	446,96
		CA Pedauh	772,49
		CA Toffo Kota Lambu	576,2
		TWA Kerandangan	52,68
		TWA Suranadi	26,9
		TWA Tanjung Tampa	1.302,53
		TWA Madapangga	74,02
		TWA Gunung Tunak	252,16
		TWA Pelangan	47,22
		TWA Danau Rawa Taliwang	523,63
		TWA Pulau Satonda	193,37
		TWAL Pulau Moyo	1.080,00
		TWA Semongkat	72,05
		TWA Bangko Bangko	852,16
TB Pulau Moyo	470,06		
52	BKSDA Kalimantan Tengah	CA Pararawen I dan II	5.924,91
		KSA/KPA Sei Sebangau	57.765,00
		SM Lamandau	61.425,00
53	BTN Berbak Sembilang	TN Berbak	86.082,00
		TN Sembilang	
54	BTN Bukit Dua Belas	TN Bukit Dua Belas	54.780,40
55	BTN Togean	TN Togean	363.150,18
56	BTN Wakatobi	TN Wakatobi	1.320.987,00
57	BTN Bantimurung Bulusaraung	TN Bantimurung Bulusaraung	43.765,00
58	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum	TN Betung Kerihun Danau Sentarum	209.895,87
59	BTN Manupeu Tanah Daru Laiwangi Wanggameti	TN Manupeu Tanah Daru Laiwangi Wanggameti	92.079,68
60	BTN Wasur	TN Wasur	431.425,12
Jumlah			6.927.214,25

Upaya memulihkan keseimbangan alam melalui proses pelepasliaran satwa dilakukan pada TN Baluran. Sebanyak 13 (tiga belas) ekor burung yang dilepasliarkan berasal dari hasil penegakan hukum dan penyerahan dari masyarakat. Beberapa diantaranya : Gelatik jawa (*Padda oryzivora*) sebanyak 7 (tujuh) ekor jantan dan Julang Mas (*Rhyticeros undulatus*) sebanyak 4 (empat) ekor jantan

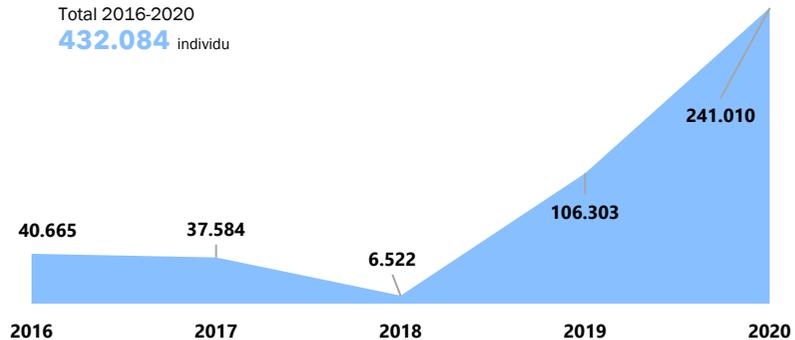
Foto oleh M Luthfi



#### Rekapitulasi Pelepasliaran Satwa (jumlah satwa/indv)

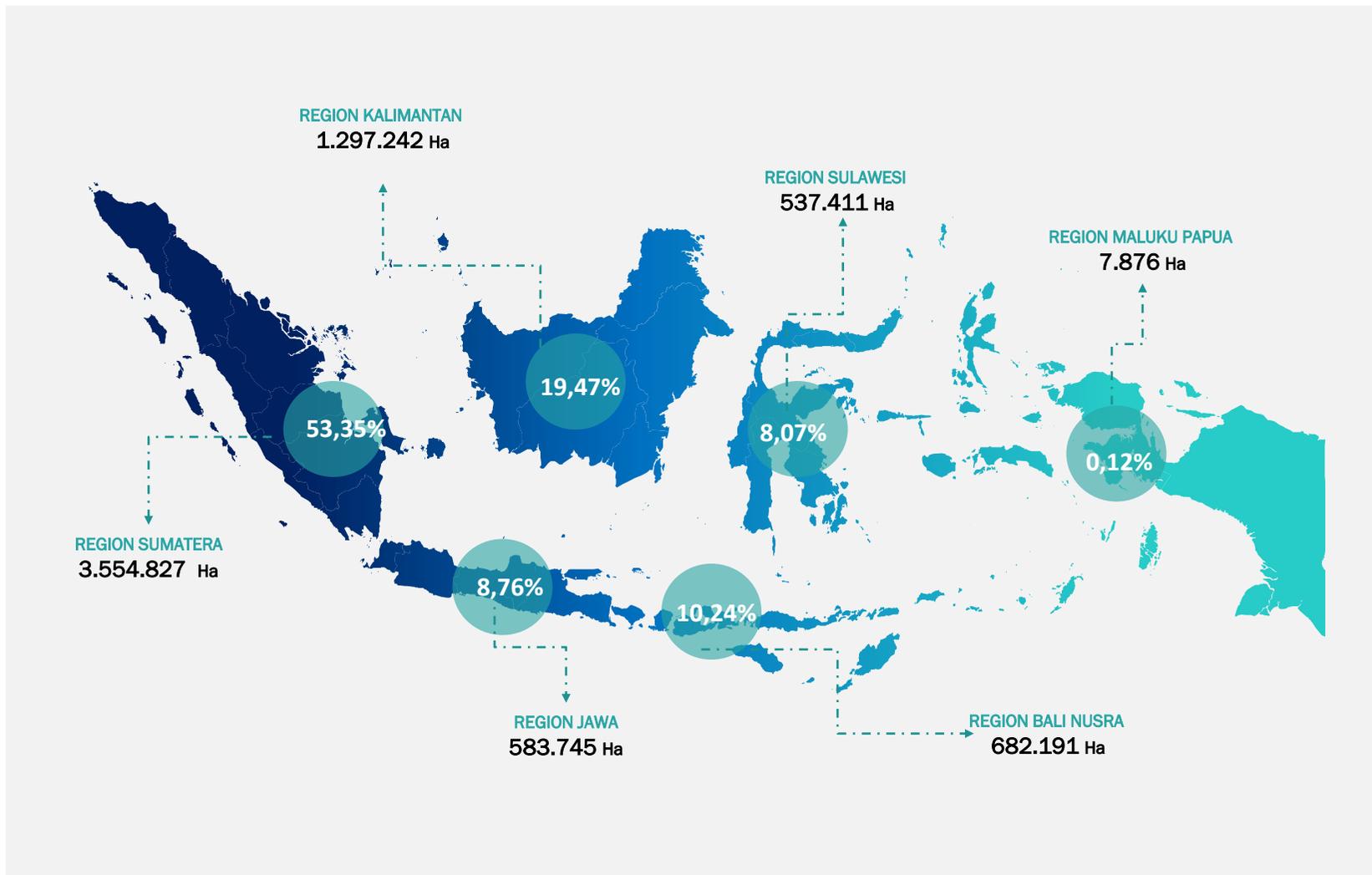
Total 2016-2020

**432.084** individu



Sebagai salah satu upaya dalam menjaga keanekaragaman hayati, Kementerian LHK melepasliarkan satwa kembali ke habitat alaminya. Satwa liar hasil sitaan, serahan masyarakat maupun penyelamatan korban konflik dengan manusia diprioritaskan untuk segera dilepasliarkan ke habitat alaminya apabila memenuhi persyaratan. Pada tahun 2020 telah dilakukan pelepasliaran satwa ke habitat alaminya sebanyak 241.010 individu, jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak selama 5 (lima) tahun terakhir atau sebesar 55,78% dari jumlah total pelepasliaran selama kurun waktu 2016-2020.

## Sebaran Kawasan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi di Luar Kawasan Konservasi



Kawasan yang telah diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi pada tahun 2020 seluas 6,67 juta ha yang dilakukan pada 23 satuan kerja BBKSDA/BKSDA di seluruh Indonesia. Luasan kawasan bernilai HCV di luar kawasan konservasi tersebut merupakan 49,00 persen dari total luas kawasan HCV (baik di luar maupun di dalam kawasan konservasi) yang diinventarisasi pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil analisis skoring kehati, dari 23 satuan kerja yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi, diperoleh sebesar 82,81 persen kawasan memiliki nilai kehati tinggi; 17,58 persen memiliki nilai kehati sedang dan sisanya 0,92 memiliki nilai kehati rendah.

Berdasarkan region, Sumatera menjadi region dengan kawasan konservasi bernilai HCV terluas sebesar 53,35 persen diikuti oleh region Kalimantan sebesar 19,47 persen.

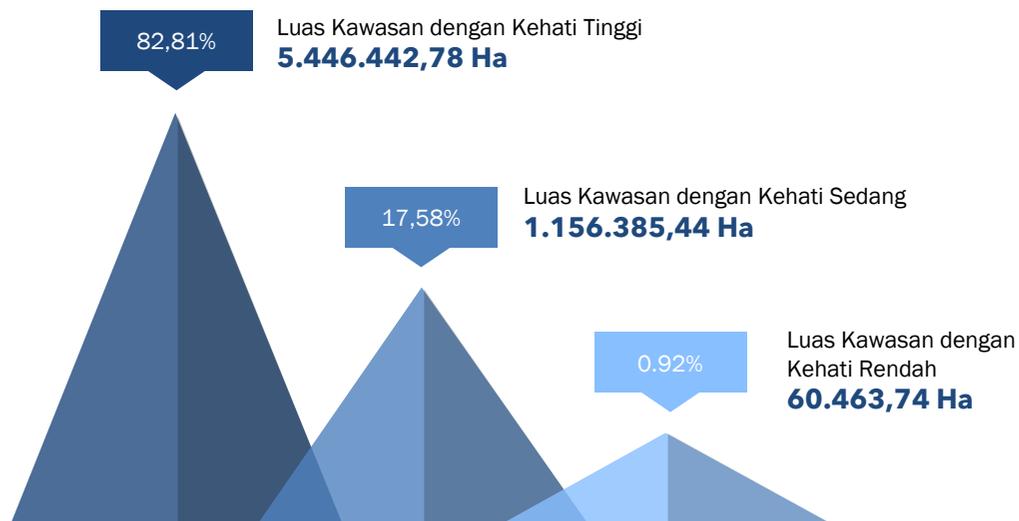
Upaya perlindungan keanekaragaman hayati juga dilakukan pada kawasan yang berada di luar kawasan konservasi. Upaya yang dilakukan antara lain melalui inventarisasi dan verifikasi kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi berdasarkan kriteria sebaran satwa (temuan jejak, perjumpaan langsung dan monitoring), tutupan lahan, kejadian konflik satwa dan manusia serta koridor satwa.

Burung Cendrawasih (Cicinnurus regius)  
Raja yang ditemukan di wilayah Kampung Aset  
Kabupaten Mappi, BBKSDA Papua.

Foto oleh Danial Idris



Luasan Hasil  
Analisis  
Skoring  
Kehati (Ha)



# Hasil Verifikasi Luasan Indikatif Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi di Luar KSA, KPA, dan TB Tahun 2020

No	Unit Kerja	Target Luasan (Ha)	Indikatif Hasil Inver 2020 UPT KSDA (Ha)	Luasan Area InVer Kehati (Ha)	Luasan Hasil Analisa Skoring Kehati (Ha)			Total Luasan Hasil Analisa Skoring Kehati (Ha)	Lokasi	Fungsi Kawasan			
					Tinggi	Sedang	Rendah			HL	HP	APL	Tubuh Air
1	BKSDA NAD	333.203	703.980,60	703.980,60	556.936,12	151.453,58	0	708.389,70	Mila; Cot Girek; Aceh Timur; DAS Peusangan; Sampoinet; Simbabala; Pulo Sarok; Landscape Barat; Kapaseusak	224.240,90	160.371,60	319.969,60	3.807,60
2	BBKSDA Sumatera Utara	294.187	2.680,00	2.780,70	2.791,57	1,4	0	2.792,97	Jaring Halus; Bagan Percut; Pantai Sujono; Pantai Kresek; Bukit Maradja Estate; PT PD Paya Pinang (Serdang Berdagai); Batang Toru; PT Cinta Raja (Deli Serdang); PT Sinar Pandawa (Labuhan Batu); North Estate (Labuhan Batu)	2.682,98	-	109,45	0,54
3	BKSDA Sumatera Barat	294.187	114.212,50	550.719,92	533.983,27	15.659,72	0	549.642,99	Kab. Agam; Kab. Agam; Kab. Solok; Kota Padang; Kab. Solok; Kab. Pasaman; Kab. Pasaman Barat	456.331,19	83.230,85	10.079,70	1,25
4	BBKSDA Riau	627.381	327.879,31	327.880,00	222.489,43	104.525,59	0	327.015,02	Kantong Tesso Tenggara; Kantong Serangge; Kantong Petapahan; Kantong Giam Siak Kecil; Kantong Balal Raja; Kantong Mahato; Kantong Tesso Utara; Kantong Tesso Tenggara Bag Selatan	14.448,12	217.659,28	94.192,49	715,13
5	BKSDA Bengkulu-Lampung	294.187	723.530,58	513.109,32	563.910,64	20.029,74	0	583.940,38	KPHL Batu Tegi, KPHL Bukit Daun, KPHL Kaur, KPHP Bengkulu Utara, KPHP Muko Muko	429.365,06	127.721,73	26.853,59	-
6	BKSDA Sumatera Selatan	294.187	1.282.242,09	1.282.242,09	1.135.350,90	136.631,11	0	1.271.982,01	Kantong Habitat Gajah Sugihan-Simpang Heran, Kantong Harimau-Gajah Dangu Meranti, Kantong Harimau Jambul Nanti Patah, Kantong Bukit Dingin	339.832,49	918.838,02	13.311,50	-
7	BKSDA Jambi	294.187	111.469,12	110.883,34	105.294,79	5.769,55	0	111.064,34	KEE Pantai Cemara, KEE Koridor Gajah Seblat, PT. REKI	-	107.371,47	3.692,87	-
8	BKSDA Kalimantan Selatan	333.203	247,77	415,55	122,79	279,35	0	402,14	Desa Panjaratan; Desa Kuala Lupak	-	-	402,14	-
9	BKSDA Kalimantan Tengah	333.203		652.669,10	391.154,61	261.514,49	0	652.669,10		370.094,92	22.723,73	251.547,80	8.302,65
10	BKSDA Kalimantan Timur	549.356	545.713,00	546.557,58	467.772,38	78.785,20	0	546.557,58	Danau Mesangat dan Kenohan Suwi; Bentang alam Wahea - Kelay	102.116,03	383.718,87	60.722,68	-
11	BKSDA Kalimantan Barat	333.204		97.598,75	94.460,33	3.152,41	0	97.612,73		39.781,64	34.944,32	22.834,44	52,33
12	BBKSDA Jawa Barat	255.170			84.691,36	718,61	0	85.409,97		85.392,60	17,38	-	-
13	BKSDA Jawa Tengah	255.170	2.699,30	12.619,41	47.009,30	49.145,45	0	96.154,75	KEE Gunung Ungaran, KEE Petung Kriyono	38.928,23	50.719,54	6.506,97	
14	BBKSDA Jawa Timur	255.170		275.699,77	106.304,67	115.133,12	60.463,74	281.901,53		73.808,28	57.329,88	150.755,00	8,37
15	BKSDA DIY	255.170		117.886,68	15.996,96	104.281,56	0	120.278,52		11.207,42	24.821,92	84.249,18	-

No	Unit Kerja	Target Luasan (Ha)	Indikatif Hasil Inver 2020 UPT KSDA (Ha)	Luasan Area InVer Kehati (Ha)	Luasan Hasil Analisa Skoring Kehati (Ha)			Total Luasan Hasil Analisa Skoring Kehati (Ha)	Lokasi	Fungsi Kawasan			
					Tinggi	Sedang	Rendah			HL	HP	APL	Tubuh Air
16	BKSDA Jakarta	0	0				0	Tidak ada data shp polygon	Tidak ada data shp polygon	-	-	-	-
17	BBKSDA Sulawesi Selatan	333.204	322.112,00	446.757,71	297.604,23	23,8	0	297.628,03	Kab Sidrap, Kab Luwu Utara	216.603,77	80.996,07	28,19	-
18	BKSDA Sulawesi Tengah	333.204	239.876,30	239.551,03	139.641,16	100.141,83	0	239.782,98	Kab.Parigi Moutong, Kab.Tojo Una-Una, Kab.Poso, Kab.Banggai Kepulauan, Kab. Banggai	27.484,40	90.390,82	121.907,77	-
19	BKSDA Sulawesi Tenggara	333.204	199.320,66	22.029,46				Tidak ada data shp polygon	Kabupaten Konawe Selatan, Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Utara	-	-	-	-
20	BKSDA Sulawesi Utara	333.204	1.148,86					Tidak ada data shp polygon	Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Minahasa, Kec. Popayato, Kab. Pohuwato, Kec. Taluditi, Kab. Pohuwato	-	-	-	-
21	BKSDA Bali	333.204		57,44	65,66		0	65,66		-	-	65,66	-
22	BKSDA NTB	333.204	665.757,89	665.757,89	672.770,29	8.833,31	0	681.603,60	KPH Tastura, KPH Rinjani Barat, KPH Rinjani Timur, KPH Brang Rea, KPH Matayang, KPH Sejorong, KPH Puncak Ngengas, KPH Batulanteh, KPH Orong Telu, KPH Brang Beh, KPH Ampang, KPH Ampang Riwo, KPH Piampang, KPH Ropang, KPH Madapangga Rompu, KPH Maria Donggomasa, KPH Tambora, KPH Soromandi	405.826,03	274.160,75	1.616,82	
23	BBKSDA NTT	333.204	522,11	522,11	522,11		0	522,11	Pulau Rote (KEE Rote Ndao), Pulau Flores (Tanjung Torong Padang, Riung), Pulau Longos	-	-	522,11	-
24	BKSDA Maluku	333.204	775,86	380,45	481,03	294,83	0	775,86	Tanjung Maleo, KEE Mangrove Kao, Pulau Buano, Pantai Laiseia, Pulau Lea	-	16,88	758,98	-
25	BBKSDA Papua	333.203	6.300	6.300,00	6.298,96	1,04	0	6.300,00	Timika (SKW II), Rawa Baki, Keakwa	2.400,00	3.474,81	425,19	-
26	BBKSDA Papua Barat	0	800	800	790,23	9,77	0	800		-	600,16	185,94	13,90
Jumlah		8.000.000	5.251.267,95	6.577.198,90	5.446.442,78	1.156.385,44	60.463,74	6.663.291,96					



Penampakan Bunging (Pulau Gosong) Belle dari atas udara. Bungin Belle ini masuk dalam wilayah kerja Resor Pasitallu Timur SPTN Wilayah 2 Jinato TNTBR. Pulau ini tidak bervegetasi, panas namun diatasnya hidup sekitar 20 KK masyarakat suku bajo yang secara musiman, saat musim angin barat mereka kembali ke Pulau Pasitallu Timur. Bungin Belle dan perairan sekitarnya memberinya kehidupan untuk tempat mencari ikan.

Foto oleh Asri.



Indikator Kinerja Utama 07

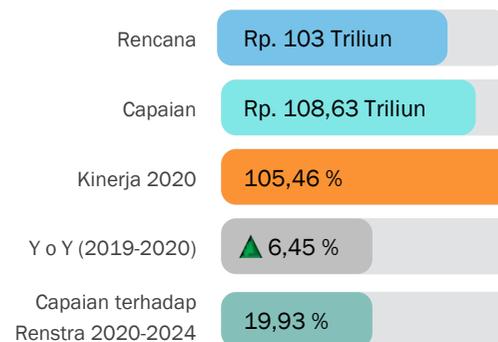
## Kontribusi Sektor LHK Terhadap PDB Nasional

*Kegiatan Pembuatan/pembibitan tanaman bambu pada areal kemitraan konservasi dalam rangka pemberian akses kelola kawasan konservasi berupa pemungutan HHBK jenis bambu (Bambuseae) dan Pepulut (*Urena lobata*) seluas 10 ha, di kawasan hutan TN. Kerinci Seblat Hutan Madapi (Mahoni Damar Pinus).*

Foto oleh Emi Hayati Danis

# IKHTISAR KINERJA

PDB nasional merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian nasional atau pun sebagai cerminan keberhasilan suatu pemerintahan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi di seluruh Indonesia. Tingkat pertumbuhan ekonomi sering kali dijadikan sebagai indikator untuk mengukur capaian pembangunan perekonomian nasional.



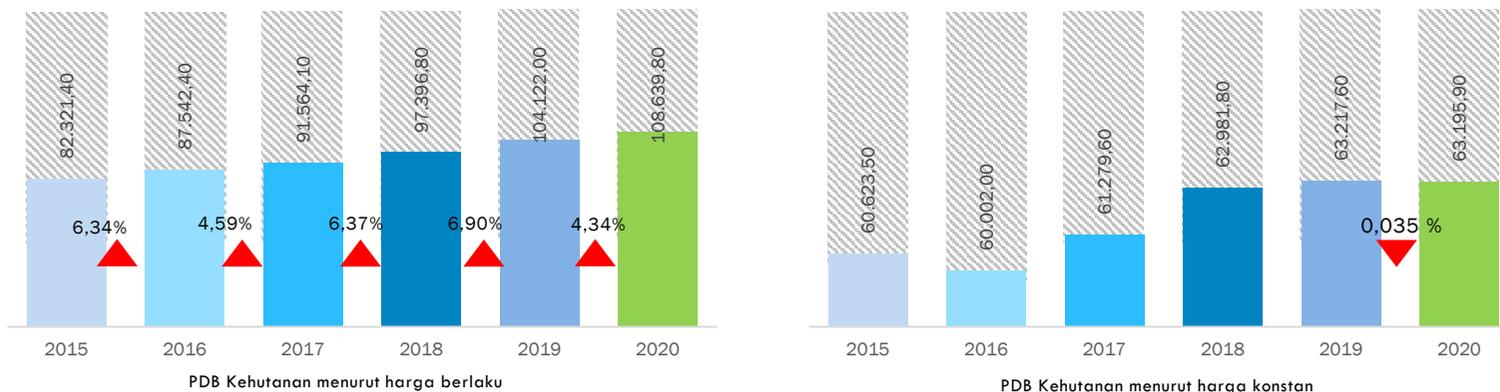
Entitas pengukuran PDB sektor kehutanan mencakup kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran. Serta mencakup jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yg dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yg berasal dari hutan rimba, maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu dan hasil hutan lainnya, tercakup juga adalah jasa penunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yg dilakukan atas dasar kontrak.

Selanjutnya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia untuk sektor kehutanan meliputi : (1) KBLI 021, terdiri atas perusahaan Hutan yang berasal dari perusahaan Hutan Tanaman, Hutan Alam, dan HHBK; (2) KBLI 022 dalam bentuk penebangan dan pemungutan kayu; (3) KBLI 023 meliputi pemungutan HHBK; dan, (4) KBLI 024 meliputi jasa penunjang kehutanan.

Pada tahun 2020 PDB sektor LHK mencapai 108,63 triliun rupiah (menurut harga berlaku), hasil ini mencapai target 105,46% dari 103 triliun rupiah. Capaian tahun 2020 meningkat 4,34% dari tahun 2019 meskipun tahun ini Indonesia mengalami dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Dari target Renstra 2020-2024 (PDB kehutanan menurut harga berlaku), pada tahun ini baru mencapai 19,93%. Sedangkan untuk PDB sektor kehutanan menurut harga konstan mengalami penurunan pada tahun 2020, namun hanya turun 0,035% dari tahun 2019 dengan capaian 63,19 triliun rupiah.

## MENYUMBANG

### KINERJA POSITIF PEMBENTUKAN PDB

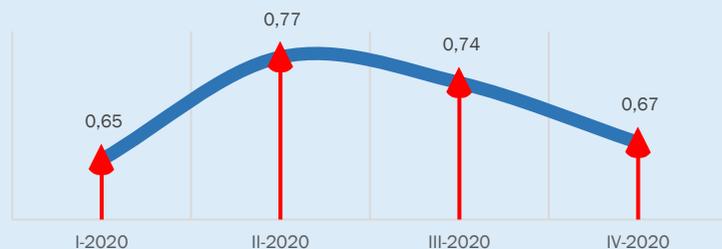


# PDB Subsektor Kehutanan & Penebangan Hutan 2020

**PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 per Triwulan (miliar Rp)**



**Distribusi PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 per Triwulan (%)**



**PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 per Triwulan (miliar Rp)**



Hasil hutan bukan kayu sangat berpotensi sebagai komoditas kehutanan unggulan. Hasil hutan bukan kayu dapat menyelamatkan eksploitasi terhadap sektor kehutanan ketika potensi hasil hutan bukan kayu dapat dimanfaatkan dengan baik. Hasil hutan non kayu sangat menguntungkan, karena dari satu jenis saja kita bisa memanfaatkan bagian-bagian dari suatu jenis tumbuhan tersebut. Apakah daunnya, akarnya, maupun buahnya. Penggunaannya juga bermacam-macam, mulai dari pemenuhan kebutuhan, sebagai barang-barang penghias bahkan sebagai obat-obatan. Hutan produksi kaya dengan potensi berupa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti getah pinus, getah karet, jernang, kemenyan, daun kayu putih, asam, gaharu, damar, sagu, kemiri, rotan, bambu, madu dan lain-lain.

Realisasi produksi HHBK tahun 2020 sebesar 557.924,54 ton atau jauh melebihi target sebesar 350.000 ton per tahun.

**Produksi HHBK 2015-2020**

Angka dalam ribu ton



# Potret Pertumbuhan Ekonomi 2020

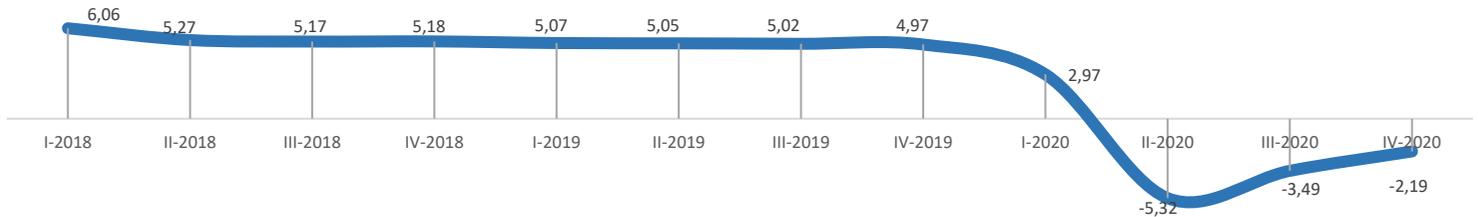
**Y o Y**  
-2,19%

**Q to Q**  
-0,42%

**C to C**  
-2,07%

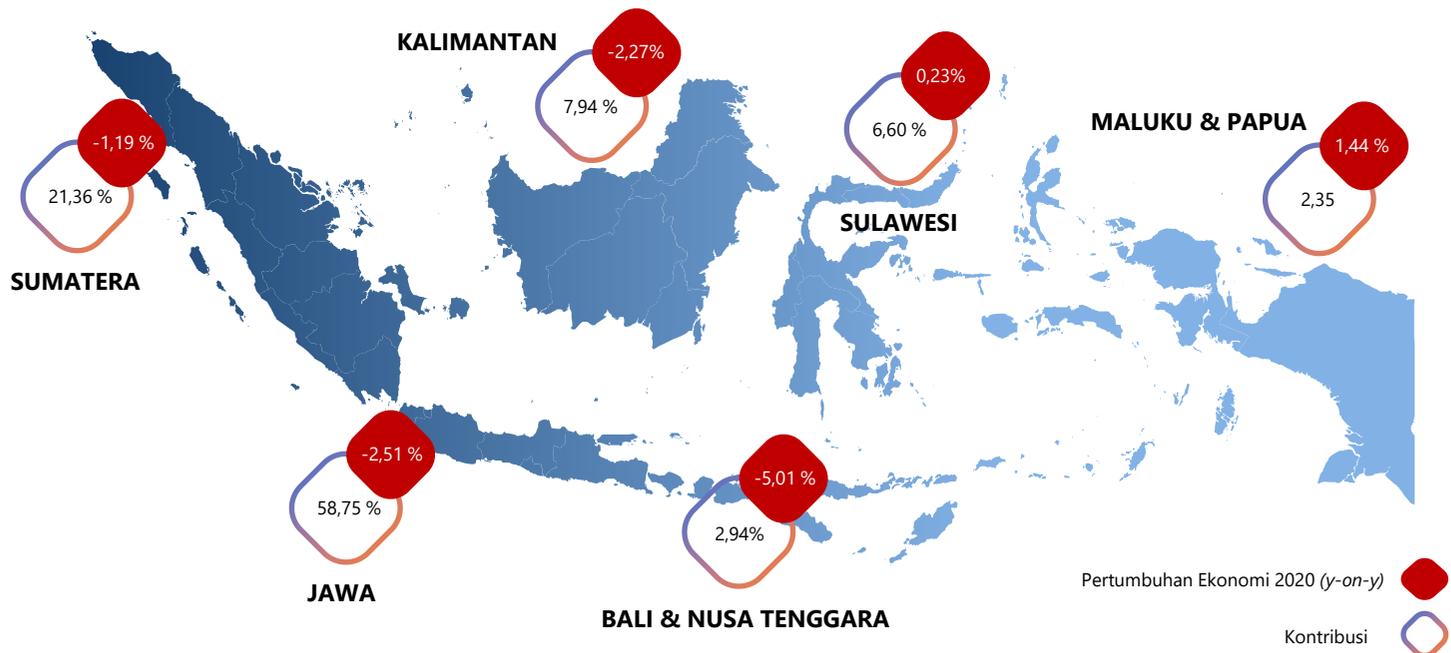
**Produk Domestik Bruto (PDB) Harga Berlaku**  
Rp. 15.434,2 Triliun

Pertumbuhan PDB 2018-2020 (Y o Y, persen)



## PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PDRB MENURUT WILAYAH

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75 %





## Indikator Kinerja Utama 08

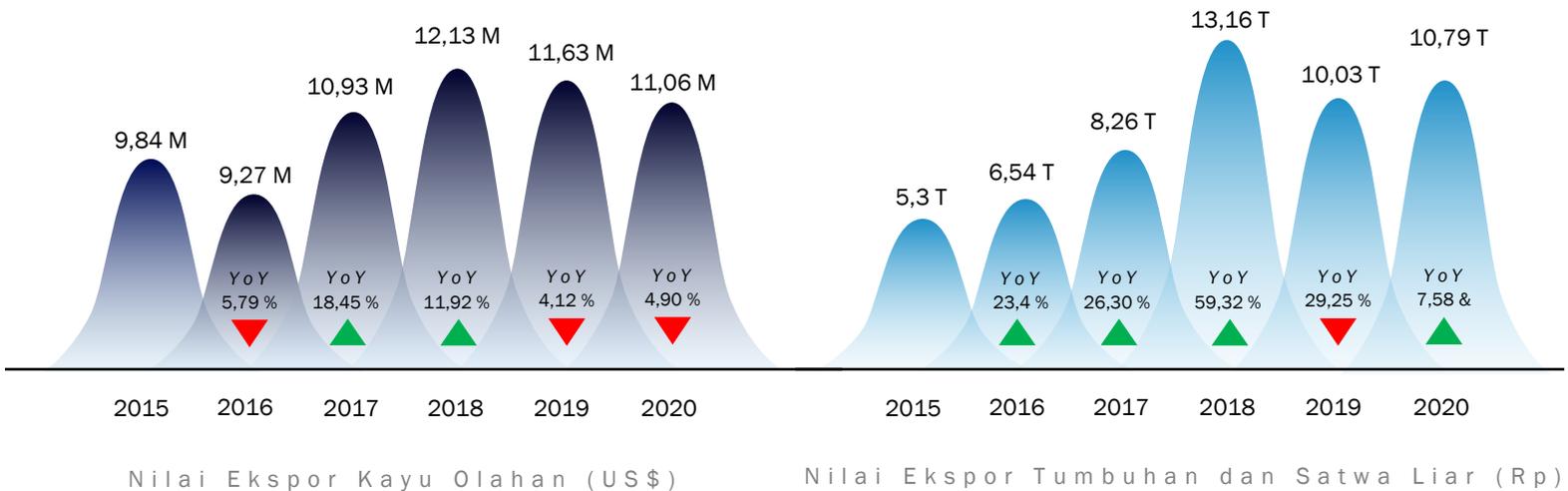
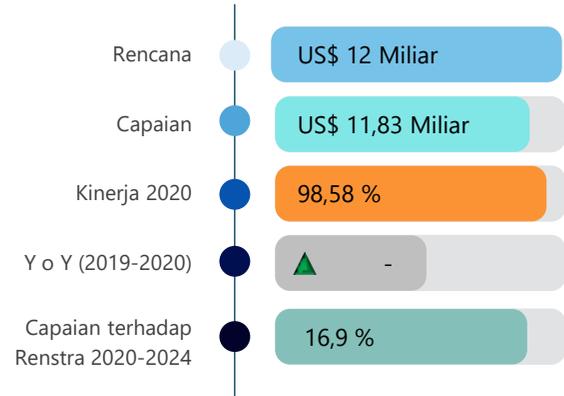
### Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting

*Merawat sumber benih, mendorong porsi produk kayu dari Hutan Tanaman Industri terhadap produk ekspor hasil hutan.*

*Foto oleh Raysapta*

# IKHTISAR KINERJA

Ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting telah memberikan devisa yang memadai bagi negara. Namun demikian, pemanfaatannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (produk kayu) dan untuk TSL harus menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) serta memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dalam pemanfaatannya untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi.



Nilai Ekspor hasil hutan disumbangkan dari produk kayu olahan dan TSL. Nilai ekspor kayu olahan Tahun 2020 sebesar US\$ 11,06 Miliar. Perolehan tersebut turun sebesar 4,90% dibandingkan capaian Tahun 2019. Perbandingan rencana dan capaian Tahun 2020 menggambarkan kinerja sebesar > 120 % untuk ekspor kayu olahan dari target US\$ 7 Miliar. Sedangkan untuk ekspor TSL memberikan hasil kinerja sebesar > 120 % dengan capaian mencapai Rp. 10,79 triliun (US\$ 770,31 juta) dari target Rp 1 triliun. Angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 7,58%.

Capaian kinerja untuk nilai ekspor hasil hutan dari kedua sektor tersebut sebesar 98,50% atau US\$ 11,83 miliar (USD 11,06 miliar + USD 0,77 miliar) dari target US\$ 12 miliar. Jika dibandingkan dengan target renstra, pada tahun akhir pelaksanaan renstra yaitu pada tahun 2024 diharapkan tercapai sebesar US\$ 70 miliar maka pada tahun 2020 telah tercapai sebesar 16,9 %.



*Para pengrajin kayu Sengon di Lampung Selatan sedang memotong kayu log untuk kebutuhan lokal dan beberapa juga disiapkan untuk diekspor ke berbagai negara.*

*Foto oleh Abdul Kholik*

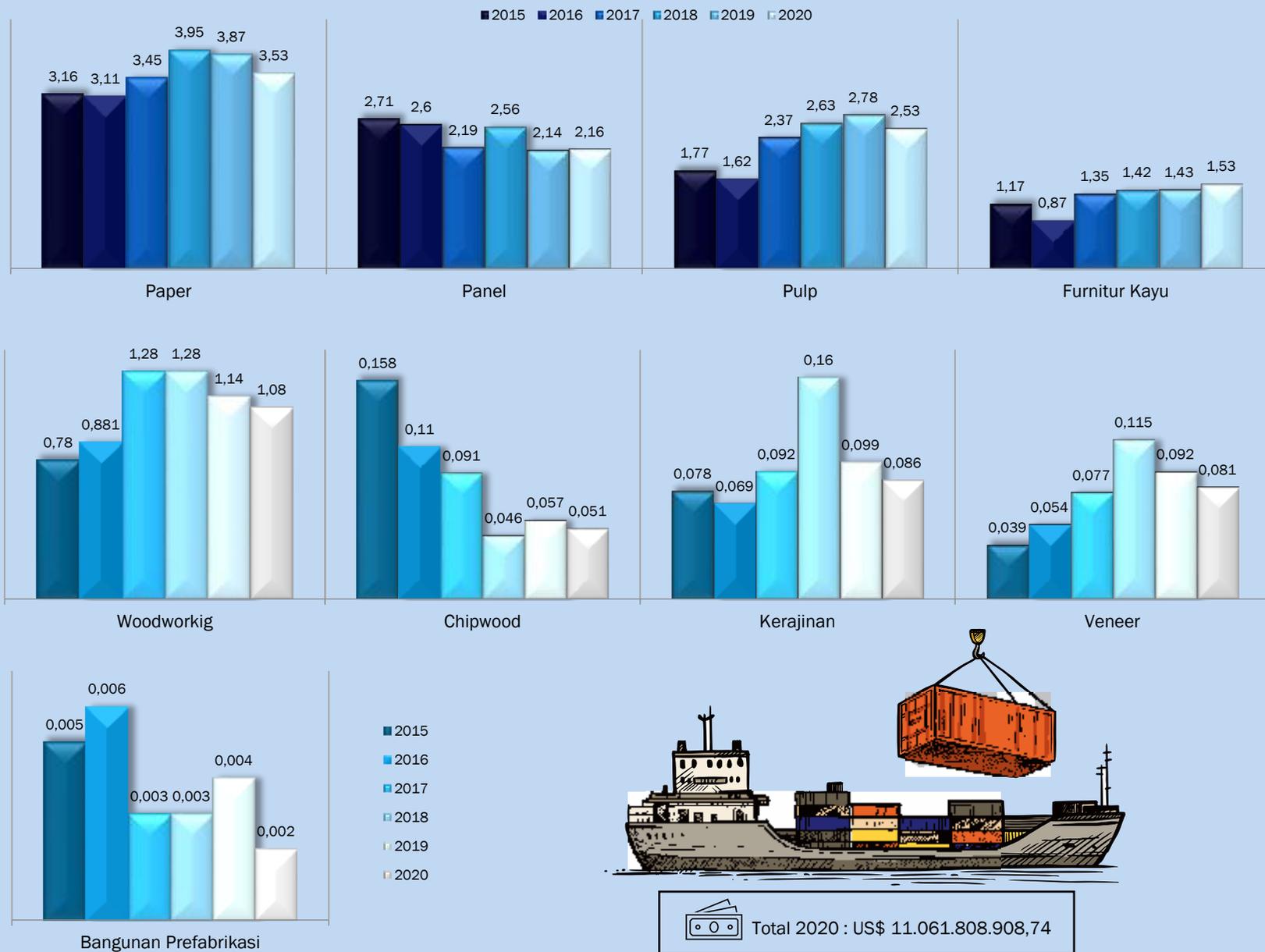
Nilai Ekspor kayu olahan mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut, sebelumnya pada tahun 2019 penurunan ekspor yang terjadi ditengarai merupakan imbas dari perang dagang Amerika Serikat dan China sehingga volume perdagangan mengalami penurunan. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 turut memberikan tekanan berat terhadap kinerja sektor usaha kehutanan, pasalnya negara utama tujuan ekspor kayu olahan Indonesia yakni China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Korea Selatan turut terdampak dari pandemi, sehingga harus melakukan pembatasan transportasi antar negara termasuk ekspor impor.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan produktivitas industri kehutanan di hulu antara lain mempercepat pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan pengembangan Agroforestry di areal kerja IUPHHK-HTI, Kemudian mewujudkan pembangunan multiusaha di areal IUPHHK, serta penyederhanaan perizinan berusaha di bidang pemanfaatan hutan produksi.

Pada industri di hilir, beberapa upaya yang dilakukan adalah peningkatan luas penampang produk ekspor industri kehutanan, memperluas keberterimaan pasar dengan memperkokoh penerapan SVLK, serta fasilitasi sertifikasi SVLK untuk Usaha Kecil Menengah.

Sebaliknya, Nilai ekspor TSL berhasil mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan nilai ekspor TSL salah satunya didukung oleh keberhasilan dalam program penangkaran tumbuhan dan satwa liar. Tercatat pada 2020 terjadi peningkatan pada jumlah pemegang usaha peredaran TSL dan peningkatan jumlah investasi industri peredaran TSL.

# Nilai Ekspor Kayu Olahan Berdasarkan Jenis Produk 2020 (US\$ Miliar)



## Netto Ekspor Kayu Olahan (Ton)



Total 2020  
**16.702.641,13 Ton**

	Paper	Pulp	Panel	Woodworking	Chipwood (Serpil kayu)	Furnitur kayu	Veneer	Kerajinan	Bangunan Prefabrikasi
■ 2020	5.265.254,17	6.400.272,25	2.199.470,60	1.600.475,76	695.707,95	436.742,59	77.679,01	25.762,05	1.276,75
■ 2019	4.784.289,39	5.332.713,46	1.985.096,61	1.582.093,16	668.126,62	407.757,99	82.635,11	28.265,57	2.934,06
■ 2018	6.665.403,54	4.246.746,16	2.191.066,60	1.696.092,14	589.486,69	407.680,77	218.871,11	28.233,40	2.213,28
■ 2017	5.184.226,40	4.572.491,63	2.085.440,06	1.636.228,32	1.181.894,62	423.565,80	67.317,89	28.092,38	1.724,58

Berdasarkan jenis produk olahan, Kertas (Paper), Pulp, dan Panel masih menjadi jenis dengan nilai ekspor tertinggi berturut-turut Paper sebesar US\$ 3,53 miliar; Pulp sebesar US\$ 2,53 miliar; dan Panel US\$ 2,16 miliar. Meskipun ketiga sektor tersebut mengalami penurunan nilai ekspor jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

Total volume ekspor olahan kayu pada tahun 2020 sebesar 16,70 juta ton. Jenis produk kayu olahan Paper, Pulp, dan Panel menjadi jenis dengan volume ekspor tertinggi. Volume ekspor pulp mencapai 6,4 juta ton, volume ekspor kertas mencapai 5,26 juta ton sementara panel sebesar 2,2 juta ton.



Pemuda bermain enggang, permainan tradisional di TN. Gunung Rinjani

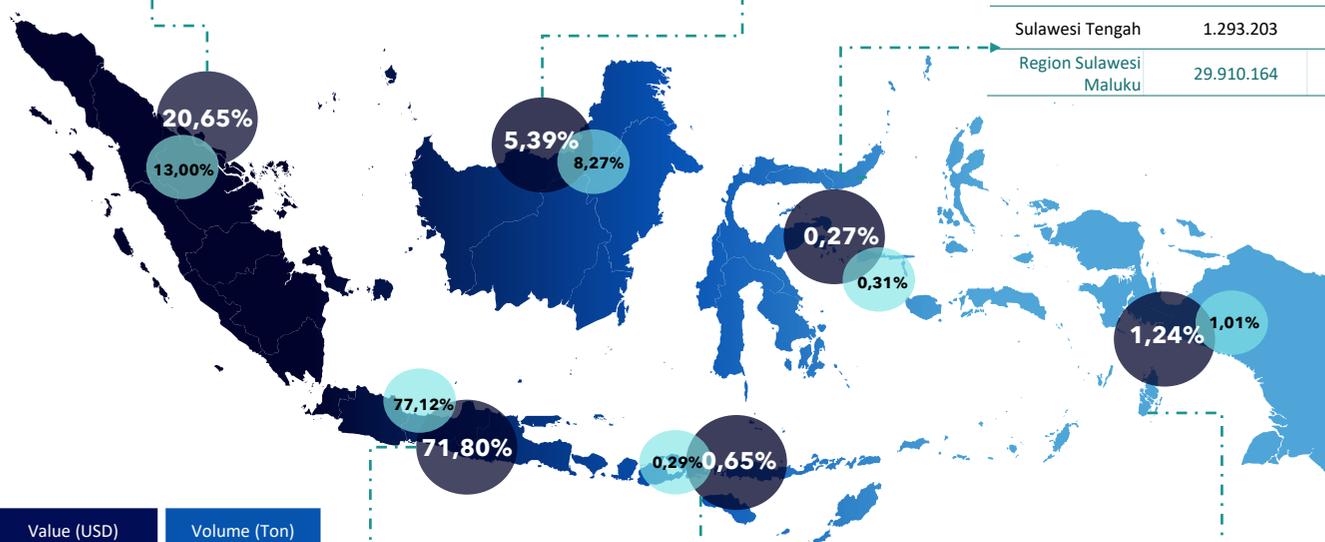
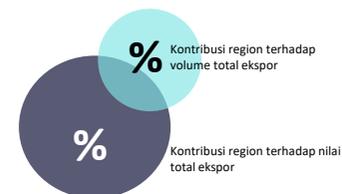
Foto oleh Benediktus Rio Wibawanto

# Ekspor Kayu Olahan 2020 per Provinsi

	Value (USD)	Volume (Ton)
Bengkulu	1.012.704	2.989
Jambi	182.697.788	46.908
Kepulauan Riau	62.678.672	111.967
Lampung	16.412.181	40.244
Riau	530.377.112	1.626.437
Sumatera Barat	479.346	669
Sumatera Selatan	1.251.969.961	285.006
Sumatera Utara	238.234.731	518.249
Region Sumatera	2.283.862.494	2.632.469

	Value (USD)	Volume (Ton)
Kalimantan Barat	92.372.219	173.776,12
Kalimantan Selatan	252.350.239	486.284,26
Kalimantan Tengah	51.239.179	621.542,80
Kalimantan Timur	141.802.536	275.891,79
Kalimantan Utara	58.933.925	116.474,22
Region Kalimantan	596.698.098	1.673.969,19

	Value (USD)	Volume (Ton)
Maluku	3.390.120	7.309,45
Sulawesi Selatan	25.226.841	53.903,61
Sulawesi Tengah	1.293.203	1.574,62
Region Sulawesi Maluku	29.910.164	62.788,68



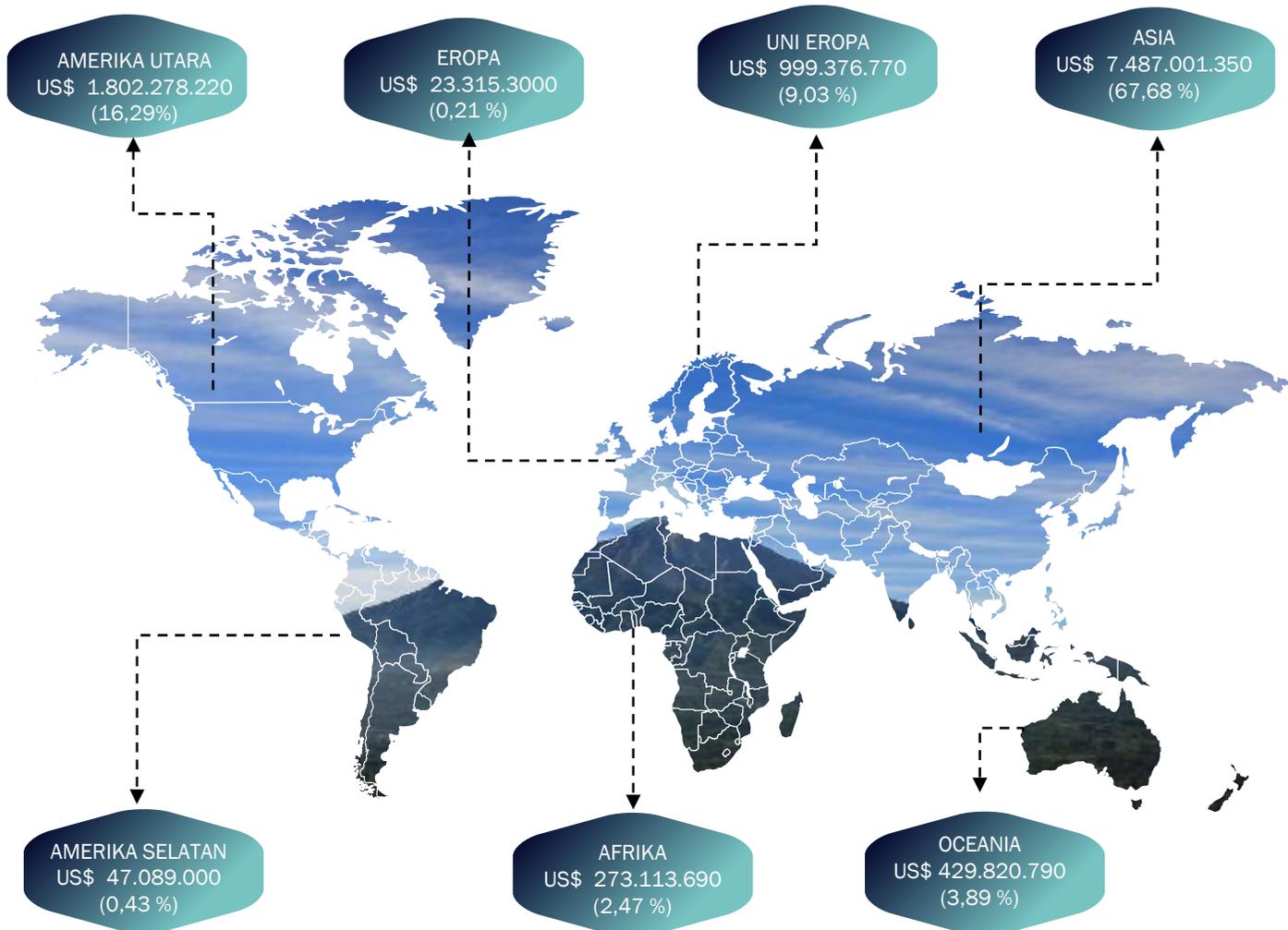
	Value (USD)	Volume (Ton)
Banten	205.300.276	308.634,42
DI Yogyakarta	57.237.117	85.414,76
DKI Jakarta	4.128.976.300	4.118.146,54
Jawa Barat	377.021.434	680.874,41
Jawa Tengah	1.415.150.369	3.209.270,28
Jawa Timur	1.758.592.697	7.218.067,16
Region Jawa	7.942.278.193	15.620.408

	Value (USD)	Volume (Ton)
Bali	71.824.892	57.636
Nusa Tenggara Barat	17.792	58,33
Nusa Tenggara Timur	536.681	998,77
Region Bali Nusra	72.379.365	58.693,33

	Value (USD)	Volume (Ton)
Papua	126.241.287	195.096,66
Papua Barat	10.439.238	10.223,69
Region Papua	136.680.524	205.320,35

## Ekspor Kayu Olahan 2020 per Benua

\*Data diambil per tanggal 22 Januari 2021



Pada tahun 2020, benua dengan tujuan ekspor terbesar adalah Asia sebesar US\$ 7,48 Miliar atau sebesar 67,68% disusul oleh Amerika Utara sebesar US\$ 1,8 M atau sebesar 16,29%. Jika dilihat berdasarkan negara tujuan ekspor, Cina masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai ekspor sebesar US\$ 3,18 Miliar; disusul oleh Amerika Serikat sebesar US\$ 1,61 Miliar; Jepang sebesar US\$ 1,15 Miliar dan Korea Selatan sebesar US\$ 0,67 Miliar.

Untuk melihat informasi ekspor hasil kayu olahan ke negara tujuan secara *real-time*, dapat memindai QR code berikut ini.



## Berita

### Ekspor Kayu Olahan

### Tahun 2020

Indonesia adalah satu-satunya negara penghasil kayu tropis di dunia, yang telah membentuk sistem lacak balak dari hulu hingga hilir yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini juga telah diakui secara internasional

Berikut salah satu petikan informasi tentang peran SVLK dalam mendukung kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2020

## Produk Kayu Lestari Indonesia Semakin Dipercaya Pasar Inggris

Selasa, 24 September 2020



Foto: BIRO HUMAS KLHK

**Jakarta** - Wakil Menteri LHK Alue Dohong menggarisbawahi peran SVLK telah berhasil membantu dalam memangkas penambangan dan perdagangan kayu liar, dan di saat yang sama memberikan manfaat ekonomi secara nasional..

“Sekarang, 100% ekspor kayu dari Indonesia bersumber dari rantai pasokan yang diaudit secara independen, mencakup industri hilir dan hutan sebagai hulunya di seluruh negeri,” ujar Wamen Alue pada webinar dalam webinar “UK Market Update for FLEGT Timber Product: Indonesia’s Timber as Sustainable Partner for UK Market”,

“Sistem legalitas verifikasi kayu Indonesia menunjukkan perdagangan dan pembangunan serta pengelolaan hutan berkelanjutan dapat berjalan beriringan,” ucap Minister of State for Pacific and the Environment Inggris, Lord Goldsmith (24/09/2020)

Sumber: [ppid.menlhk.go.id](http://ppid.menlhk.go.id)

Untuk membaca berita  
selengkapnya

*Pindai aku!*





*Penangkaran Rusa Rakyat di Desa Komara, Kabupaten Takalar. Desa penyangga pada Taman Buru Komara. Hasil Penangkaran Rusa Rakyat dipersiapkan untuk Restocking rusa pada area Taman Buru Komara dengan target beberapa tahun kedepan, Taman Buru ini menjadi satu satunya Kawasan Konservasi di Indonesia yang beroperasi legal untuk aktivitas berburu.*

*Foto oleh Hamka*

## Nilai Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar per Komoditi Angka dalam miliar rupiah



Reptil  
*Reptile*



Karang  
*corals*



Amfibi  
*Amphibi*



Hewan lunak  
*mollusca*

2020	4.946,09	317,38	281,68	0,00
2019	1.283,57	0	0	0,29
2018	494,68	38,88	0	0,33
2017	1.361,71	40,42	0	0,75
2016	1.252,35	291,08	0	0,34
2015	1.350,17	115,62	0	0



Mamalia  
*mammals*



Ikan  
*Fish*



Burung  
*birds*



Hewan berbuku  
*arthropoda*

2020	7,20	2321,07	755,19	28,62
2019	1289,99	1334,37	13,05	7,72
2018	6,32	1195,55	7,69	32,05
2017	15,85	322,74	8,35	22,52
2016	729,65	340,74	12,13	2,73
2015	1520,88	346,83	154,35	2,79



Sekumpulan Kupu-kupu, satwa khas TN Bantimurung Bulusaraung menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Foto oleh Indra Pradana, TN Bantimurung Bulusaraung



Anggrek  
*orchids*



Gaharu  
*agarwood*



Pakis  
*fern*



Ramin  
*ramin*

Tahun	Anggrek orchids	Gaharu agarwood	Pakis fern	Ramin ramin
2020	9,31	69,21	2,38	0,00
2019	11,16	141,35	1,43	0
2018	17,46	66,94	1,04	0
2017	22,32	295,33	2,16	0
2016	17,62	1880,88	2,12	0
2015	39,29	385,79	3,03	1,99



Sonokeling  
*rosewood*



Pasak Bumi



Akar Laka



Limbah Anggrek

Tahun	Sonokeling rosewood	Pasak Bumi	Akar Laka	Limbah Anggrek
2020	2042,55	5,00	5,63	0,38
2019	5945,63	0	0	0
2018		0	0	0
2017	4270,83	0	0	0
2016	0	0	0	0
2015	0	0	0	0

Nilai ekspor TSL dan *bioprospecting* KLHK pada tahun 2020 secara total sebesar Rp. 10,79 Triliun, sebanyak Rp 5,9 Triliun atau 54,74% berasal dari komoditas hasil habitat alam sementara sisanya Rp 4,88 Triliun atau 45,26% berasal dari komoditas hasil penangkaran .

Nilai ekspor TSL dan *bioprospecting* pada tahun 2020 dihasilkan dari 7 (tujuh) komoditas satwa dan 7 (tujuh) komoditas tumbuhan liar dan bioprospecting. Sebesar 80,22% dari nilai ekspor total berasal dari hasil ekspor satwa liar sebesar Rp 8,56 Triliun dengan reptile sebagai komoditas ekspor terbesar. Sementara sebesar 19,78% atau Rp 2,13 Triliun berasal dari ekspor tumbuhan liar dan bioprospecting dengan Sonokeling sebagai komoditas ekspor terbesar.

Total Ekspor TSL dan  
Bioprospecting  
Rp.10.791.681.563.677  
atau USD 770,31 juta



**54,74%**  
Ekspor Hasil Habitat  
Alam Rp.  
5.907.150.897.618

**45,26%**  
Ekspor Hasil Penangkaran  
Rp. 4.884.530.666.059



Peningkatan populasi burung curik bali di habitat alami kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) salah satunya tidak terlepas dari peran para penangkar. Penangkar burung curik bali di Jawa Tengah dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah kembali melaksanakan restocking di TNBB pada Desember 2020.

strategi ex-situ link to in-situ yang dilakukan merupakan bagian dari upaya peningkatan populasi di alam. Upaya konservasi ini bertujuan untuk memulihkan populasi satwa-satwa prioritas yang terancam punah. Strategi ini memerlukan proses panjang yang dimulai dari keberhasilan menangkarkan burung dan kesediaan untuk menyerahkan 10 persen dari hasil penangkaran sebagai bagian dari restocking

Foto oleh Firliz Azhar



## Jumlah Pemegang Izin Usaha Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar Terdaftar

NO	Komoditi	Pemegang Izin (Unit)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Koral	37	37	59	65	66	55
2	Reptil	79	79	84	84	98	95
3	Gaharu	32	32	43	43	37	35
4	Flora (termasuk pakis)	7	7	6	10	15	22
5	Ikan	5	5	42	42	61	72
6	Arthropoda	4	4	11	11	20	20
7	Ramin	6	6	1	1	0	0
8	Buaya	13	13	18	18	24	23
9	Burung	29	29	32	32	47	46
10	Ampibi	10	10	12	12	23	24
11	Mamalia	15	15	25	25	30	30
12	Moluska	1	1	5	5	6	4
13	Sonokeling	0	0	89	89	111	121
14	Pasak Bumi	0	0	0	1	3	3
Jumlah		238	238	427	438	541	550

Pada tahun 2020, jumlah perusahaan pengedar TSL ke luar negeri yang telah memiliki sertifikat untuk melakukan ekspor sejumlah 540 perusahaan. Jumlah ini meningkat 1,66 persen atau bertambah 9 perusahaan bila dibandingkan dengan jumlah usaha TSL yang dapat melakukan ekspor ke luar negeri pada tahun 2019 (541 unit). bila dilihat ke belakang selama 5 (lima) tahunan, menunjukkan tren yang semakin meningkat dengan cukup signifikan. Kemudahan berusaha dan

penyederhanaan perizinan turut berkontribusi terhadap tren peningkatan jumlah unit usaha ini.

Jika dilihat berdasarkan tren peningkatan, pada tahun 2020 komoditi Flora, Ikan, Ampibi dan Sonokeling mengalami peningkatan jumlah izin usaha jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sonokeling menjadi komoditas dengan jumlah izin usaha terbanyak yaitu 121 unit. Kemudian disusul oleh Reptil sebanyak 97 unit.

Sedangkan komoditas terkecil pada tahun 2020 ini adalah Ramin, dimana tidak ada satupun unit usaha yang menjalankan usaha di bidang komoditas ini. Peringkat terendah ke dua adalah Pasak Bumi, dengan 3 unit usaha.

Bila dirata-rata untuk setiap unit usaha, maka devisa yang dapat dihasilkan adalah 19,62 miliar rupiah per tahun. Nilai tersebut meningkat sebesar 6,17 persen dari rata rata pada tahun 2019 yaitu 18,48 miliar rupiah pertahun.

### FAKTA DATA



## Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap pada Bidang Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Ke Luar Negeri

NO.	Komoditi	Tenaga Kerja(Orang)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Koral	1.295	1.295	1.925	1.985	2.000	1.850
2	Reptil	5.898	5.898	5.948	5.948	6.088	6.050
3	Gaharu	448	448	532	532	490	470
4	Flora (termasuk pakis)	150	150	140	190	240	310
5	Ikan	72	72	442	442	550	650
6	Arthropoda	68	68	138	138	238	230
7	Ramin	600	600	300	300	-	-
8	Buaya	260	260	310	310	370	360
9	Burung	2.700	2.700	2.730	2.730	2.880	2.870
10	Ampibi	220	220	250	250	460	470
11	mamalia	814	814	914	914	964	964
12	moluska	13	13	65	65	75	55
13	Sonokeling	-	-	7.916	7.916	8.246	8.400
14	Pasak Bumi	-	-	-	15	45	45
Jumlah		12.538	12.538	21.610	21.735	22.646	22.724

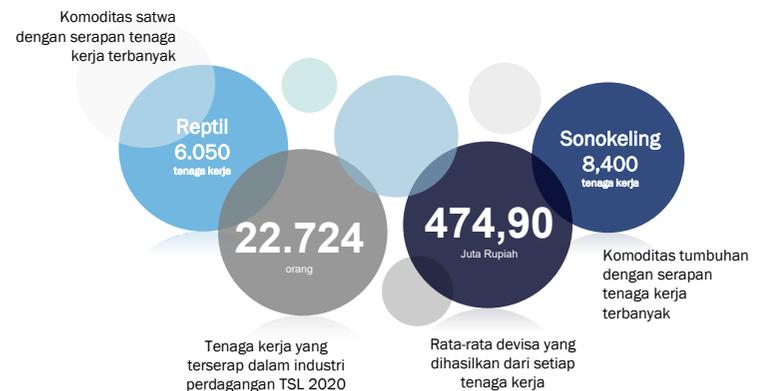
Apabila dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri penangkaran dan peredaran tumbuhan dan satwa liar, pada tahun 2020 serapan tenaga kerja sebesar 22.724. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan walaupun tidak signifikan (serapan tenaga kerja 2019 sebesar 22.646 orang).

Bila dilihat dari komoditasnya, tenaga kerja terbanyak untuk penangkaran satwa adalah pada komoditas jenis reptil dengan 6.050 orang karyawan, sedangkan untuk tumbuhan komoditas sonokeling menempati posisi pertama jumlah tenaga kerja dengan 8,400 orang pekerja.

Bila dilihat dari nilai ekspor yang dihasilkan pada tahun 2019 sebesar 10,03 triliun, maka didapatkan angka sebesar 474,90 juta rupiah devisa negara yang dihasilkan oleh setiap pekerja pada industri tumbuhan dan satwa liar. Nilai tersebut meningkat jika dibanding tahun 2019 sebesar 441,96 juta rupiah per pekerja

Seluruh tumbuhan dan satwa liar yang diekspor adalah bahan baku untuk kemudian diolah menjadi produk yang akan memberikan nilai tambah bagi negara-negara pengimpor TSL.

### FAKTA DATA



## Jumlah Investasi Industri Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Ke Luar Negeri

NO.	Komoditi	Investasi (juta rupiah)					
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Koral	159.100	159.100	253.700	279.500	283.800	282.700
2	Reptil	32.750	32.750	34.822	34.822	40.526	40.326
3	Gaharu	8.000	8.000	10.750	10.750	9.250	9.150
4	Flora (termasuk pakis)	1.750	1.750	1.500	2.500	3.750	4.400
5	Ikan	1.250	1.250	10.500	10.500	18.900	20.000
6	Arthropoda	1.000	1.000	2.750	2.750	5.200	5.000
7	Ramin	6.000	6.000	1.000	1.000	-	-
8	Buaya	6.500	6.500	9.000	9.000	12.000	11.900
9	Burung	8.700	8.700	9.600	9.600	14.100	14.000
10	Ampibi	3.000	3.000	3.600	3.600	6.900	7.200
11	mamalia	11.100	11.100	18.500	18.500	22.200	22.200
12	moluska	580	580	1.380	1.380	1.580	1.400
13	Sonokeling	-	-	366.796	366.796	371.196	372.200
14	Pasak Bumi	-	-	-	250	650	650
	Jumlah	239.730	239.730	723.898	750.948	790.052	791.126

Industri tumbuhan dan satwa liar menunjukkan tren investasi yang semakin meningkat sejak 2015 hingga 2020. Pada tahun 2015 industri TSL hanya berhasil menyerap investasi sebesar 239,73 miliar rupiah. Angka ini berlipat pada 5 (lima) tahun kemudian menjadi 791,13 miliar rupiah dalam setahun. Meningkatnya investasi ini turut dipicu masuknya jenis Sonokeling menjadi salah satu appendix CITES dari sebelumnya bukan merupakan jenis yang dilindungi. Investasi dari sektor Sonokeling sendiri memang sudah besar, sehingga turut meningkatkan investasi TSL secara keseluruhan.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi peningkatan nilai investasi meskipun tidak terlalu signifikan. Beberapa komoditi yang mengalami peningkatan pada tahun 2020 adalah komoditi Flora, Ikan, Ampibi, dan Sonokeling. Peningkatan paling signifikan ditunjukkan oleh komoditas ikan yang mencatatkan peningkatan 1500% dari investasi tahun 2014

Untuk komoditas ramin, selama 2 (dua) tahun tidak ada investasi untuk komoditas kayu ramin ini. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya substitusi bahan baku parquette (lantai kayu) dengan semakin majunya teknologi, sehingga kayu ramin yang dulu merupakan jenis kayu berserat halus sehingga nyaman bila digunakan sebagai lantai, menjadi tersubstitusi oleh jenis-jenis lantai atau papan parquette lain.

### FAKTA DATA



**IDR 791,13** miliar  
Jumlah investasi peredaran TSL ke Luar Negeri untuk tahun 2020



Komoditas dengan investasi tertinggi  
**Koral**  
282,7 miliar rupiah



**Sonokeling**  
372,20 miliar rupiah



*Kawanan ikan Damsel fish (Stegastes variabilis) yang berenang di atas terumbu karang indah. Lokasi kawanan ikan cantik ini berada di site selam Home Reef (Buoy I) - SPTN Wilayah II TN. Wakatobi.*

*Foto oleh Hendrawan*



## Indikator Kinerja Utama 09

### Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK

*Kegiatan pengambilan anakan tanaman bambu pada areal kemitraan konservasi dalam rangka pemberian akses kelola kawasan konservasi berupa pemungutan HHBK jenis bambu (Bambuseae) dan Pepulut (Urena lobata) seluas 10 ha. Pemberian akses kelola kawasan konservasi ini di berikan kepada Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Karya Mandiri desa Tebat Tenong Luar.*

*Foto oleh Emi Hayati Danis*

## IKHTISAR KINERJA

Pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan untuk meningkatkan perekonomian nasional, baik yang dilakukan oleh pemerintah, dan pelaku usaha yang berorientasi bisnis maupun yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan harus tetap berprinsip pada pengelolaan hutan lestari.



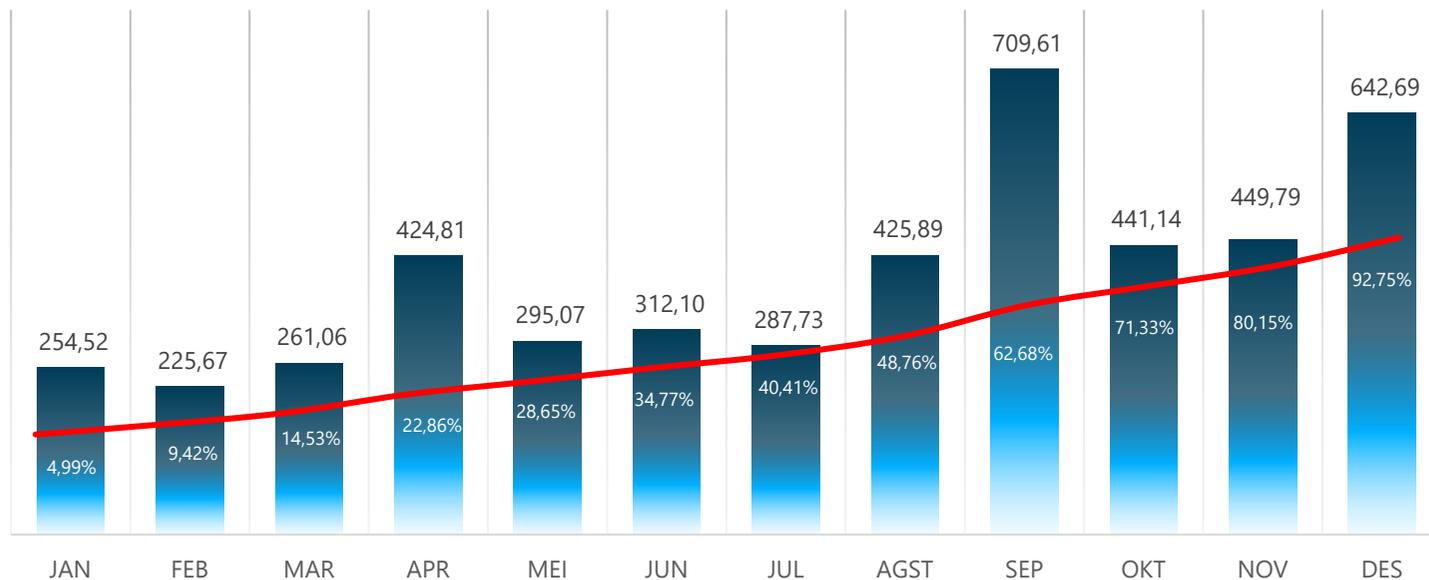
### Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional KLHK (Rp. Triliun)



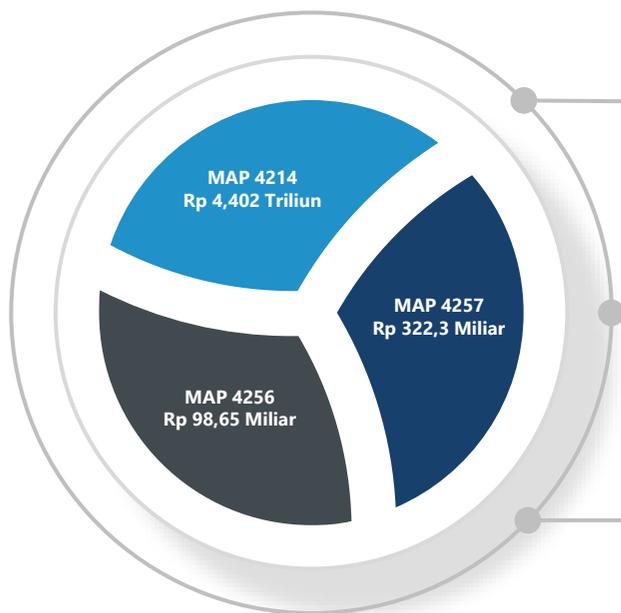
Penerimaan negara bukan pajak sektor fungsional Lingkungan Hidup dan Kehutanan cenderung meningkat dan mendukung keseimbangan primer keuangan negara. Penerimaan negara dari produksi kayu bulat dan pendapatan jasa lingkungan di taman nasional dan kawasan konservasi lainnya melalui kunjungan wisata telah melahirkan devisa negara sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 ini beberapa kegiatan wisata terpaksa harus ditutup untuk mengurangi penyebaran virus. Sehingga juga mengurangi penerimaan negara khususnya di sektor pariwisata. Selain itu juga penutupan akses beberapa negara seperti pelabuhan dan bandara menghambat proses ekspor kayu olahan dari Indonesia, hal inilah yang juga mempengaruhi turunnya PNBPN.

Pada tahun 2020, capaian PNBPN fungsional KLHK mencapai 4,629 triliun rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2019 capaiannya menurun 16,8%. Sedangkan berdasarkan target Renstra 2020-2024 sudah mencapai 17,47 %.

## PNBP Fungsional per Bulan (Miliar Rupiah)



\*Angka koreksi (-101,05 miliar rupiah)



Pendapatan Kehutanan : Dana Reboisasi, Penggunaan Kawasan Hutan, Provisi Sumberdaya Hutan, Pendapatan IIUPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman, Pemanfaatan Air dan Energi



Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan : Pendapatan Bunga dari rekening pembangunan hutan, Penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara (PNBP Umum)



Pendapatan Jasa Lainnya : Pendapatan wisata alam, Pendapatan iuran Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pendapatan Jasa di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## Perkembangan PNB Menurut Mata Anggaran Penerimaan

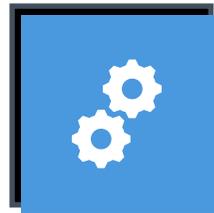
Perkembangan penerimaan negara menurut mata anggaran pendapatan mengalami penataan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018. Pungutan masuk wisata alam yang sebelumnya berada pada mata anggaran penerimaan (MAP) 4237 pindah ke MAP 4256, namun demikian secara konsisten pendapatan yang bergabung bersama Pendapatan Iuran dan Denda menjadi Pendapatan Jasa Lainnya dalam bentuk pendapatan wisata alam. Demikian halnya dengan pendapatan bunga dari rekening pembangunan hutan tergabung dalam Pendapatan Bunga (MAP 4257) yang sebelumnya termasuk dalam bagian MAP 4233.



Untuk melihat secara detail pendapatan negara dari pemanfaatan hutan produksi silahkan memindai QR Code di samping. (Halaman 21)



**MAP 4214**



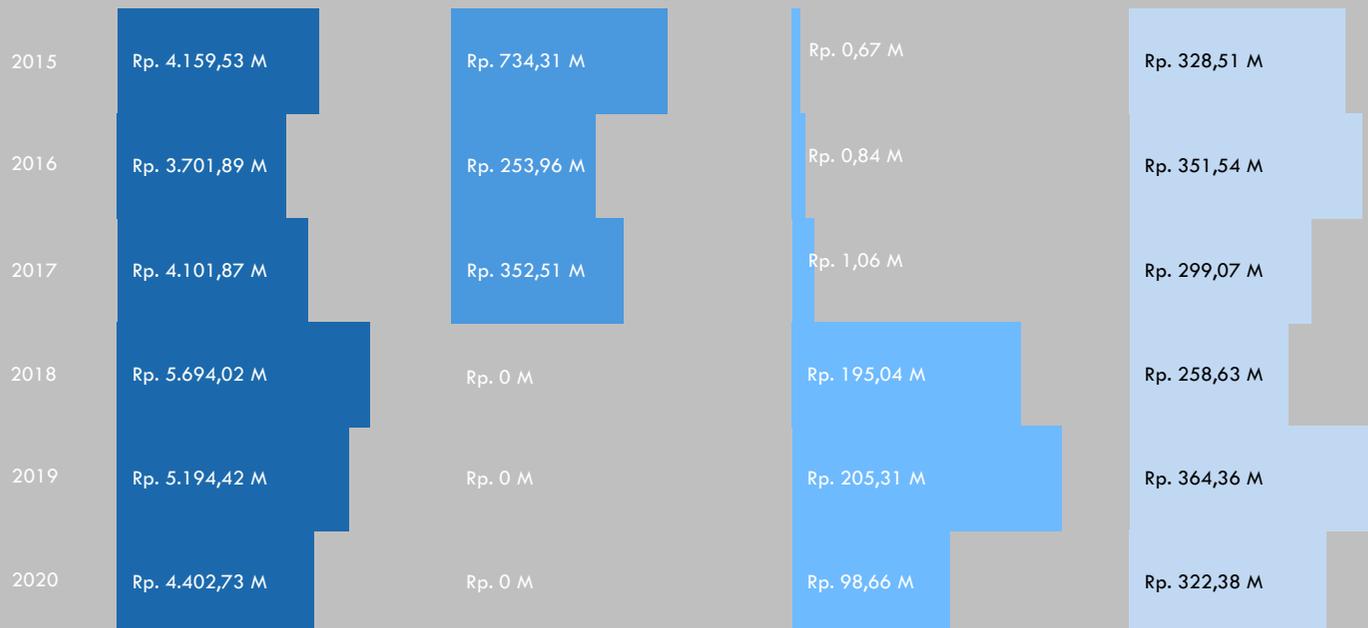
**MAP 4237**



**MAP 4256**



**MAP 4257**



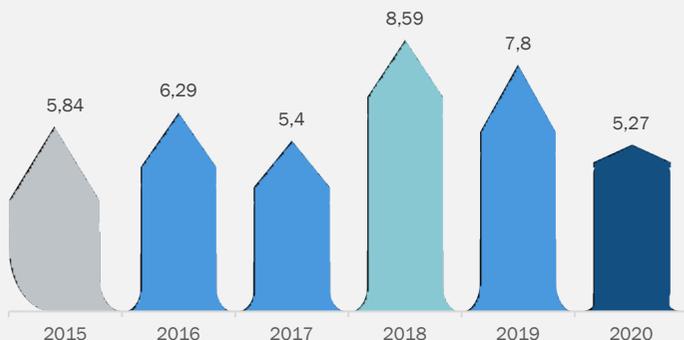
# Pendapatan Negara dari Produksi Kayu Bulat

## PRODUKSI KAYU BULAT (Juta M3)

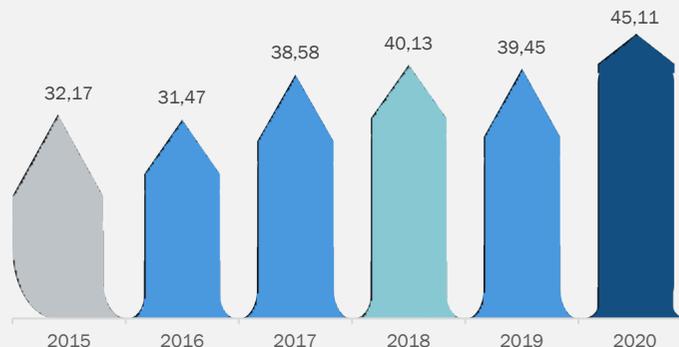


Produksi kayu bulat merupakan salah satu penyumbang devisa negara. Target produksi kayu bulat 30 juta m<sup>3</sup> pada tahun 2020 tercapai 120% dengan realisasi 51,30 30 juta m<sup>3</sup>. Produk hulu ini telah menggerakkan ekspor dalam bentuk pulp (bahan baku kertas), furniture dan kayu olahan. Kalimantan Tengah dan Riau menjadi produsen utama produksi kayu bulat baik untuk hutan alam dan hutan tanaman. Provinsi lain berkejaran mengikuti di belakangnya. Kayu bulat yang diproduksi ini berasal dari hutan alam dan hutan tanaman yang pengelolaannya dilakukan oleh pemegang ijin. Pemanfaatan hasil hutan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi negara dan juga tanpa mengurangi kaidah konservasi yang ada.

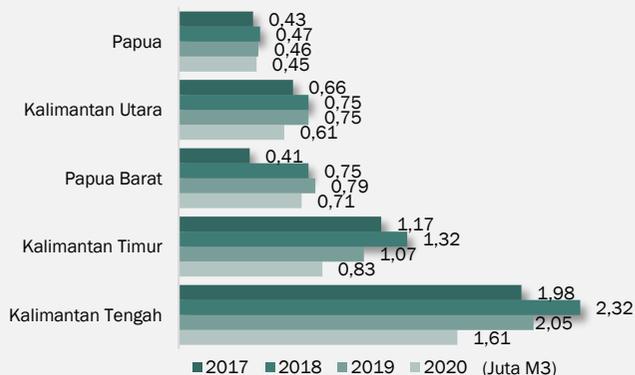
## PRODUKSI KAYU BULAT HUTAN ALAM (Juta M3)



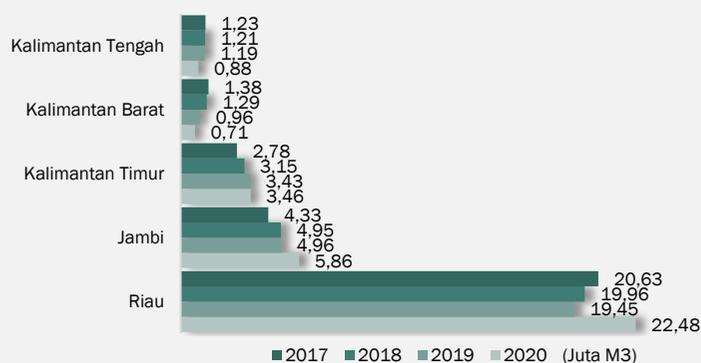
## PRODUKSI KAYU BULAT HUTAN TANAMAN (Juta M3)



## PROVINSI TERBANYAK PRODUKSI KAYU BULAT HUTAN ALAM



## PROVINSI TERBANYAK PRODUKSI KAYU BULAT HUTAN TANAMAN



## KUNJUNGAN WISATAWAN

TOTAL PENGUNJUNG  
TAHUN 2020

**3.342.905**

Kunjungan di kawasan konservasi terdiri dari pengunjung dari dalam negeri dan luar negeri. Pada tahun ini kunjungan wisata turun lebih dari 50% dibanding tahun 2019, tidak lain karena adanya Pandemi.

Wisatawan Nusantara



Wisatawan Mancanegara



## KAWASAN KONSERVASI

“ Keindahan alam Indonesia merupakan potensi penggerak ekonomi di bidang pariwisata. Kaum milenial yang tak hanya suka dengan kegiatan belanja barang kini kian menjajaki alam Indonesia untuk belanja pengalaman. Dari semua kalangan menunjukkan geliatnya dalam belanja pengalaman tak terlupakan ini. Kunjungan wisata yang relatif meningkat menunjukkan perputaran roda ekonomi yang semakin membaik. Namun di tengah pandemi ini, sektor wisata masih berusaha keras untuk bangkit dari keterpurukan dengan adanya reaktivasi kawasan yang tidak lupa tetap sesuai dengan protocol kesehatan yang ada.

### 10 TAMAN NASIONAL DENGAN KUNJUNGAN TERTINGGI

- 
- |                               |                 |                            |                 |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 1. TN Gunung Gede Pangrango   | : 258.506 orang | 6. TN Gunung Halimun Salak | : 112.613 orang |
| 2. TN Gunung Ciremai          | : 238.748 orang | 7. TN Baluran              | : 103.028 orang |
| 3. TN Bantimurung Bulusaraung | : 201.150 orang | 8. TN Gunung Merbabu       | : 88.903 orang  |
| 4. TN Bromo Tengger Semeru    | : 196.404 orang | 9. TN Komodo               | : 56.144 orang  |
| 5. TN Alas Purwo              | : 122.425 orang | 10. TN Bali Barat          | : 44.713 orang  |



*Lanskap TN. Bantimurung Bulusaraung dari atas yang memukau dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung diberi juga julukan "The Spectacular Tower Karst" sebagai representasi keunikan dan kekhasan karst yang memiliki beragam fungsi. Pada tahun 2020 TN Bantimurung Bulusaraung merupakan taman nasional dengan pengunjung terbanyak ketiga sebanyak 201.150 orang.*

*Foto oleh Indra Pradana*

# Rekapitulasi PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan

No	Satuan Kerja	Jumlah PNBP (Rp)
1	BBKSDA Jawa Barat	7.925.226.000
2	BBTN Bromo Tengger Semeru	6.288.350.000
3	BTN Komodo	5.526.367.500
4	BBTN GN. Gede Pangrango	4.522.793.000
5	BKSDA Jawa Tengah	2.321.812.500
6	BTN Baluran	1.989.279.500
7	BTN Gunung Ceremai	1.703.306.500
8	BTN Bantimurung Bulusaraung	1.296.376.000
9	BTN Alas Purwo	1.278.211.000
10	BTN Bali Barat	1.089.747.000
11	BBTN Gunung Leuser	994.766.500
12	BTN Gunung Halimun Salak	991.894.000
13	BBKSDA Jawa Timur	785.587.500
14	BKSDA Sumatera Selatan	783.300.500
15	BKSDA Bali	675.151.500
16	BTN Gunung Merbabu	594.635.000
17	BTN Kelimutu	536.621.500
18	BTN Tanjung Puting	534.117.500
19	BTN Bunaken	504.475.000
20	BBTN Teluk Cendrawasih	472.937.500
21	BKSDA DKI Jakarta	463.735.000
22	BBKSDA Sulawesi Selatan	399.124.000
23	BTN Way Kambas	339.186.500
24	BTN Gunung Merapi	290.892.500
25	BTN Manupeu Tanadaru Laiwangi W	285.972.500
26	BBTN Lore Lindu	272.292.500
27	BTN Gunung Rinjani	257.508.500
28	BTN Kutai	250.635.000
29	BKSDA Nusa Tenggara Barat	198.522.500
30	BKSDA Sulawesi Utara	188.670.000
31	BTN Ujung Kulon	151.284.000
32	BKSDA Kalimantan Selatan	142.505.000
33	BTN Meru Betiri	139.330.500
34	BBTN Kerinci Seblat	128.917.000
35	BTN Karimun Jawa	106.245.000
36	BTN Takabone Rate	106.180.000
37	BKSDA Bengkulu	100.991.250
38	BTN Kepulauan Togean	88.985.000

No	Satuan Kerja	Jumlah PNBP (Rp)
39	BBTN Bukit Barisan Selatan	85.693.500
40	BTN TAMBORA	85.662.500
41	BTN Kepulauan Seribu	79.350.500
42	BKSDA Kalimantan Timur	68.812.500
43	BKSDA Sulawesi Tengah	63.110.000
44	BKSDA Kalimantan Tengah	59.390.000
45	BTN Wakatobi	55.665.000
46	BTN Sebangau	53.671.000
47	BTN Tesso Nilo	51.807.500
48	BTN Berbak Sembilang	51.012.500
49	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	39.509.000
50	BBTN Betung Kerihun Sentarum	29.512.500
51	BKSDA Kalimantan Barat	26.738.500
52	BKSDA Sulawesi Tenggara	22.560.000
53	BBKSDA Sumatera Utara	19.359.500
54	BTN Lorentz	16.044.500
55	BKSDA NAD	15.527.500
56	BTN Gunung Palung	12.162.500
57	BTN Bogani Nani Wartabone	10.490.500
58	BTN Manusela	10.255.000
59	BTN Wasur	10.190.000
60	BTN Bukit Tiga Puluh	8.973.000
61	BKSDA Sumatera Barat	8.572.500
62	BBKSDA Riau	7.624.500
63	BTN Rawa Aopa Watumuhai	6.767.500
64	BTN Bukit Baka Bukit Raya	5.215.000
65	BKSDA D.I Yogyakarta	3.985.000
66	BTN Bukit Dua Belas	2.000.000
67	BBKSDA Papua Barat	1.295.000
68	BTN Batang Gadis	1.280.000
69	BTN Aketajawe Lolobata	955.000
70	BBKSDA Papua	-
71	BKSDA Jambi	-
72	BKSDA Maluku	-
73	BTN Siberut	-
74	BTN Kayan Mentarang	-
<b>A</b>	<b>Jumlah TN</b>	<b>27.116.372.250</b>
<b>B</b>	<b>Jumlah KSDA</b>	<b>18.522.752.000</b>
<b>C</b>	<b>Jumlah TN + KSDA</b>	<b>45.639.124.250</b>
<b>D</b>	<b>Dit. PJLHK</b>	<b>8.169.728.163</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>53.808.852.413</b>

## Rekapitulasi PNBP dari Menangkap/Mengambil/Mengangkut TSL Tahun 2020

NO	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	Direktorat KKH	16.911.399.444
2	BBKSDA Jatim	1.962.492.738
3	BBKSDA Jabar	1.277.613.844
4	BBKSDA Sumut	590.308.350
5	BKSDA Kalbar	524.359.170
6	BBKSDA Papua	509.144.859
7	BKSDA Sumsel	382.476.700
8	BKSDA Jateng	343.347.450
9	BBKSDA Riau	225.713.000
10	BKSDA Yogyakarta	206.805.000
11	BBKSDA Sulsel	200.484.472
12	BBKSDA Papua Barat	186.170.040
13	BKSDA Maluku	168.736.505
14	BKSDA Sulteng	150.344.606
15	BKSDA Kalsel	127.093.000
16	BKSDA Kalteng	123.250.000
17	BKSDA Bali	115.211.720
18	BKSDA Sultra	105.497.530
19	BKSDA Jakarta	101.715.000
20	BKSDA Bengkulu	80.454.549
21	BKSDA NTB	58.853.207
22	BKSDA Jambi	54.765.420
23	BKSDA Sulut	43.893.000
24	BKSDA Sumbar	38.318.380
25	BKSDA NAD	27.579.300
26	BKSDA Kaltim	25.140.000
27	BBKSDA NTT	1.627.760
<b>JUMLAH</b>		<b>24.542.795.044</b>

Sumber :  
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem



*Flying Dragon, cicak terbang atau sering disebut cekibar. Jenis ini dikenal dengan nama ilmiah Dracovolans linnaeus. Distribusi cicak terbang ini hanya terbatas di kepulauan Sulawesi dan merupakan satwa endemic pulau tersebut. Diantaranya di Kepulauan Buton, Kabaena dan Muna.*

*Foto oleh Donny Heru Kristianto*

A photograph showing two forest guards in a lush green forest. One guard, wearing a purple hijab and a dark long-sleeved shirt with 'GEMUK BSI' written on it, is pointing towards a young tree. The other guard, wearing a green long-sleeved shirt and a wide-brimmed hat, is holding the tree. The background is filled with dense green foliage and tall trees.

## Indikator Kinerja Utama 10

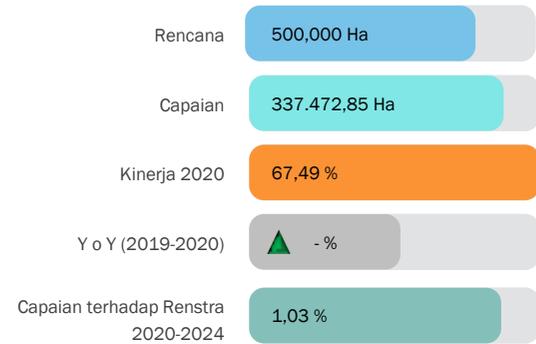
### Luas Kawasan Hutan Dengan Status Penetapan

Penjaga Hutan Wonosadi sedang merawat pohon yang tumbuh subur di daerah dengan suhu relatif dingin dan terletak di daerah berketinggian lebih dari 300 mdpl.

Foto oleh Daffa Ulhaq Adabi.

# IKHTISAR KINERJA

Penguikuan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan (P.62/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tentang Penguikuan Kawasan Hutan, Pasal 1 nomor 3). Tujuan dari kegiatan Penguikuan Kawasan Hutan adalah untuk memberikan kepastian hukum atas status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan (PP 44/2004 pasal 15).

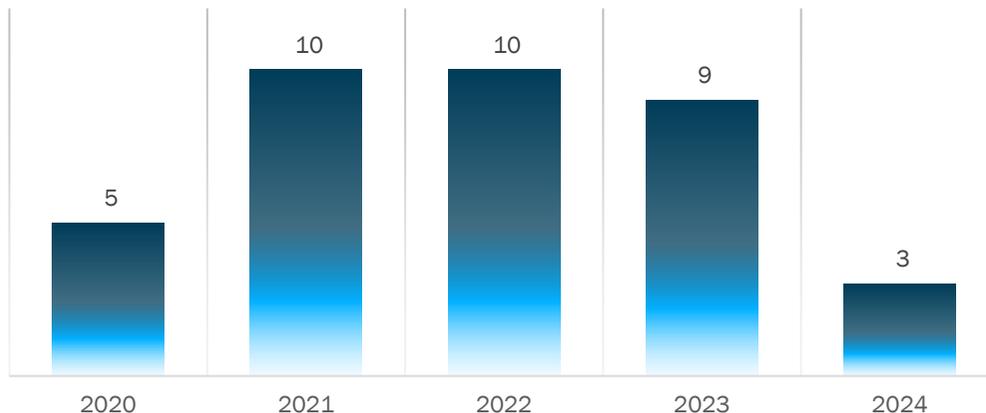


Berdasarkan Rencana Strategi KLHK dan RPJMN 2020 - 2024, target Penetapan Kawasan Hutan tahun 2020 adalah 5 juta hektare, namun dengan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 terjadi perubahan target menjadi 0,5 juta hektare.

Dalam rangka menjaga dan mempertahankan kawasan hutan yang telah ditetapkan tersebut, data dan informasi tentang kawasan hutan harus selalu dimonitor dan diperbarui (*update*). Kegiatan monitoring dan pembaruan (*updating*) data dan informasi kawasan hutan juga meliputi kawasan hutan yang masih dalam proses usulan penetapannya, sehingga diharapkan pada saat kawasan hutan tersebut ditetapkan, tidak terdapat lagi hak-hak pihak ketiga atau permasalahan yang timbul berkaitan dengan penetapan kawasan hutan tersebut.

Pada tahun 2020 luas kawasan yang sudah ditetapkan seluas 337.472,85 ha atau 67,49 % dari target seluas 500.000 ha. Sebenarnya pada tahun 2020 sudah dilakukan penetapan kawasan seluas 682.359,32 ha pada 46 kawasan, akan tetapi SK yang diterbitkan hingga akhir Desember baru 31 SK. Sisanya 15 SK masih dalam proses penerbitan SK. Dari target Renstra 2020-2024 pada tahun 2020 baru tercapai 1,05 %.

## RENCANA PENETAPAN KAWASAN HUTAN BERDASARKAN RPJMN 2020-2024 (Juta Ha)



Untuk melihat update real-time luas Kawasan Hutan Indonesia

*Pindai aku!*

# KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN INDONESIA

Kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual dapat diwujudkan melalui penetapan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan agar suatu kawasan hutan mempunyai kepastian status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan.



**5.321.321 Ha (4,23 %)**  
Kawasan Konservasi  
Perairan



**22.088.573,40 Ha (17,56 %)**  
Kawasan Konservasi  
Daratan



**29.578.158,29 Ha (23,51 %)**  
Hutan Lindung



**26.772.337,04 Ha (21,28 %)**  
Hutan Produksi Terbatas



**29.215.611,55 Ha (23,22 %)**  
Hutan Produksi Tetap



**12.840.981,68 Ha (10,21 %)**  
Hutan Produksi  
Yang Dapat Dikonversi

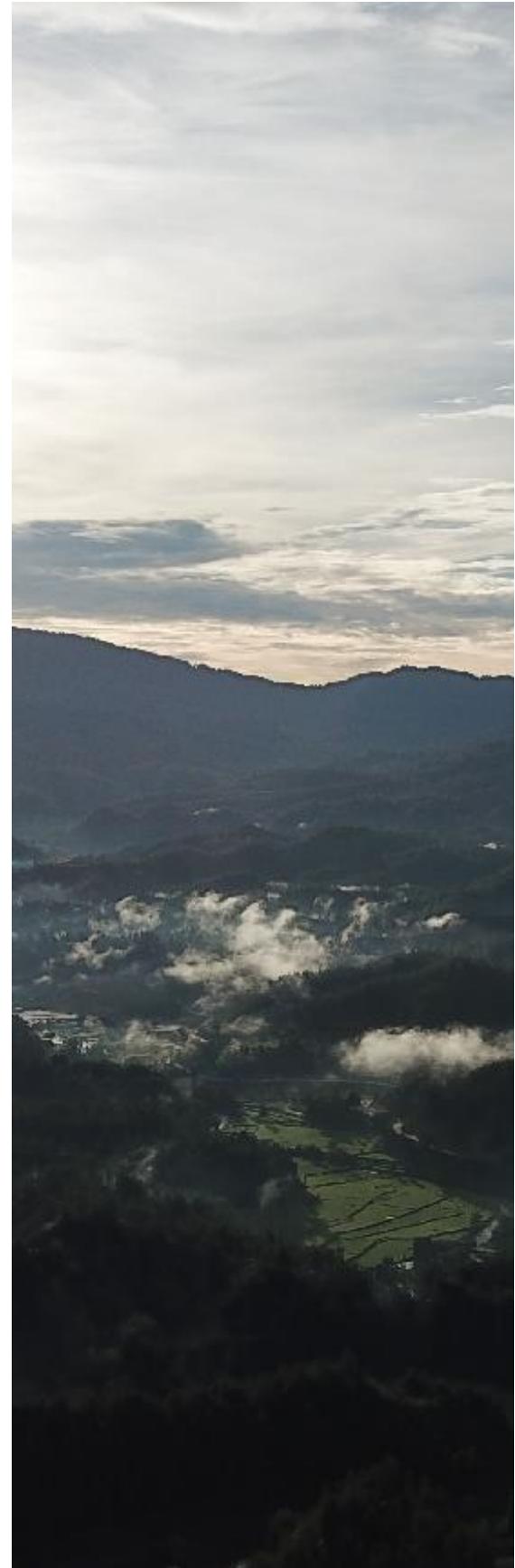
**Total : 125.817.022,96 Ha**

Sumber data : LKJ Ditjen PKTL KLHK 2020

## Data Penetapan Kawasan Hutan s/d Desember 2020

Hingga tahun 2020, secara kumulatif telah ditetapkan kawasan hutan sebanyak 2.107 unit kelompok hutan dengan total luas **88.585.951** ha atau 73,52 % dari total luas darat kawasan hutan (120.495.714,96 ha).

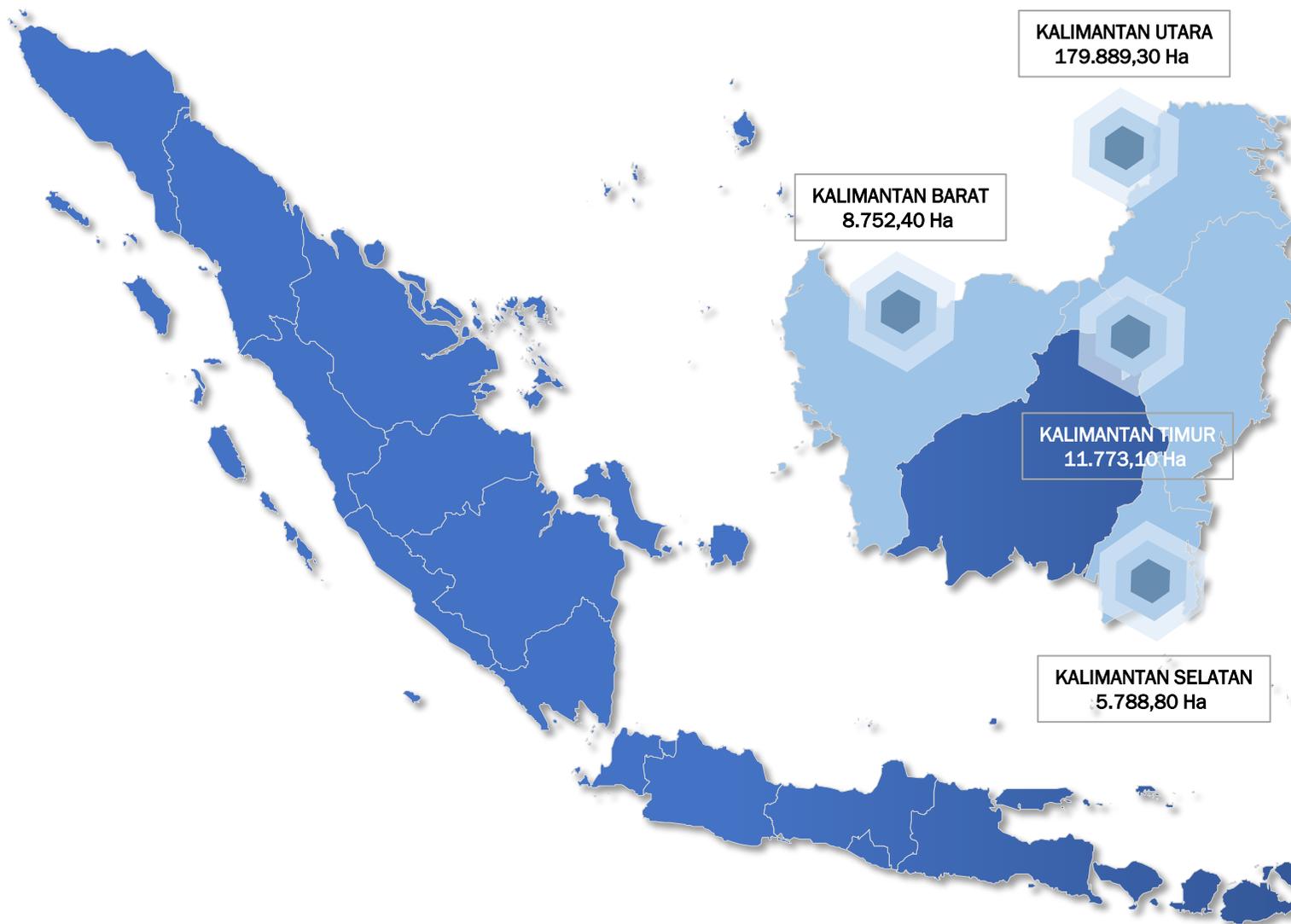
Provinsi	Luas (Ha)	Jumlah SK
Aceh	926.198	19
Bali	137.428	25
Bangka Belitung	541.821	87
Banten	202.427	21
Bengkulu	705.348	54
DI. Yogyakarta	8.861	9
DKI. Jakarta	107.856	4
Gorontalo	805.289	32
Jambi	1.731.662	47
Jawa Barat	952.659	141
Jawa Tengah	787.177	137
Jawa Timur	971.201	146
Kalimantan Barat	6.149.706	165
Kalimantan Selatan	1.509.567	44
Kalimantan Tengah	4.094.156	30
Kalimantan Timur	7.970.231	87
Kalimantan Utara	3.567.355	23
Kep. Riau	104.106	27
Lampung	603.237	29
Maluku	2.669.736	120
Maluku Utara	1.418.375	58
Nusa Tenggara Barat	1.187.581	62
Nusa Tenggara Timur	1.045.131	142
Papua	24.689.346	102
Papua Barat	8.121.899	39
Riau	2.117.002	52
Sulawesi Barat	1.061.994	19
Sulawesi Selatan	2.035.299	68
Sulawesi Tengah	2.563.697	62
Sulawesi Tenggara	3.263.658	46
Sulawesi Utara	381.359	60
Sumatera Barat	1.413.859	51
Sumatera Selatan	2.982.021	51
Sumatera Utara	1.758.708	48
<b>Grand Total</b>	<b>88.585.951</b>	<b>2.107</b>



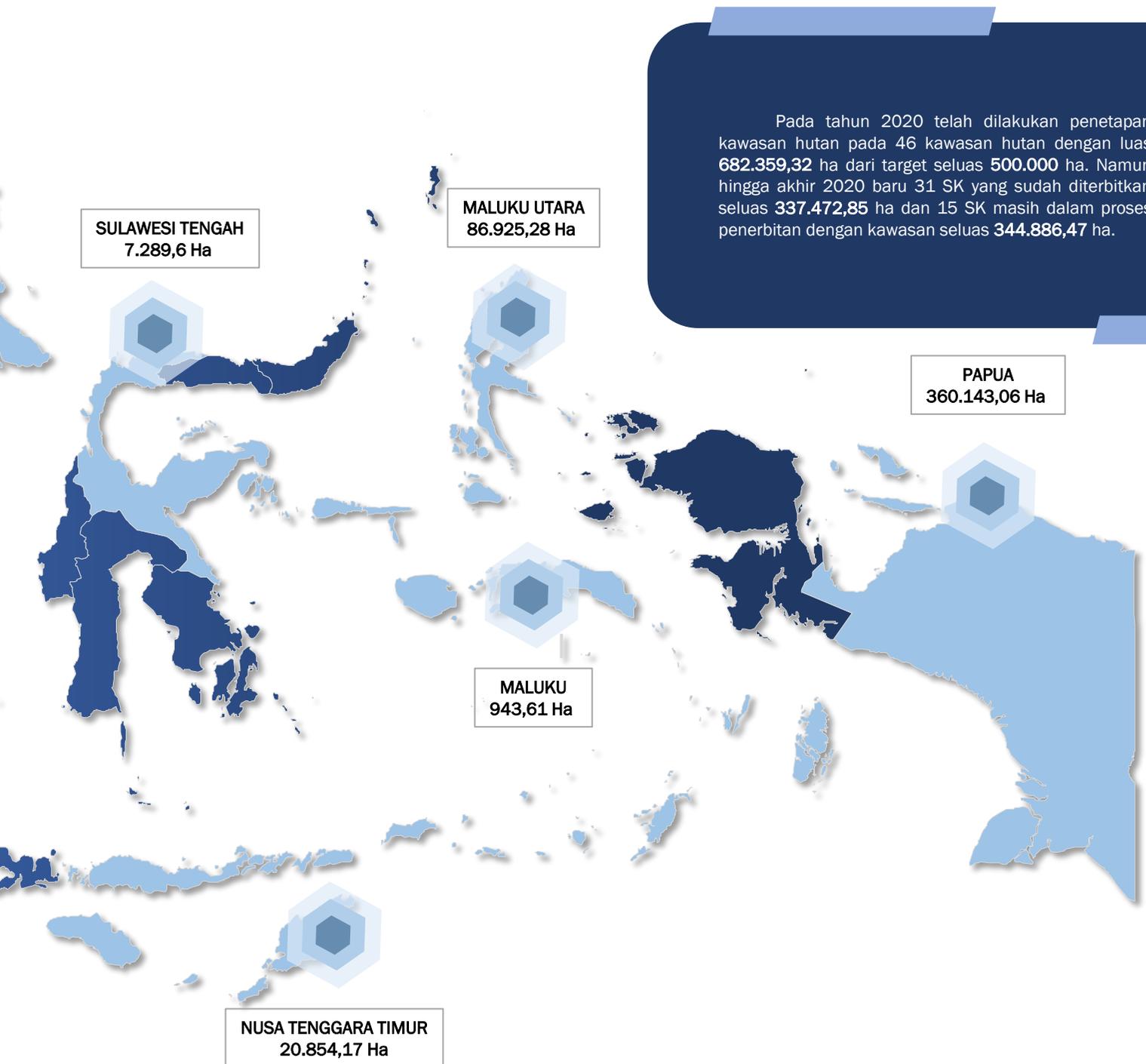


*Landscape Pada Jalur Pendakian Gunung Gandang Dewata Di  
TN. Gandang Dewata, Sulawesi Barat. Foto oleh Hamka*

## PENETAPAN KAWASAN



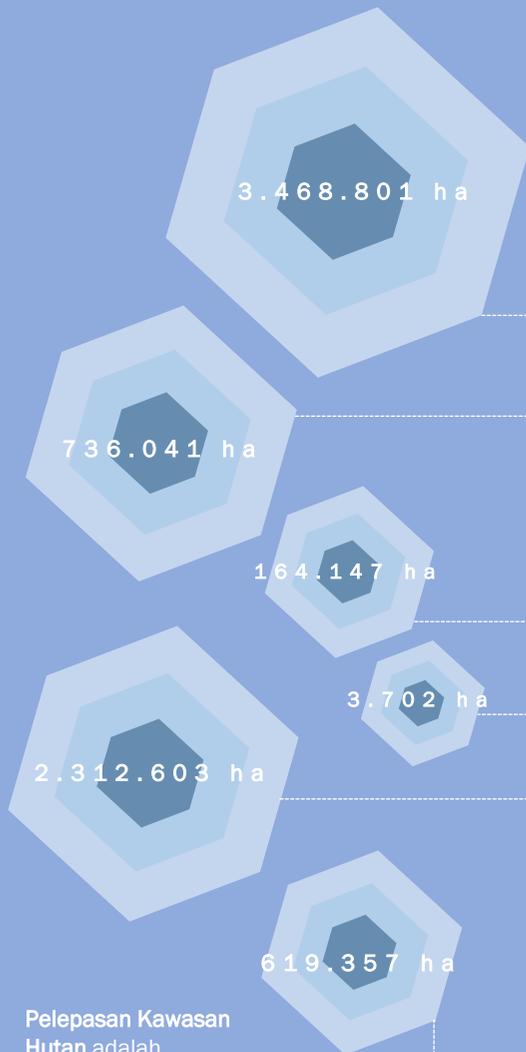
## HUTAN TAHUN 2020



Pada tahun 2020 telah dilakukan penetapan kawasan hutan pada 46 kawasan hutan dengan luas **682.359,32** ha dari target seluas **500.000** ha. Namun hingga akhir 2020 baru 31 SK yang sudah diterbitkan seluas **337.472,85** ha dan 15 SK masih dalam proses penerbitan dengan kawasan seluas **344.886,47** ha.

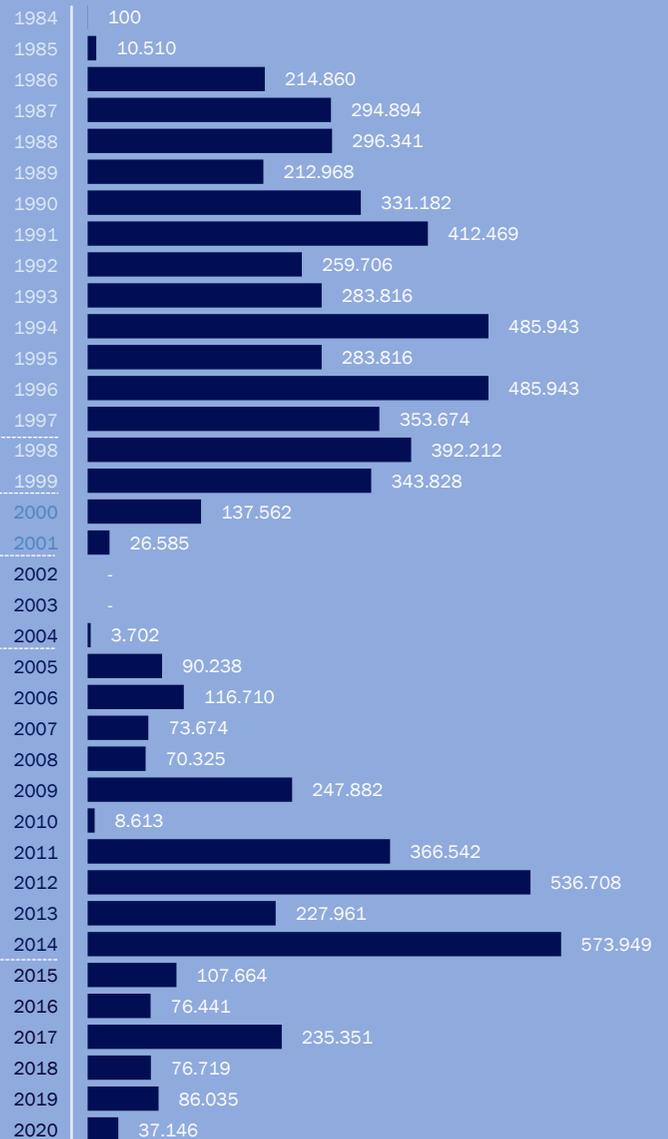
## BOX INFORMASI

### LUAS PELEPASAN KAWASAN HUTAN 1984-2020



**Pelepasan Kawasan Hutan** adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan.

**TAHUN LUAS DALAM HEKTAR (HA)**





*TN. Meru Betiri yang terletak di sebelah timur pulau Jawa memiliki keindahan hutan dan pantainya yang luar biasa. Juga satwanya yang beragam dan eksotis memadu bersama alam. TN. Meru Betiri merupakan kawasan hutan yang telah mantap karena telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Lokasi Pantai Sukamade, TN Meru Betiri.*

*Foto oleh Ardi.*



*Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menghadiri acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2020 yang dilaksanakan secara virtual.*

*Semangat Indonesia Maju, upaya percepatan penetapan kawasan hutan terus dilakukan untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap dan kuat, memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan hutan di Indonesia.*

*Foto oleh M Luthfi*

## Indikator Kinerja Utama 11

# Luas Kawasan Hutan Yang Dilepaskan Untuk TORA

*Desa Long Suluy Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, salah satu desa yang didampingi oleh proyek Forclime FC yang bersumber dari dana Hibah Luar Negeri dalam rangka Demonstration Activity penurunan emisi gas rumah kaca.*

*Foto oleh Tio Kosasih*



Untuk mengetahui Informasi tentang Reforma Agraria



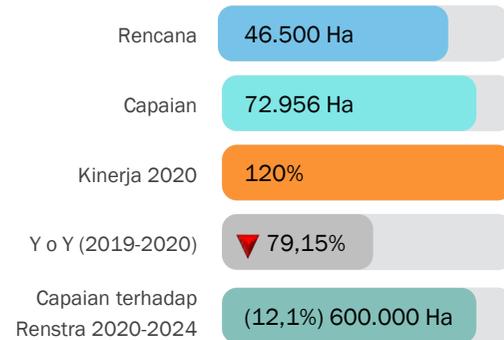
*Pindai aku!*



# IKHTISAR KINERJA

**72.956 hektar**

Dari target sebesar 46.500 hektar, atau tercapai 120%. Mendukung sasaran strategis no. 3 yaitu terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Target hingga 2024 seluas 600.000 Hektar.



Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) merupakan salah satu sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KLHK telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendukung kegiatan TORA. Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan pemerataan dalam hal pengelolaan/pemanfaatan lahan serta penggunaan sumber daya hutan oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

Tujuan dari reforma agraria adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan; untuk menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; mendukung peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan; memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria.



Proses eksplorasi lokasi Padat Karya Penanaman Mangrove pada Sub Das Sungai Barito sebagai upaya menggerakkan roda perekonomian pada masa pandemi Covid-19

Foto oleh Galih Primadani

## Capaian Progres TORA



**2,6 juta hektar**

Luas kumulatif areal kawasan hutan yang dilepas untuk tanah obyek reforma agraria (TORA) hingga tahun 2020.

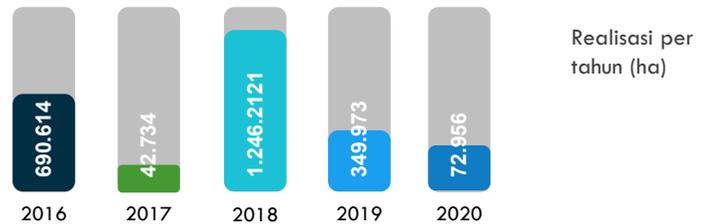
Realisasi TORA tahun 2020 dengan rincian



Perubahan Batas  
(SK Biru sebanyak 53 SK)  
**70.184 Ha**



SK Pelepasan  
untuk Transmigrasi (3 unit)  
**2.772 Ha**



Evaluasi terhadap pencapaian TORA menjadi salah satu kunci untuk mendukung akses masyarakat terhadap tanah. Melalui Evaluasi ini dapat diketahui capaian progres TORA dan juga realisasi TORA.

Sampai dengan akhir tahun 2020, pencapaian progres TORA telah mencapai 72.956 Hektar. Capaian tersebut meliputi perubahan batas (SK Biru sebanyak 53 SK) 70.184 Hektar dan SK Pelepasan untuk transmigrasi sebanyak 3 unit.

### Rincian Realisasi TORA SK Biru

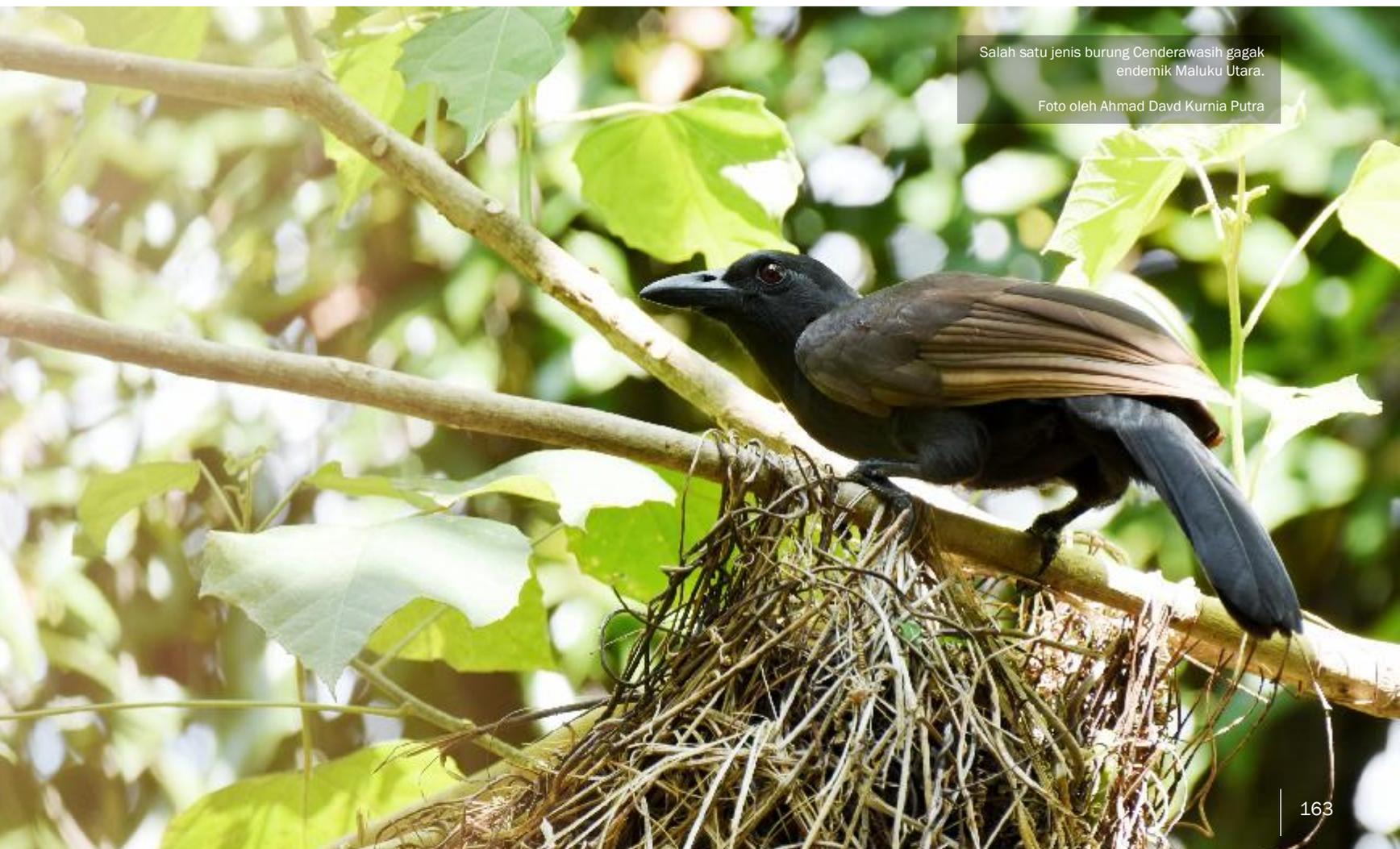
\*SK Biru merupakan SK yang dikeluarkan untuk TORA

NO	Provinsi	Kabupaten	Nomor Surat Keputusan (SK)	Tanggal	Luas (Ha)
1	Maluku Utara	Halmahera Tengah	SK.152/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	11 Maret 2020	4.866,50
2	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	SK.153/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	11 Maret 2020	281,14
3	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	SK.132/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	3 Maret 2020	102,64
4	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Timur	SK.134/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	3 Maret 2020	71,51
5	Sulawesi Tenggara	Kolaka	SK.133/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	3 Maret 2020	438,23
6	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	SK.131/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	3 Maret 2020	13.268,59
7	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	SK.130/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	3 Maret 2020	1.702,98
8	Maluku Utara	Halmahera Barat	SK.138/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	5 Maret 2020	484,41
9	Maluku Utara	Halmahera Timur	SK.137/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	5 Maret 2020	2.487,69
10	Maluku Utara	Tidore Kepulauan	SK.136/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	5 Maret 2020	255,94
11	Sulawesi Tengah	Banggai	SK.147/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	9 Maret 2020	3.650,41
12	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Selatan	SK.140/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	9 Maret 2020	322,27
13	Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	SK.141/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	9 Maret 2020	278,93
14	Sulawesi Tenggara	Konawe	SK.145/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	9 Maret 2020	1.642,24
15	Maluku	Kota Tual	SK.144/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	9 Maret 2020	5,25

NO	Provinsi	Kabupaten	Nomor Surat Keputusan (SK)	Tanggal	Luas (Ha)
16	Sulawesi Utara	Minahasa Tenggara	SK.148/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	9 Maret 2020	9,23
17	Sulawesi Tengah	Morowali	SK.150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2020	9 Maret 2020	120,87
18	Aceh	Aceh Tamiang	SK.188/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2020	13 April 2020	1.365,55
19	Bengkulu	Bengkulu Utara	SK.203/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2020	22 April 2020	48,02
20	Sulawesi Tengah	Buol	SK.200/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2020	22 April 2020	23,78
21	Sulawesi Tengah	Tojo Una una	SK.198/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2020	22 April 2020	2.399,08
22	Bengkulu	Muko-muko	SK.202/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2020	23 April 2020	21,56
23	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	SK.211/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2020	27 April 2020	4.446,31
24	Sulawesi Tenggara	Kolaka Timur	SK.204/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2020	27 April 2020	445,04
25	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	SK.215/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2020	30 April 2020	661,55
26	Sulawesi Tenggara	Kolaka Utara	SK.214/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2020	30 April 2020	160,24
27	Kalimantan Barat	Sekadau	SK.255/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2020	16 April 2020	6.901,20
28	Kalimantan Tengah	Kapuas	SK.220/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2020	8 Mei 2020	8.169,47
29	Bangka Belitung	Bangka Barat	SK.292/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	17 Juli 2020	7,28
30	Bangka Belitung	Bangka Selatan	SK.296/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	17 Juli 2020	10,76
31	Nusa Tenggara Barat	Dompu	SK.293/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	17 Juli 2020	33,00
32	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	SK.294/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	17 Juli 2020	35,63
33	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	SK.295/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	17 Juli 2020	46,70
34	Sulawesi Tengah	Morowali Utara	SK.303/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	27 Juli 2020	3.244,44
35	Bangka Belitung	Bangka Tengah	SK.308/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	28 Juli 2020	199,82
36	Kep. Riau	Batam	SK.317/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	30 Juli 2020	78,91
37	Kep. Riau	Kep. Anambas	SK.315/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	30 Juli 2020	72,51
38	Kep. Riau	Kota Tanjungpinang	SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	30 Juli 2020	7,79
39	Kep. Riau	Lingga	SK.316/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	30 Juli 2020	53,22
40	Jambi	Muaro Jambi	SK.310/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	30 Juli 2020	1.505,05
41	Jambi	Tanjung Jabung Barat	SK.311/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020	30 Juli 2020	598,30
42	Papua Barat	Teluk Bintuni	SK.313/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2020	30 Juli 2020	5.088,72
43	Papua Barat	Teluk Wondama	SK.312/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2020	30 Juli 2020	576,77
44	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	SK.324/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020	04 Agustus 2020	11,44
45	Sulawesi Selatan	Barru	SK.328/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020	7 Agustus 2020	2.103,11
46	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	SK.345/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020	28 Agustus 2020	494,97
47	Nusa Tenggara Timur	Lembata	SK.346/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020	28 Agustus 2020	159,76
48	Nusa Tenggara Timur	Ngada	SK.347/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020	28 Agustus 2020	16,183
49	Nusa Tenggara Timur	Malaka	SK.348/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020	28 Agustus 2020	23,445
50	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	SK.349/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020	28 Agustus 2020	128,26
51	Kep. Riau	Karimun	SK.359/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2020	07 September 2020	235,11
52	Kep. Riau	Bintan	SK.361/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2020	07 September 2020	778,28
53	Bengkulu	Kaur	SK.360/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2020	07 September 2020	43,64
<b>J u m l a h</b>					<b>70.184</b>

## Rincian Realisasi TORA 3 SK Transmigrasi

NO	Provinsi	Kabupaten	Lokasi	SK Pelepasan/Surat Penegasan		Tahun SK	Las (Ha)
				Nomor	Tanggal		
1	Maluku Utara	Halmahera Tengah	Kusubibi Jojame	649/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019	30 Agustus 2019	2019	1.089,69
2	Maluku Utara	Halmahera Timur	Dorosagu-patlean Xviii/D/4,5	743/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2019	27 September 2019	2019	487,92
3	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	Sebabi Viii/A/1	544/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019	8 August 2019	2019	1.194,85
<b>J u m l a h</b>							<b>2.772,46</b>



Salah satu jenis burung Cenderawasih gagak endemik Maluku Utara.  
Foto oleh Ahmad Davd Kurnia Putra

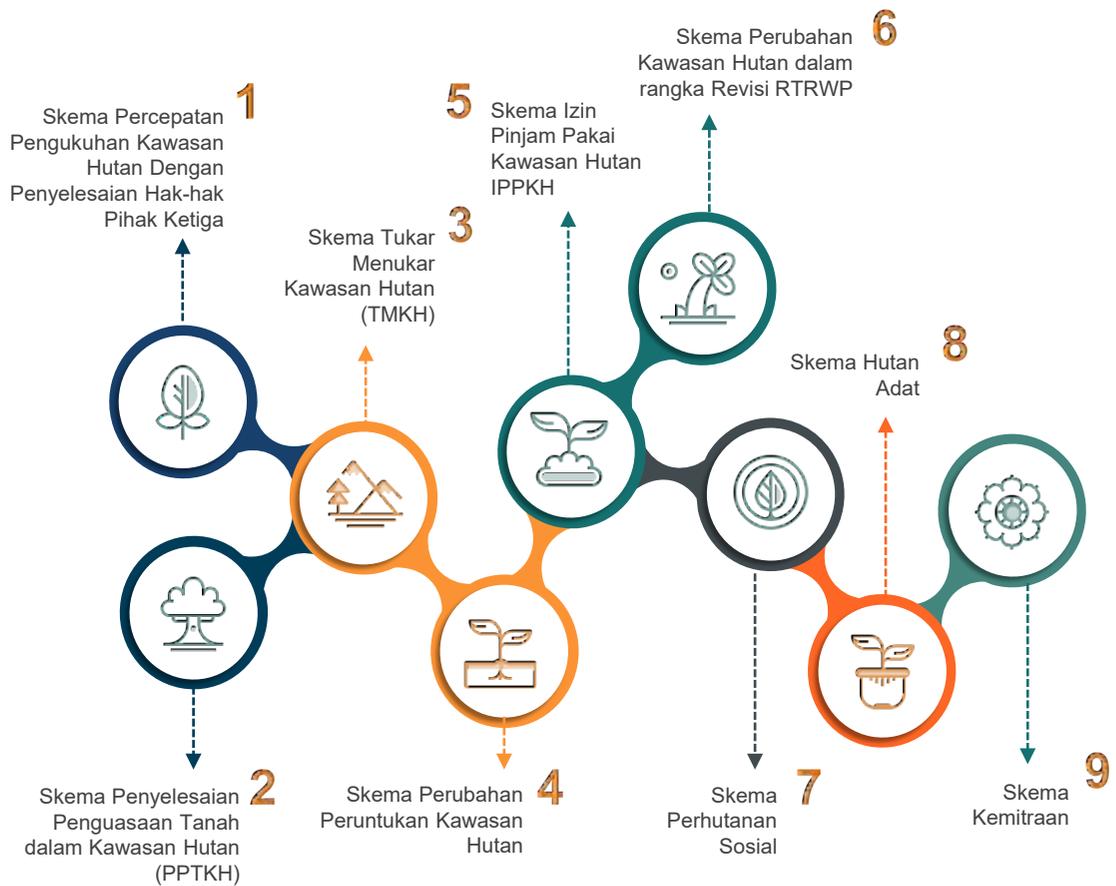
## Tipologi Konflik Kawasan Hutan

- 01 Klaim masyarakat atas IUPHHK dan IPPKH.
- 02 Permohonan pelepasan tanah warisan dan hak-hak lama pada kawasan hutan.
- 03 Permohonan *enclave* dari kawasan hutan.
- 04 Tanah Ulayat di dalam kawasan hutan.
- 05 Klaim masyarakat atas kawasan hutan.
- 06 Permasalahan pembagian lahan APL yang berasal dari perubahan peruntukan.
- 07 Pembebasan tanah untuk lahan kompensasi/pengganti yang menurut masyarakat belum selesai.
- 08 Pemekaran Provinsi/Kabupaten dalam kawasan hutan.
- 09 Pembentukan desa definitif dalam kawasan hutan.
- 10 Sengketa lahan kawasan hutan yang akan dikelola dengan pola PHBM (Pola Perum Perhutani).
- 11 Keberadaan infrastruktur pemerintahan di dalam kawasan hutan.
- 12 Sertifikat di dalam kawasan hutan.

Selama perjalanan tahun 2020 penetapan SK TORA menjumpai beberapa konflik ditingkat tapak. Mengurai konflik menjadi solusi menjadi tantangan tahun ini bagi KLHK. Memastikan SK yang menjadi hak masyarakat atas lahan menjadi tanggung jawab KLHK. Berikut tipologi konflik dan skema penyelesaian konflik yang dijumpai.



## Skema Penyelesaian Konflik Agraria



Salah satu jenis burung cekakak dengan nama latin *Todirhamphus chloris* adalah spesies burung endemic Maluku Utara.

Foto oleh Ahmad Davd Kurnia Putra



Presiden Joko Widodo pada Kamis, 7 Januari 2021, menyerahkan surat keputusan (SK) untuk Hutan Sosial, Hutan Adat, dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) se-Indonesia. Penyerahan dilakukan kepada 30 perwakilan penerima yang hadir terbatas di Istana Negara, Jakarta, dan kepada penerima lainnya yang mengikuti acara secara virtual di 30 provinsi.

Berita

Tanah Obyek Reforma Agraria

Tahun 2020

Sepanjang perjalanan tahun 2020 pembahasan tentang Tanah Obyek Reforma Agraria atau yang sering disebut dengan TORA menjadi salah satu berita yang sering diliput oleh media masa.

Berikut salah satu petikan informasi tentang Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) tahun 2020

## Titah Jokowi, Penyelesaian Masalah Tanah Dipercepat

Kamis, 03 Des 2020



Foto: BIRO PERS SETPRES

**Jakarta** - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan para pegiat reformasi agraria hari ini. Dalam pertemuan ini, Jokowi ingin mengetahui berbagai persoalan yang ada di lapangan serta menemukan solusi yang disepakati bersama.

Jokowi ingin adanya percepatan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

"Ini agar betul-betul nanti bisa terealisasi sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan reforma agraria bisa mengalami percepatan dan akselerasi dalam menyelesaikan (persoalan) yang belum-belum," kata Jokowi, Kamis (3/12/2020).

Sumber: [finance.detik.com](https://finance.detik.com)

Untuk membaca berita  
selengkapnya

*Pindai aku!*





*Walaupun progres TORA mengalami percepatan, tetapi dalam pelaksanaannya status kawasan hutan menjadi salah satu pertimbangan yang utama, sebagaimana halnya kawasan hutan yang terdapat ekosistem penting di dalamnya tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan yang menjadi habitat terbaik bagi satwa liar  
Foto oleh Ineke Tya Claudya Sarwono Putri*



## Indikator Kinerja Utama 12

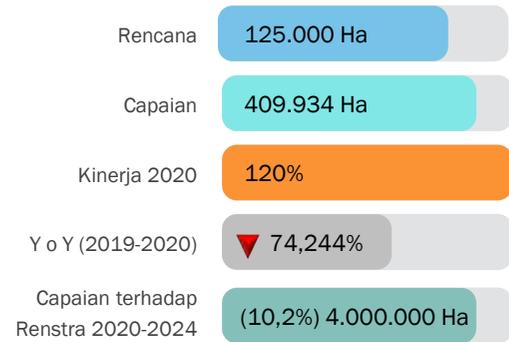
### Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat

*Landscape Desa Rante Pongko, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Desa Terakhir menuju Jalur Pendakian Gandang Dewata, Pada Kawasan TN. Gandang Dewata. Desa Rante Pongko Desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional warga sekitar mendapatkan akses pengelolaan Kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif berkat adanya TN. Gandang Dewata. Foto oleh Hamka*

# IKHTISAR KINERJA

## 409.934 hektare

Dari target sebesar 125.000 hektar, atau tercapai 120%. Mendukung sasaran strategis no. 3 yaitu terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Target hingga 2024 seluas 4.000.000 Hektare, atau telah tercapai 10,2%

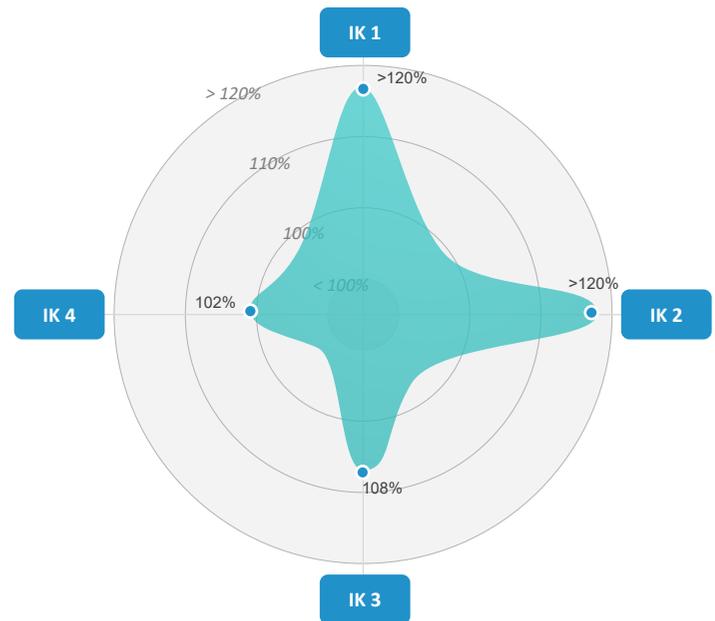


Evaluasi terhadap pencapaian luas kawasan yang dikelola oleh masyarakat merupakan evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana akses pengelolaan terhadap Kawasan hutan yang diberikan kepada masyarakat. Komponen penyusun utama IKU 12 yaitu luas perhutanan Sosial. Luas perhutanan sosial diperoleh dari jumlah luas Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat.

Sebagaimana dalam Renstra KLHK 2020-2024, penilaian luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat menjadi indikator kinerja utama (IKU) Kementerian LHK dan indikator kinerja program (IKP) sebagai penjabarannya.

Terdapat empat indikator kinerja program IKU 12. Berikut ini pengukuran indikator kinerja program pada empat program pendukung indikator kinerja utama

## Capaian Indikator Kinerja Program IKU 12



## Capaian IKP Eselon I sebagai pembentuk IKU. 12 Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat

No	Unit Kerja Eselon 1	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian
IK 1	PSKL	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun (125.000 Ha)	409.934,50 Ha	327% (>120%)
IK 2	PSKL	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang meningkat kinerjanya dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan dan lingkungan (300 Kelompok)	589 Kelompok	196% (>120%)
IK 3	PHPL	Akses legal masyarakat pada perusahaan hutan produksi meningkat (10.000 Ha)	10.800 Ha	108%
IK 4	KSDAE	Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif (509 desa)	588 desa	102%

Capaian yang terlalu tinggi dari target dibatasi maksimal 120% untuk menghindari bias perhitungan agregat kinerja keseluruhan

### Capaian Perhutanan Sosial

Program perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Program tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan areal hutan kepada pemerintah, untuk selanjutnya diproses dan jika sudah disetujui, maka masyarakat berhak untuk mengelola (mengolah dan mengambil manfaat) dari hutan secara berkelanjutan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memperluas akses kelola masyarakat terhadap hutan melalui program perhutanan sosial. Pemerintah menargetkan ada 12,7 juta hektare luas hutan sosial hingga 2024. Saat ini area yang sudah dikelola mencapai 4,42 juta Ha.

Untuk mengetahui Informasi tentang Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat



Pindai aku!



4,42 juta hektare

Luas kumulatif areal perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat hingga tahun 2020.



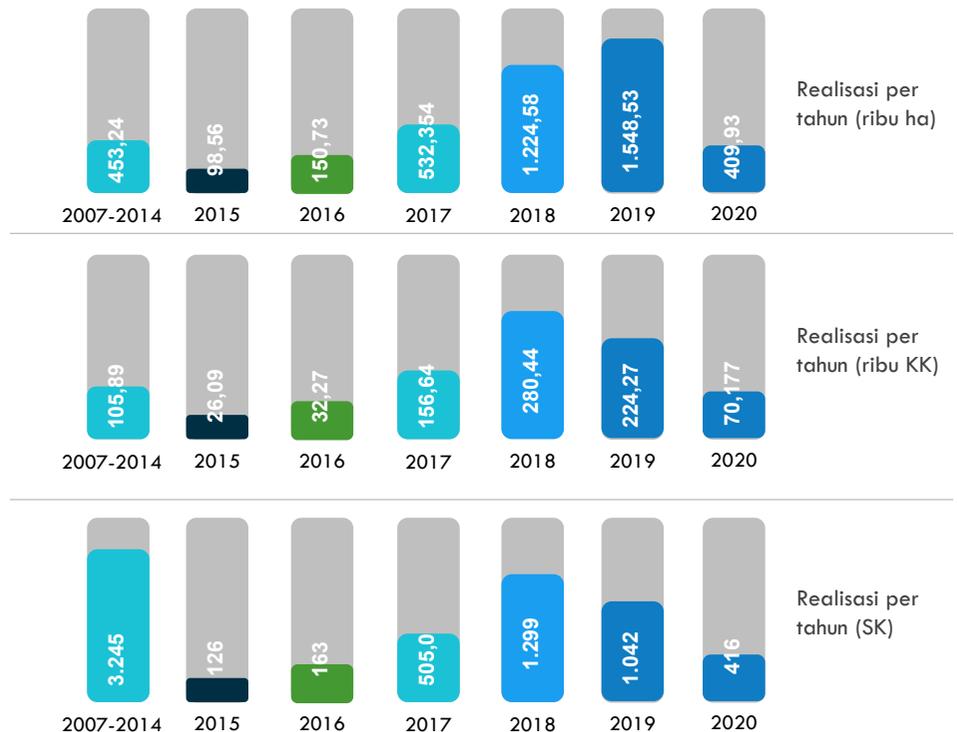
±895.769 KK

Jumlah kepala keluarga yang terlibat dalam perhutanan sosial hingga tahun 2020

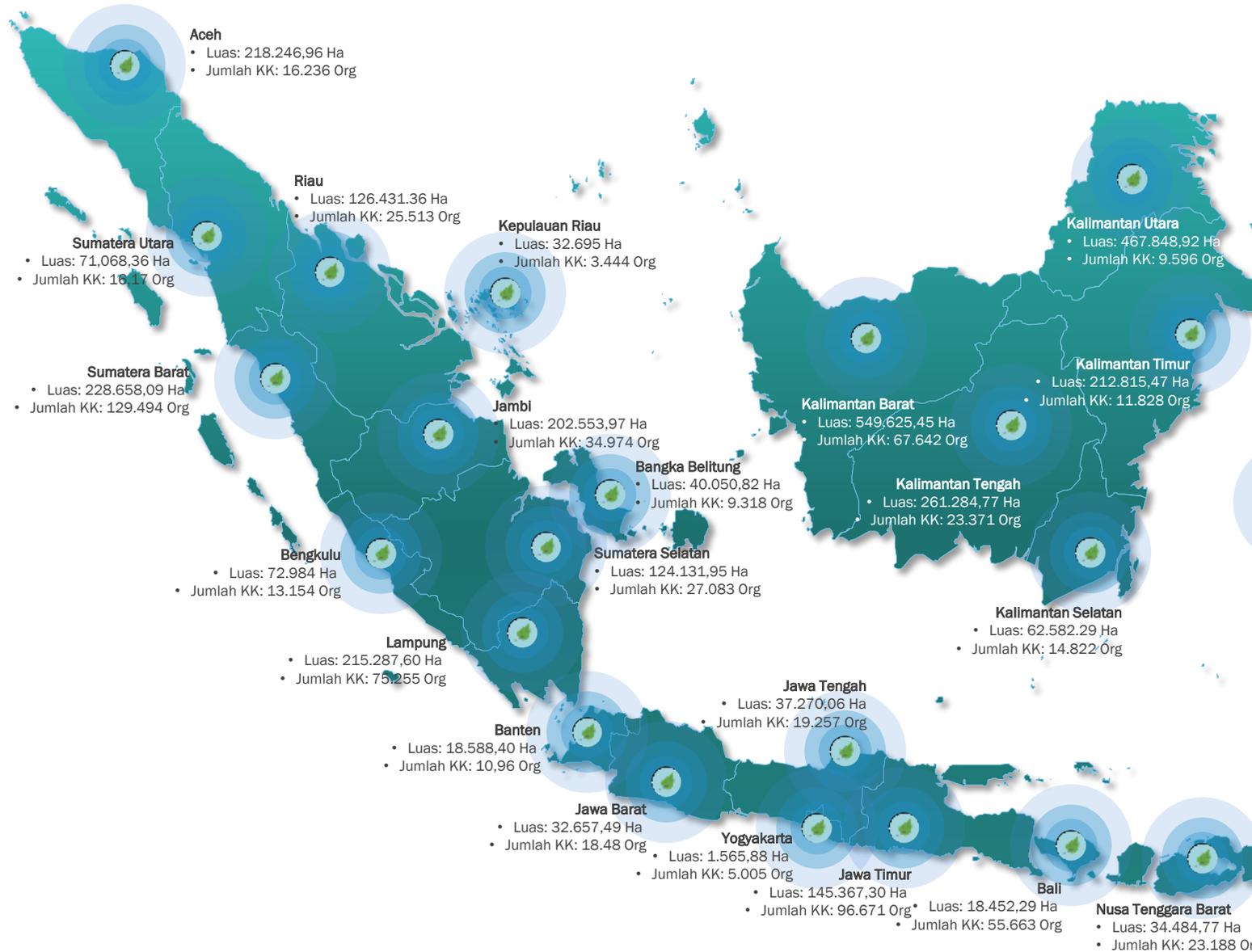


6.798 unit SK

Jumlah unit SK tentang perhutanan sosial yang diterbitkan hingga tahun 2020



## Sebaran Luas Hutan Sosial

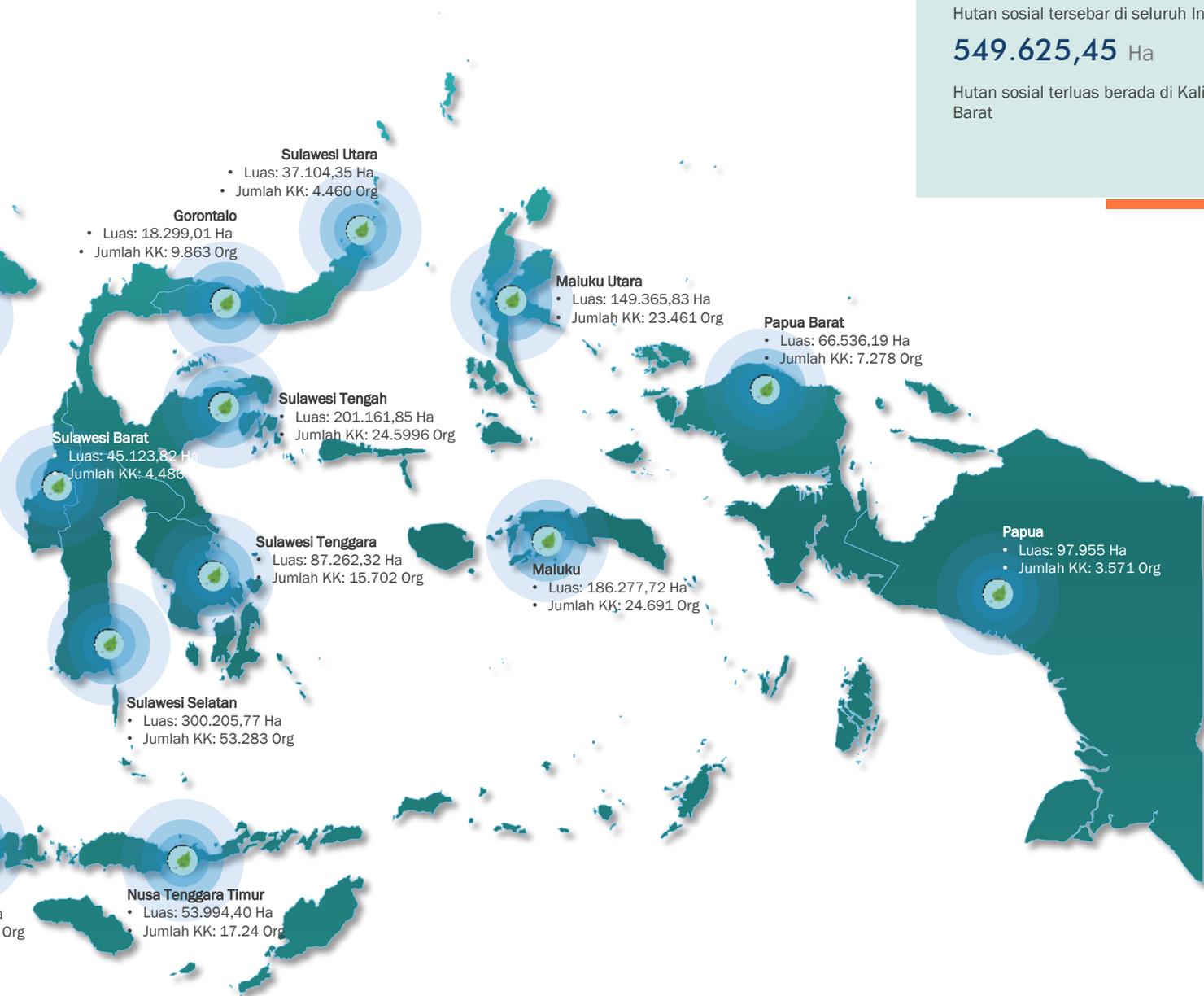


## 33 Provinsi

Hutan sosial tersebar di seluruh Indonesia

**549.625,45** Ha

Hutan sosial terluas berada di Kalimantan Barat



## Capaian Kelompok Usaha Perhutanan Sosial 2020

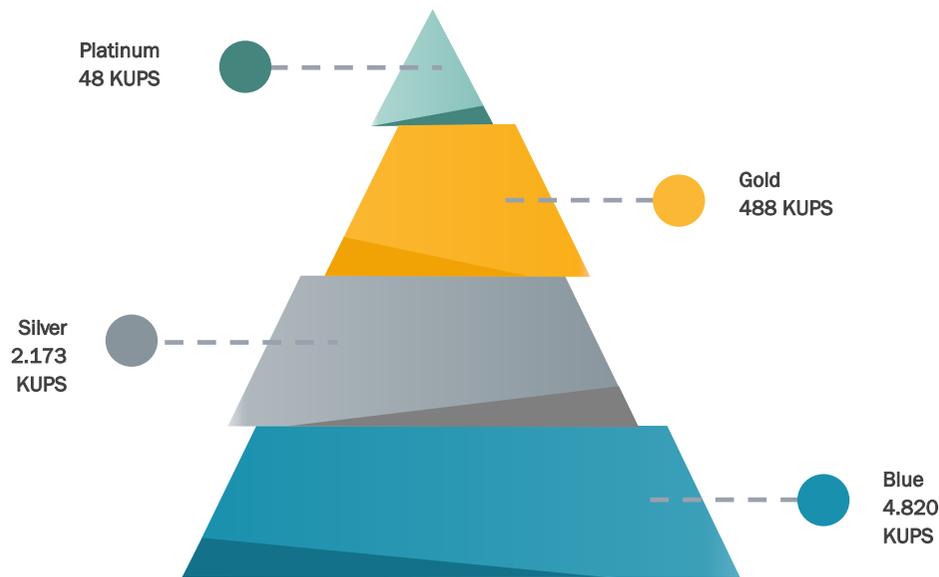
7.529 KUPS

Luas Kawasan hutan yang dikelola masyarakat melalui program perhutanan sosial tidak hanya berhenti pada luas izin yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK), namun harus bergulir sebagai aktivitas perekonomian yang berdampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

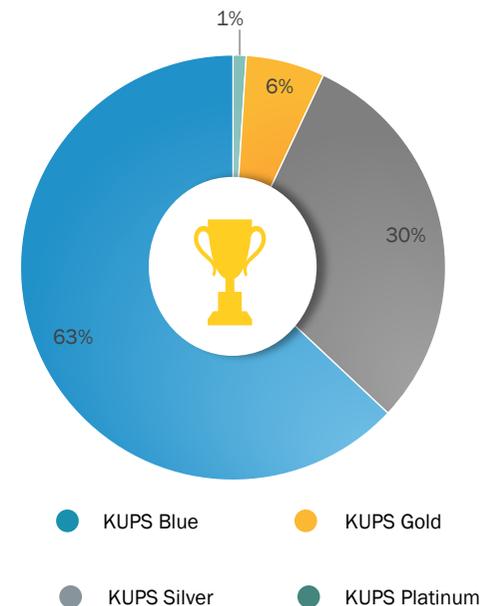
Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kepala keluarga yang telah memperoleh akses kelola kawasan hutan, maka dibentuk kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). KUPS memiliki empat tingkatan pencapaian, dimulai dari *Blue*, *Silver*, *Gold*, dan *Platinum*.

Kategori KUPS menunjukkan pencapaian dari saat awal terbentuk hingga saat ini. Kategori *Blue* disebut juga kategori perintis, kategori *Silver* disebut juga kategori berkembang, kategori *Gold* disebut juga kategori maju, dan kategori *Platinum* disebut juga kategori mandiri.

### Capaian KUPS Berdasar Kategori



### Persentase KUPS berdasar Kategori



## Semakin Bertambah KUPS yang Terbentuk Setiap Tahun

Tahun 2020, tercatat 7.513 KUPS telah terdaftar. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena masyarakat memperoleh hasil nyata setelah bergabung dengan KUPS.

Pengelolaan dan pendampingan KUPS akan terus dilakukan agar geliat ekonomi di tingkat tapak terus meningkat. Memberikan manfaat bagi masyarakat sembari melestarikan lingkungan.

Jumlah KUPS 2016-2020 (kumulatif)



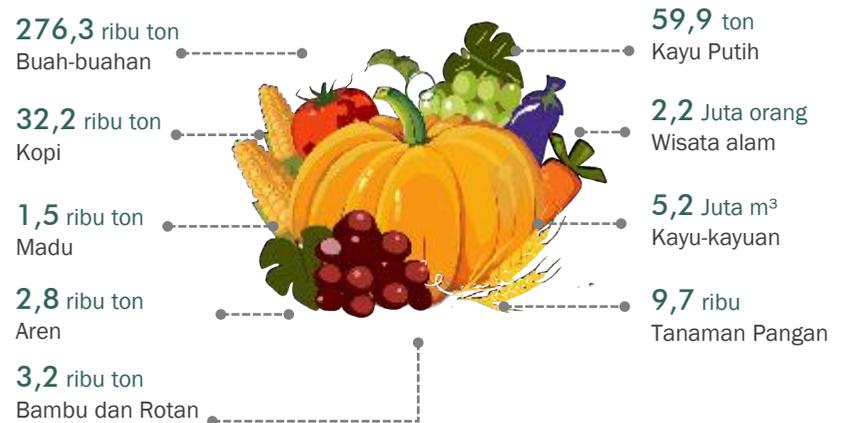
Dukungan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak hanya memberikan izin pengelolaan hutan sosial. Dukungan tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat yang nantinya membentuk Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif. Dukungan pemerintah ditingkat tapak di antaranya, pendampingan KUPS dari awal merintis hingga menjadi KUPS mandiri, pemberian akses seluas-luasnya kepada KUPS untuk menjangkau pasar atau konsumen, memberikan pelatihan-pelatihan digital, pelatihan *marketing* dan lain sebagainya guna membekali KUPS dengan kemampuan dan bekal keterampilan yang tepat sasaran dalam menjangkau pasar nasional maupun global.

## Komoditas Hasil KUPS

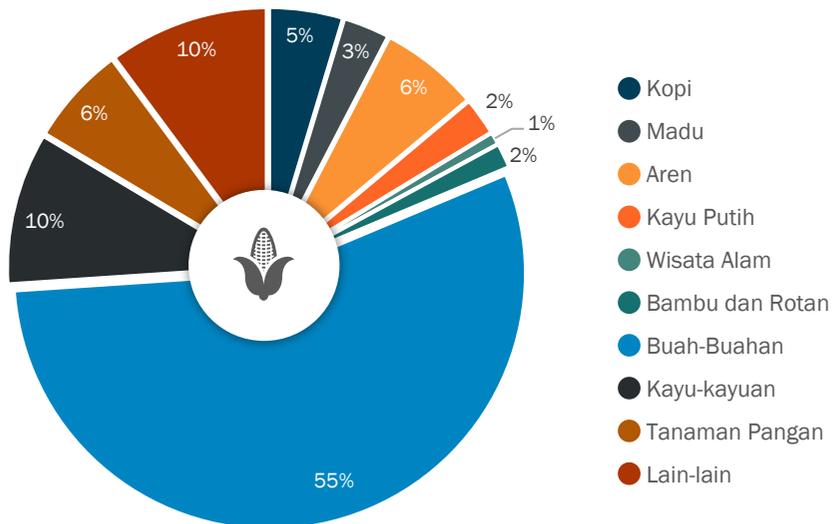
Komoditas hasil Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sangat bervariasi. Berdasarkan hasil inventarisasi hasil komoditas diketahui terdapat sembilan komoditas unggulan, antara lain buah-buahan, kopi, madu, bambu/rotan, kayu putih, wisata alam, kayu-kayuan dan tanaman pangan.

Komoditas hasil dari perhutanan social dimanfaatkan sebagai suplai kebutuhan nasional untuk menopang ketahanan pangan di Indonesia. Tidak sedikit pula hasil komoditas KUPS diekspor ke luar negeri untuk meningkatkan pendapatan KUPS.

Volume Produksi Komoditas KUPS



Proporsi Komoditas yang Diusahakan KUPS



Tahun 2020, diketahui mayoritas setengah lebih hasil komoditas dari KUPS adalah buah-buahan (55,27%), diikuti dibawahnya yaitu hasil kayu (10%), sedangkan minoritas hasil komoditas dari KUPS adalah wisata alam (0,80%). Hal ini diketahui masih sedikit KUPS yang menawarkan pengalaman wisata alam sebagai komoditas unggulan.

Pengalaman wisata alam yang dikelola di perhutanan sosial perlu ditingkatkan untuk mengejar selisih capaian dari komoditas KUPS lainnya. Peran pendampingan oleh pemerintah lebih harus diintensifkan untuk pengembangan wisata alam di tahun mendatang.

## Penetapan Hutan Adat

Luas Hutan Adat 2016-2020

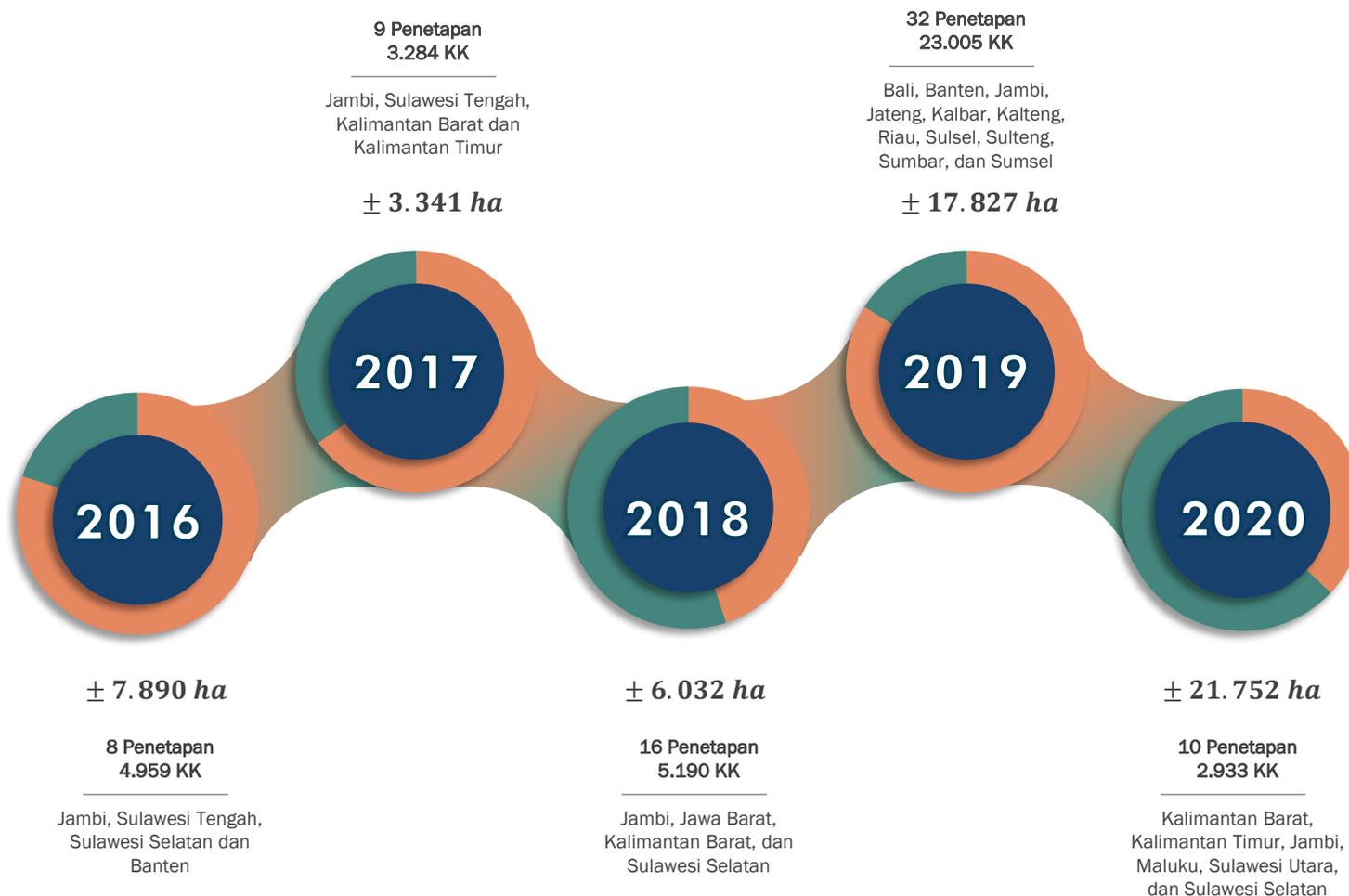
**± 56.842** hektare

Dari total luas penetapan, luasan hutan adat yang ditetapkan pada tahun 2020 seluas **± 21.753 ha** merupakan luasan terbesar sepanjang periode tahun 2016-2020.

Jumlah KK yang Mendapatkan Manfaat

**39.371** KK

Jumlah KK penetapan hutan adat terbanyak diketahui tahun 2019 sejumlah 23.005 KK.



Perhutanan Sosial

Perbaiki Kesejahteraan, Lestarkan Hutan

Survei pada tahun 2020 terhadap 103 KUPS, menyebutkan program perhutanan sosial membantu memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari segi ekonomi, lingkungan, juga pengurangan konflik, namun masih perlu adanya intervensi terhadap keterlibatan perempuan.

Sumber : [katadata.co.id](http://katadata.co.id)







(Atas) Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 41 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial untuk 20.890 kepala keluarga (KK). SK tersebut mencakup pengelolaan lahan seluas 73.670 hektare lahan yang berupa 39 SK hutan desa dan hutan kemasyarakatan serta 2 hutan adat.  
(Kanan) Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan saat menyerahkan 41 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial.

Foto oleh Janur Wibisono





## Madu Karst

Madu karst adalah madu hutan. Madu yang berasal dari lebah liar. Lebah mengisap nektar dari vegetasi karst Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Proses panen pun secara tradisional. Madu yang berasal dari desa enclave Bantimurung Bulusaraung ini memiliki rasa, tekstur, dan warna madu yang unik. Memiliki ciri khas tersendiri. Berbeda dengan madu hutan pada umumnya. Sangat bermanfaat untuk menjaga stamina dan imunitas tubuh. Gabungan Kelompok Tani Hutan Pattanyamang adalah salah satu desa penghasil madu karst. Kelompok yang berada di Desa Pattanyamang, Camba, Maros, Sulawesi Selatan. Desa yang berada di tengah kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Foto di atas oleh Junaidi Sam.

Gabungan kelompok ini beranggotakan 30 orang. Adalah Nurhidayah, sebagai ketua kelompok, begitu gigih membangun dan memotivasi kelompoknya untuk selalu berkembang. Berkat kegigihannya ia berkesempatan mewakili masyarakat penyangga taman nasional ke luar negeri. Menghadiri Konferensi ASEAN Heritage Park ke 35 di Pakse, Lao PDR, pada 21-24 Oktober 2019 lalu. Tentunya juga mengenalkan produk madu karst pada ajang pameran di sana. Harga madu karst ini bervariasi sesuai dengan volumenya. Botol berisi 150 ml seharga Rp. 45.000, untuk 250 ml seharga Rp. 75.000, dan ukuran 500 ml seharga Rp. 125.000.

Besar harapan bahwa dengan adanya produk "madu karst" ini bisa menciptakan ekonomi produktif bagi kelompok dan juga menambah penghasilan bagi anggotanya. Dengan manfaat yang langsung dirasakan, maka motivasi masyarakat untuk terus menjaga kelestarian hutan dapat terus dijaga. Masyarakat sejahtera, hutan pun lestari.

## Indikator Kinerja Utama 13

# Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan

Potret dari atas Pantai Laicucu kawasan TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa). Taman Nasional ini telah dinilai sebagai kawasan dengan pengelolaan yang efektif. Efektivitas pengelolaan hutan konservasi turut memberi kontribusi terhadap peningkatan Indeks Efektivitas Pengelolaan Hutan Indonesia.

Foto oleh Dwi Putro Notonegoro



Untuk mengetahui  
Informasi tentang  
IEPKH

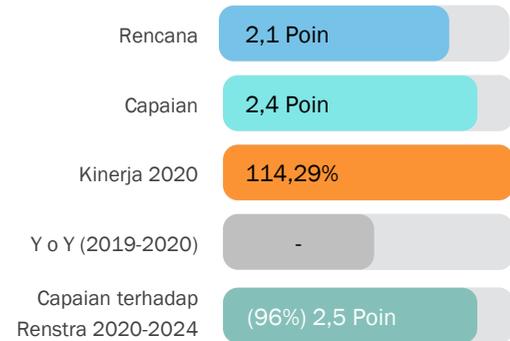


*Pindai aku!*

## IKHTISAR KINERJA

# 2,4 Poin

Dari target senilai 2,1 Poin, indeks efektivitas pada tahun 2020 telah tercapai sebesar 2,4 poin. Mendukung sasaran strategis no. 4 yaitu terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing. Target hingga 2024 nilai 2,5 Poin, atau telah tercapai 96% dari Renstra.



### Penghitungan Indeks

- Penghitungan nilai Indeks menggunakan rumus sebagaimana tersebut pada SK Menteri LHK Nomor : SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yaitu :

Rumus yang digunakan untuk Indeks Efektifitas Pengelolaan Kawasan Hutan (IEPKH) adalah:

$$\text{IEPKH} = (\text{BKHK} \times \text{KKHK}) + (\text{BKHL} \times \text{KKHL}) + (\text{BKHP} \times \text{KKHP}) + (\text{BKHDTK} \times \text{KKHDTK})$$

Keterangan :

**BKHK** = Luas Kawasan Hutan Konservasi / Luas Kawasan Hutan Indonesia

**BKHL** = Luas Kawasan Hutan Lindung / Luas Kawasan Hutan Indonesia

**BKHP** = Luas Kawasan Hutan Produksi / Luas Kawasan Hutan Indonesia

**BKHDTK** = Luas Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus / Luas Kawasan Hutan Indonesia

dimana : **BKHK + BKHL + BKHP + BKHDTK = 1**

- Sesuai SK Menteri LHK Nomor : SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 bahwa Skala Capaian untuk IKU 13 ini menggunakan interval 2,1-2,5, maka nilai 69,44 apabila kita masukkan dalam skala penilaian berada pada kisaran nilai sebagai berikut:

$$81 < (\text{IEPKH} = 2,5) = 100$$

$$61 < (\text{IEPKH} = 2,4) \leq 80$$

$$41 < (\text{IEPKH} = 2,3) \leq 60$$

$$21 < (\text{IEPKH} = 2,2) \leq 40$$

$$(\text{IEPKH} = 2,1) \leq 20$$

# Capaian Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Di Indonesia

Data Luas Kawasan Hutan dan Nilai Indeks Sampai dengan tahun 2020, Luas Kawasan Hutan Indonesia Berdasarkan Fungsi adalah sebagai berikut :

No	Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi	Luas (Ha)	Persentase (bobot)	Nilai Skala terbobot	Nilai tertimbang	
				0-100		
1.	Hutan Konservasi	27.409.899,40	21,74%	60,23	13,09	
2.	Hutan Lindung	29.578.164,29	23,46%	79,58	18,67	
3.	Hutan Produksi	68.973.530,27	54,70%	68,79	37,63	
4.	KHDTK Diklat	92.212,58	0,07%	66,5	0,05	
5.	KHDTK Litbang	33.949,50	0,03%	-	-	
Jumlah		126.087.756,04	100	-	<b>69,44</b>	
Konversi Indeks						$61 \leq (\text{IEPKH} = 2,4) < 80$

Indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan (IEPKH) adalah indeks atau indikator untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dalam pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, entitas pengukurannya ditujukan pada seluruh kawasan hutan, baik kawasan hutan konservasi (HK), hutan produksi (HP), hutan lindung (HL) maupun kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).

## 60,23

Hutan Konservasi (HK)

Melalui SK Direktur Jenderal KSDAE nomor : SK.4/KSDAE/KK/KSA.1/1/2021 tentang Penetapan Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Sampai dengan Tahun 2020, bahwa telah dilakukan penilaian pada 551-unit kawasan (terdapat tiga kawasan yang tidak dapat dilakukan penilaian), dengan hasil nilai rata-rata **60,23%**.

## 66,50

Hutan Diklat (KHDTK)

Penilaian Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat diperoleh nilai sebesar **66,5** poin dari target 66,5 Poin atau 100,00%. Nilai tersebut merupakan hasil dari rerata nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat dari 7 KHDTK di lingkup Badan P2SDM.

## 79,58

Hutan Lindung (HL)

Berdasarkan hasil penilaian operasionalisasi KPHL yang dilakukan sampai dengan tahun 2019 dengan nilai skala terbobot adalah **79,58** yang artinya tahapan operasionalisasi sedang, yang artinya KPHL dalam tahapan sedang berkembang (developing).

## 68,79

Hutan Produksi (HP)

Dengan mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Sampai dengan tahun 2020 telah dilakukan Penilaian PHPL sebanyak 159 Unit Manajemen dengan hasil 109 berkategori Baik, dan 50 berkategori Sedang.



## Capaian kinerja pembentuk Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan

No	Unit Kerja Eselon 1	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
IK 1	PHPL	Unit manajemen hutan bersertifikat PHPL Sedang dan Baik (267 Unit Manajemen)	271 UM	101%
IK 2	BP2SDM	Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat (66,5 poin)	66.5 poin	100%
IK 3	KSDAE	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 Juta ha kawasan konservasi (52,5 poin)	60,23 poin	114,72%
IK 4	BLI	Jumlah KHDTK dan Hutan Penelitian yang dikelola sebagai laboratorium riset lapangan (35 unit)	35 unit	100%
IK 5	PDASHL	Jumlah KPHL yang meningkat statusnya menjadi KPHL maju (5 KPHL)	14 KPHL	280% (>120%)

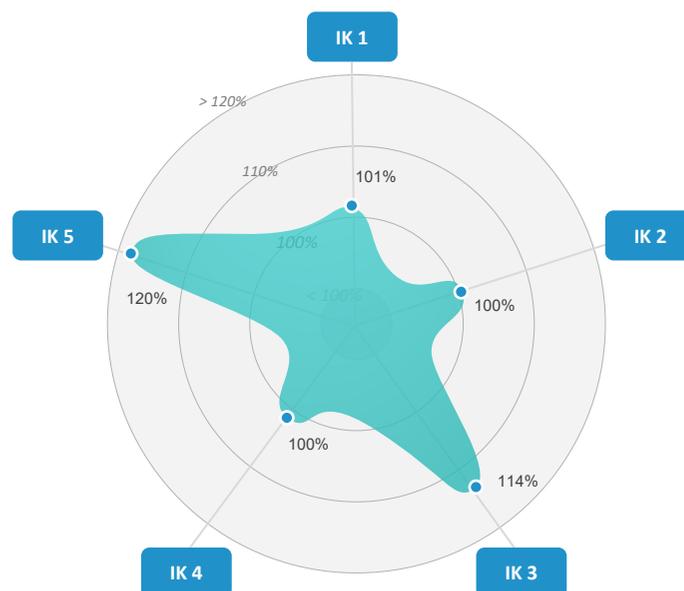
Capaian yang terlalu tinggi dari target dibatasi maksimal 120% untuk menghindari bias perhitungan agregat kinerja keseluruhan

Indeks efektivitas pengelolaan bertujuan untuk melihat sejauh mana pengelolaan terhadap kawasan hutan telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Nilai indeks efektivitas pengelolaan hutan diperoleh dari nilai beberapa komponen Kawasan hutan. Komponen hutan tersebut meliputi Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan dengan Tujuan Khusus.

Sebagaimana dalam renstra KLHK 2020-2024, penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan hutan menjadi indikator kinerja utama (IKU) Kementerian LHK dan indikator kinerja program (IKP) sebagai pendukungnya.

Terdapat lima indikator kinerja program IKU 13. Berikut ini pengukuran indikator kinerja program pada lima program pendukung indikator kinerja utama:

### Capaian Indikator Kinerja Program IKU 13





Warga suku Tobelo dalam memamerkan hasil buruan yang dijemur. Warga leluasa diberi akses untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di hutan untuk kemaslahatan warga di sekitar hutan, dengan menerapkan kaidah kelestarian lingkungan dan menjaga hutan. Warga suku Tobelo tinggal di kawasan hutan konservasi yang menjadi salah satu komponen nilai indeks efektifitas Kawasan hutan.

Foto oleh Akhmad David Kurnia Putra





“

Semua aspek lingkungan kita perbaiki, saya yakin ini akan jadi keren, dan bisa jadi contoh di tempat yang lain, seperti di lokasi Ibu Kota Negara baru nantinya.

————— Siti Nurbaya (MenLHK)



*Ibu Menteri LHK mengunjungi Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KHDTK menjadi salah satu komponen pembentuk Indeks Efektifitas Pengelolaan Hutan*

*Foto oleh M Luthfi*



*NGUMANG (Adat Sumbawa)*

*Seorang pria mengacungkan kedua tangannya sembari menembangkan lawas (seperti seorang penari) dengan suara merdu sehingga menjadi pusat perhatian orang banyak. Ngumang ini kita jumpai disaat orang melaksanakan keramaian karapan kerbau atau ketika menyelenggarakan permainan berempuk dalam sawah yang diatur sedemikian rupa. Ngumang; Merupakan salah satu jenis seni vokal yang umumnya dilakukan oleh satu orang sambil mengucap lawas (pantun atau syair daerah Sumbawa) dengan suara lantang disertai teriakan atau pekikan sebagai pengiring, pemanis, atau daya tarik.*

*Foto oleh Amsyar Setiawan*



## Indikator Kinerja Utama 14

### Jumlah Kasus Yang Ditangani Melalui Penegakan Hukum

Polisi kehutanan sedang melakukan Patroli pengamanan, mendata potensi serta gangguan kawasan hutan di Blok Hutan Praingkareha, Resort Wudipandak, SPTN II Lewa, TN. Matalawa. Foto oleh Heri Andri



Untuk mengetahui Informasi tentang Penegakkan Hukum



*Pindai aku!*

# IKHTISAR KINERJA

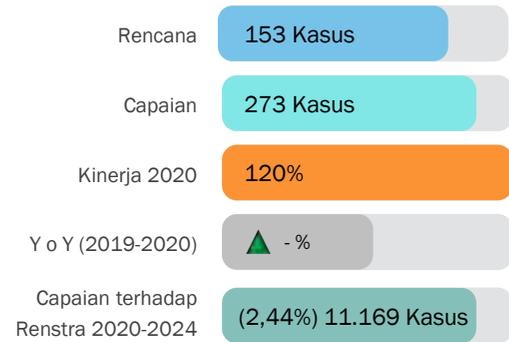
## 273 Kasus

Dari target senilai 153 kasus, atau tercapai 120%. Terdiri dari 220 pidana dan 53 perdata. Mendukung sasaran strategis no. 4 yaitu terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing. Target hingga 2024 nilai 11.169 Kasus atau tercapai 2,44% dari Renstra 2024.

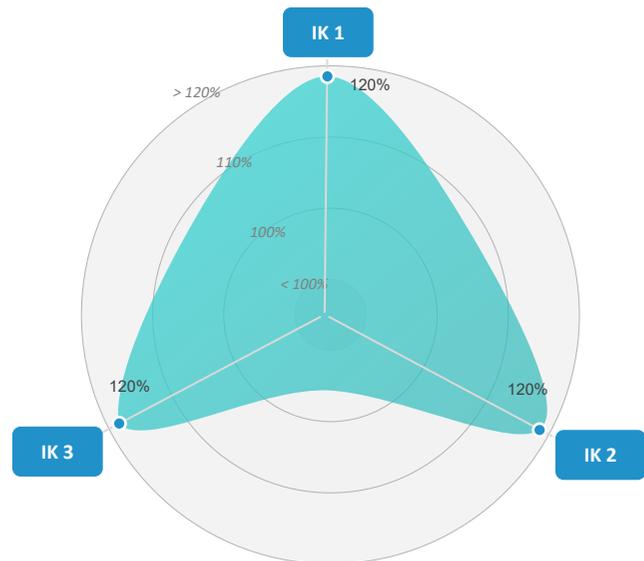
Evaluasi terhadap kasus yang ditangani melalui penegakan hukum merupakan evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana kasus pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan yang terjadi dapat diselesaikan dan trend kasus yang ditemui. Komponen utama nilai jumlah kasus diperoleh dari gabungan dari kasus pidana dan kasus perdata.

Sebagaimana dalam Renstra KLHK 2020-2024, Jumlah kasus yang ditangani melalui penegakan hukum menjadi indikator kinerja utama (IKU) Kementerian LHK dan indikator kinerja program (IKP) sebagai pendukungnya.

Terdapat tiga indikator kinerja program IKU 14. Berikut ini pengukuran indikator kinerja program pada tiga program pendukung indikator kinerja utama:



## Capaian Indikator Kinerja Program IKU 14



## Capaian IKP Eselon I sebagai pembentuk IKU KLHK

No	Unit Kerja Eselon 1	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
IK 1	PHLHK	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan (30 persen)	32,23 persen	107,4%
IK 2	PHLHK	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman (1,02 juta Ha)	2.226.985,10 Ha	218,33% (> 120%)
IK 3	PHLHK	Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani (153 kasus)	273 kasus	178,43% (> 120%)

Capaian yang terlalu tinggi dari target dibatasi maksimal 120% untuk menghindari bias perhitungan agregat kinerja keseluruhan

### Capaian Penyelesaian Kasus

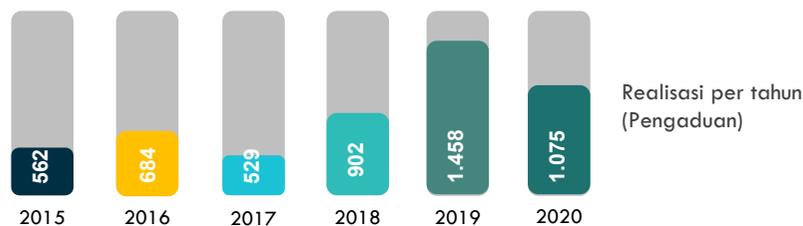
Penanganan penegakan hukum untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan sumber daya alam diyakini memiliki daya ungkit yang kuat dalam mewujudkan lingkungan dan hutan yang berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas mampu menurunkan angka deforestasi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencakup dalam tindakan-tindakan pengawasan, operasi pengamanan hutan, operasi peredaran hasil hutan, penerapan sanksi administrasi, penegakan hukum pidana, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.



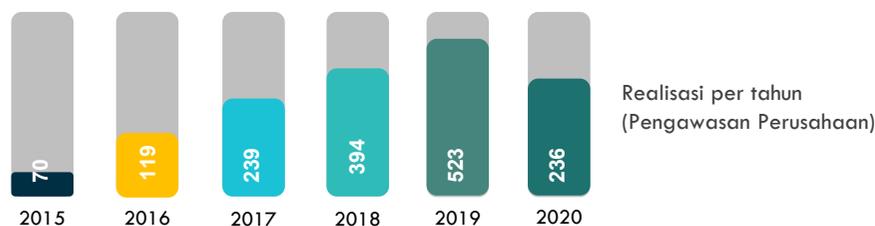
5.210 pengaduan

Jumlah pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat maupun temuan di tempat kejadian perkara hingga tahun 2020.



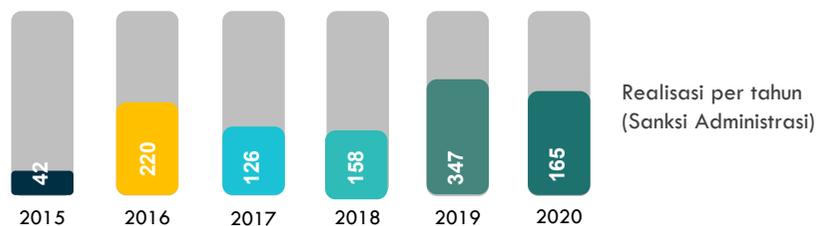
1.581 perusahaan

Jumlah pengawasan terhadap perusahaan yang dilaporkan oleh masyarakat hingga tahun 2020



1.058 sanksi administrasi

Jumlah sanksi administrasi yang diberikan hingga tahun 2020



## Peningkatan Kapasitas Aparat Gakkum



2.936 personil

Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup hingga tahun 2020.



2.329 personil

Jumlah Polisi Kehutanan hingga tahun 2020.



1.971 personil

Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil hingga tahun 2020.

Personil aparat penegakan hukum terbagi menjadi tiga personil utama, yaitu PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup), Polhut (Polisi Kehutanan) dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Setiap personil memiliki jumlah yang beragam. Terhitung hingga tahun 2020 tercatat 2.936 personil pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup (PPLH), 2.329 personil polisi kehutanan (POLHUT) dan 1.971 personil penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Masing-masing aparat memiliki tanggung jawab di pundaknya masing-masing untuk menjaga kepatuhan (compliance) terhadap regulasi yang mengatur tentang lingkungan hidup serta melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana kehutanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan Kapasitas Aparat Gakkum Per Tahun

Tahun 2020, tercatat jumlah personil gabungan PPLH, POLHUT, dan PPNS sejumlah 1.872 personil. Jumlah ini tercatat tertinggi sejak lima tahun terakhir. Peningkatan setiap tahun menjadi sinyal bahwa tantangan setiap tahun semakin meningkat.





Peringatan hari jadi Brigade Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ke-15. Acara diselenggarakan secara hybrid (luring dan daring). SPORC adalah soko guru penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Foto oleh Ditjen Gakkum



## Capaian Gakkum 2020



Pembalakan Liar/Kayu Ilegal



Perambahan Kawasan Hutan



Pencemaran Lingkungan

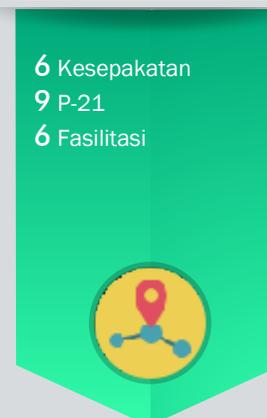
Perburuan & Perdagangan Ilegal TSL



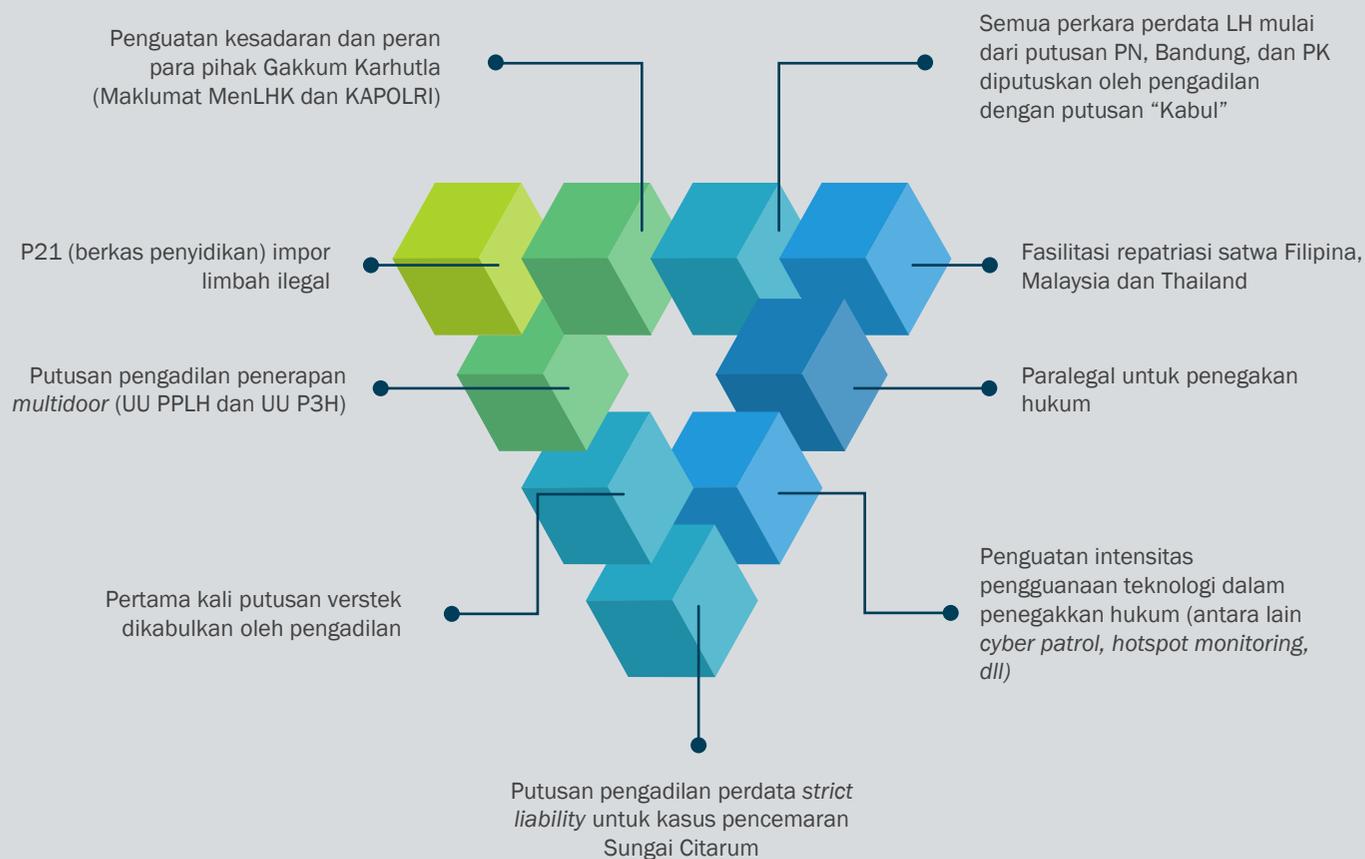
Pembakaran Hutan dan Lahan



Perusakan Lingkungan



## Upaya-upaya dan prestasi penegakan hukum 2020



## Daftar Kasus Perdata bidang LHK

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Tipologi Kasus	Nilai Putusan Pengadilan	KASUS PERDATA			Status Pidana
					Putusan	Status Eksekusi	Nilai Eksekusi	
1	PT. Selatnasik Indokwarsa & PT. Simpang Pesak Indokwarsa (PT. SNI & PT.SPI)	Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung	Perusakan Lingkungan Hidup	32.264.312.000	Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)	Telah melaksanakan eksekusi	32.264.312.000	-
2	PT. Bumi Mekar Hijau (PT BMH)	Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	Kebakaran Hutan dan Lahan	78.502.500.000	Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)	Telah melaksanakan eksekusi	78.502.500.000	-
3	PT. Kawi Mekar (PT. KM)	Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat	Pencemaran Lingkungan DAS Citarum	375.200.000	Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)	Telah melaksanakan eksekusi	375.200.000	-
4	PT. How Are You Indonesia (PT.HAYI)	Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat	Pencemaran Lingkungan DAS Citarum	12.013.501.184	Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)	Telah melaksanakan eksekusi	12.013.501.184	-
5	PT.Merbau Pelalawan Lestari (PT.MPL)	Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau	Perambahan Kawasan Hutan	16.244.574.805.000	Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)	KLHK sedang melengkapi data pendukung asset		
6	PT Kalista Alam (PT.KA)	Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh	Kebakaran Hutan dan Lahan	366.068.669.000	Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht)	Proses Eksekusi : Penilaian aset oleh KJJ Pung'S untuk Eksekusi		Berkas Penyidik KLHK telah dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2013
					Dikabulkan sesuai tuntutan MenLHK			Diputuskan di Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 131/Pid.B/2013/PN.MBO dengan putusan pidana denda Rp. 3.000.000.000
7	PT. Jatim Jaya Perkasa (PT JJP)	Kab. Rokan Hilir, Riau	Kebakaran Hutan dan Lahan	491.025.500.000	Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht)	Persiapan pengajuan eksekusi		Berkas Penyidik KLHK telah dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan Agung Nomor: B-1983/E.4/Euh.1/06/2016 tanggal 28 Juni 2016 dan
					Dikabulkan sesuai tuntutan MenLHK			Diputuskan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan putusan pidana penjara 2 tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000
8	PT. National Sago Prima (PT NSP)	Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau	Kebakaran Hutan dan Lahan	1.072.913.922.500	Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht)	Persiapan pengajuan eksekusi		Proses Pidana dilakukan oleh Polda Riau
					Dikabulkan sesuai tuntutan MenLHK			

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Tipologi Kasus	Nilai Putusan Pengadilan	KASUS PERDATA			Status Pidana
					Putusan	Status Eksekusi	Nilai Eksekusi	
9	PT Waringin Agro Jaya (PT. WAJ)	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	Kebakaran Hutan dan Lahan	466.468.991.700	Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht) Dikabulkan Sebagian	Proses Eksekusi : Peringatan (Anmaning) Eksekusi		.Proses Pidana dilakukan oleh Polda Sumsel
10	PT Waimusi Agroindah (PT.WA)	Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	Kebakaran Hutan dan Lahan	29.658.700.000	Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht) Dikabulkan Sebagian	Peringatan (Anmaning) Eksekusi; Tergugat telah melakukan pembayaran kerugian LH secara mengangsur sebesar Rp Belum ada kesepakatan antara Penggugat (KLHK) dengan Tergugat terkait dengan biaya pemulihan	5.250.000.000	. Proses Pidana dilakukan oleh Polda Sumsel
11	PT Surya Panen Subur (PT.SPS)	Kab. Nagan Raya, Prov Aceh	Kebakaran Hutan dan Lahan	439.018.442.800	Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht) Dikabulkan sesuai tuntutan MenLHK	Proses Eksekusi Peringatan (Anmaning) Eksekusi Proses Eksekusi		Berkas Penyidik KLHK telah dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2014 Diputuskan di Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: Putusan Penjara 3 tahun Putusan pidana denda Rp. 3.000.000.000
12	PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT. RKK)	Kab. Muaro Jambi, Prov Jambi	Kebakaran Hutan dan Lahan	191.803.261.700	Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht) Dikabulkan sesuai tuntutan MenLHK	Proses Eksekusi Peringatan (Anmaning) Eksekusi		Proses Pidana dilakukan oleh Polda Jambi
13	PT Palmina Utama (PT.PU)	Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan	Kebakaran Hutan dan Lahan	22.292.478.500	Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht) Dikabulkan Sebagian	Persiapan pengajuan permohonan eksekusi		Proses Pidana dilakukan oleh Polda Kalsel
14	PT Arjuna Utama Sawit (PT. AUS)	Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.	Kebakaran Hutan dan Lahan	342.975.688.369	Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht) Menunggu relaasi putusan kasasi Dikabulkan Sebagian			Proses Pidana dilakukan oleh Polda Kalteng
15	PT Kaswari Unggul (PT. KU)	Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi	Kebakaran Hutan dan Lahan	25.527.525.180	Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht) Menunggu Keputusan Kasasi Dikabulkan Sebagian			Berkas Penyidik KLHK telah dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan Agung dengan Nomor: B-1208/E.4/Epk/04/2019 tanggal 18 April 2019 Diputuskan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Nomor: 40/Pid.Sus-LH/2019/PN.Tjt dengan putusan bebas. .Menunggu putusan kasasi
TOTAL				19.815.483.497.933			128.405.513.184	



Tim Ditjen Gakkum KLHK dan Polda Riau membongkar belasan tempat pengolahan kayu (sawmill) ilegal dalam operasi penindakan untuk menyelamatkan Suaka Margasatwa (SM) Rimbang Baling, antara 18-22 November 2020. Operasi melibatkan 456 personil. Operasi mengamankan 664 batang kayu gelondong dan 2.559 keping kayu olahan. Operasi gabungan ini menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai adanya aktivitas pembalakan ilegal dan sawmill ilegal yang mengolah kayu alam dari kawasan SM Rimbang Baling. SM Rimbang Baling sangat penting bagi bangsa Indonesia yang menjadi habitat berbagai satwa langka dilindungi seperti harimau sumatera, beruang, dan tapir. Foto oleh Direktorat Jenderal PHLHK.



## Indikator Kinerja Utama 15

### Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

*Pantai Mondulambi, salah satu bagian dari zona pemanfaatan TN. Manupeu Tanadaru – Laiwangi Wanggameti yang ditujukan untuk mengundang para wisatawan berkunjung. sejak pandemi diberlakukannya kuota pengunjung taman nasional dan wisatawan wajib melakukan booking melalui sistem elektronik yang disediakan beberapa taman nasional. Sistem ini merupakan salah satu penerapan SPBE.*

*Foto oleh Dwi Putro Notonegoro.*



Untuk mengetahui informasi tentang Indeks SPBE



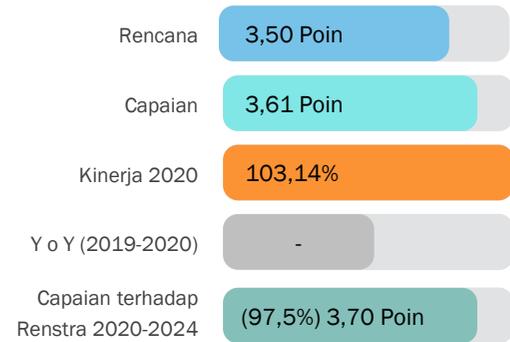
*Pindai aku!*



# IKHTISAR KINERJA

## 3,61 Poin

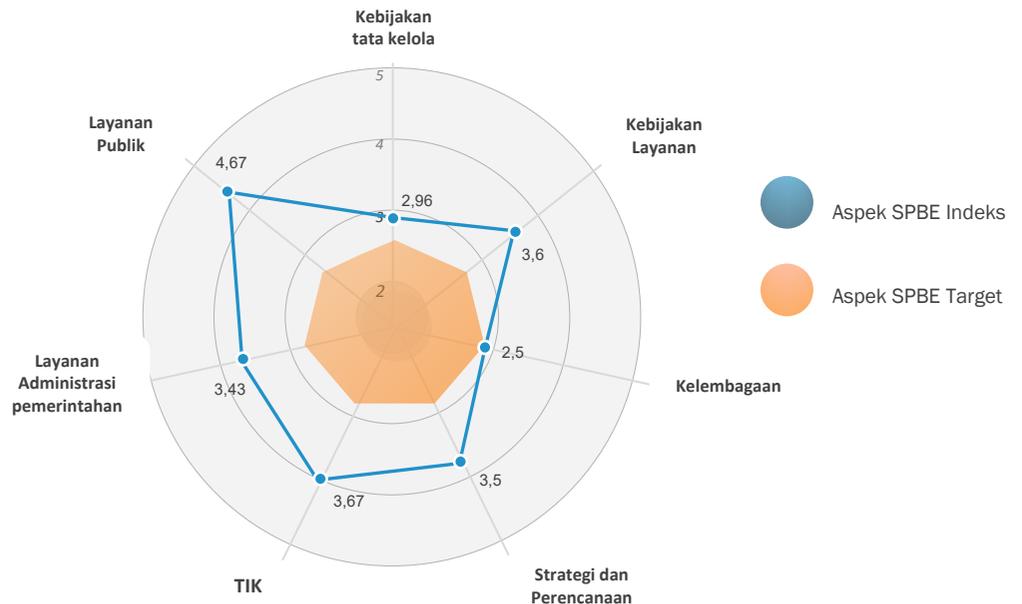
Dari target sebesar 3,50 poin, kinerja tahun 2020 untuk Indeks SPBE mencapai 3,61 poin atau 103,14%. Mendukung sasaran strategis no. 4 yaitu terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing. Target hingga 2024 nilai 3,70 Poin. Bila dibandingkan dengan target Renstra sampai dengan tahun 2024 (3,70 poin), maka Indeks SPBE tahun 2020 ini telah mencapai 97,5 persen.



### Nilai per komponen pembentuk Indeks SPBE KLHK 2020

Nama instansi	
<b>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	
K/L/D	: Kementerian
Daerah	: Pusat
<b>Indeks SPBE</b>	<b>: 3.61</b>
Predikat SPBE	: Sangat Baik
Domain Kebijakan SPBE	: 3.29
✓ Kebijakan tata Kelola SPBE	: 2.96
✓ Kebijakan layanan SPBE	: 3.6
Domain Tata Kelola	: 3.29
✓ Kelembagaan	: 2,5
✓ Strategi dan perencanaan	: 3,5
✓ TIK	: 3,67
Domain Layanan SPBE	: 3.88
✓ Administrasi pemerintahan	: 3,43
✓ Pelayanan publik	: 4,67

### Grafik nilai per komponen Indeks SPBE KLHK 2020



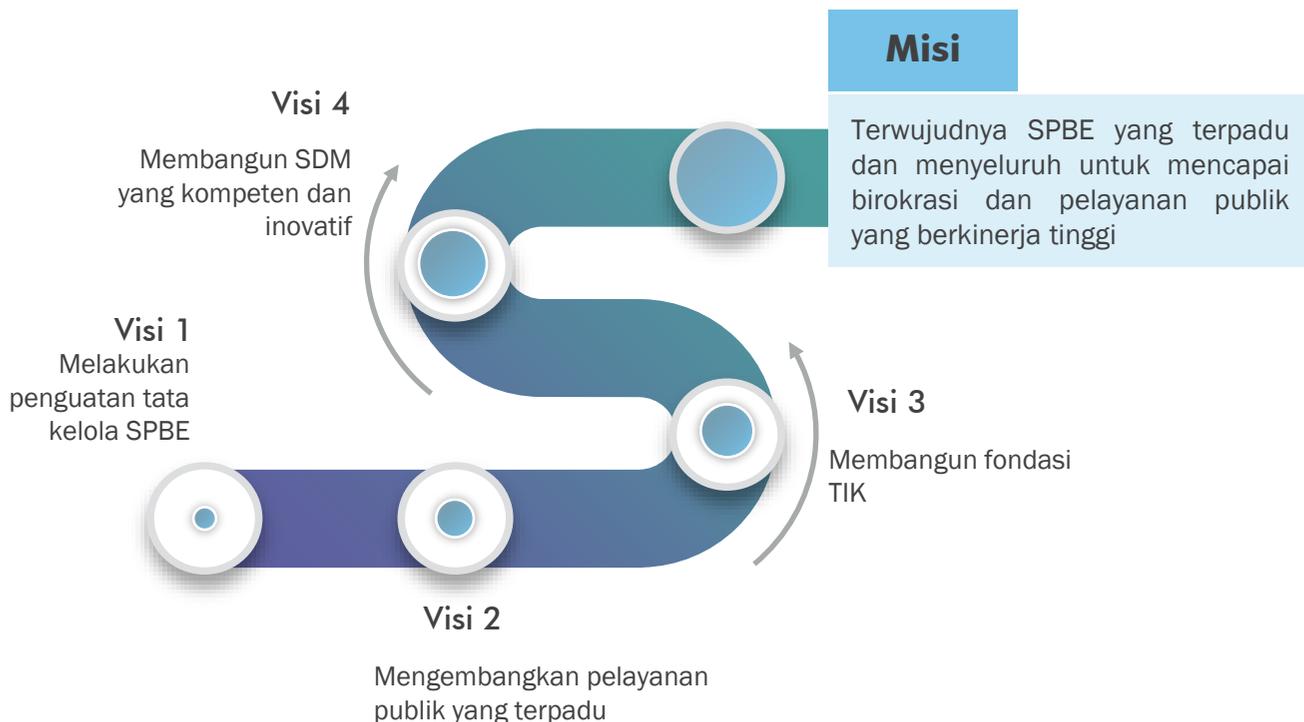
\*Angka capaian merupakan SPBE Tahun 2019 (menunggu hasil evaluasi SPBE 2020 dari KemenPAN-RB)

Evaluasi terhadap indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Nilai SPBE diperoleh dari beberapa komponen penyusun. Komponen penyusun tersebut berupa nilai Kebijakan tata kelola, Kebijakan Layanan, Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, TIK, Layanan Administrasi pemerintahan, dan Layanan Publik

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN&RB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

## Visi dan Misi SPBE 2018 -2025



## Strategi Evaluasi SPBE

01

PEDOMAN

PERMEN PANRB NO.5/2018

TENTANG PEDOMAN EVALUASI SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

02

TUJUAN



Mengetahui capaian  
kemajuan pelaksanaan  
SPBE pada instansi  
Pusat dan Pemerintah  
Daerah



Memberikan saran  
perbaikan untuk  
peningkatan  
kualitas  
pelaksanaan SPBE



Menjamin kualitas  
pelaksanaan SPBE  
pada Instansi Pusat  
dan Pemerintah  
daerah

03

PELAKSANAAN

Target  
623 K/L/D/Polri



Pelaksanaan  
Kerja sama dengan  
5 perguruan tinggi:  
UI, UGM, PENS,  
Telkom-U dan UG



Kategori Indeks SPBE



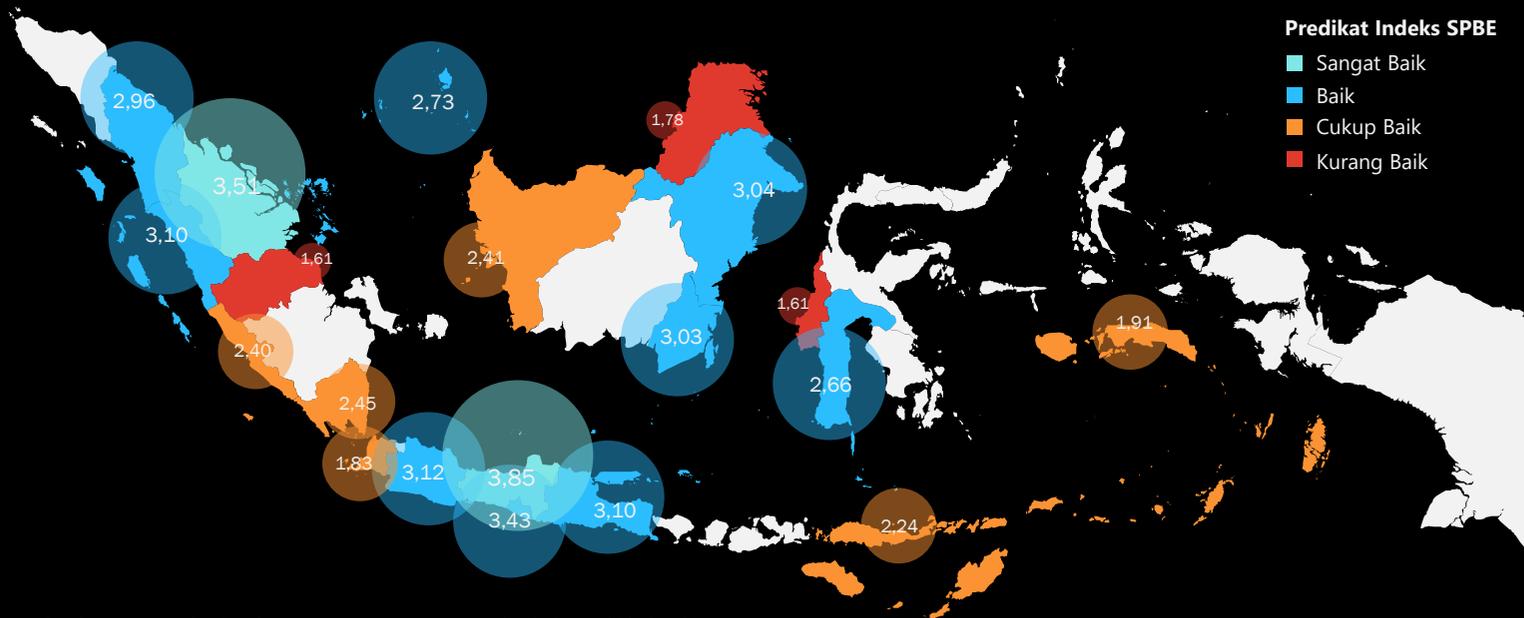
NO	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - <4,2	Sangat Baik
3	2,0 - <3,5	Baik
4	1,8 - <2,0	Cukup Baik
5	<1,8	Kurang Baik



Bapak Wakil Menteri LHK, Alue Dohong berkesempatan menghadiri penyerahan penghargaan sebagai Badan Publik Kategori Kementerian dengan kualifikasi Informatif dari KIP yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), K.H. Ma'ruf Amin, secara virtual. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2020 kembali meraih penilaian sebagai Badan Publik Kementerian dengan kualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Sebelumnya, penganugerahan keterbukaan informasi publik dengan kualifikasi informatif ini juga telah diraih oleh Kementerian LHK pada tahun 2019 lalu. Foto oleh Raysapta

## Nilai Indeks SPBE Seluruh Provinsi di Indonesia

Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

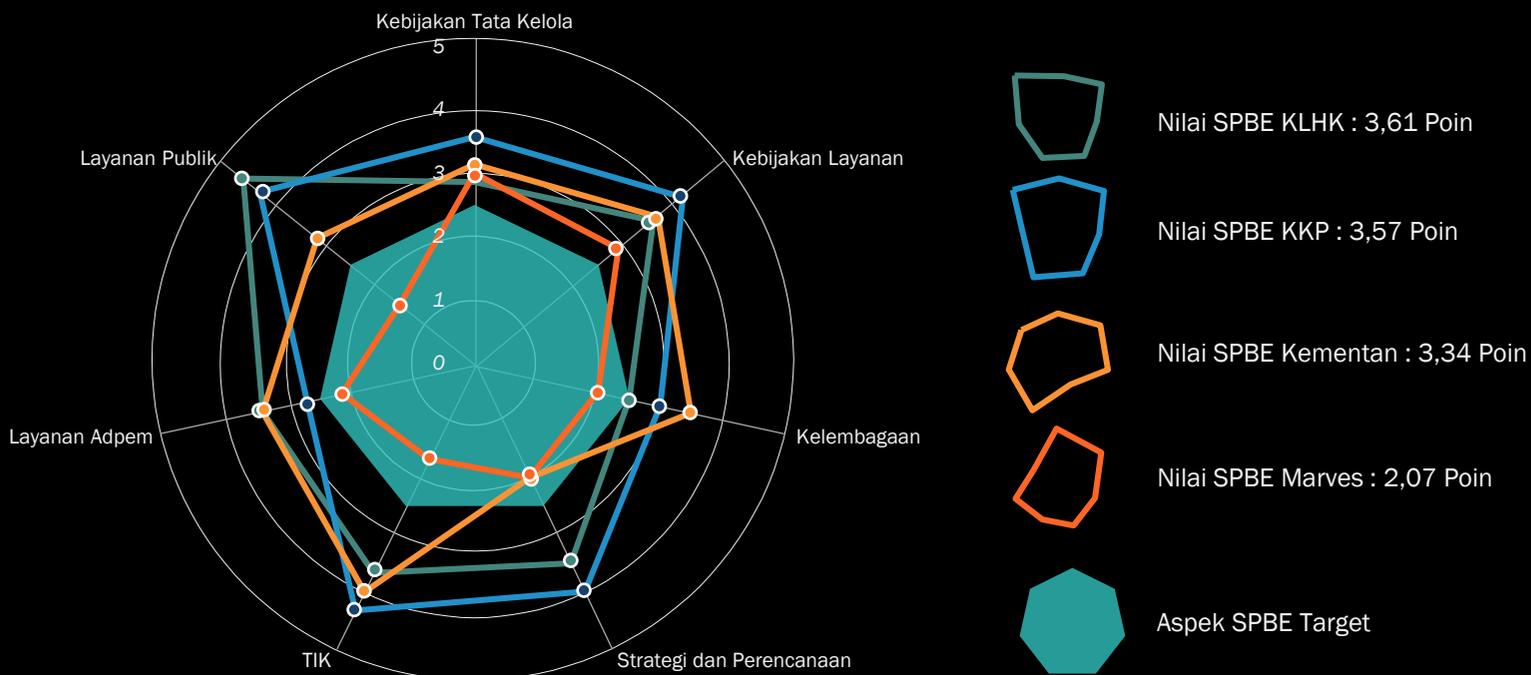
\*Wilayah yang tidak terdapat nilai/predikat tidak berkenan nilai/predikatnya dipublikasikan

Setelah melihat perkembangan nilai SPBE seluruh Provinsi di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN&RB, diketahui bahwa Provinsi Jawa tengah memiliki nilai SPBE tertinggi, selanjutnya Provinsi Riau menyusul di peringkat kedua dan Provinsi D.I. Yogyakarta menempati peringkat ketiga. Nilai SPBE terendah saat ini mencapai 1,78 yaitu di Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan hasil Evaluasi nilai SPBE masing-masing provinsi di Indonesia, diketahui bahwa provinsi yang nilai SPBE mendapat predikat sangat baik (3,50 - <4,2) berjumlah dua provinsi atau 10%. Provinsi yang mendapat predikat baik (2,0 - <3,5) berjumlah sembilan provinsi atau 45%. Provinsi yang mendapat predikat cukup baik (1,8 - <2,0) berjumlah enam provinsi atau 30%. Provinsi yang mendapat predikat kurang baik (<1,8) berjumlah tiga provinsi atau 15%. Selain provinsi yang disebutkan tersebut provinsi lainnya yang tidak terdapat nilai/predikat karena tidak berkenan nilai/predikatnya dipublikasikan.

## Nilai Indeks SPBE 4 Kementerian

Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019



Setelah melihat perkembangan nilai SPBE Kementerian LHK yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN&RB, untuk peningkatan kualitas layanan pelayanan kinerja ke depannya perlu dilakukan *benchmarking* dengan beberapa Kementerian lain.

Jika dilihat dari nilai SPBE beberapa kementerian serumpun yang dijadikan *benchmarking*, KLHK memiliki nilai SPBE tertinggi yaitu 3,61 poin, menyusul Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nilai 3,57 poin. Selanjutnya, Kementerian Pertanian (Kementan) tercatat memiliki nilai SPBE sebesar 3,34 poin, dan terakhir Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan nilai 2,07 poin

Berdasarkan hasil Evaluasi nilai SPBE masing-masing kementerian yang menjadi contoh dalam *benchmarking* ini, diketahui bahwa kementerian yang nilai SPBE mendapat predikat sangat baik (3,50 - <4,2) adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian yang mendapat predikat baik (2,0 - <3,5) adalah Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves).





*Perbincangan santai Ibu Menteri LHK bersama Actor Nicolas Saputra saat gala premiere film SEMESTA. Film sebagai media informasi kepada publik dengan membawa pesan yang sarat akan makna tentang perubahan iklim dengan merawat alam Indonesia dengan dorongan agama, kepercayaan dan budaya yang berbeda-beda.*

*Foto oleh M Ryan Sandria*

<https://www.facebook.com/MenteriLHK>



Sistem Monitoring Kehutanan Nasional (SIMONTANA) atau National Forest Monitoring System (NFMS), inovasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lolos ke dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

SIMONTANA atau NFMS adalah sistem yang dibangun KLHK untuk menyediakan data dan informasi sumberdaya hutan berbasis spasial yang handal, terkini, dan terpercaya secara transparan dalam pengurusan hutan nasional yang lebih baik dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. SIMONTANA dapat memantau hutan di seluruh Indonesia sehingga publik dapat mengetahui dinamika kondisi hutan saat ini dengan cepat dan akurat.

Inovasi teknologi informasi yang mendapat apresiasi dan pengakuan ini merupakan produk dan hasil kerja jajaran staf KLHK dengan dukungan APBN dan keilmuan asli dalam negeri.

“Saya bersyukur dan bangga atas keberhasilan inovasi SIMONTANA, serta inovasi KLHK lainnya yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan negara. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi saya sampaikan atas kerja keras para ASN KLHK dalam memberikan pelayanan kepada publik. Terus berinovasi tanpa henti untuk Indonesia tercinta” – Wakil Menteri LHK.



Indikator Kinerja Utama 16

## Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Inovatif dan/atau Implementatif

*Potret fauna Hydrosaurus amboinensis (Soa-soa Layar) di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Karakteristik dan sebaran Soa-soa Layar menjadi salah satu objek penelitian untuk Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi yang senantiasa mengkaji dan meneliti untuk memberikan saran bagi kebijakan yang tepat sasaran.*

*Foto oleh Putu Sutarya*



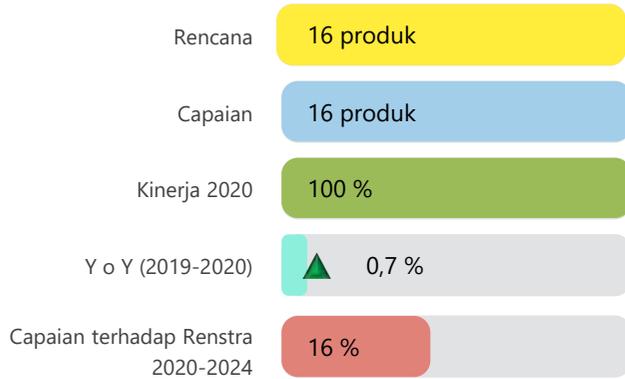
Untuk mengetahui  
Informasi tentang  
Litbang



*Pindai aku!*



## IKHTISAR KINERJA



Mendukung sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke empat yaitu: Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing, salah satu indikatornya yaitu hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif dan implementatif.

Produk-produk yang dihasilkan oleh Litbang Kementerian LHK menjadi salah satu acuan ilmiah dalam pengambilan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pengembangan produk litbang mendorong peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan kehidupan masyarakat.

Rekomendasi kebijakan dari produk litbang digunakan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak dan implikasi sebelum serta sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.

Untuk itu, hasil litbang lingkup Kementerian LHK akan diarahkan pada pencapaian hasil yang berdaya guna dan berhasil guna yang berkontribusi terhadap kemajuan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan serta perbaikan taraf hidup masyarakat. Indikator ini merupakan tahun pertama digunakan untuk mencapai sasaran strategis kementerian. Dimana tahun 2020 target produk litbang yang dihasilkan sebanyak 16 produk, dengan realisasi sebanyak 16 produk atau tercapai 100%.

## 16 produk inovatif dan/atau implementatif

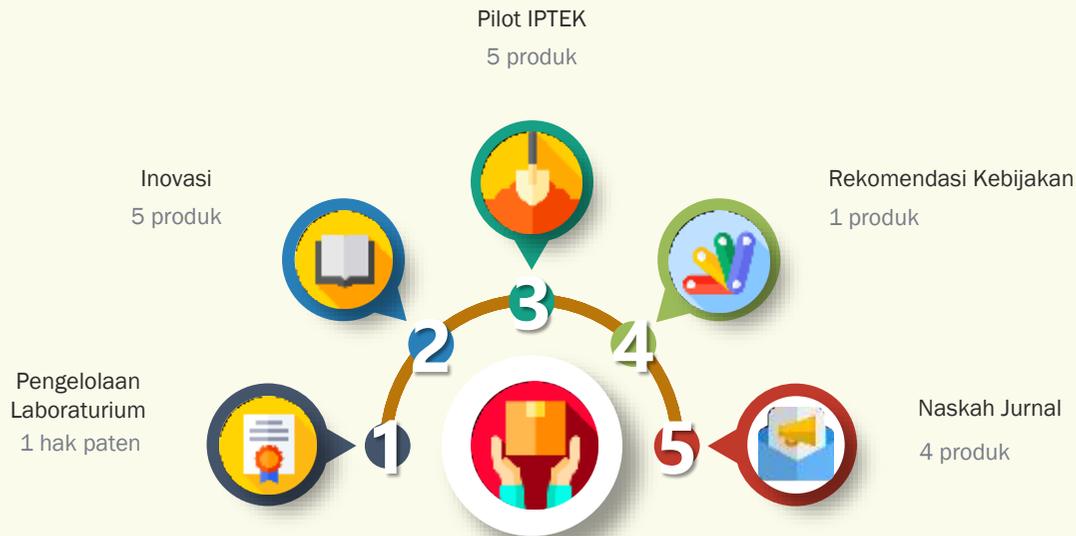
Dari target 2020 sebanyak 16 produk, seluruhnya tercapai (100%). produk inovatif dan/atau implementatif dikelompokkan menjadi: (1) naskah jurnal, (2) pilot IPTEK, (3) inovasi, (4) rekomendasi kebijakan, dan (5) pengelolaan laboratorium. Berdasarkan Renstra 2020, capaian ini disesuaikan dengan realokasi anggaran yang sebelumnya 52 menjadi 16 produk. Target hingga 2024 sebanyak 100 produk. Bila dibandingkan dengan renstra 2024 capaian hingga 2020 produk yang dihasilkan mencapai 16%.



Produk Inovasi yang berkontribusi terhadap perbaikan taraf hidup masyarakat sekitar hutan

Dikemas menarik, Teh Celup Daun Pakoba, produk hasil inovasi terapan dari Litbang KLHK. Hasil produk ini menjadi riset unggulan yang mampu mendongkrak pendapatan masyarakat dari rente ekonomi pemasaran produk Teh Celup Daun Pakoba. Foto oleh BPPLHK Manado.

# Produk Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020



Sebanyak enam belas produk hasil penelitian dengan pengembangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Enam belas produk tersebut dibagi ke dalam lima kategori yaitu:

1. Hak paten, sebanyak satu produk, inovasi yang dipatenkan penelitian tentang inokulan bubuk pemicu gaharu. Pemanfaatan paten ini diharapkan dapat meningkatkan produksi gaharu hasil budidaya serta mengurangi ketergantungan terhadap gaharu alam.
2. Rekomendasi kebijakan, sebanyak satu produk dengan judul formulasi penilaian pemulihan tegakan hutan alam setengah penebangan terbitan Policy Brief Volume 14 No. 1 Tahun 2020-Pusat Litbang Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim.
3. Inovasi, sebanyak satu produk dan empat buku: Teh Herbal Pakoba yang sudah dikemas dan diproduksi serta menerbitkan empat buku hasil penelitian dan

pengembangan potensi sumber daya hutan yang melimpah dengan judul: (a). Atasi Diabetes Melitus Dengan Tumbuhan Herbal Akar Kuning; (b). Budidaya Dan Pemanfaatan Spesies Pohon Lokal Sulawesi; (c). Kapula Ratu Rempah yang diterbitkan oleh IPB Press; dan (d). Strategi Produksi Bibit Berkualitas untuk Pengembangan Rotan Jernang.

4. Lima produk implementasi hasil litbang berupa pilot IPTEK demonstration plot (demplot) berupa: (a). Demplot Model DAS Mikro Partisipatif di Sub DAS Naruan, DAS Bengawan Solo; (b). Demplot paludikultur di Kawasan Hutan Tujuan Khusus (KHDTK) Tumbang Nusa; (c). Demplot budidaya lebah kelulut dan tanaman sayur; (d). Demplot agroforestri cendana melalui pola silvopastur; dan (e). sumber benih sengon yang diproduksi di Kediri dan Pasuruan.
5. Tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempublikasikan

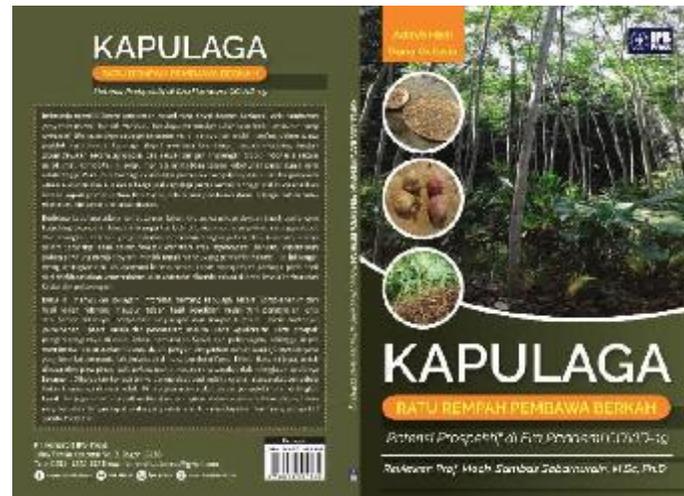
empat jurnal, baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Satu jurnal berbahasa Indonesia dengan judul Pemilihan Teknik Sterilisasi Benih dan Media yang Tepat Untuk Mikropropagasi Jati Muna (*Tectona grandis L.*). Tiga terbitan jurnal berbahasa Inggris dengan judul: (a). *Nest characteristic and populations of Tapanuli Orangutans in Batangtoru landscape, South Tapanuli District, Indonesia*; (b). *Elevated CO2 offsets the alteration of foliar chemicals (n icosane, geranyl acetate, and elixene) induced by elevated O3 in three taxa of O3 tolerant eucalypts*. Terbit di *Journal of Forestry Research* dan (c). *Vegetation Dynamic Post-Disturbance In Tropical Rain Forest Of Bird's Head Peninsula of West Papua, Indonesia (Crea-Jurnal)*.

## Highlights Produk Inovatif dan Implementatif



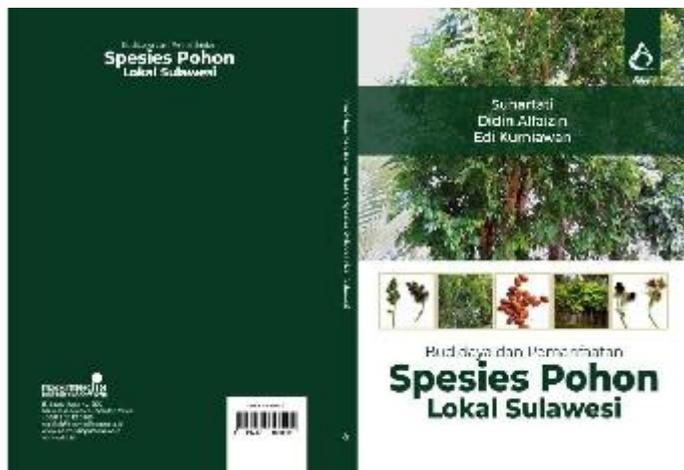
### BPPTA Ciamis

Kapulaga dapat menjadi rempah komoditas tinggi dengan pengelolaan yang baik. Buku berjudul “Kapulaga, Ratu Rempah Pembawa Berkah” ini menyajikan beragam informasi secara komprehensif mulai dari pengenalan jenis dan pemanfaatannya sampai prospek pengembangannya di areal kelola perhutanan sosial dan pekarangan. Diharapkan kehadirannya bermanfaat, memberikan inspirasi, dan motivasi dalam pengembangan dan pemanfaatan jenis multiguna yang bernilai ekonomis bagi pelaku usaha, masyarakat pengelola hutan, maupun masyarakat umum.



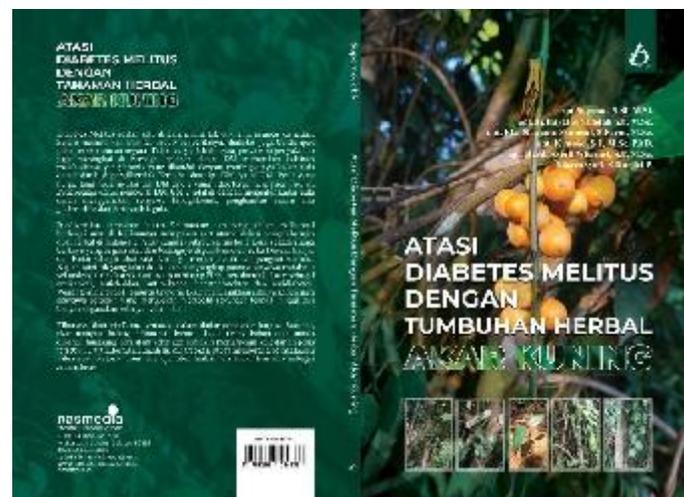
### BPPLHK Makassar

Buku ini disusun sebagai pedoman untuk menyebarkan informasi tentang budidaya beberapa jenis lokal Sulawesi. Penerbitan buku ini adalah buah karya BP2LHK Makassar untuk mendokumentasikan hasil penelitian spesies pohon kayu lokal Sulawesi. Salah satu spesies pohon lokal Sulawesi adalah kayu kuku (*Pericopsis mooniana* Thw.) yang saat ini berstatus terancam punah (*vulnerable tree species*). Di habitat aslinya seperti kawasan Cagar Alam (CA) Lamedai, Sulawesi Tenggara potensinya terus menurun. Berdasarkan kondisi tersebut, maka spesies ini perlu upaya konservasi genetik dan dikembangkan pada hutan tanaman atau hutan tanaman industri (HTI). Spesies pohon lokal Sulawesi yang dibahas pada tulisan ini diantaranya bitti (*Vitex* sp), cempaka, dan kayu kuku (*Pericopsis mooniana* Thw.).



### BPPTKSDA Samboja

Obat herbal di Indonesia memiliki ruang yang sangat terbuka untuk dikembangkan, khususnya dengan pengetahuan tradisional berbagai suku di belahan Indonesia. Buku “Atasi Diabetes Melitus dengan Tumbuhan Herbal Akar Kuning” mencoba menjawab tantangan ini dengan menelaah Akar Kuning (*Fibraurca tinctoria* Lour.) sebagai potensi obat sakit kuning (liver) malaria dan penguat stamina menurut suku Dayak, Banjar, dan Kutai.



# Highlights Produk Inovatif dan Implementatif

BUKU



## BP2LHK Palembang

Rotan Jernang (*Daemonorops* sp.) menjadi salah satu komoditas penting untuk masyarakat sekitar hutan, yang memanfaatkan baik resin jernang maupun batang rotan. Oleh karena itu BP2LHK Palembang meneliti tentang Budidaya Tanaman Rotan Jernang (*Daemonorops* sp) sebagai Upaya Peningkatan Peran Masyarakat Sekitar Hutan dalam Pembangunan Hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyediakan data dan informasi tentang budidaya agroforestri rotan jernang di lahan masyarakat. Data dan informasi terkait Rotan Jernang khususnya mengenai strategi produksi bibit berkualitas telah disusun dalam sebuah buku “Strategi Produksi Bibit Berkualitas untuk Pengembangan Rotan Jernang”.



REKOMENDASI  
KEBIJAKAN



## BBPPEHD Samarinda

Salah satu produk hasil litbang yang implementatif adalah terbitnya Policy Brief Volume 14 No. 1 Tahun 2020 dengan judul “Formulasi Penilaian Pemulihan Hutan Alam Setelah Penebangan”. Rekomendasi Kebijakan yang digagas oleh B2P2EHD Samarinda ini mendapatkan apresiasi dan tanggapan positif untuk implementasi formulasi oleh APHI Kalimantan Timur dan IUPHHK HA.



### BPPLHK Aek Nauli

Orangutan Tapanuli merupakan subspesies orangutan paling terancam dengan status IUCN Critically Endangered. Keadaan ini bisa dimitigasi dengan mengenali karakteristik Orangutan Tapanuli, dan apa yang membedakannya dengan subspesies lain. Jurnal berjudul “Nest characteristics and populations of Tapanuli Orangutans in Batangtoru landscape, South Tapanuli District, Indonesia” hasil buah pikiran BPPLHK Aek Nauli ini bisa menjadi dasar untuk implementasi strategi mitigasi konflik manusia dan orangutan.



### BPPTSTH Kuok

Eukaliptus merupakan sumber daya hutan penting dan mungkin toleran terhadap konsentrasi ozon permukaan tanah (O<sub>3</sub>) yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul “Elevated CO<sub>2</sub> offsets the alteration of foliar chemicals (n-icosane, geranyl acetate, and elexene) induced by elevated O<sub>3</sub> in three taxa of O<sub>3</sub> tolerant eucalypts”. Penelitian ini terbit di Journal of Forestry Research.



### BPPLHK Manokwari

Gangguan antropogenik menjadi salah satu utama dalam pemulihan hutan hujan tropis. Pemulihan hutan terganggu aktivitas antropogenik belum begitu dipahami, sehingga diadakan penelitian untuk mengkaji proses pemulihan vegetasi di Fef, Kabupaten Tambrau, Papua Barat dengan membandingkan komposisi bentuk kehidupan hutan primer sebagai kontrol terhadap hutan alam, hutan terganggu lima tahun, dan hutan rusak tujuh tahun.



### BPPTPTH Bogor

Untuk mendapatkan bibit unggul Jati Muna, BPPTPTH Bogor melakukan penelitian berjudul “Pemilihan Teknik Sterilisasi Benih dan Media Yang Tepat Untuk Mikropropagasi Jati Muna (*Tectona grandis* L.)” yang kemudian terbit di Perbenihan Tanaman Hutan Vol.8.No1 Agustus 2020.

## Highlights Produk Inovatif dan Implementatif

### HAK PATEN



BLI Gunung Batu Bogor

Inokulan Bubuk Pemicu Gaharu

Inovasi teknologi mikroorganisme dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan diperlukan untuk mencegah penurunan populasi mikroorganisme yang hidup di area sistem perakaran (mikorizosfer) akibat degradasi lahan. Gaharu menjadi salah satu jawaban untuk tantangan tersebut, dimana untuk memproduksi gaharu perlu menginokulasi mikroba ke dalam pohon tertentu seperti *Aquilaria* dan *Gyrinops*. Dengan demikian, pohon terinokulasi dapat memproduksi metabolit sekunder atau resin dan menambah valuasi jasa lingkungan dan meningkatkan nilai ekonomi hutan.

### PILOT IPTEK

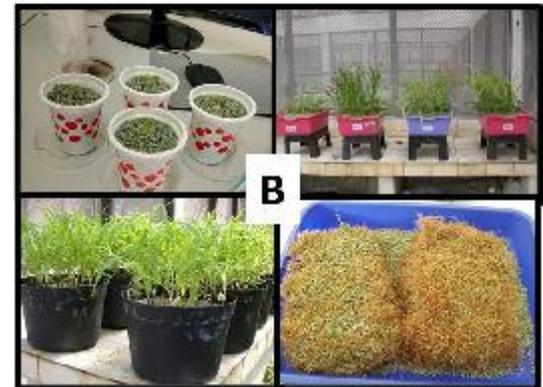
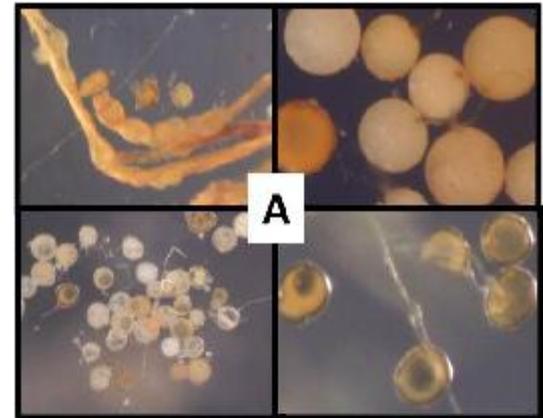


BBPPBPTH Yogyakarta

Sumber Benih Sengon di Kediri dan Pasuruan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar atas benih unggul toleran karat tumor. Plot sumber benih ini dibuat atas prakarsa BBPPBPTH Yogyakarta, UPT Perbenihan Provinsi Jatim, PT. Sumber Sari Petung, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. PT Sumber Sari Petung juga menyediakan areal untuk menjadi plot perbenihan di Ngancar, Kediri, Jawa Timur.



Plot sumber benih sengon



Sumber benih Sengon di Kediri dan Pasuruan



## BPPTPDAS Solo

Balitek DAS telah berhasil melakukan kegiatan pengembangan riset Model Pengelolaan DAS Mikro secara Partisipatif-Kolaboratif di DAS Mikro Naruan, Sub DAS Keduang, di hulu DAS Bengawan Solo. Kegiatan ini telah didokumentasikan menjadi sebuah film yang dapat dilihat di laman youtube [Balitekdas](#) dengan judul “[Model Pengelolaan DAS Mikro secara Partisipatif dan Integratif](#)” dan “[Bambu, Bahan Pengendali Erosi Jurang Kecil yang Murah dan Efisien](#)”.



Bambu, Bahan Pengendali Erosi Jurang Kecil yang Murah dan Efisien



Model Pengelolaan DAS Mikro secara Parsitipatif dan Integratif



## BPPLHK Kupang

Silvopastur merupakan integrasi pohon, pakan dan ternak dalam lokasi yang sama. Silvopastur telah dilakukan oleh masyarakat di Pulau Timor dan memberikan pendapatan kepada masyarakat sekitar hutan dan dapat memberikan manfaat ekologi. Namun, sebagian besar praktik silvopastur di Pulau Timor dilakukan secara ilegal dan hal ini menyebabkan silvopastur di Pulau Timor tidak efisien. Pengembangan diperlukan untuk memperbaiki silvopastur yang telah ada yaitu dengan membangun Demplot Agroforestri Cendana Melalui Pola Silvopastur di Pulau Timor tepatnya di Hutan Penelitian Banamlaat Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefamenanu Nusa Tenggara Timur seluas 0,5 ha. Diharapkan dari pengembangan ini bisa menunjang salah satu prioritas nasional yaitu Kedaulatan Pangan (PN4) dan membentuk kelompok serta membina masyarakat agar bersedia menanam cendana dengan pola silvopastur.

### BPPLHK Banjarbaru

Paludikultur adalah metode berbudidaya di lahan gambut tanpa mengubah kondisi asli lahan gambut. Sebagai salah satu kegiatan PEN Food Estate, BPPLHK Banjarbaru bekerja sama dengan P3SEKPI Bogor, BPTPDAS Solo, dan Universitas Palangkaraya melakukan paludikultur di KHDTK Tumbang Nusa, Kab Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Tiga subkegiatan model restorasi ekosistem gambut berbasis masyarakat:

(1)Evaluasi demplot paludikultur yang dibasahi kembali yang dilaksanakan oleh Balai Litbang LHK Banjarbaru; (2) Pemetaan potensi pasar dan kemandirian usaha petani untuk mendukung restorasi gambut yang dilaksanakan oleh P3SEKPI Bogor dan (3) Pengurangan kebakaran lahan gambut melalui pengelolaan muka air tanah yang dilaksanakan oleh BPTPDAS Solo.



### BPPTHBK Mataram

Sekitar KHDTK Rarung, BPPTHBK Mataram membuat demplot budidaya lebah Kelulut dan tanaman sayuran. Kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya pada Rencana Operasional Pengembangan (ROPg) tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran pasca realokasi anggaran. Kegiatan yang dapat dilakukan hanya pengamatan perkembangan koloni terkait kondisi sehat tidaknya koloni serta identifikasi serangan hewan pengganggu yang terjadi di sekitar lokasi pengembangan. Kondisi demikian tidak menyurutkan upaya untuk mencapai target pada Perjanjian Kinerja berupa 1 produk hasil litbang.

### BPPLHK Manado

Pakoba (*Syzigium luzonense* Merr.) adalah salah satu pohon unggulan Sulawesi Utara yang memiliki nilai budaya erat dengan masyarakat. Daun dan kulit kayu pakoba dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal. Daun pakoba sendiri memiliki kandungan senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, khususnya sebagai sumber antioksidan alami dan berpotensi dapat menurunkan kadar gula darah. Untuk itu BP2LHK Manado berkerja sama dengan Perkumpulan Manengkel Solidaritas menyelenggarakan pelatihan pembuatan teh daun Pakoba. Teh herbal Pakoba mengandung antioksidan yang cukup tinggi, penambah daya tahan tubuh, dan dapat dimanfaatkan untuk terapi anti diabetes.



## Mendukung PEN Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi

Tahun 2020 merupakan momentum besar dalam pembangunan nasional, pandemi Covid-19 yang memicu resesi menjadi *trigger* dimana keputusan harus diambil secara cepat dan tepat. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senantiasa memadukan kajian ilmiah dalam pengambilan kebijakan. Sebanyak Rp. 11 miliar dari anggaran PEN KLHK 2020 sebesar Rp 812,43 miliar digunakan untuk penelitian kajian kubah gambut dan penerapan metode paludikultur dalam rehabilitasi dan restorasi lahan gambut. Alokasi yang dianggarkan untuk melakukan Penelitian dan Pengembangan mampu menghasilkan sembilan kajian dan satu implementasi inovasi, yaitu:

1. Kajian implementasi model restorasi ekosistem gambut berbasis masyarakat dan bekerja sama dengan Universitas Palangkaraya. Kajian ini menghasilkan keluaran berupa analisis Paludikultur Ekosistem Gambut, peta potensi pasar, kemandirian usaha tani gambut, pengelolaan tinggi muka air, dan neraca air gambut serta Desain COE.
2. Kajian konektivitas sistem lindung dan budidaya gambut berkelanjutan, bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada.
3. Kajian implementasi multisistem silvikultur menuju ekosistem gambut berkelanjutan bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor mengkaji paludikultur & agroforestri (biofisik, ekonomi sosial masyarakat, zonasi multisistem & multiusaha ekosistem gambut, kemandirian masyarakat melalui penerapan teknik usaha terpadu, demplot paludikultur, dan agroforestri.

4. Kajian Model Bisnis Ketahanan Pangan dalam Mendukung Pengelolaan Ekosistem Gambut Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah, kajian ini diharapkan mampu menggali sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan masyarakat, kemitraan masyarakat-pemerintah-swasta, rancangan model bisnis komoditas unggulan.
5. Kajian strategi konservasi biodiversitas ekosistem gambut, berupa kajian ekologi dan ekonomi masyarakat dalam konservasi ekosistem gambut yang melibatkan Universitas Tanjungpura.
6. Kajian pengembangan wisata tradisional berbasis kearifan lokal masyarakat sekitar gambut.
7. Kajian pengelolaan tata air lahan gambut secara lanskap dalam Kawasan Hidrologi Gambut (KHG).
8. Kajian aspek lingkungan restorasi dan rehabilitasi kubah gambut.
9. Strategi penerapan teknik budidaya gambut berkelanjutan (paludikultur) oleh masyarakat. Keluaran dari kajian ini berupa ekologi & ekonomi masyarakat, peta partisipasi/peringkat, adopsi teknologi budidaya oleh masyarakat, strategi teknik budidaya gambut oleh masyarakat.
10. Implementasi IPTEK arang terpadu dalam pengembangan sistem budidaya gambut oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan sumber pendapatan alternatif.

BLI juga melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meliputi kegiatan monev untuk seluruh kegiatan PEN di lingkup KLHK.



Perjuangan seorang anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Lembaga Pengelola Lahan Desa Kampung di Dam Kanal Besar Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penelitian di lahan gambut mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.

Foto oleh Faturrahman.



Alih Teknologi

Kegiatan implementasi inovasi teknologi arang terpadu dalam pengembangan sistem budidaya gambut oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan sumber pendapatan alternatif, menjadi salah satu program Kementerian LHK dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) *Food Estate* (FE). Foto oleh Ruspiana.

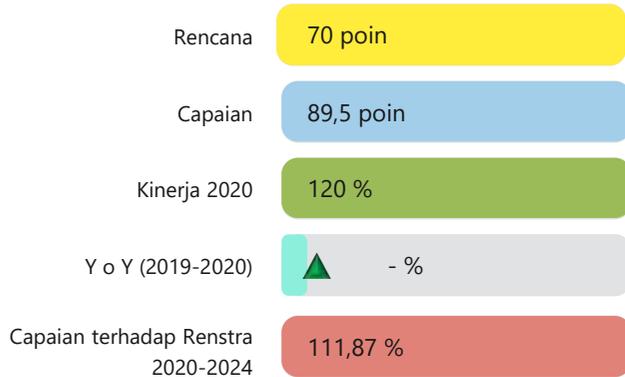


## Indikator Kinerja Utama 17

### Indeks Produktivitas Dan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

*Proses seleksi calon pegawai negeri sipil untuk formasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019. Serangkaian tahap seleksi yang adil dan transparan diharapkan mampu meningkatkan indeks produktivitas dan daya saing SDM KLHK. Foto oleh Nensi Sulandri.*

## IKHTISAR KINERJA



Produktivitas dan daya saing SDM dalam lingkungan hidup dan kehutanan adalah sejauh mana SDM yang bekerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan telah dibekali kapasitas (kompetensi dan sertifikasi) baik secara individu maupun kelembagaan. Dengan demikian, para SDM LHK dapat bekerja secara profesional di bidang tugasnya dan dapat meningkatkan produktivitas serta daya saing baik secara personal maupun institusi lembaga. Produktivitas dan daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan dihitung menggunakan indeks yang dihitung menggunakan komponen dimensi SDM, kelembagaan usaha,

dan kelembagaan lingkungan hidup. Kementerian LHK menargetkan indeks produktivitas dan daya saing sebesar 70 poin pada tahun 2020. Realisasi Indikator Kinerja Utama ini sebesar 89,50 poin atau tercapai 127,86%, namun demikian untuk perhitungan capaian kinerja dibatasi maksimal 120%. IKU ini belum dapat menghitung nilai tahun per tahunnya (YoY) karena tahun 2020 merupakan tahun pertama perhitungan indeks produktivitas dan daya saing. Capaian tahun 2020 telah melampaui target Renstra di 2024 dengan target indeks 80 poin atau terealisasi 111,88%.

### 89,5 poin

Dari target sebesar 70 poin indeks produktivitas dan daya saing SDM, tercapai 89,50 poin (127,86%). Mendukung sasaran strategis no. 4 yaitu terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing. Target hingga 2024 dalam Renstra sebanyak 80 poin (111,87%).



Menuju ASN KLHK yang produktif dan berdaya saing

Pembekalan materi Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Foto oleh BP2SDM.

## Metodologi Perhitungan

Produktivitas dan daya saing SDM LHK dibangun atas 2 (dua) dimensi yaitu dimensi SDM (indeks SDM) dan dimensi kelembagaan. Dimensi SDM berpusat pada aspek kompetensi dan sertifikasi yang berwujud (*tangible*). Adapun entitas yang diukur berkenaan dengan dimensi SDM yaitu: (1) Jumlah SDM LHK bersertifikat kompetensi, (2) Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang kompeten, (3) Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat, (4) Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal, dan (5) Jumlah SDM Masyarakat yang terlatih,

peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Sementara itu, untuk dimensi kelembagaan yaitu berpusat pada: (1) kelembagaan usaha kehutanan (KTH) yang dibina serta (2) kelembagaan komunitas/atau individual yaitu komunitas atau individu yang mendapat pelatihan khusus untuk mendapatkan pemahaman dan keterampilan untuk berkontribusi dalam perbaikan lingkungan hidup. Ketiga indeks (indeks SDM, indeks kelembagaan usaha, dan indeks kelembagaan lingkungan hidup) menjadi komponen untuk perhitungan indeks

produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (IPDSSDM) dengan nilai bobot tersendiri. Perhitungan IPDSSDM tertera pada rumus di bawah paragraf ini. Sumber data dihimpun dari data individu atau kelembagaan yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas, baik dari Satker (UPT/BDLHK, SMKKN dan Eselon II) lingkup BP2SDM yang memberikan pendidikan dan pelatihan guna memperoleh kompetensi dan sertifikasi maupun dari data produktivitas yang diukur oleh masing-masing eselon I lingkup KLHK.

Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM (IPDSSDM):

$$I_{PDSSDM} = a_1 I_{SDM} + a_2 I_{KU} + a_3 I_{LLH}$$
$$I_{PDSSDM} = 0,50 I_{SDM} + 0,25 I_{KU} + 0,25 I_{LLH}$$

Dimana  $I_{SDM}$  = Indeks SDM  
 $I_{KU}$  = Indeks Kelembagaan Usaha  
 $I_{LLH}$  = Indeks Kelembagaan Lingkungan Hidup

Unsur Pembangun Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



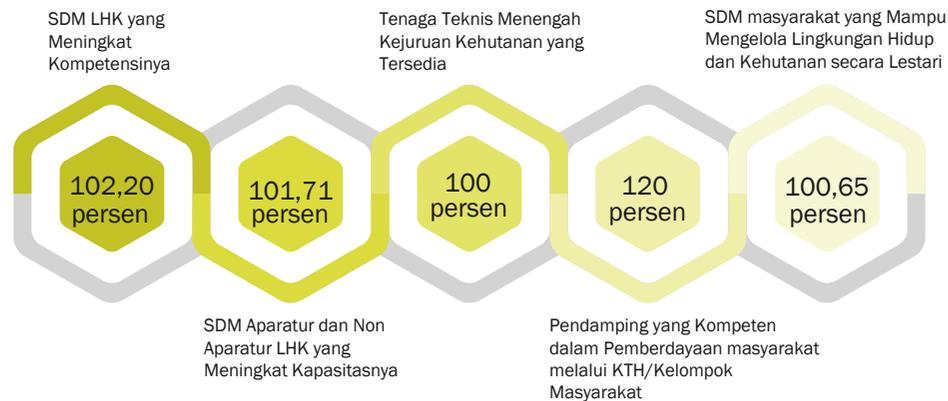
## Capaian Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM Kementerian LHK

Capaian indeks produktivitas dan daya saing SDM Kementerian LHK terdiri dari tiga komponen (dimensi SDM, dimensi kelembagaan usaha, dan kelembagaan lingkungan hidup. Indeks tersebut didapatkan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM (IPDSSDM):

$$\begin{aligned} I_{PDSSDM} &= a_1 I_{SDM} + a_2 I_{KU} + a_3 I_{LLH} \\ &= 0,50 I_{SDM} + 0,25 I_{KU} + 0,25 I_{LLH} \\ &= (0,5 \times 79) + (0,25 \times 100) + (0,25 \times 100) \\ &= 39,5 + 25 + 25 \\ I_{PDSSDM} &= 89,5 \text{ poin} \end{aligned}$$

## Kinerja Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK Dimensi Sumber Daya Manusia



Dimensi Sumber Daya Manusia memiliki bobot 50 persen dari indeks produktivitas dan daya saing SDM KLHK. Realisasi kinerja komponen pembangun dimensi sumber daya manusia, yang pertama adalah SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang meningkat kompetensinya, dimana target tahun 2020 sebanyak 1.000 orang dengan realisasi 1022 orang. Indikator yang kedua yaitu SDM Aparatur dan non aparaturnya yang meningkat kapasitasnya dengan realisasi 9.781 orang dari target 9.617 orang. Indikator ketiga, tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia mencapai 466 dari target 466 orang. Indikator Keempat pendamping yang kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/kelompok masyarakat telah mendampingi sebanyak 460 dari target 200 kelompok. Indikator kelima yaitu SDM masyarakat yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari telah terbentuk sebanyak 1.540 orang dari target 1.530 orang.

Kelima komponen ini kemudian disusun untuk menjadi indeks dimensi SDM dengan perhitungan sebagai berikut:

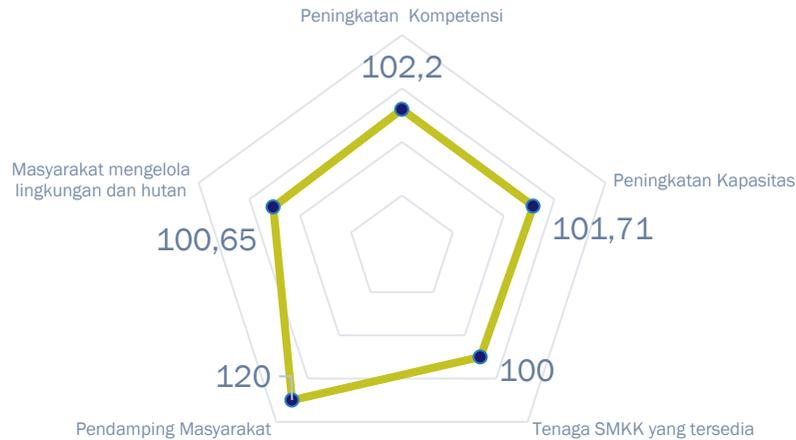
$$\begin{aligned} I_{SDM} &= a_1 I_{SDMSK} + a_2 I_{SDMK} + a_3 I_{SDMSMKK} + a_4 I_{SDMP} + a_5 I_{SDMLH} \\ I_{SDM} &= 0,175 I_{SDMSK} + 0,20 I_{SDMK} + 0,15 I_{SDMSMKK} + 0,3 I_{SDMP} + 0,175 I_{SDMLH} \\ I_{SDM} &= (0,175 \times 40) + (0,20 \times 47,5) + (0,15 \times 100) + (0,3 \times 100) + (0,175 \times 100) \\ I_{SDM} &= 79 \end{aligned}$$

Keterangan

$I_{SDM}$	= Indeks SDM
$I_{SDMSK}$	= Persentase SDM LHK yang bersertifikat kompetensi
$I_{SDMK}$	= Persentase SDM LHK yang kompeten
$I_{SDMSMKK}$	= Persentase SDM SMK yang bersertifikat kompetensi
$I_{SDMP}$	= Persentase SDM penyuluh dan/atau pendamping yang andal
$I_{SDMLH}$	= Persentase SDM masyarakat berbudaya lingkungan hidup
$a_{1,2,3,4,5}$	= Nilai bobot masing-masing indeks

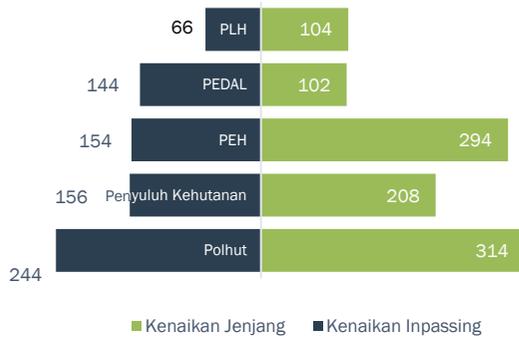
Secara keseluruhan komponen pembangun dimensi sumber daya manusia melebihi target yang ditetapkan. Terutama pendamping yang kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui kelompok petani hutan atau kelompok masyarakat.

## PENINGKATAN KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI SDM LHK (%)



## Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM

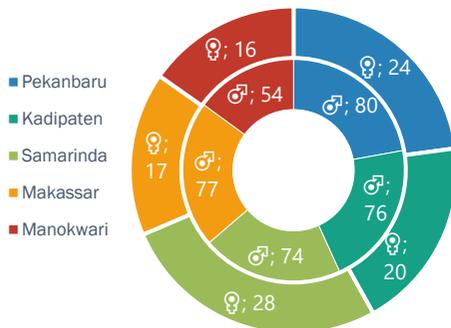
### HASIL UJI KOMPETENSI SDM TAHUN 2020



Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di Kementerian LHK penting karena berhubungan langsung dalam menunjang program dan kegiatan. Pada tahun 2020 Badan P2SDM mampu memberikan kinerja yang baik, dibuktikan dengan realisasi indikator kinerja peningkatan kompetensi dan sertifikasi di atas 100% untuk seluruh Indikator Kinerja.

Di masa pandemi, Kementerian LHK menyelenggarakan uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan melalui sarana daring yang merupakan penerapan protokol kesehatan dengan tetap mengedepankan kualitas. Dari peserta sebanyak 1.040 orang, 1.022 diantaranya lulus uji kompetensi dengan baik. Selain itu ada pula uji inpassing untuk penyesuaian jabatan fungsional, dengan hasil 764 orang dinyatakan layak inpassing ke jabatan baru. Rincian peserta uji kompetensi berdasarkan jabatan dimuat dalam infografis di samping.

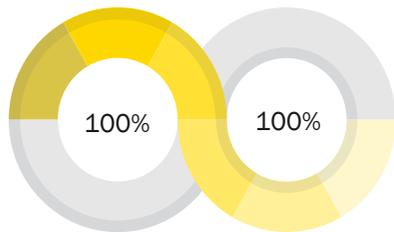
### SEBARAN SISWA SMK KEHUTANAN BERDASARKAN GENDER



Tenaga teknis menengah kejuruan dimaksudkan untuk menyongsong era baru dengan bekal kompetensi dan daya saing siap bekerja baik di dunia usaha maupun dunia industri. Di tahun 2020 seluruh siswa Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan sebanyak 466 siswa lulus dan menandakan target Indikator Kinerja tercapai 100%. Sebaran siswa SMK Kehutanan berdasarkan jenis kelamin termuat dalam infografis di samping.

# Kinerja Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK Dimensi Kelembagaan

Kelembagaan Usaha  
Kehutanan



Kelembagaan yang  
Berkontribusi dalam  
Perbaikan Lingkungan

Dimensi kelembagaan memiliki bobot indeks 50 persen yang dihitung berdasarkan dua komponen yaitu kelembagaan usaha kehutanan dan kelembagaan yang berkontribusi dalam perbaikan lingkungan. Indikator kelembagaan usaha kehutanan dihitung berdasarkan jumlah kelompok tani hutan yang terbentuk, targetnya sebanyak 110 kelompok tani hutan dengan realisasi 110 kelompok atau tercapai 100 persen. Sedangkan komponen yang kedua, kelembagaan yang berkontribusi dalam perbaikan lingkungan dihitung

berdasarkan dua indikator yaitu: jumlah lembaga pendidikan yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup terealisasi 77 dari target 77 yang terdiri dari 72 lembaga pendidikan dan jumlah lembaga masyarakat atau komunitas yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup sebanyak 5 lembaga sehingga tercapai 100%. Perhitungan indeks kelembagaan terdiri dari kedua komponen kelembagaan usaha dan kelembagaan lingkungan hidup seperti dalam rumus sebagai berikut:

$$I_{LLH} = \frac{\text{Jumlah satuan komunitas/lembaga lingkungan hidup}}{\text{Total satuan komunitas/lembaga}} * 100\%$$

$$I_{LLH} = \frac{(72+5)}{(72+5)} * 100\%$$

$$I_{LLH} = 100$$

$$I_{LU} = a_1 I_{KKTHM} + a_2 I_{KLP2UKS}$$

$$I_{LU} = 0,75 I_{KKTHM} + 0,25 I_{KLP2UKS}$$

$$I_{LU} = (0,75 * 100) + (0,25 * 100)$$

$$I_{LU} = 100$$

Keterangan

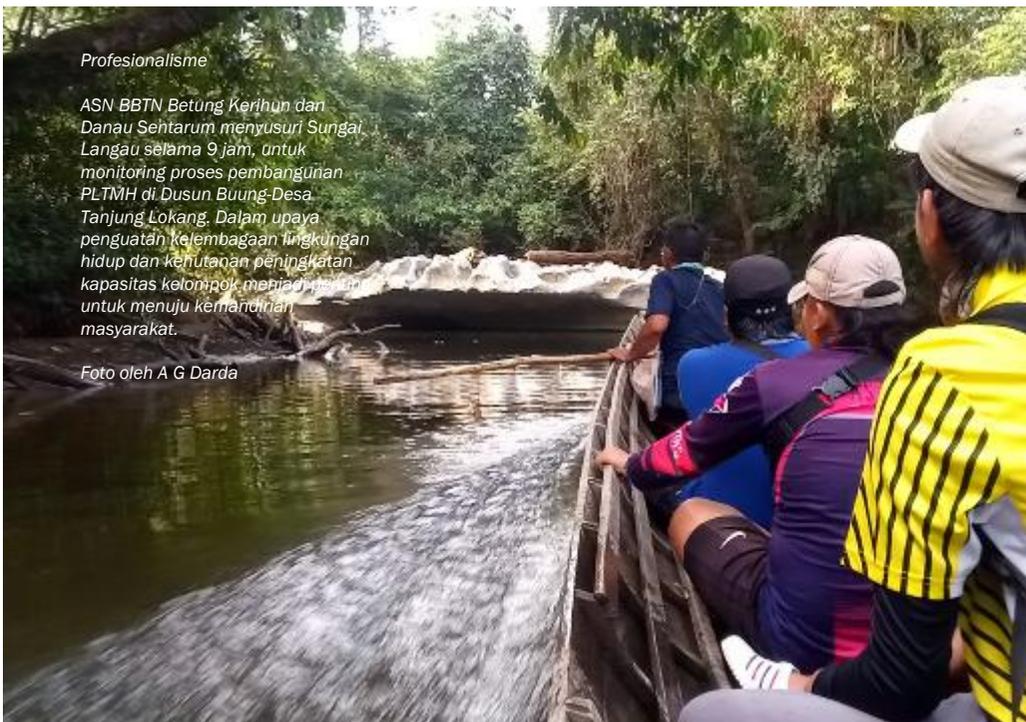
$I_{LLH}$  = Indeks Kelembagaan Lingkungan Hidup

$I_{KU}$  = Indeks Kelembagaan Usaha

$I_{KKTHM}$  = Persentase KTH Mandiri

$I_{KLP2UKS}$  = Persentase LP2UKS baik pembentukan atau pengembangan

$a_{1,2,3,4,5}$  = Nilai bobot masing-masing indeks



Professionalsme

ASN BBTN Betung Kerihun dan Danau Sehtarum menyusuri Sungai Langau selama 9 jam, untuk monitoring proses pembangunan PLTMH di Dusun Buung-Desa Tanjung Lokang. Dalam upaya penguatan kelembagaan lingkungan hidup dan kehutanan peningkatan kapasitas kelompok menjadi penting untuk menuju kemandirian masyarakat.

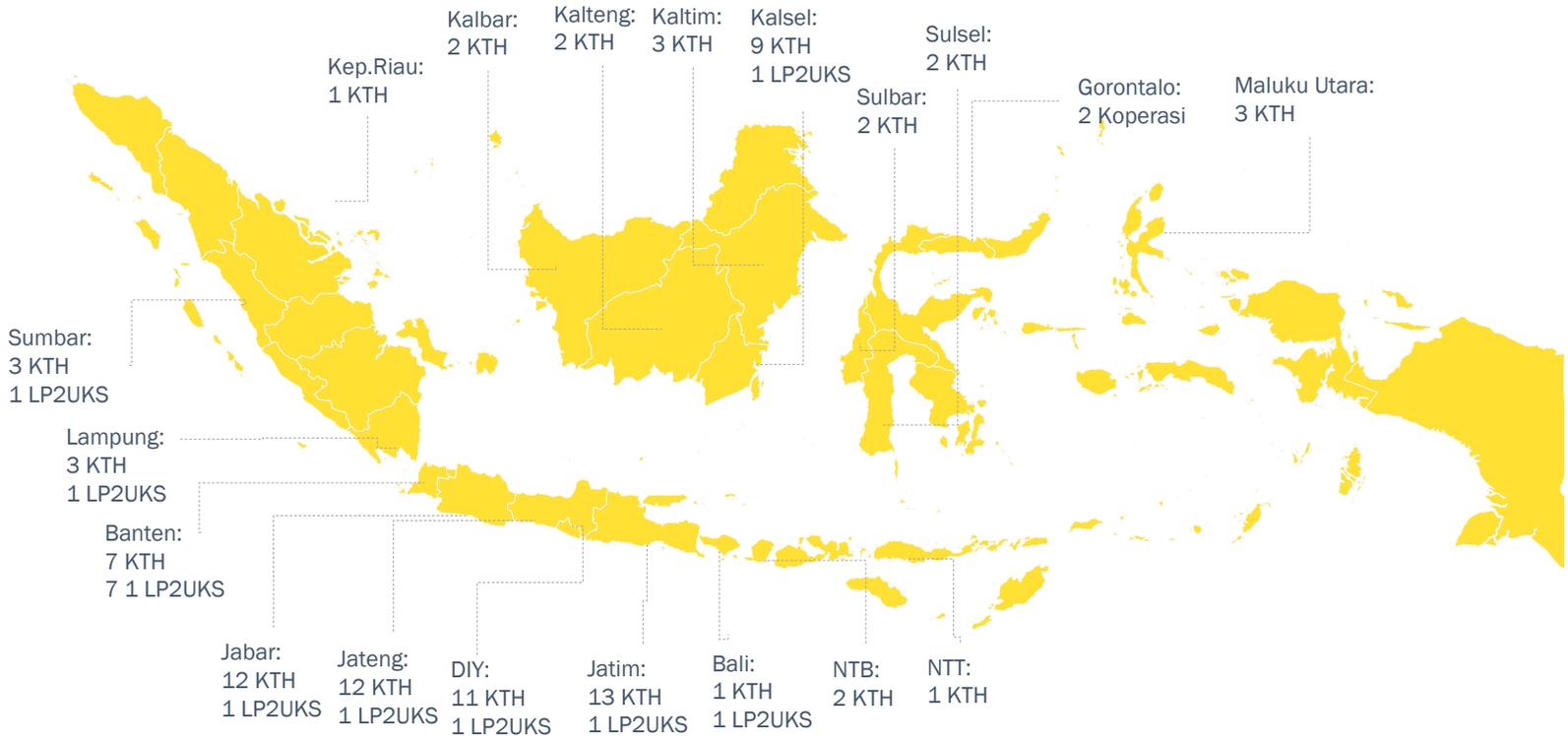
Foto oleh A G Darda

## Kinerja Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK Dimensi Kelembagaan Usaha

Pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat merupakan salah satu upaya Kementerian LHK dalam merangkul semua pihak secara holistik. Kementerian LHK perlu dukungan masyarakat sekitar hutan untuk menyelaraskan tujuan dengan kebutuhan masyarakat sekitar, diharapkan kebijakan maupun pengelolaan bisa lebih tepat sasaran dan membentuk modal sosial yang selaras dengan jaringan, norma, dan kepercayaan dalam kolaborasi sosial. Modal sosial akan semakin bertambah bila masyarakat terlibat langsung, sehingga dibentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri dan Wanawiyata Widyakarya/Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS).

Sasaran utama indikator ini adalah sebanyak 110 unit masyarakat/petani hutan yang tergabung dalam kelompok/lembaga sosial. Pada tahun 2020, telah terbentuk 110 unit, yang terdiri dari 100 KTH Mandiri dan 10 Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS), atau tercapai 100%. Bobot dimensi kelembagaan usaha untuk perhitungan indeks produktivitas dan daya saing SDM Kementerian LHK adalah sebesar 25%, dimana realisasi mencapai 100% dan menyumbang 25 dari 89,5 poin untuk perhitungan indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK. Rincian persebaran KTH dan LP2UKS tergambar dalam infografis sebagai berikut.

Sebaran Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS)



## Kinerja Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK Dimensi Kelembagaan Lingkungan Hidup

Badan P2SDM berupaya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat secara masif, sistematis, dan terstruktur khususnya pada lembaga/organisasi/komunitas masyarakat dan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. Perincian target dan realisasi seperti terlihat pada tabel di samping, dimana terdapat lima unit lembaga/komunitas yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Bela Lingkungan dan 72 unit sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Pembinaan gerakan masyarakat bela lingkungan (Gemilang) dilakukan di lima lokasi, baik secara luring maupun daring. Kegiatan kedua, pembinaan Gerakan PBLHS dilaksanakan secara daring pada 72 sekolah di Jabodetabek yang belum berhasil memperoleh penghargaan Adiwiyata Tahun 2019.

Bobot dimensi kelembagaan lingkungan untuk perhitungan indeks produktivitas dan daya saing SDM Kementerian LHK adalah sebesar 25%. Pada tahun 2020, kinerja program lembaga/komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup telah tercapai 100%, dengan penyerapan anggaran 99,99%.

Lembaga/Komunitas Berbudaya Lingkungan Hidup

NO	OUTPUT KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Lembaga/ Komunitas yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Bela Lingkungan (Unit)	5	5	100
2	Terwujudnya Sekolah/Kampus yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Unit)	72	72	100
TOTAL		77	77	100



Gerakan peduli lingkungan dimulai sejak dini, seperti yang dilakukan anak-anak sekolah yang mengikuti kegiatan bersih pantai di Labuan Bajo pada 6 Maret 2020.

Foto oleh Janur Wibisono



Indikator Kinerja Utama 18

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi

Seorang Polhut Taman Nasional Manupeu Tanah Baru dan Laiwangi Wanggameti sedang melakukan pencatatan titik penemuan dugaan penebangan liar yang berada di kawasan Gunung Wanggameti. Pekerjaan Polhut untuk mencatat data spasial dipermudah dengan adanya layanan GPS pada ponsel pintar. Profesionalisme menuntut SDM Kementerian LHK dapat bersaing untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Foto oleh Dwi Putro Negoro, Balai TN Matalawa



Untuk mengetahui  
Informasi tentang Nilai  
Reformasi Birokrasi  
2020



*Pindai aku!*

## IKHTISAR KINERJA

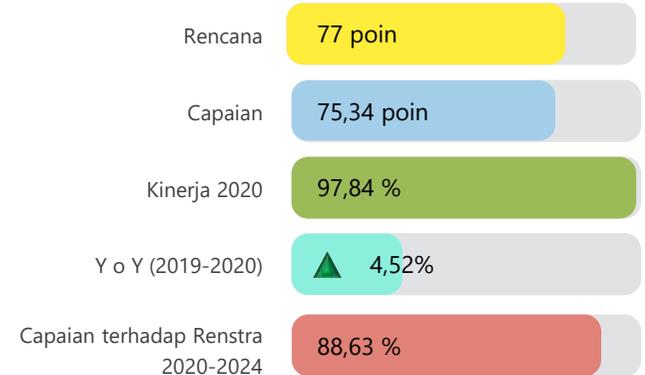
Indeks reformasi birokrasi dibentuk oleh: pertama adalah 8 (delapan) komponen pengungkit (proses) yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kedua adalah 5 (lima) komponen hasil (sasaran) yakni nilai akuntabilitas kinerja, survei integritas, survei eksternal persepsi korupsi, survei eksternal pelayanan publik dan opini BPK. Kinerja reformasi birokrasi tahun 2020 sebesar 75,34 atau tercapai 97,84% dari target 77. Bila dibandingkan dengan target renstra 2024 sebanyak 85 poin, sampai dengan tahun 2020 tercapai 88,63%.

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Penilaian reformasi birokrasi untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan oleh Kementerian PAN-RB.

Ulasan ini bertujuan untuk menilai kemajuan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran reformasi, yakni terbentuknya birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi efektif dan efisien, dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik dengan baik. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis untuk mendorong peningkatan kinerja ASN Kementerian LHK.

Hasil dari penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dapat menjadi tolok ukur perbaikan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Nilai reformasi birokrasi tahun 2020 menggunakan penilaian RB tahun 2019 dikarenakan penilaian RB tahun 2020 belum dirilis oleh Kementerian PAN RB. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan capaian indeks reformasi birokrasi sebesar 75,34 poin dari target 77 poin atau tercapai 97,84%.



Membawa hasil tangkapan Ekosistem mangrove yang terjaga membawa berkah bagi nelayan, mangrove menjadi habitat ikan, udang dan kepiting

Foto oleh Iskandar

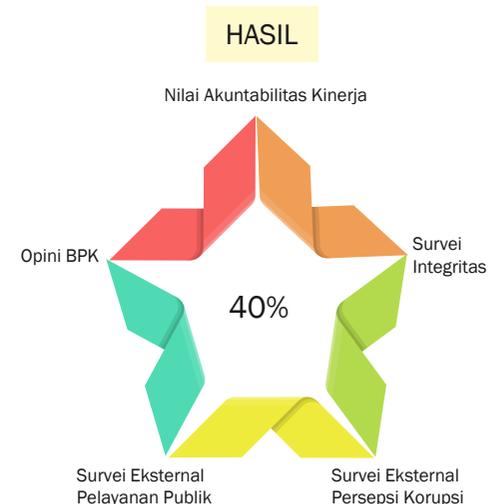
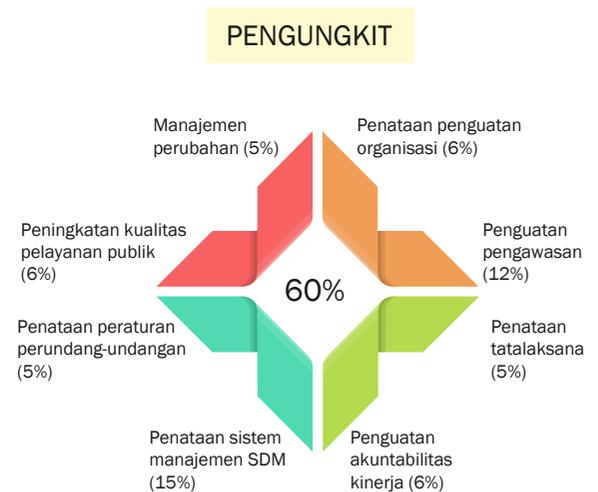
# Metodologi Perhitungan

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu cita-cita yang dituju dengan diselenggarakannya pelaksanaan reformasi birokrasi. Pembentukan tata kelola diharapkan dapat mencapai pemerintahan yang dinamis (*dynamic government*), di mana tata kelola pemerintahan akan responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap, dan mampu mengelola perubahan.

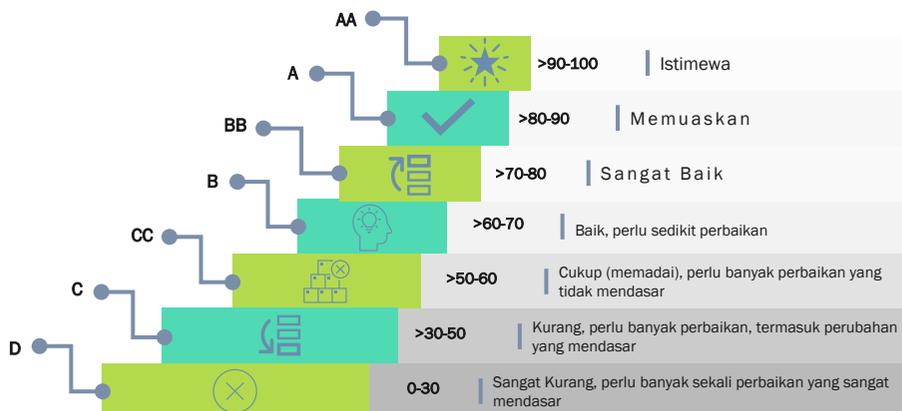
Penilaian reformasi birokrasi dilakukan dengan mengevaluasi delapan area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan penguatan organisasi, penguatan pengawasan,

penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan sistem manajemen SDM, penataan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk komponen hasil, terdapat lima aspek yang diuji berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB, di antaranya adalah nilai akuntabilitas kinerja, survei integritas, opini BPK, survei eksternal persepsi korupsi, dan survei eksternal pelayanan publik. Masing-masing aspek ini memiliki bobot yang kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai indeks reformasi birokrasi.

## Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi



Kategori penilaian reformasi birokrasi



Sumber: Permen PAN&RB No. 13 Tahun 2010

## Tren Reformasi Birokrasi 2015-2020



Tekad kuat untuk melakukan Reformasi Birokrasi sudah mulai didengungkan sejak tahun 2015, dimana saat itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai digabung. Di awal terbentuknya Kementerian LHK, nilai Reformasi Birokrasi adalah 61,8 (kelas CC). Dalam lima tahun, Kementerian LHK mampu menaikkan nilai Reformasi Birokrasi sebesar 13,54 poin sampai dengan 75,34 (kelas BB) yang artinya Kementerian LHK telah melakukan perbaikan menuju tujuan utama, tata kelola dan pelayanan prima. Hasil ini tentunya membawa angin segar dalam pengurusan instansi pemerintah, dimana harapan Kementerian LHK untuk senantiasa berbenah dan memperbaiki diri terbukti membuahkan hasil.

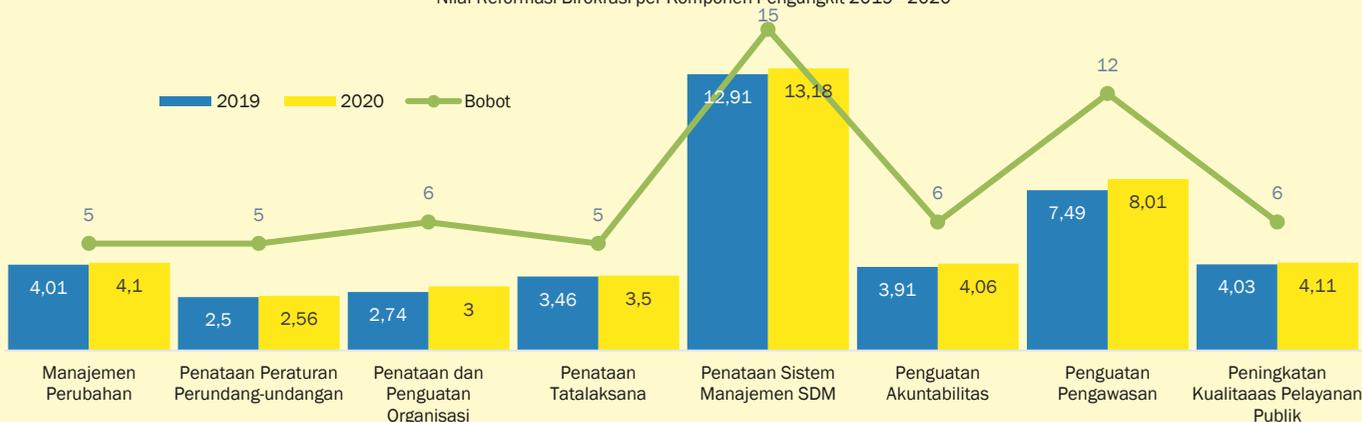


Orangutan Sumatera menjadi identitas Indonesia, spesies kunci yang perlu diperhatikan kelestariannya. Salah satu upaya perbaikan tata kelola birokrasi membuahkan hasil dengan semakin meningkatnya populasi orangutan Sumatera ini. Foto oleh Yunita Aprilia

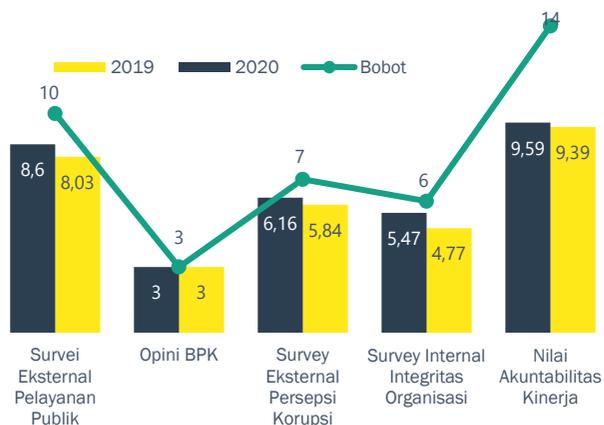
Sasaran reformasi birokrasi tahun 2015-2019 berlandaskan pada Rencana Strategis Tahun 2015-2019, dimana capaian kinerja reformasi birokrasi dapat dilihat pada grafik di samping. Mulai tahun 2020, ambisi capaian nilai reformasi birokrasi disampaikan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dimana ditargetkan akan mencapai nilai 85 pada tahun 2024. Melihat suksesnya pencapaian kinerja reformasi birokrasi di tahun 2015-2019, diharapkan kinerja reformasi birokrasi di tahun 2020-2024 juga tercapai tanpa hambatan berarti.

## Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi KLHK

Nilai Reformasi Birokrasi per Komponen Pengungkit 2019 - 2020



Nilai Reformasi Birokrasi per Komponen Hasil 2019 - 2020



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan reformasi birokrasi untuk kemudian dinilai oleh Kementerian PAN-RB. Penilaian tahun 2020 merupakan hasil pengukuran reformasi birokrasi Kementan-PAN-RB di tahun 2019.

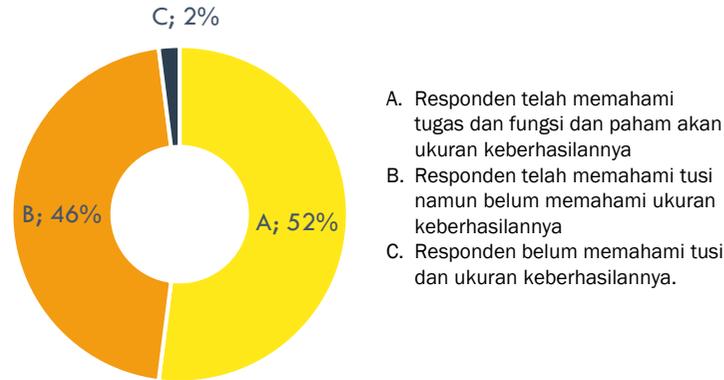
Penilaian RB dibagi ke dalam dua komponen, yakni Komponen Pengungkit dengan bobot 60% dan Komponen Hasil dengan bobot 40%. Nilai dari kedua komponen ini kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai indeks reformasi birokrasi.

Di tahun 2020, nilai reformasi birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan menurut hasil penilaian Kementerian PAN-RB adalah sebesar 75,34 poin. Pada komponen pengungkit, capaian tertinggi diraih oleh aspek Penataan Sistem Manajemen SDM (13,18 dari 15 poin). Aspek ini meningkat 0,27 poin dari tahun sebelumnya. Untuk komponen hasil, nilai tertinggi diraih oleh Opini BPK yang berpendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Aspek ini telah diraih paling tidak selama tiga tahun berturut-turut.

Pertambahan nilai paling signifikan dialami oleh Survei Eksternal Pelayanan Publik pada komponen hasil, sebesar 0,57 poin dari tahun 2019.

## SURVEI INTEGRITAS JABATAN



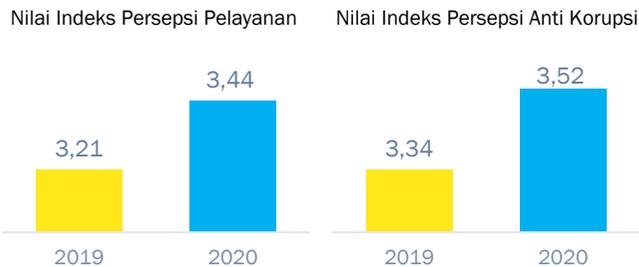
- A. Responden telah memahami tugas dan fungsi dan paham akan ukuran keberhasilannya
- B. Responden telah memahami tuisi namun belum memahami ukuran keberhasilannya
- C. Responden belum memahami tuisi dan ukuran keberhasilannya.

Untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi yang menunjukkan hasil, kelima aspek dalam komponen hasil terurai sebagai berikut:

### Survei Integritas Jabatan

Berdasarkan survei terhadap pegawai Kementerian LHK, 52% responden telah memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dan paham akan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, 46% responden telah memahami tugasnya, namun tidak memahami ukuran keberhasilan keluaran tugas. Sekitar 2% responden belum memahami baik tugas fungsi maupun keberhasilan keluaran tugas masing-masing.

## Survei Eksternal



### Survei Eksternal

#### Indeks Persepsi Pelayanan

Dari skala 4, survei persepsi pelayanan menunjukkan indeks 3,44 di tahun 2020, naik 0,23 poin dari tahun sebelumnya. Indeks ini menggambarkan bahwa harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima masih belum sempurna. Naiknya angka indeks persepsi pelayanan menunjukkan adanya peningkatan pelayanan dari lingkup Kementerian LHK.

#### Indeks Persepsi Anti-Korupsi

Integritas pemberi layanan yang digambarkan dalam indeks persepsi anti korupsi menunjukkan nilai 3,52 dari skala 4. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai indeks persepsi anti korupsi sudah meningkat 0,18 poin dari 3,34. Artinya meskipun sudah ada peningkatan, masih ada ruang untuk berkembang untuk terus meningkatkan integritas anti-korupsi aparatur pemberi layanan.

## SURVEI INTEGRITAS ORGANISASI

NO	KOMPONEN	INDEKS 2019	INDEKS 2020
1	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3,51	3,94
2	Integritas Kinerja Terkait Pengelolaan SDM	3,54	3,97
3	Integritas Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran	3,51	3,98
4	Integritas Kinerja dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Norma	3,47	3,97
Indeks Integritas Organisasi		3,51	3,96

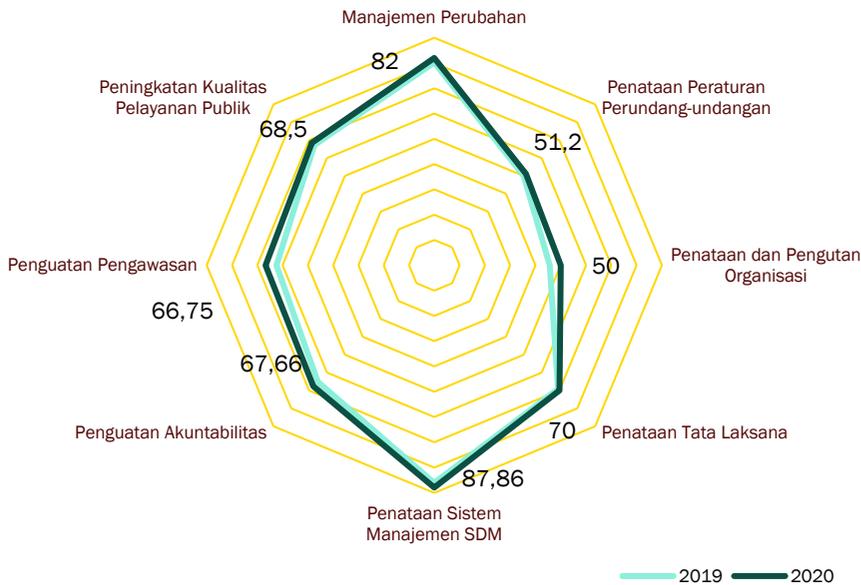
### Survei Integritas Organisasi

Indeks ini menunjukkan persepsi aparatur di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. Secara umum, indeks ini memiliki skala 0-4 dan indeks integritas organisasi menunjukkan kenaikan signifikan di tahun 2020, yakni 0,45 poin dibandingkan dengan tahun 2019. menurut Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014, indeks integritas ideal adalah 3,6 poin, sehingga indeks integritas organisasi Kementerian LHK sudah di atas indeks ideal.

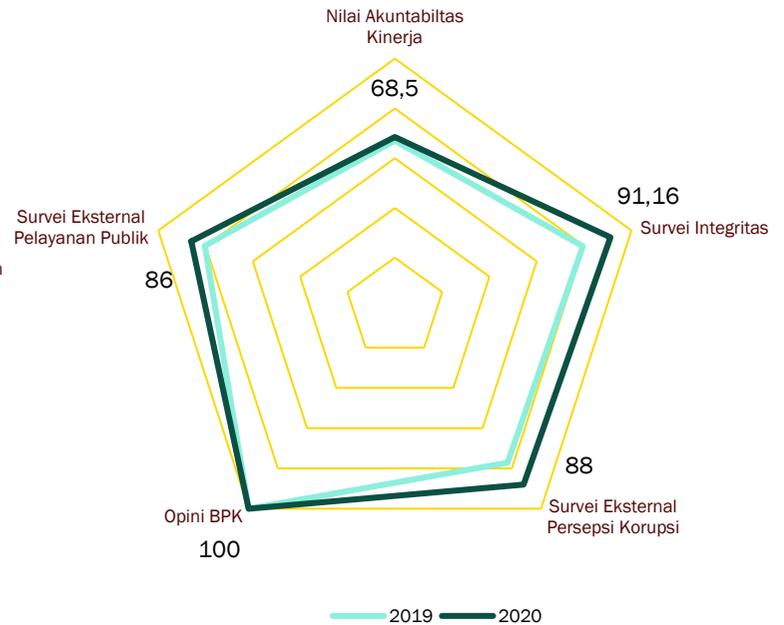
Sumber: Hasil evaluasi pelaksanaan RB KLHK tahun 2019

# Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi KLHK

## KOMPONEN PENGUNGKIT



## KOMPONEN HASIL



Target indeks reformasi birokrasi tahun 2020 pada rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2020-2024 adalah sebesar 77 poin. Untuk mencapai target tersebut, minimal masing-masing aspek pada komponen pengungkit maupun hasil harus meraih setidaknya 77% dari target yang telah ditentukan. Umumnya,

seluruh komponen penilaian mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Kenaikan paling tinggi dialami oleh komponen Survei Integritas Jabatan, yang pada tahun 2020 mencapai 91,16% dari target. Selain itu, penambahan nilai terkecil dialami oleh

Penataan Tata Laksana dengan kinerja 70% di tahun 2020 dan 69,2% di tahun 2019 dari target. Komponen opini BPK yang sudah sesuai target sejak 2017 patut diapresiasi dan dipertahankan. Komponen Penataan dan Penguatan Organisasi masih perlu ditingkatkan, karena hanya mencapai 50% dari target tahun ini.

# Implementasi Reformasi Birokrasi

Realisasi penilaian reformasi birokrasi Kementerian LHK tahun 2020 masih terdapat gap 1,66 poin yang belum tercapai. Beberapa rekomendasi dari Kementerian PAN RB yang perlu diperhatikan agar capaian RB tahun 2020 dapat diraih dengan maksimal:

## Rekomendasi

## Tindak Lanjut

## Rekomendasi

## Tindak Lanjut

**1. Menyusun roadmap reformasi birokrasi di lingkungan KLHK untuk periode tahun 2020-2024**

Keputusan Menteri LHK Nomor 374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024

**2. Mempercepat perbaikan budaya kerja, evaluasi kemajuan kinerja agen perubahan, dan mengidentifikasi langkah perbaikan**

Pokja Manajemen Perubahan telah berkoordinasi dengan seluruh eselon 1 untuk menyusun instrumen evaluasi kinerja agen perubahan dan survei resistensi RB, dan mendorong agen untuk menyusun rencana aksi.

**3. Melaksanakan evaluasi atas efektivitas penerapan peraturan, terutama dengan pihak eksternal**

- Peraturan Menteri LHK yang telah ditetapkan disosialisasi oleh Eselon I Pemrakarsa.
- Terdapat beberapa usulan perubahan atas Peraturan Menteri, seperti usulan APHI.
- Usulan penyempurnaan beberapa Peraturan Menteri LHK yang direkomendasikan oleh pihak eksternal telah diproses.

**4. Memanfaatkan website Kementerian LHK untuk memberikan informasi dan berita tentang reformasi birokrasi**

Terbentuknya website reformasi birokrasi KLHK ([rb.menlhk.go.id](http://rb.menlhk.go.id))

**5. Menerapkan seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB no. 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit**

Telah dilakukan penilaian penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di KLHK oleh KASN

**6. Penyegaran terhadap aparatur berupa pelatihan untuk memperkuat profesionalisme aparatur**

Pengembangan pegawai melalui revisi regulasi, seleksi diklat, pengembangan dan implementasi E-learning, uji kompetensi secara daring (*online*)

**7. Penguatan integritas aparatur melalui penguatan penerapan sistem pengendalian internal serta program lain yang relevan dan diharapkan mampu memberikan deteksi dini potensi penyimpangan**

Penguatan penerapan SPI yang dibuktikan dengan adanya keterlibatan seluruh satker KLHK dalam penyampaian identifikasi risiko dan penilaian risiko yang dapat dipantau secara *real time* dan dievaluasi secara berkala (triwulan) pada aplikasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Online

## Rekomendasi

**8. Mendorong setiap unit kerja untuk mengembangkan survei kepuasan masyarakat secara berkala yang disesuaikan dengan karakteristik organisasi/pelayanan**

**9. Mendorong inovasi serta penerapan teknologi informasi pada setiap unit kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna memberikan percepatan dalam pemberian layanan**

## Tindak Lanjut

- Telah dilakukan survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019)
- Surat Kepala Biro Perencanaan No. S.185/ROCAN/RP/SET.1/6/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang mendorong agar setiap unit kerja melaksanakan survei tingkat kepuasan layanan satuan kerja
- Telah dilaksanakan survei layanan petugas PTSP (tanggal 8 – 12 Juni 2020) selama masa pandemi

Integrasi sistem perizinan melalui OSS, informasi laporan pengaduan, meningkatkan nilai Index SPBE setiap tahun.

## Rekomendasi

**10. Meninjau kembali unit kerja di lingkungan Kementerian LHK yang diajukan untuk zona integritas dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB No. 10 Tahun 2019**

## Tindak Lanjut

- Meningkatkan peran Unit Eselon I agar melakukan pembinaan dalam pembangunan zona integritas di seluruh unit kerjanya dan melakukan penilaian mandiri kepada seluruh unit kerjanya.
- KLHK telah mengusulkan unit kerja berpredikat WBK/WBBM sebanyak 14 Satker kepada KemenPAN dan RB. Sesuai dengan surat Inspektur Jenderal no. 60/IRJEN/ITVES/RHS/WAS/07/2020. Empat dari 14 satker yang diusulkan telah lolos dan ditetapkan sebagai Satker WBK yaitu: Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM, BPKH Wil XI Yogyakarta, Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan, dan Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam.

## Capaian Road Map Reformasi Birokrasi KLHK Tahun 2020

No	Indikator Tujuan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024	SASARAN			Baseline (2019)	Realisasi 2020		Target 2024
		Birokrasi yang Bersih & Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima		Target	Realisasi	
1.	Indeks Pengawasan Kearsipan	✓	✓	✓	98,36 poin	98,50	98,84	100
2.	Indeks Kualitas Kebijakan		✓		n.a	70	68,09	75
3.	Indeks SPBE	✓	✓	✓	3,61 poin	3,50	3,61	3,70
4.	Nilai SAKIP	✓	✓	✓	69,68 poin	72	69,86	80
5.	Maturitas SPIP	✓			Level 3	3	3	4
6.	Kapabilitas APIP	✓			Level 3	3	3	4
7.	Unit Kerja dengan predikat WBK	✓			0 satker	2	4	18
8.	Opini BPK	✓			WTP	WTP	WTP	WTP

Perjalanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih panjang untuk mencapai tata kelola instansi pemerintahan yang ideal. Oleh karena itu, dibutuhkan peta jalan untuk menunjukkan arah yang harus diambil selanjutnya bagi instansi. Peta Jalan yang dimaksud ini akan berfungsi sebagai dasar, sehingga pembangunan dan pengembangan akan berjalan terarah, efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan zaman, Peta Jalan Reformasi Birokrasi terwadahi dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Perumusan Peta Jalan RB 2020-2024 ini didasarkan pada beberapa hal, diantaranya (1) Peta Jalan Reformasi Birokrasi Nasional, (2) Hasil evaluasi atas capaian RB Kementerian LHK lima tahun terakhir, (3) Analisis atas permasalahan, dan (4) Hambatan penyelesaian isu-isu strategis sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk meraih tujuan dalam Road Map, terdapat delapan indikator

yang menjadi tujuan, yakni Indeks Pengawasan Kearsipan, Indeks Kualitas Kebijakan, Indeks SPBE, Nilai SAKIP, Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Unit Kerja dengan predikat WBK, dan Opini BPK. Setiap indikator merupakan komponen yang dianggap representatif untuk mencapai sasaran Road Map, yaitu Birokrasi Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Kapabel, dan Pelayanan Publik yang Prima. Setiap indikator ini memiliki target yang akan diuji realisasinya di akhir tahun, dan dibandingkan dengan *baseline* dari tahun 2019 untuk melihat kemajuan masing-masing indikator. Di akhir periode Road Map (2024) kemudian akan dilihat apakah target masing-masing indikator tercapai atau tidak.

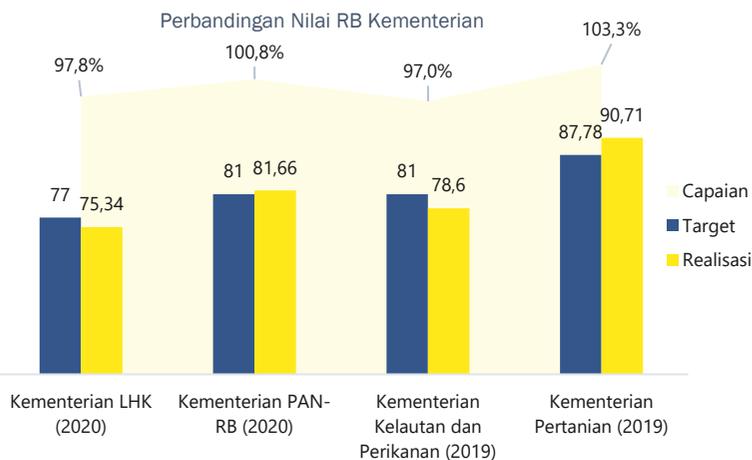
“Tiga sasaran reformasi birokrasi yang tertuang di dalam road map RB KLHK 2020-2024:

1. Birokrasi Bersih dan Akuntabel
2. Birokrasi yang Kapabel
3. Pelayanan Publik yang Prima”



Untuk melihat Road Map RB KLHK 2020-2024 silahkan memindai QR code di samping bit.ly/roadmapKLHK\_2020-2024

## Benchmarking Nilai



Untuk melihat posisi kinerja reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hasil penilaian reformasi birokrasi dibandingkan dengan K/L lain yang memiliki area kerja serumpun Kementerian LHK. Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian PAN-RB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pertanian.

Berdasarkan data tahun 2020 (KemenPAN-RB dan KKP) dan 2019 (Kementan), target pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian LHK adalah yang terkecil, sebesar 77 poin. Angka yang ditargetkan oleh keempat K/L pembandingan berada di kisaran 70-90 poin, dan umumnya terealisasi >97%. Sebagai *disclaimer*, capaian dari Kementan adalah data tahun 2019 dan merupakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Menilik hasil perbandingan nilai RB dengan K/L lain, Kementerian LHK dapat mengambil inspirasi dari K/L lain yang lebih baik pelaksanaan reformasi birokrasinya untuk kemudian diterapkan di lingkungan KLHK (Amati, Tiru, Modifikasi).

## Milestone 2020-2024



Dalam rangka meraih penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien yang diatur dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, setiap tahun diharapkan ada penambahan poin dalam nilai reformasi birokrasi di mana sasaran per tahunnya menggambarkan tujuan pencapaian yang relevan dengan perkembangan zaman.

Di akhir periode Rencana Strategis ini, milestone yang diharapkan adalah (1) Semua program selesai dengan baik dan dapat menjawab permasalahan riil di masyarakat, (2) Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat, (3) Penggunaan waktu efektif dan produktif, dan (4) Hasil pembangunan nyata.

Diharapkan pada tahun 2024 Kementerian LHK dapat menjadi kementerian dengan tujuan utama pada *outcome* (hasil) dan menjawab permasalahan riil di masyarakat, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025.

## Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal

Pelayanan internal untuk mendukung kinerja program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat penting untuk senantiasa digalakkan. Kebutuhan instansi untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi penting untuk dipastikan agar berjalan dengan lancar. Pelayanan internal ini diberikan oleh lingkup Sekretariat Jenderal sebagai pengampu pelayanan dalam lingkup kementerian. Di akhir tahun, Biro Perencanaan melakukan survei yang mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan internal untuk satker lingkup Kementerian LHK maupun mitra Kementerian LHK.



Survei tingkat kepuasan pelayanan internal dilakukan dengan pendekatan nilai indeks layanan internal hasil asesmen Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Dilihat dari tren perkembangan tingkat kepuasan pelayanan internal selama lima tahun terakhir seperti infografis di samping, di tahun 2016 dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru *merger* selama satu tahun, tingkat kepuasan pelayanan internal mencapai 3,1 dari target 4 poin. Tren survei menunjukkan pertumbuhan positif dengan data terakhir tercapai 3,9 dari 4 poin.

Responden dalam survei tingkat kepuasan pelayanan internal ini adalah seluruh satker internal Kementerian LHK. Dari enam satker yang berada dalam lingkup Sekretariat Jenderal, hasil survei tingkat kepuasan pelayanan internal menunjukkan Biro Perencanaan, Biro Hukum, dan Pusat Keteknikan menjadi satker dengan hasil survei terbaik, dengan nilai realisasi 4 dari 4 poin atau 100%. Selanjutnya, Biro Umum dan Biro Kerjasama Luar Negeri mengikuti dengan nilai 3,9 dari 4 atau 97,5%, dan Biro Kepegawaian mendapatkan hasil 3,8 dari 4 atau 95,91%. Tingkat kepuasan pelayanan internal merupakan Indikator Kinerja baru pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal sehingga tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu. Besaran angka ini menjadi informasi kinerja serta umpan balik perbaikan satker yang bersangkutan dalam melayani mitra internal di Kementerian LHK.



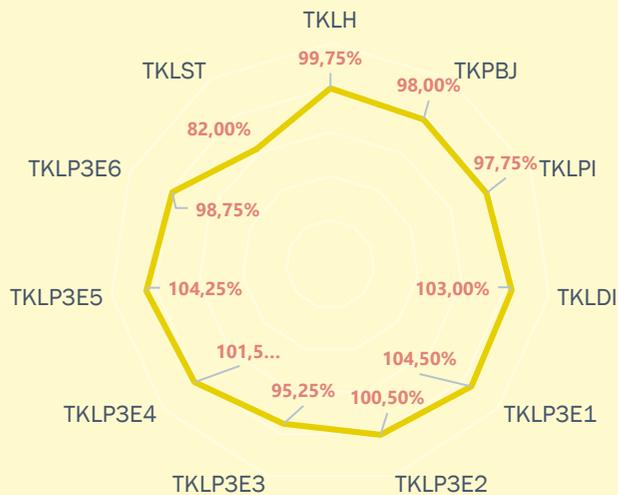
Beberapa langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan internal diantaranya sebagai berikut:

1. Menguji kualitas pelayanan dengan menyampaikan kuesioner dengan frekuensi yang lebih sering untuk melihat perkembangan termin awal dan akhir dari hasil survei terhadap kinerja pelayanan tahun tersebut.
2. Meningkatkan kualitas Pelayanan Umum, Pelayanan Pegawai dan Organisasi serta Pelayanan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri.
3. Menjadikan hasil analisis kuesioner sebagai umpan balik perbaikan kinerja berkelanjutan.
4. Menindaklanjuti masukan, saran dan rekomendasi dari responden.
5. Membuat rencana aksi peningkatan kepuasan layanan internal

## Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik

Peningkatan layanan juga dilakukan untuk mitra publik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengadakan survei dengan pendekatan nilai indeks layanan internal hasil asesmen Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Penilaian tingkat kepuasan pelayanan publik bertujuan untuk menjamin terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak dan memenuhi asas pelayanan publik, yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Survei dilakukan pada responden stakeholder

penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh satker dalam lingkup Sekretariat Jenderal, di antaranya Pemerintah Daerah, organisasi, masyarakat, dan mitra lainnya. Kuesioner disebar baik dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring). Survei diadakan dengan pengisian kuesioner dengan nilai maksimum 5 (skala Likert), dan mencakup 11 layanan, antara lain: Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga (TKLH), Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (TKPBJ), Layanan Perizinan (TKLPI), Layanan Data dan Sistem Informasi (TKLDI), Layanan P3E Jawa (TKLP3E1), Kalimantan (TKLP3E2), Bali Nusra (TKLP3E3), Sulawesi (TKLP3E4), Papua (TKLP3E5), Sumatera (TKLP3E6), dan Layanan NSPK Standardisasi (TKLST).



Sebelas layanan menjadi objek survei, dengan target masing-masing layanan adalah 4 poin. Secara umum, tingkat kepuasan pelayanan publik mencapai 3,95 dari 4 poin, atau 96,7% dengan kategori puas. Nilai kepuasan tertinggi adalah tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E sebesar 4,18 poin, dan nilai kepuasan terendah adalah tingkat kepuasan pelayanan NSPK dan standarisasi sebesar 3,28 poin. Namun demikian, dari semua komponen yang membangun nilai kepuasan pelayanan publik, responden sudah merasa puas.

Untuk menunjang pelaksanaan pelayanan publik KLHK tahun 2021, ada beberapa catatan perbaikan dari tahun ini, yakni:

1. Peningkatan kualitas SDM yang profesional dan responsif
2. Peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan
3. Pengembangan mekanisme, prosedur atau SOP dan syarat administrasi yang lebih efektif dan mudah dijangkau
4. Waktu pelayanan yang lebih singkat
5. Senantiasa melakukan pembaruan data dan informasi mengenai kebijakan di KLHK
6. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Pemda atau instansi terkait



*Adaptasi kebiasaan baru (New normal), kegiatan rapat di ruangan terbuka dalam rangka pencegahan Pandemi Covid - 19 di Balai TN. Rawa Aopa Watumohai*

*Foto Oleh Ramli*



## Indikator Kinerja Utama 19

### Opini WTP Laporan Keuangan

Pembuatan saluran air untuk mikrohidro. Saluran mikrohidro mempermudah akses listrik bagi warga sekitar dan kebutuhan operasional. Dengan kualitas akuntabilitas keuangan yang baik, setiap rupiah APBN digulirkan untuk menjawab permasalahan di tingkat tapak. Foto oleh Akhmad David Kurnia Putra



Untuk mengetahui Informasi tentang Opini BPK atas Laporan Keuangan KLHK



*Pindai aku!* 

# IKHTISAR KINERJA

Pelaporan keuangan pemerintah merupakan ujung dari pengelolaan keuangan negara yang memiliki posisi penting dalam penilaian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kementerian LHK sebagai salah satu Kementerian/Lembaga Negara yang mengelola keuangan negara, mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan (LK) secara tepat waktu sesuai dengan undang-undang (UU) untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan selanjutnya dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh BPK.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah salah satu entitas instansi pemerintahan yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari 331 satuan kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2020, laporan keuangan yang dikoordinasikan oleh Biro Keuangan bekerja sama dengan Biro Umum pada Sekretariat Jenderal mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Rencana 1 opini

Capaian Wajar Tanpa Pengecualian

Kinerja 2020 100 %

Y o Y (2019-2020) ▲ - %

Capaian terhadap Renstra 2020-2024 100 %

Capaian atas kinerja unit kerja dan Biro Keuangan serta Biro Umum dalam mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian sejalan dengan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 dimana target yang ditetapkan adalah Opini BPK atas Hasil Pemeriksaan dari Laporan Keuangan tahun 2019 mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian.

Pagu

Rp9.196.117.308.000,00.

Realisasi

Rp8.843.040.517.179,00

Nilai Aset

Rp18.716.787.088.174,00



Pendapatan Laporan Operasional

Rp5.534.156.949.365,00

Laporan Perubahan Ekuitas

Rp 18.702.796.050.648,00

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Negara hingga tanggal 31 Desember 2019 yang berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.992.073.615.963,00 atau mencapai 125% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp4.775.356.680.000,00. Sedangkan realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp8.843.040.517.179,00 atau mencapai 96% dari alokasi anggaran sebesar Rp9.196.117.308.000,00.

## NERACA

Nilai Aset dicatat dan disajikan sebesar Rp18.716.787.088.174,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.687.696.496.280,00; Aset Tetap sebesar Rp14.358.538.670.419,00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp21.210.365.455,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp1.649.341.556.020,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp13.991.037.526,00 dan Rp18.702.796.050.648,00.

## LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.534.156.949.365,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp9.251.426.365.874,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp3.717.269.416.509,00. Sedangkan dari Kegiatan Non Operasional terdapat defisit Rp30.656.929.290,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp3.747.926.345.799,00.

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp8.120.392.727.464,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp3.747.926.345.799,00, kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi Rp10.832.534.691.419,00 dan transaksi antar entitas Rp3.497.794.977.564,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp 18.702.796.050.648,00.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.



## Tren Opini BPK Atas Laporan Keuangan KLHK



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan entitas yang baru bergabung pada tahun 2015, dimana sebelumnya merupakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Opini BPK pada laporan keuangan di tahun tersebut menyatakan Wajar Dengan

Pengecualian. Setelah dua tahun berjalan, status opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak 2017 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berlanjut hingga 2019. Opini Wajar Tanpa Pengecualian ini penting karena dapat diartikan bahwa

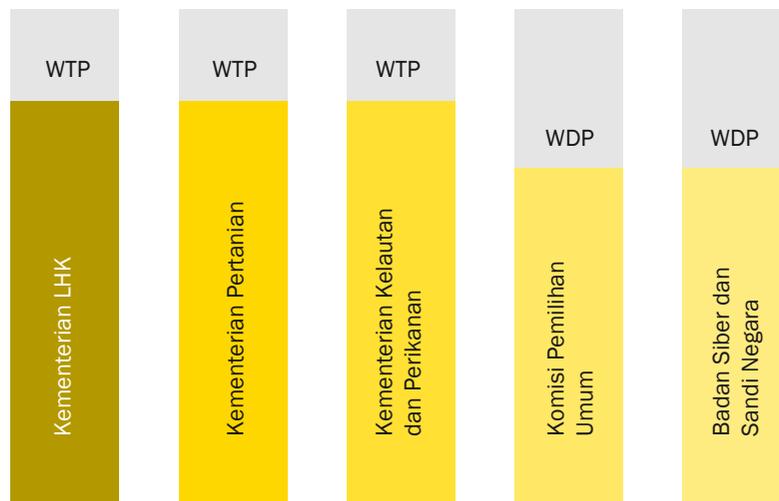
pertanggungjawaban dan pengelolaan aset BMN semakin akuntabel dari tahun ke tahun. Hadirnya sikap siap siaga setiap unit kerja untuk selalu tertib dalam keuangan membuat pencapaian opini BPK ini mungkin dan dapat dipertahankan.

Para nelayan yang usai melaut di Pantai Sanur, Bali. Kegiatan pelayanan atau penyuluhan bagi warga di sekitar tapak menjadi salah satu komponen penilaian di laporan keuangan  
Foto oleh Daffa Ulhaq Adabi

## Benchmarking Opini BPK

Opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah status idaman bagi entitas pemerintah yang telah menyelesaikan tahun anggaran dan melaksanakan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). Untuk mengetahui performa kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diperlukan perbandingan dengan hasil opini BPK dari kementerian lain. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat tahun 2019, Kementerian LHK bersama 84 kementerian/lembaga lain meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2 kementerian/lembaga mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 1 kementerian/lembaga mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) di tahun 2019.



Perbandingan opini BPK atas Laporan Keuangan beberapa Kementerian/Lembaga



*Julang Sulawesi (Aceros cassidix) terbang berdampingan dengan Pergam (Ducula sp.). Kehidupan satwa di alam liar harus senantiasa dijaga dan kegiatan perlindungan ini dilaporkan dalam Laporan Keuangan setiap satker terkait.*

Foto oleh Putu Sutarya

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2019

<http://bit.ly/3o1h0Fi>



## Langkah Strategis Mempertahankan Opini B P K

Opini BPK dengan status Wajar Tanpa Pengecualian adalah tujuan tertinggi bagi Kementerian/Lembaga yang menyusun Laporan Keuangan Tahunan. Maka dari itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah mendapatkan status ini setidaknya selama tiga tahun harus mampu mempertahankannya dengan usaha yang lebih gencar dan lebih bertenaga. Ada beberapa langkah strategis untuk tetap mengawal kesinambungan opini BPK untuk laporan keuangan Kementerian LHK, di antaranya:

1. Menyusun rencana aksi untuk mempertahankan opini atas laporan keuangan wajar tanpa pengecualian.
2. Memperkuat instrumen pengawasan internal (SPIP) di masing-masing satuan kerja.
3. Meningkatkan ketertiban pencatatan (dokumentasi) seluruh aset BMN di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



*Petugas serta masyarakat sedang melakukan pengukuran dan pengambilan data debit air sungai yang merupakan sumber air terjun Laputi, TN Matalawa. Pencatatan keuangan setiap kegiatan lingkup Satker merupakan kunci untuk pendataan yang tepat di Laporan Keuangan.*

*Foto oleh Heri Andri*



Indikator Kinerja Utama 20

## Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Balai TN. Bantimurung-Bulusaraung merupakan ekosistem terbanyak di Indonesia serta ekosistem batuan karst terindah dan terbesar kedua di dunia. SPIP menjadi salah satu kunci tata kelola BTN Bantimurung Bulusaraung agar kelestariannya tetap terjaga.

Foto oleh Akhmad David



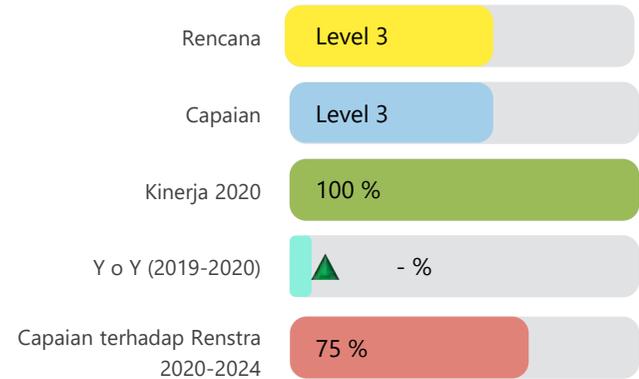
Untuk mengetahui  
Informasi tentang  
SPIP

*Pindai aku!*



## IKHTISAR KINERJA

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP diukur melalui 5 unsur yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan pengendalian intern. Realisasi maturitas SPIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada pada level 3 dari target tahun 2020 pada level 3 atau tercapai 100%. Bila dibandingkan dengan target renstra 2020-2024 dimana target tahun 2024 SPIP Kementerian LHK berada pada level 4 maka capaiannya sebesar 75%.



Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan organisasi dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang baik.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan instansi yang menilai level maturitas SPIP seluruh kementerian atau lembaga termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Target level SPIP Kementerian LHK tahun 2020 berada pada level 3. Namun demikian tahun ini BPKP tidak melakukan penilaian langsung sehingga data yang digunakan adalah penilaian mandiri SPIP tahun 2020 dengan realisasi maturitas SPIP Kementerian LHK berada pada level 3 atau tercapai 100%.



Rumah satwa endemik

Bukit Modus memiliki luas sekitar 104 hektar menjadi rumah bagi fauna endemik Sulawesi Tenggara seperti maleo (*Macrocephalon maleo*), rangkok dan kakatua putih jambul kuning (*Cacatua sulphurea*). Bukit modus merupakan bagian dari Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Foto oleh Indra Anggrana Wijaya

# Metodologi Pengukuran

Data diambil dari hasil survei persepsi seluruh pegawai KLHK dengan menggunakan instrumen seperti kuesioner, wawancara, revidu dokumen, atau observasi. Fokus penilaian maturitas SPIP ditujukan pada variabel yang menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari unsur dan sub unsur sebagaimana telah ditetapkan

dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Secara keseluruhan terdapat lima fokus penilaian yang tersebar ke dalam 25 sub unsur SPIP. Dengan asumsi bahwa fokus penilaian mempunyai tingkat keterkaitan dan tingkat kepentingan yang berbeda, maka fokus penilaian memiliki bobot yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut:

NO	UNSUR	JUMLAH BOBOT UNSUR	JUMLAH SUB UNSUR	BOBOT SUB UNSUR
1	Lingkungan Pemerintah	30	8	3,750
2	Penilaian Resiko	20	2	10,000
3	Kegiatan Pengendalian	25	11	2,275
4	Informasi dan Komukasi	10	2	5,000
5	Pemantauan	15	2	7,500
TOTAL		100	25	

Penetapan skor maturitas SPIP yaitu dengan menggunakan skor hasil validasi dengan membuat rerata tertimbang dari skor validasi. Selanjutnya, skor ini yang

akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval Skor Tingkat Maturitas SPIP ditampilkan pada tabel berikut:

Level	Kategori Fokus Maturitas	Interval Skor
0	Belum Ada	0 < Skor 1
1	Rintisan	1 ≤ skor < 2
2	Berkembang	2 ≤ skor < 3
3	Terdefinisi	3 ≤ skor < 4
4	Terkelola dan Terukur	4 ≤ skor < 4,5
5	Optimum	4,5 - 5

Bobot masing-masing sub unsur:

No	Fokus Penilaian	Bobot (%)
<b>I Unsur Lingkungan Pengendalian</b>		
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3,75%
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3,75%
3	Kepemimpinan yang Kondusif	3,75%
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3,75%
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	3,75%
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,75%
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	3,75%
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,75%
<b>II Penilaian Risiko</b>		
1	Identifikasi Risiko	10,00%
2	Analisis Risiko	10,00%
<b>III Unsur Kegiatan Pengendalian</b>		
1	Reviu Kinerja	2,27%
2	Pembinaan SDM	2,27%
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27%
4	Pengendalian Fisik atas Aset	2,27%
5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	2,27%
6	Pemisahan Fungsi	2,27%
7	Otorisasi Transaksi	2,27%
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	2,27%
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	2,27%
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	2,27%
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	2,27%
<b>IV Unsur Informasi dan Komunikasi</b>		
1	Informasi yang Relevan	5,00%
2	Komunikasi yang Efektif	5,00%
<b>V Unsur Pemantauan</b>		
1	Pemantauan Berkelanjutan	7,50%
2	Evaluasi Terpisah	7,50%

## Kinerja Maturitas SPIP KLHK

Penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada tingkat “terdefinisi” atau berada pada level 3 dari 5 tingkat maturitas SPIP. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP tahun 2020 lingkup KLHK diketahui sebesar “3,3727”, hal tersebut menggambarkan target kenaikan skor Maturitas SPIP pada tahun 2020 telah tercapai. Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik Penyelenggaraan SPIP secara umum

menunjukkan bahwa KLHK: (a). Telah sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam KLHK; (b). Telah sepenuhnya mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam KLHK; (c). Sebagian sudah melaksanakan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam KLHK dan mendokumentasikannya secara konsisten; (d). Sebagian sudah melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi

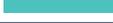
dalam KLHK secara berkala dan terdokumentasi; (e). Sebagian sudah melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer; dan (f). Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat “terkelola dan terukur” adalah perlu melakukan “evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian”



Anggota Kelompok Tani Tiram melakukan penanaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional Padat Karya Mangrove oleh di Desa Penaga Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Bintan. Sebesar 57,07% atau Rp 464,64 miliar dari total Rp 812,43 miliar Pagu PEN Kementerian LHK tahun 2020 dianggarkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Pengawasan intern menjadi penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi nasional.

Foto Hendy Noordianto.

Rincian hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK Tahun 2020, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi" dengan skor sebesar 3.3727.

NO	FOKUS PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	LEVEL	TINGKAT	STATUS
I	UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN					
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3,75%	0,1500	4	Terkelola dan Terukur	
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3,75%	0,1125	3	Terdefinisi	
3	Kepemimpinan yang Kondusif	3,75%	0,1125	3	Terdefinisi	
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3,75%	0,1500		Terkelola dan Terukur	
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	3,75%	0,1125	3	Terdefinisi	
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,75%	0,1125	3	Terdefinisi	
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	3,75%	0,1500	4	Terkelola dan Terukur	
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,75%	0,1500	4	Terkelola dan Terukur	
II	PENILAIAN RISIKO					
1	Identifikasi Risiko	10,00%	0,4000	4	Terkelola dan Terukur	
2	Analisis Risiko	10,00%	0,4000	4	Terkelola dan Terukur	
III	UNSUR KEGIATAN PENGENDALIAN					
1	Reviu Kinerja	2,27%	0,0682	3	Terdefinisi	
2	Pembinaan SDM	2,27%	0,0909	4	Terkelola dan Terukur	
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27%	0,0682	3	Terdefinisi	
4	Pengendalian Fisik atas Aset	2,27%	0,0682	3	Terdefinisi	
5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	2,27%	0,0682	3	Terdefinisi	
6	Pemisahan Fungsi	2,27%	0,0682	3	Terdefinisi	
7	Otorisasi Transaksi	2,27%	0,0682	3	Terdefinisi	
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	2,27%	0,0682	3	Terdefinisi	
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	2,27%	0,0682	3	Terdefinisi	
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	2,27%	0,0682	3	Terdefinisi	
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	2,27%	0,0682	3	Terdefinisi	
IV	UNSUR INFORMASI DAN KOMUNIKASI					
1	Informasi yang Relevan	5,00%	0,1500	3	Terdefinisi	
2	Komunikasi yang Efektif	5,00%	0,1500	3	Terdefinisi	
V	UNSUR PEMANTAUAN					
1	Pemantauan Berkelanjutan	7,50%	0,2250	3	Terdefinisi	
2	Evaluasi Terpisah	7,50%	0,2250	3	Terdefinisi	
<b>JUMLAH SKOR</b>			<b>3,3727</b>	<b>3</b>	<b>TERDEFINISI</b>	

## Strategi Menuju Level 4 Maturitas SPIP

Setahun sebelum berakhirnya rencana strategis Kementerian LHK 2019-2024, target maturitas SPIP harus sudah mencapai level 4. Kementerian LHK mulai menata kelola target tersebut dengan

merancang langkah-langkah strategis. Ada tujuh langkah strategis hasil koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.



Eksplorasi bersama masyarakat Suku Punan Hovongan  
Menyusuri sungai sebagai akses utama dalam rangka eksplorasi kawasan. Tiba musim kemarau, ASN Balai Besar TN Betung Kerihun perlu tenaga ekstra untuk menarik perahu yang terjebak di Riam Homatop, Sungai BUILT, Desa Tanjung Lokang, Kabupaten Kapuas Hulu

Foto oleh A. G. Darda



## Rencana Aksi Unsur Pembangunan SPIP

Pada Level 4, penerapan SPIP telah efektif, setiap personil/unit mengendalikan kegiatan untuk pencapaian tujuan kegiatan/organisasi, serta dilaksanakannya evaluasi secara formal dan terdokumentasi. APIP mengintegrasikan keseluruhan informasi dari seluruh elemen organisasi untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen risiko. Pencapaian Level 4 bukan hanya untuk kebutuhan penilaian/status, namun juga harus memastikan optimalnya kemanfaatan SPIP dan peran APIP bagi peningkatan performa dan ketercapaian tujuan organisasi



### Lingkungan Pengendalian

- Menyusun *Grand Design* SPIP sesuai dengan Lingkungan Pengendalian level 3.
- Memastikan rencana tindak pengembangan pada sub unsur penegakan integritas dan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan telah efektif dan dilaksanakan seluruh satuan kerja.
- Melakukan pembaruan data sub unsur pada lingkungan pengendalian terutama pada sub unsur penegakan integritas dan struktur organisasi dengan berbasis web.
- Melakukan evaluasi secara periodik dalam rangka memperoleh umpan balik atas kondisi lingkungan pengendalian.



### Penilaian Risiko

- Melakukan pembaruan peta risiko berdasarkan perubahan lingkungan pengendalian dan kegiatan.
- Memastikan rencana tindak pengembangan pada sub unsur identifikasi risiko dan analisis risiko berdasarkan perubahan lingkungan pengendalian dan kegiatan.
- Melakukan pembaruan data peta risiko berbasis web.
- Melakukan evaluasi secara periodik dalam rangka memperoleh umpan balik atas seluruh risiko yang ada.



### Aktivitas Pengendalian

- Menyusun *Grand Design* pengembangan SOP sesuai dengan perubahan lingkungan pengendalian dan kegiatan.
- Memastikan rencana tindak pengembangan atas sub unsur pemisahan fungsi, pengendalian fisik atas aset dan dokumentasi yang baik telah efektif dan dilaksanakan seluruh satuan kerja.
- Melakukan implementasi SOP atas fisik atas aset dan dokumentasi yang baik dengan berbasis teknologi.
- Melakukan evaluasi secara periodik dalam rangka memperoleh umpan balik atas pelaksanaan SOP yang telah berjalan.



### Informasi dan Komunikasi

- Menyusun *Grand Design* Pengembangan Penyampaian Informasi dan Komunikasi sesuai dengan perubahan lingkungan pengendalian dan kegiatan.
- Memastikan rencana tindak pengembangan atas sub unsur informasi yang relevan dan komunikasi yang efektif telah dilaksanakan seluruh satuan kerja.
- Melakukan implementasi SOP penyampaian informasi dan komunikasi atas pelaksanaan SPIP dengan berbasis teknologi.
- Melakukan evaluasi secara periodik dalam rangka memperoleh umpan balik atas pelaksanaan SOP yang telah berjalan.



### Pemantauan

- Menyusun *Grand Design* Pemantauan sesuai dengan perubahan lingkungan pengendalian dan kegiatan.
- Memastikan rencana tindak pengembangan atas sub unsur Pemantauan Berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah telah efektif dilaksanakan seluruh satuan kerja.
- Melakukan implementasi SOP pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPIP dengan berbasis teknologi.
- Melakukan evaluasi secara periodik dalam rangka memperoleh umpan balik atas pelaksanaan SOP yang telah berjalan.



Seorang juru batu (kiri) memandu arah perahu untuk mengantar personil ASN ke kantor resor Tanjung Longkang (dua hari perjalanan dari kota Putussibau). Medan yang sulit tidak menyurutkan capaian kinerja satker yang mendukung sasaran strategis kementerian.

Foto oleh A G Darda

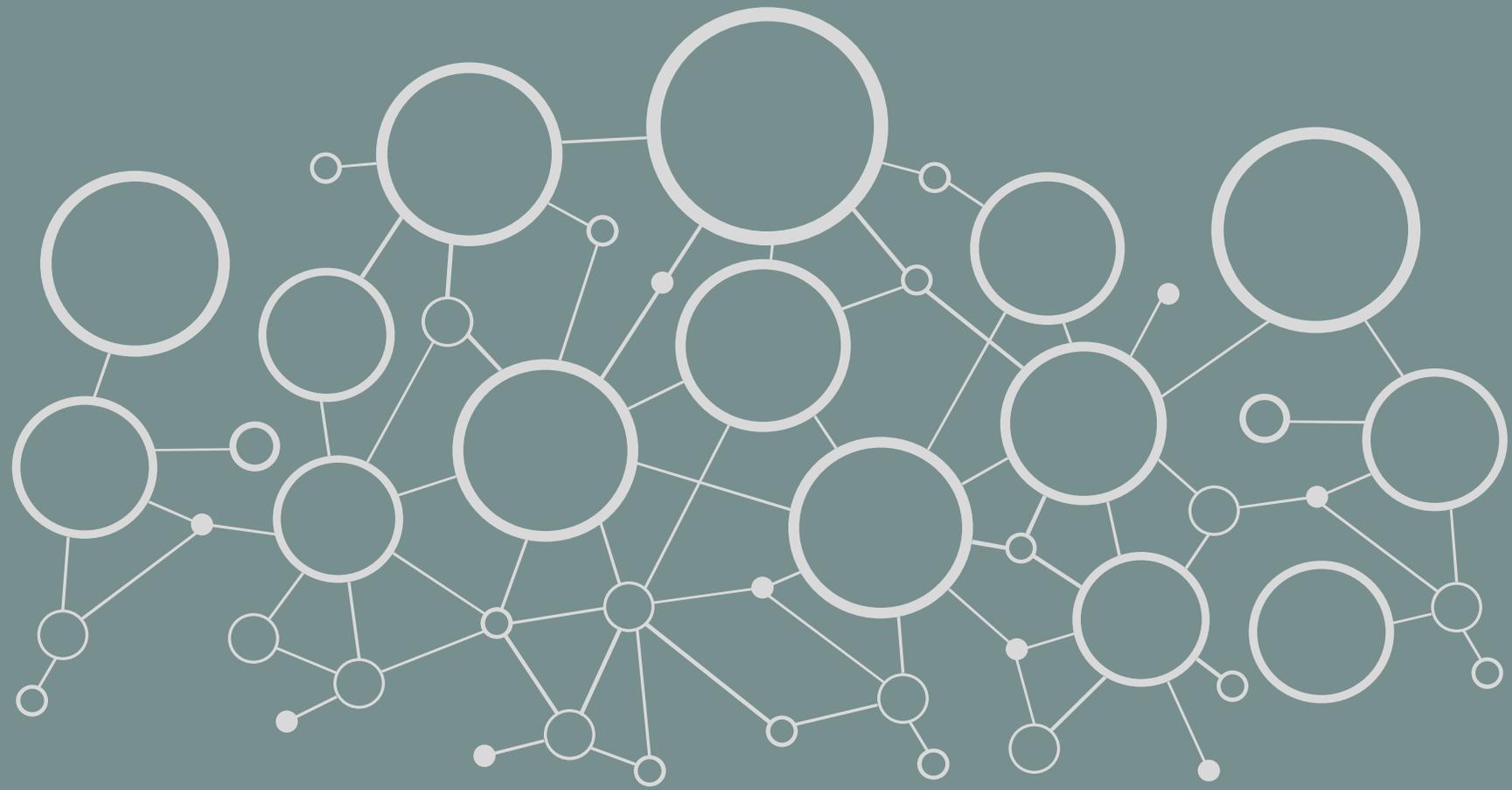
## Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU

NO	Indikator Kinerja Utama	Unit Kerja Penanggung Jawab	Rerata Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Nilai efisiensi	Kategori
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Ditjen PPKL, Ditjen PSLB3, BLI	91,08	102,27	0,89	Efisien
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ditjen PPI	97,08	14,75	6,58	Tidak Efisien
3	Penurunan Laju Deforestasi	Ditjen PDASHL, Ditjen PPI, Ditjen PHPL	96,31	95,45	1,01	Tidak Efisien
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Ditjen PSLB3	97,97	81,05	1,20	Tidak Efisien
5	Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya	Ditjen PDASHL	96,11	120	0,80	Efisien
6	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	Ditjen KSDAE	94,10	120	0,78	Efisien
7	Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional	Ditjen PDASHL, Ditjen PSLB3, Ditjen PHPL	96,39	105,46	0,93	Efisien
8	Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting	Ditjen PHPL, Ditjen KSDAE, BLI	94,14	98,58	0,95	Efisien
9	Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK	Ditjen PKTL, Ditjen KSDAE, Ditjen PHPL	93,71	90,78	1,01	Tidak Efisien
10	Luas Kawasan Hutan Dengan Status Penetapan	Ditjen PKTL	90,34	67,49	1,33	Tidak Efisien
11	Luas Kawasan Hutan Yang Dilepaskan Untuk TORA	Ditjen PKTL	90,34	120	0,75	Efisien
12	Luas Kawasan Yang Dikelola Oleh Masyarakat	Ditjen PSKL, Ditjen KSDAE, Ditjen PHPL	93,74	120	0,78	Efisien
13	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	Ditjen PHPL, Ditjen KSDAE, Ditjen PDASHL, BP2SDM, BLI	94,95	114,29	0,83	Efisien
14	Jumlah Kasus yang Ditangani Melalui Penegakan Hukum	Ditjen PHLHK	99,13	120	0,82	Efisien
15	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Setjen KLHK	89,97	103,14	0,87	Efisien
16	Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Inovatif dan atau Implementatif	BLI	92,44	100	0,92	Efisien
17	Indeks Produktivitas Dan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	BP2SDM	92,56	120	0,77	Efisien
18	Nilai Kinerja reformasi Birokrasi	Setjen, Ditjen PHPL, Ditjen PDASHL, Ditjen KSDAE, Ditjen PKTL, Ditjen PSKL, Ditjen PHLHK, Ditjen PSLB3, Ditjen PPI, Ditjen PPKL, BP2SDM, BLI	93,9	97,84	0,96	Efisien
19	Opini WTP Laporan Keuangan	Setjen, Ditjen PHPL, Ditjen PDASHL, Ditjen KSDAE, Ditjen PKTL, Ditjen PSKL, Ditjen PHLHK, Ditjen PSLB3, Ditjen PPI, Ditjen PPKL, BP2SDM, BLI	93,9	100	0,93	Efisien
20	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) KLHK	Setjen, Ditjen PHPL, Ditjen PDASHL, Ditjen KSDAE, Ditjen PKTL, Ditjen PSKL, Ditjen PHLHK, Ditjen PSLB3, Ditjen PPI, Ditjen PPKL, BP2SDM, BLI	93,9	100	0,93	Efisien



*Alat transportasi penangkapan berupa sampan. Monitoring penggunaan sumberdaya. Balai TN Wakatobi. 2019.*

*Foto oleh Hendrawan*



## B. PEMENUHAN PRIORITAS NASIONAL

*Membantu mengatasi kemiskinan, mendetak produktifitas dan nilai tambah sembari meningkatkan kualitas lingkungan hidup*

# IKHTISAR KINERJA

## PEMENUHAN PRIORITAS NASIONAL

### Luas tanah objek reforma agraria

**72.958** hektare

Dari target sebesar 46.500 hektare, atau tercapai 120%. Mendukung akses masyarakat terhadap tanah untuk memenuhi prioritas 1 dalam pembangunan nasional

### Pertumbuhan PDB Kehutanan

**1,79** %

Angka pada harga konstan sebesar Rp. 48,08 triliun. Sedangkan pada harga berlaku sebesar Rp. 82,50 triliun (atau meningkat 6,98% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya).

### Luas izin hutan sosial

**396.941** hektar

Rencana seluas 125.000 hektar, atau tercapai 120%. Mendukung akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan untuk memenuhi prioritas 1 dalam pembangunan nasional

### Indeks kualitas lingkungan hidup

**70,27**

Dari target sebesar 68,71, atau tercapai 102,27%. Kondisi ini lebih baik dari tahun sebelumnya, atau meningkat

### Luas rehabilitasi hutan dan lahan

**107.423** hektare

Rencana seluas 56.000 hektare, atau tercapai 120%. Mendukung peningkatan tutupan hutan untuk memenuhi prioritas 3 dalam pembangunan nasional

### Penurunan kebakaran hutan dan lahan

**82,01** %

Penurunan areal kebakaran hutan dan lahan, atau turun seluas 1.352.501 hektar dibanding periode yang sama ditahun sebelumnya.

### Pengurangan timbulan sampah nasional

**156.956** ton

Jumlah sampah nasional yang berhasil dikurangi untuk menurunkan beban lingkungan. Bersama dengan 5 unit fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber pelayanan kesehatan yang dibangun, upaya ini merupakan respon cepat dalam mengurangi intensitas pencemaran selama pandemi.

### Peningkatan ketaatan unit usaha

**1.066** perusahaan

Diawasi ketaatannya untuk meningkatkan efektivitas sistem kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.





*Indikator luas kawasan hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi yang sasarannya digunakan untuk mendukung program prioritas peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air merupakan bentuk dukungan terhadap prioritas nasional ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup. Sebagaimana terjadi di Pulau Sumba, keberadaan TN. Manupeu Tanadaru-Laiwangi Wanggameti tak hanya menyangga lahan pertanian, namun seluruh sendi perikehidupan masyarakat Sumba bergantung pada kelestarian taman ini.*

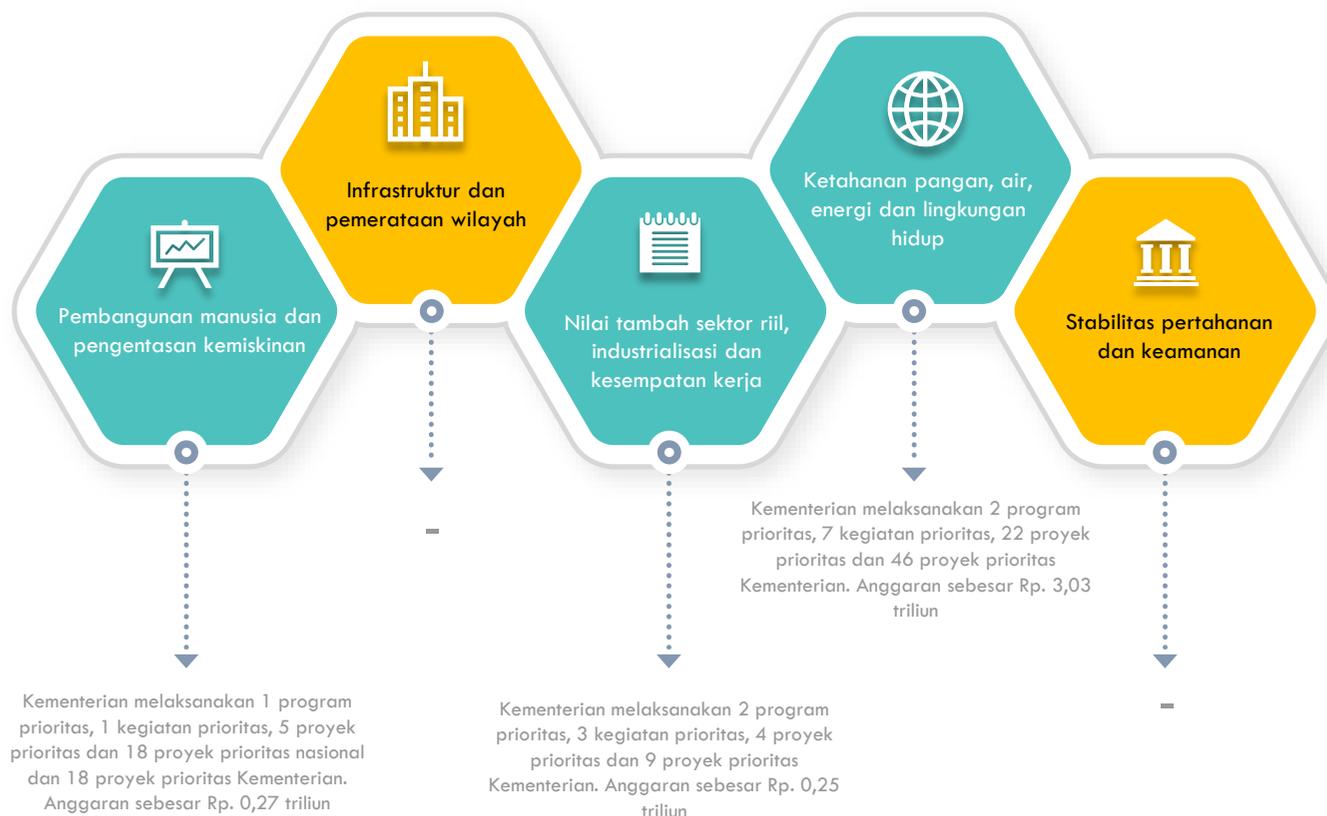
*Foto oleh Marwedhi Nurratyo.*

## POSISI PEMBANGUNAN KEMENTERIAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan nasional 2020 mengambil tema “Peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas”. Pemenuhannya dibagi ke dalam 5 prioritas nasional, yaitu : (1) Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan; (2) Infrastruktur dan pemerataan wilayah; (3) Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja; (4) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan (5) Stabilitas pertahanan dan keamanan. Masing-masing prioritas nasional memiliki sasaran dan indikator kinerja, yang pemenuhannya dilakukan melalui program prioritas dan kegiatan prioritas.

Kementerian LHK melaksanakan 3 dari 5 prioritas nasional yaitu prioritas nasional 1, 3 dan 4. Program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah 5 program prioritas dan 10 kegiatan prioritas.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan ketiga prioritas nasional sebesar Rp. 3,56 Triliun atau 32% dari total pagu Kementerian LHK sebesar Rp. 7,65 Triliun. Angka realisasi secara umum berada pada 94,83%. Realisasi anggaran terbesar mendukung prioritas nasional ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup sebesar Rp. 2,89 Triliun dari pagu Rp. 3,03 Triliun (95,24%). Menyusul berikutnya adalah prioritas nasional pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan dengan realisasi Rp. 0,25 Triliun dari pagu sebesar Rp. 0,27 Triliun (93,03%), dan prioritas nasional nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja realisasi anggaran Rp. 0,23 Triliun dari pagu sebesar Rp. 0,25 Triliun (91,90%).



## PEMENUHAN PRIORITAS NASIONAL DARI PEMBANGUNAN KEMENTERIAN

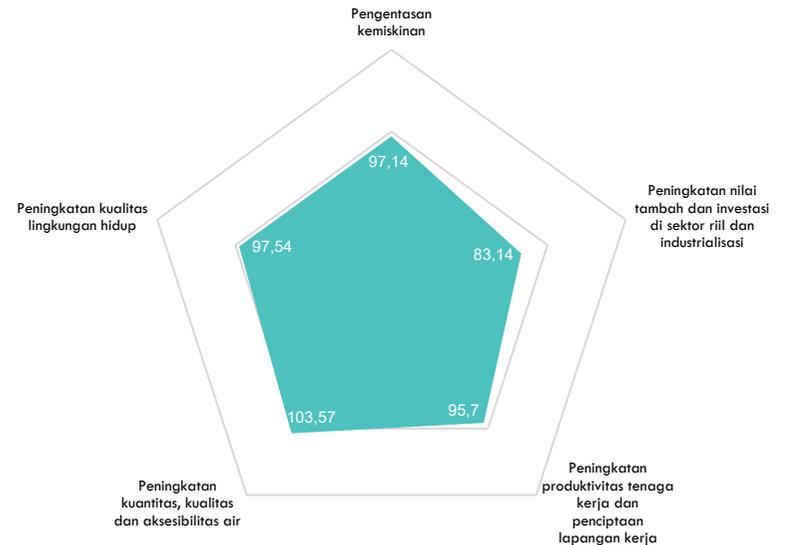
Kementerian menyumbang capaian terbesar pada kinerja prioritas nasional ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup. Dari sasaran prioritas nasional meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 68,71 terpenuhi sebesar 70,27 (atau 102,72%). Mengalir dari pemenuhan kinerja program prioritas peningkatan kualitas air sebesar 97,54%. Berkelindan dengan pemenuhan program prioritas peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air sebesar 103,57%.

Menyusul berikutnya adalah prioritas nasional pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Melalui reforma agraria dan perhutanan sosial, kegiatan prioritas telah memenuhi sasaran mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Sekaligus menyumbang program prioritas pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan penduduk miskin dan rentan yang berdaya secara ekonomi.

Raihan luas tanah obyek reforma agraria dari kawasan hutan 46.500 hektare tercapai seluas 72.958 hektare (atau 156,90%, selanjutnya untuk penyetaraan angka capaian ditata tidak melebihi 120%). Demikian halnya dengan akses kelola hutan oleh masyarakat dalam bentuk perhutanan sosial. Dari rencana seluas 125.000 hektare terpenuhi seluas 396.941 hektar (atau 120%). Jumlah kelompok masyarakat yang dikembangkan pun semakin banyak. Dari rencana sebanyak 55 kelompok perhutanan sosial yang dikembangkan untuk bisa memasarkan produk hasil hutan ke domestik dan mancanegara sebanyak 55 kelompok, terealisasi sebanyak 59 kelompok. Dari sisi akses terhadap pemodalan, hingga 2020 telah diberikan Rp.182,56 miliar modal usaha bagi 12.293 debitur. Rinciannya adalah 3.959 debitur untuk kredit sebesar Rp. 32,98 miliar dari Bank Negara Indonesia. Bank Rakyat Indonesia memberikan kredit sebesar Rp. 43,10 miliar untuk 6.029 kelompok. Bank Mandiri memberikan kredit usaha rakyat sebesar 220 kelompok sebesar Rp. 16,51 miliar. Dan, 2.085 debitur untuk kredit sebesar Rp. 89,97 miliar dari Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

Kondisi lapangan semakin menyiratkan harapan dengan hadirnya sentra produksi hutan baru dari perhutanan sosial yang menumbuhkan geliat ekonomi untuk membantu pemerataan pembangunan wilayah. Secara nasional, angka koefisien gini yang menjadi indikator prioritas nasionalnya mampu bertahan meski pandemi melanda. Demikian halnya dengan indeks pembangunan manusia yang meningkat dari tahun 2019 sebesar 71,92 menjadi 71,94 pada tahun 2020.

Profil pemenuhan sasaran program prioritas



*Membantu mengatasi kemiskinan, mendetak produktivitas dan nilai tambah sembari meningkatkan kualitas lingkungan hidup*

Prioritas nasional berikutnya adalah nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja. Meski dari angka capaian sedikit di bawah prioritas nasional lainnya, namun pertumbuhan produk domestik bruto kehutanan masih positif, saat sektor lainnya mengalami relaksasi. Angka capaian persen pertumbuhan hingga triwulan III secara kumulatif (C to C) sebesar 6,98% sesuai harga berlaku dan 1,79% sesuai harga konstan. Angka ini lebih rendah dibanding target 2,70-2,90 di Rencana Kerja Pemerintah 2020.

Kecenderungan positif ini juga tercermin dari kegiatan prioritasnya. Dari target volume ekspor produk industri Kehutanan sebanyak 9 juta ton, terealisasi sebesar 16,65 juta ton. Dari sisi ekspor tumbuhan dan satwa liar yang berasal dari penangkaran dan penangkapan dari alam, tercatat sebesar Rp. 11 triliun, demikian halnya dengan produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman. Angkanya mengibarkan harapan meski diterpa gelombang pandemi, sebesar 12 juta meter kubik.



*Abdul Kholik, salah satu staf Biro Perencanaan tengah mengabadikan salah satu sumber air di TN. Gunung Maras. Bersama titik sumber air lainnya, ekosistem Gunung Maras ini menjaga denyut sungai-sungai besar di Pulau Bangka, sekaligus menghidupkan pertanian dan sendi peri kehidupan lainnya. Menjaga ekosistemnya merupakan salah satu kegiatan prioritas penataan kawasan hutan dengan indikator luas kawasan dan sumber air yang terlindungi melalui perlindungan dan pengamanan berbasis resort bersama masyarakat.*

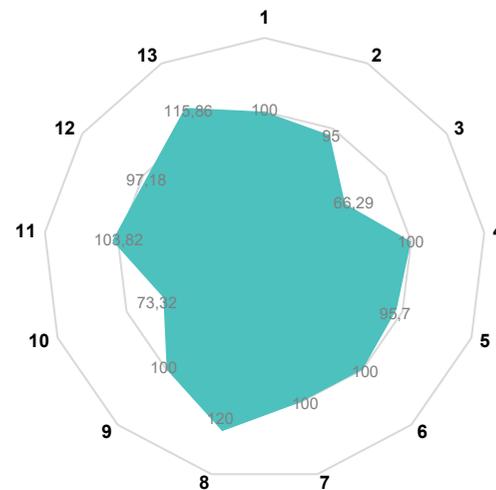
*Foto oleh Sandi Kusuma.*

Rehabilitasi hutan dan lahan memberikan sumbangan yang sangat besar dalam program prioritas peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air. Tidak hanya dalam vegetatif dengan menghutankan kembali lahan kritis, upaya ini juga ditempuh dengan membangun konservasi air sipil teknis. Dari luasan yang direncanakan sebesar 56.000 hektare telah direalisasikan seluas 112.973 hektar. Demikian halnya dengan bangunan sipil teknis yang direncanakan sebanyak 3.000 unit telah direalisasikan sebanyak 3.242 unit.

Program prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup memberikan hasil yang tinggi untuk pemenuhan indikator kualitas air laut. Menyusul berikutnya adalah kualitas udara, kualitas tutupan lahan dan kualitas air. Keberhasilan mengurangi kejadian kebakaran hutan dan lahan pada kegiatan prioritasnya telah memberikan sumbangan bagi keberhasilan pemenuhan peningkatan kualitas udara.

Profil Pemenuhan Indikator Program Prioritas

Profil pemenuhan sasaran program prioritas

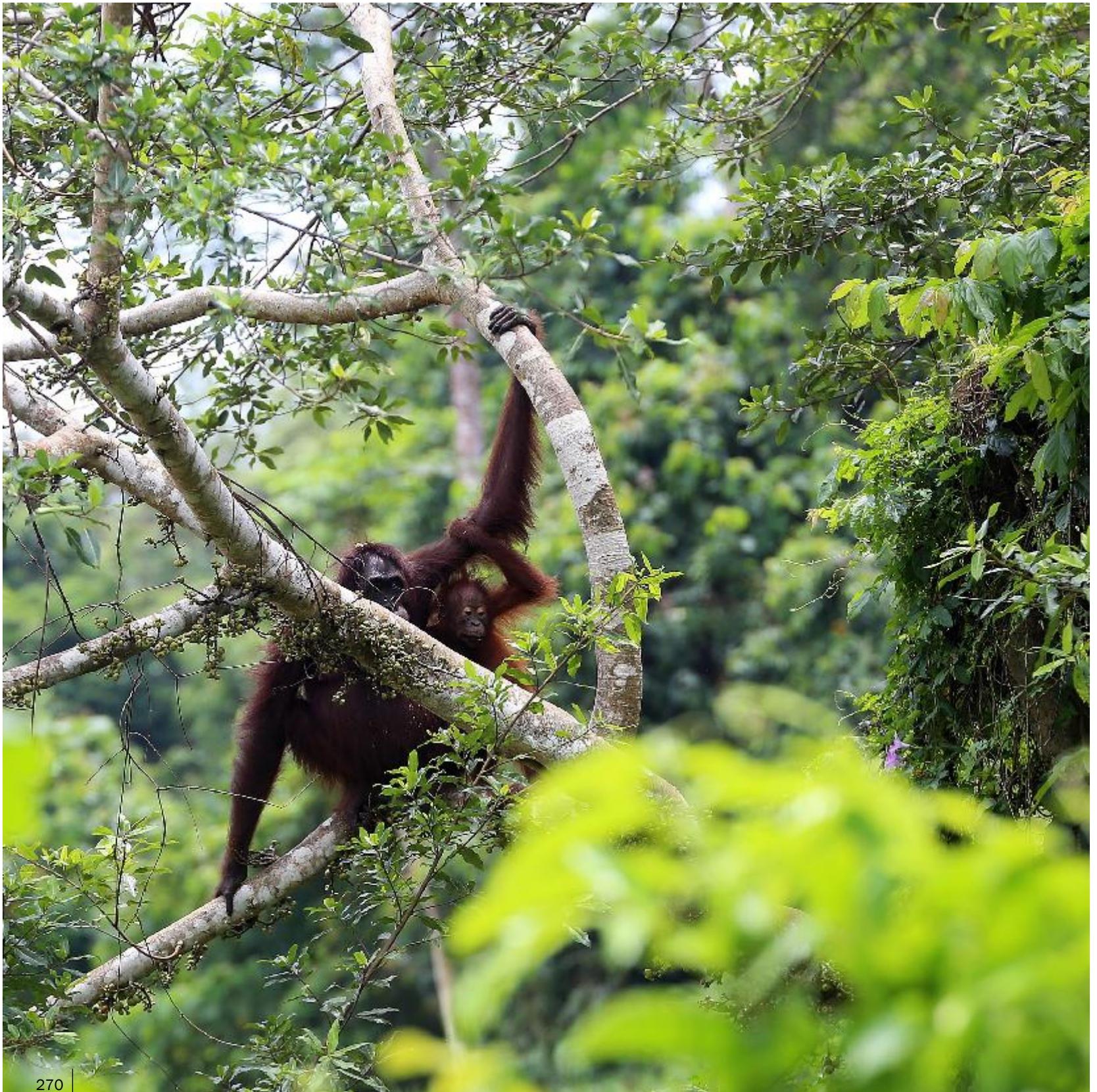


PROGRAM PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	STATUS
Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya penduduk miskin dan rentan yang berdaya secara ekonomi	1. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif	32 persen	32 persen	100 persen
		2. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	35 persen	33 persen	94,28 persen
Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi	Meningkatnya nilai tambah dan investasi sektor pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital	3. Pertumbuhan PDB Kehutanan	2,70-2,90 persen	1,79 persen	66,29 persen
		4. Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis taman nasional	10	10	100 persen
Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja	Meningkatnya produktivitas dan penciptaan lapangan kerja	5. Jumlah lulusan pendidikan vokasi	466 orang	446 orang	95,70 persen
Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air	Tertatanya hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi	6. Luas kawasan hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi	3.343.114 hektare	13,61 juta hektare	120 persen
		7. Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH	15 unit	15 unit	100 persen
	Menurunnya luas lahan kritis	8. Luas lahan kritis yang direhabilitasi	56.000 hektare	107.423,2 hektare	120 persen
	Terbangunnya rencana indikasi program berbasis DAS	9. Jumlah DAS yang dibangun rencana indikasi program berbasis DAS	34 DAS	34 DAS	100 persen
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan	10. Indeks kualitas air	73	53,53	73,32 persen
		11. Indeks kualitas udara	84	87,21	103,82 persen
		12. Indeks kualitas tutupan lahan	62,5	60,74	97,18 persen
		13. Indeks kualitas air laut	59,5	68,94	115,86 persen

## Profil Pemenuhan Indikator Kegiatan Prioritas

KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Reforma agraria dan perhutanan sosial	Mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan	Luas kawasan hutan sebagai objek TORA Kawasan hutan sebagai objek TORA	46.500 hektare	72.958 hektare	120
		Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat desa melalui HKm. HD, HTR, HA dan kemitraan kehutanan	125.000 hektare	396.941 hektar	120
		Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial yang dikembangkan	55 kelompok	59 kelompok	107,72
		Jumlah pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani hutan/kelompok masyarakat	120 orang	120 orang	100
		Luas kawasan hutan yang telah ditetapkan	500.000 hektar	377.473 hektar	75,449
Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam yang didukung penguatan rantai pasok	Meningkatnya kesiapan destinasi dan daya saing industri pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang difasilitasi penyusunan dokumen pengembangan pariwisata terpadu di Jawa Timur, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Papua Barat	5 destinasi	5 destinasi	100
Tata kelola sistem pangan nasional	Sistem pangan terkelola dengan baik	Food global security index	56,9	62,6	110,01
Penataan kawasan hutan	Tercapainya penataan kawasan hutan sesuai daya dukung daya tampung	Luas kawasan hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi	3.343.114 hektare	13,61 juta hektar	90,72
		Luas kawasan dan sumber air yang terlindungi melalui perlindungan dan pengamanan berbasis resort bersama masyarakat	745 resort	745 resort	100
Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya	Tercapainya pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya	Jumlah unit konservasi tanah dan air secara sipil teknis yang dibangun	3000 unit	3.242 unit	108,07%
		Luas tutupan hutan dan lahan melalui konservasi tanah dan air secara vegetatif: 56.000 hektare	56.000 hektare	112.973 hektare	120
Citarum Harum	Sistem pemantauan kualitas air	Jumlah pemantauan kualitas air	13 titik	13 titik	100
		Jumlah pusat pemantauan kualitas air	1 DAS	1 DAS	100
	Pengelolaan kualitas air klasifikasi minimal kelas IV	Restorasi bantaran sungai	1 titik	1 titik	100
		Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah DAS Citarum	2.713 ton	5.500 ton	120

Catatan : beberapa indikator dilakukan penyesuaian dengan adanya refocusing anggaran tahun 2020





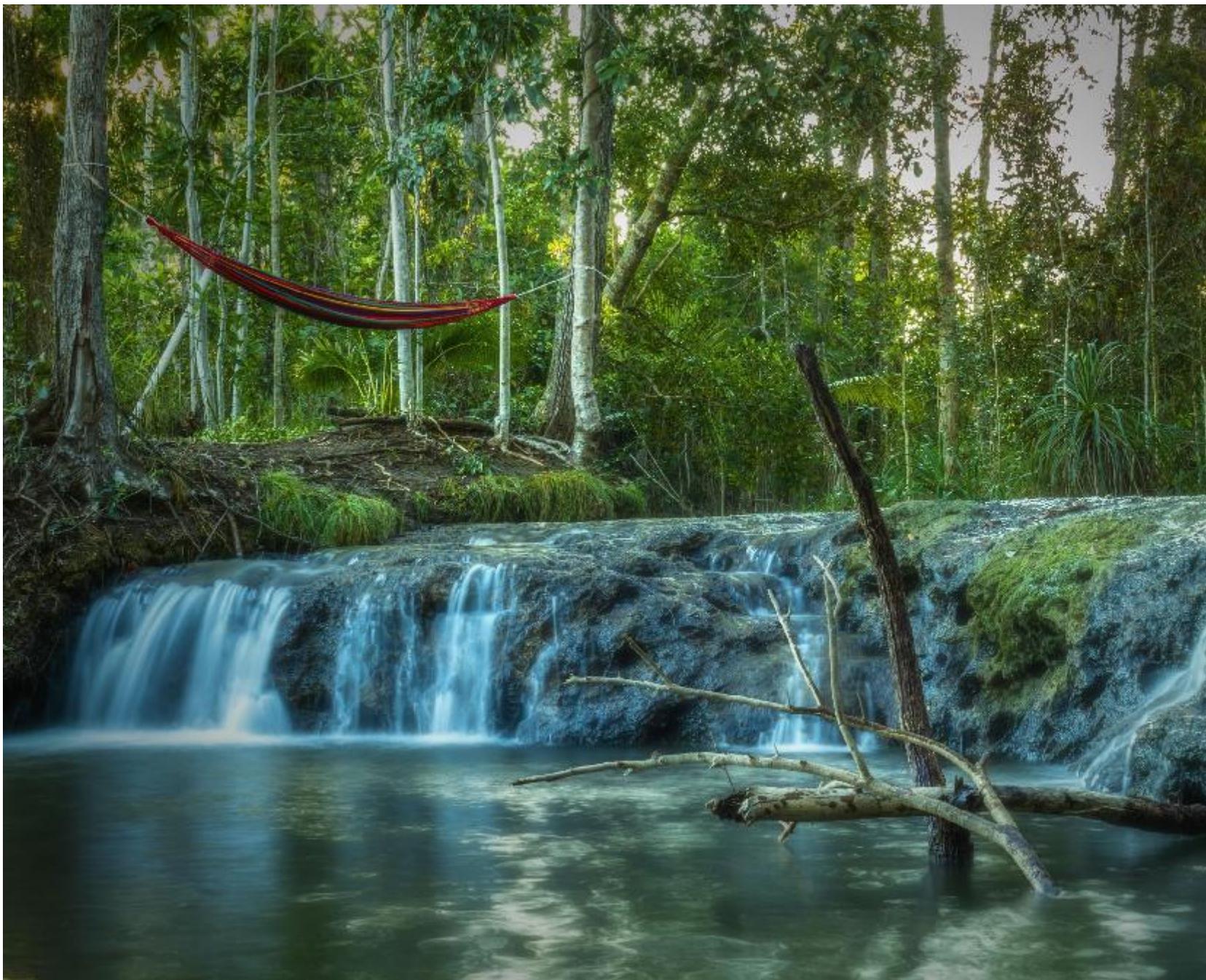
*Pantai Mandalika di Lombok yang dikembangkan sebagai destinasi wisata super prioritas. Pengembangan destinasi ini didukung oleh keindahan alam dan ragam hayati taman nasional di sekitarnya. Karakter yang dikembangkan adalah memberikan pilihan bagi wisatawan agar lebih lama tinggal di destinasi. Di halaman sebelah, induk Orangutan sedang mengasuh anaknya yang tertangkap kamera oleh petugas Balai TN. Kutai. Foto oleh Haryadi.*

## Profil Pemenuhan Indikator Kegiatan Prioritas

KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Menurunnya potensi kejadian pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Persentase penurunan luas hutan/lahan yang terbakar	10 persen	82,01 persen	120
		Data dan Informasi Kualitas Udara	510 lokasi	512 lokasi	100,39
		Data dan Informasi Kualitas Air	574 lokasi	577 lokasi	100,52
Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya respon cepat dalam mengurangi intensitas pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	18 lokasi	20 lokasi	111,11
		Pengurangan timbulan sampah nasional	42.065 ton	156.956 ton	120
		Pengelolaan sampah terpadu di wilayah pesisir	5.250 ton	10.200 ton	120
		Jumlah fasilitas pengolahan emas non merkuri di PESK yang memiliki izin	1 unit	1 unit	100
		Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber pelayanan kesehatan	5 unit	5 unit	1000
Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut	122.000 hektare	122.000 hektare	100
		Luas lahan bekas tambang rakyat yang difasilitasi pemulihannya	10 hektar	11,67 hektar	116,7
		Jumlah lokasi ekosistem pesisir laut yang dipulihkan	3 lokasi	3 lokasi	100
Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan	Meningkatnya efektivitas sistem kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	550 perusahaan	726 perusahaan	120
		Jumlah penyelesaian kasus sampai P21 untuk penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, penyelundupan dan peredaran TSL	130 kasus	220 kasus	120
		Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan	23 kasus	53 kasus	120

Catatan : beberapa indikator dilakukan penyesuaian dengan adanya refocusing anggaran tahun 2020





*Melindungi kawasan dan sumber air melalui perlindungan dan pengamanan berbasis resort bersama masyarakat berhasil menjaga sasaran program prioritas peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air. Salah satunya di Sungai Mandu-Mandula (foto atas) dan ekosistem lahan basah (foto halaman sebelumnya). Keduanya berada di lanskap dan menjadi kebanggaan TN. Rawa Aopa Watumohai.*

*Foto sungai oleh Indra Anggrana Wijaya dan foto lanskap lahan basah oleh Ikhsan Fajrin.*



## C. PEMENUHAN

---

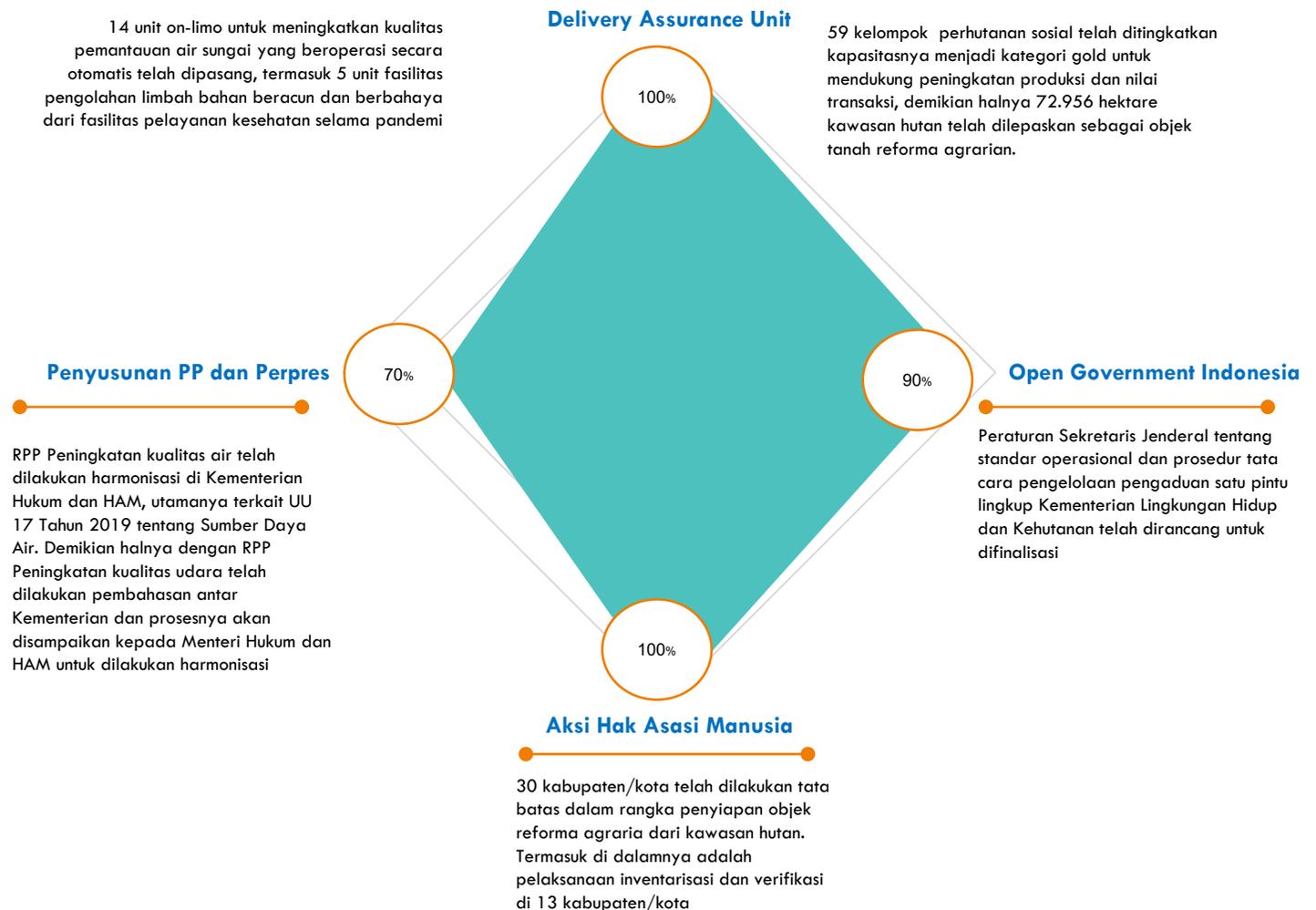
JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

---

# IKHTISAR KINERJA

## PEMENUHAN JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyumbang 4 tema utama pemenuhan janji Presiden dan Wakil Presiden yang pemantauannya dilakukan oleh Kantor Staf Presiden. Yaitu *delivery assurance unit*, *open government Indonesia*, aksi hak asasi manusia dan penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. *Delivery assurance unit* memiliki tingkat pemenuhan paling tinggi, menyusul berikutnya adalah aksi hak asasi manusia dan *open government Indonesia*.





Upaya rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan dengan mengajak masyarakat. Manfaat yang dipetik selain fungsi lingkungan yang semakin terjaga adalah ikatan sosial masyarakat yang berkembang seiring kapasitasnya yang semakin meningkat. Hal ini menggambarkan bahwa upaya rehabilitasi tak hanya sekedar upaya fisik, namun memfasilitasi perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Sebagaimana ditempuh oleh BPDAS Sei Jang Durian Kang di Desa Penaga, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Foto oleh Hendy Noordianto.

## Profil Pemenuhan Indikator Janji Presiden dan Wakil Presiden

NO.	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET DAN REALISASI	STATUS
<i>Delivery Assurance Unit</i>				
1.	Jumlah Kelompok pengelola kawasan hutan yang meningkat kinerjanya 55 kelompok	Jumlah produksi dan nilai transaksi dari off-taker ke KUPS yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, Pendapatan anggota KUPS yang semakin meningkat	<p>Target: 55 Kelompok (Kumulatif)</p> <p>Realisasi saat ini: Telah dilakukan peningkatan kapasitas KUPS sebanyak 59 kelompok menjadi kategori emas (Gold)</p>	
2.	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA 46.500 hektare	SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA 46.500 hektare (Kumulatif)	<p>Target: Tersedianya SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA 46.500 hektare (Kumulatif)</p> <p>Realisasi saat ini: Telah dilakukan Pelepasan Kawasan Hutan seluas 72.956,16 Ha dengan total 56 SK</p>	
3.	Jumlah stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu 14 unit	Sistem pemantauan kualitas air sungai yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu (unit)	<p>Target: Instalasi peralatan Onlino di 14 lokasi dan terkoneksi dengan <i>system data center</i> di KLHK</p> <p>Realisasi saat ini: Telah dilakukan proses pengadaan barang/jasa pembangunan biodigester sampah pembangunan Onlino di 14 lokasi dan sudah terintegrasi datanya secara kontinyu</p>	
4.	Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan air limbah di Sungai Citarum 1 unit IPAL dan 6 biodigester serta fasilitas pendukung (rumah pupuk dan rumah cacing)	Penurunan beban pencemaran lingkungan di DAS Citarum	<p>Target: 1. Proses Pembangunan dan Pengawasan 2. Uji fungsi</p> <p>Realisasi saat ini: Telah dilakukan pembangunan dan uji fungsi terhadap 1 Unit IPAL dan 6 biodigester</p>	
5.	Luas lahan milik masyarakat yang diberikan intervensi sekat kanal sebagai upaya pembasahan kembali areal gambut seluas 200 Ha	Terbasahnya lahan gambut masyarakat dan mengurangi resiko kebakaran lahan gambut	<p>Target: Pemulihan lahan gambut 200 Ha</p> <p>Realisasi saat ini: Telah dilakukan pemulihan lahan gambut masyarakat seluas 306 ha</p>	
6.	Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Penyediaan bibit sebanyak 26.565.766 batang untuk Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif seluas 56.000 Ha	<p>Target: Penyediaan bibit sebanyak 26.565.766 batang untuk rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif seluas 56.000 Ha</p> <p>Realisasi saat ini: Telah tersedia 28.050.685 bibit untuk penanaman seluas 56.000 Ha</p>	
7.	Jumlah rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara sipil teknis	Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis sejumlah 3.000 unit	<p>Target: Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis sejumlah 3.000 unit</p> <p>Realisasi saat ini: Telah dibangun bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan sebanyak 3.242 unit</p>	

## Profil Pemenuhan Indikator Janji Presiden dan Wakil Presiden

NO.	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET DAN REALISASI	STATUS
8	Luas rehabilitasi hutan mangrove	Rehabilitasi hutan mangrove seluas 1.000	<p>Target: Terlaksananya rehabilitasi hutan mangrove seluas 1.000 Ha</p> <p>Realisasi saat ini: Telah dilakukan rehabilitasi hutan mangrove seluas 1.000,55 Ha</p>	
9.	Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan 5 unit	Tersedianya fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan 5 unit	<p>Target: 1. Proses pabrikasi dan pembangunan selesai Oktober 2. Instalasi alat 3. Comissioning 4. Serah terima operasional fasilitas</p> <p>Realisasi saat ini: Telah tersedianya fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan 5 unit</p>	
10.	Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin 1 unit yaitu di Kuantan Singingi, Riau	Tersedianya 1 fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri untuk kegiatan penambangan emas skala kecil di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau	<p>Target: Penyelesaian pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin 1 unit yaitu di Kuantan Singingi, Riau Pelaksanaan pelatihan fasilitas</p> <p>Realisasi saat ini: Telah dilakukan pembangunan 1 fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri untuk kegiatan penambangan emas skala kecil di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau</p>	
11.	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah di DAS Citarum 5 unit	Tersedianya fasilitas pengelolaan sampah di DAS Citarum 5 unit	<p>Target: Terbangunnya fasilitas pengelolaan sampah di DAS Citarum 5 unit</p> <p>Realisasi saat ini: Telah dilakukan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah di DAS Citarum sebanyak 5 unit</p>	
12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Desa Rawan Karhutla yang dijangkau kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Rawan Karhutla 800 desa</li> <li>Jumlah Provinsi Rawan Karhutla yang ditingkatkan Dukungan Sarana Prasarana Penanganan karhutla di 7 provinsi prioritas</li> <li>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Dalkarhutla di Provinsi Rawan Karhutla 800 orang</li> </ul>	Terlaksananya Patroli Terpadu untuk pencegahan Karhutla	<p>Target: Terlaksananya kegiatan patroli Pencegahan Karhutla serta Pembentukan/ Pembinaan MPA sebanyak 50 desa (Kumulatif dari Januari- Desember 2020 adalah 800-Desa)</p> <p>Realisasi saat ini: Telah dilakukan patrol sebanyak 1.043 Desa dan peningkatan kapasitas tenaga dalkarhutla serta dukungan sarana prasarana untuk provinsi rawan karhutla</p>	
13.	Jumlah pelaksanaan pemadaman udara / pemantauan dari udara 70 sortie	Terlaksananya penanggulangan kebakaran hutan menggunakan water bombing (Sortie)	<p>Target: Terlaksananya kegiatan pemadaman darat sebanyak 74 hari</p> <p>Realisasi saat ini: Telah dilakukan kegiatan pemadaman darat sebanyak 222 hari dan pemadaman /pemantauan melalui udara sebanyak 230 sortie</p>	

## Profil Pemenuhan Indikator Janji Presiden dan Wakil Presiden

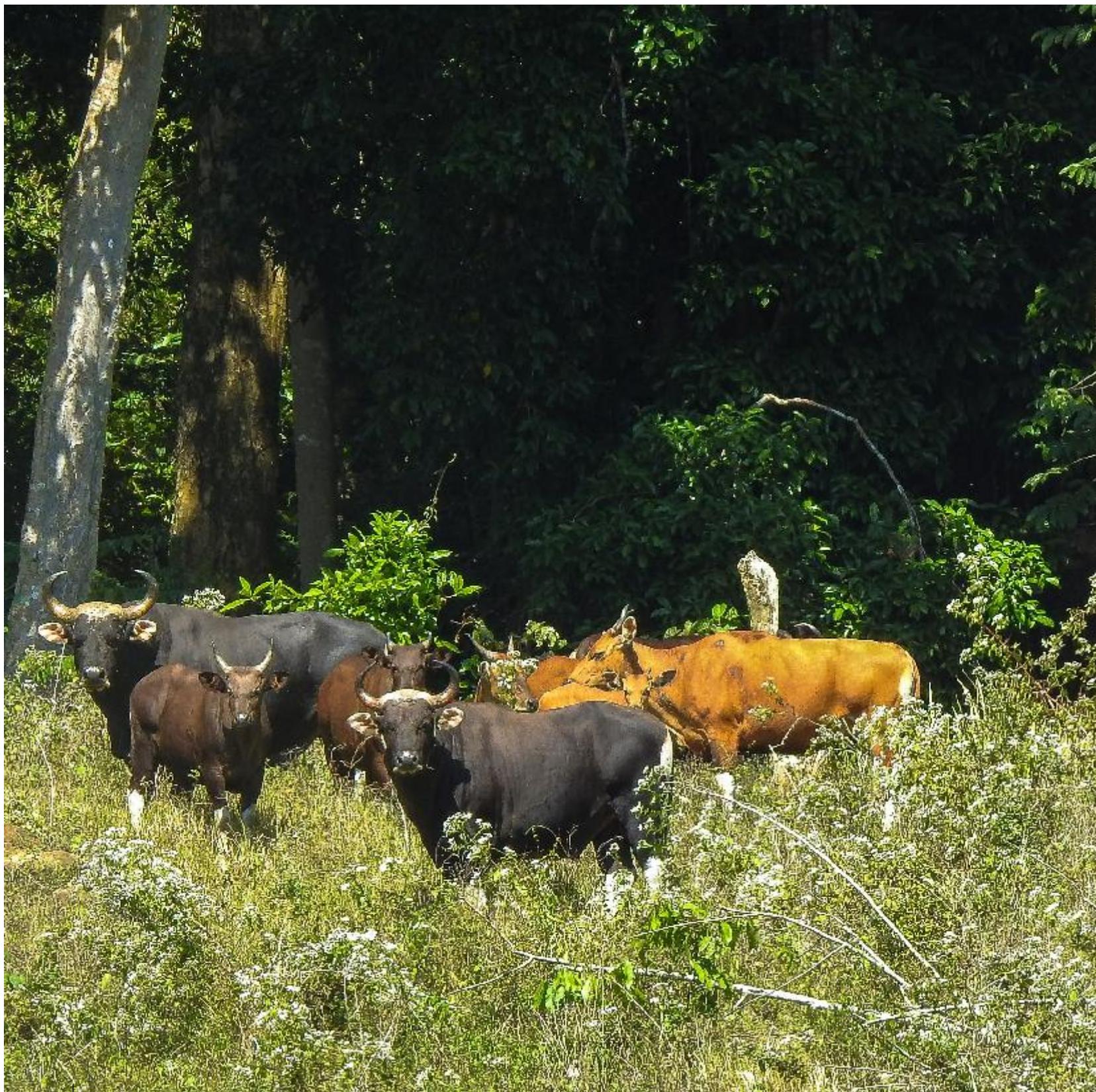
NO.	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET DAN REALISASI	STATUS
<b>Open Government Indonesia</b>				
14.	Tersedianya sistem pelayanan pengelolaan pengaduan dan pengawasan satu pintu pada bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perumusan SOP digunakan untuk mekanisme penanganan pengaduan satu pintu dalam lingkup KLHK	<p><b>Target:</b> Tersedianya peraturan Sekjen tentang SOP tata cara pengelolaan pengaduan satu pintu lingkup KLHK</p> <p><b>Realisasi saat ini :</b> Tersedianya rancangan peraturan Sekjen tentang SOP tata cara pengelolaan pengaduan satu pintu lingkup KLHK</p>	
<b>Aksi Hak Asasi Manusia</b>				
15.	<p>a. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas pentingnya legalitas atas tanah</p> <p>b. Terwujudnya perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan melalui penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan</p>	Terlaksananya sosialisasi, inventarisasi, verifikasi PPTKH dan tata batas objek reforma agraria dalam kawasan hutan pada wilayah kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan	<p><b>Target:</b> Terlaksananya tata batas objek TORA pada 30 kabupaten/kota</p> <p><b>Realisasi saat ini:</b> Telah dilaksanakan tata batas untuk penyelesaian TORA di 20 kabupaten/kota</p>	
<b>Penyusunan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden</b>				
16.	Tercantumkannya pengaturan mengenai : (1) kriteria mutu udara; (2) pemantauan kualitas udara; (3) pengendalian pencemaran udara; dan (4) peran serta masyarakat	Terselesaikannya RPP tentang pengelolaan kualitas udara	<p><b>Target:</b> Rancangan PP/Perpres disampaikan kepada Presiden</p> <p><b>Realisasi saat ini:</b> Telah dilakukan pembahasan antar Kementerian RPP tentang Pengelolaan Kualitas Udara dan selanjutnya akan segera disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi</p>	
17.	Tercantumkannya pengaturan mengenai : (1) perencanaan; (2) pemanfaatan; (3) pengendalian; (4) pemeliharaan; (5) hak, kewajiban dan larangan; (6) peran serta masyarakat; (7) sistem informasi; dan (8) pengawasan dan sanksi administratif	Terselesaikannya rancangan peraturan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan air	<p><b>Target:</b> Rancangan PP/Perpres disampaikan kepada Presiden</p> <p><b>Realisasi saat ini:</b> Telah dilakukan harmonisasi RPP Perlindungan dan Pengelolaan Air di Kementerian Hukum dan HAM utamanya dengan Kementerian PUPR terkait dengan UU Nomor 17 tentang Sumber Daya Air</p>	

Catatan : KSP memberikan status pemantauan warna biru untuk capaian di atas 100 persen, hijau untuk capaian 80-100 persen dan kuning untuk kurang dari 80 persen.



Seekor Macan Tutul melintasi hutan Meru Betiri. Keberadaannya diabadikan dengan kamera jebakan yang dipasang Balai TN. Meru Betiri di lokasi lintasannya. Demikian halnya Elang Jawa dan Banteng (foto halaman berikutnya). Ketiganya mencirikan kondisi alami TN. Meru Betiri yang terjaga dengan baik. Selama pandemi, beberapa satwa di taman-taman nasional lebih sering menampakkan diri. Bisa jadi karena interaksi manusia yang berkurang.

Foto Elang Jawa oleh Afian Eko dan foto Banteng oleh Puji Firmansyah.





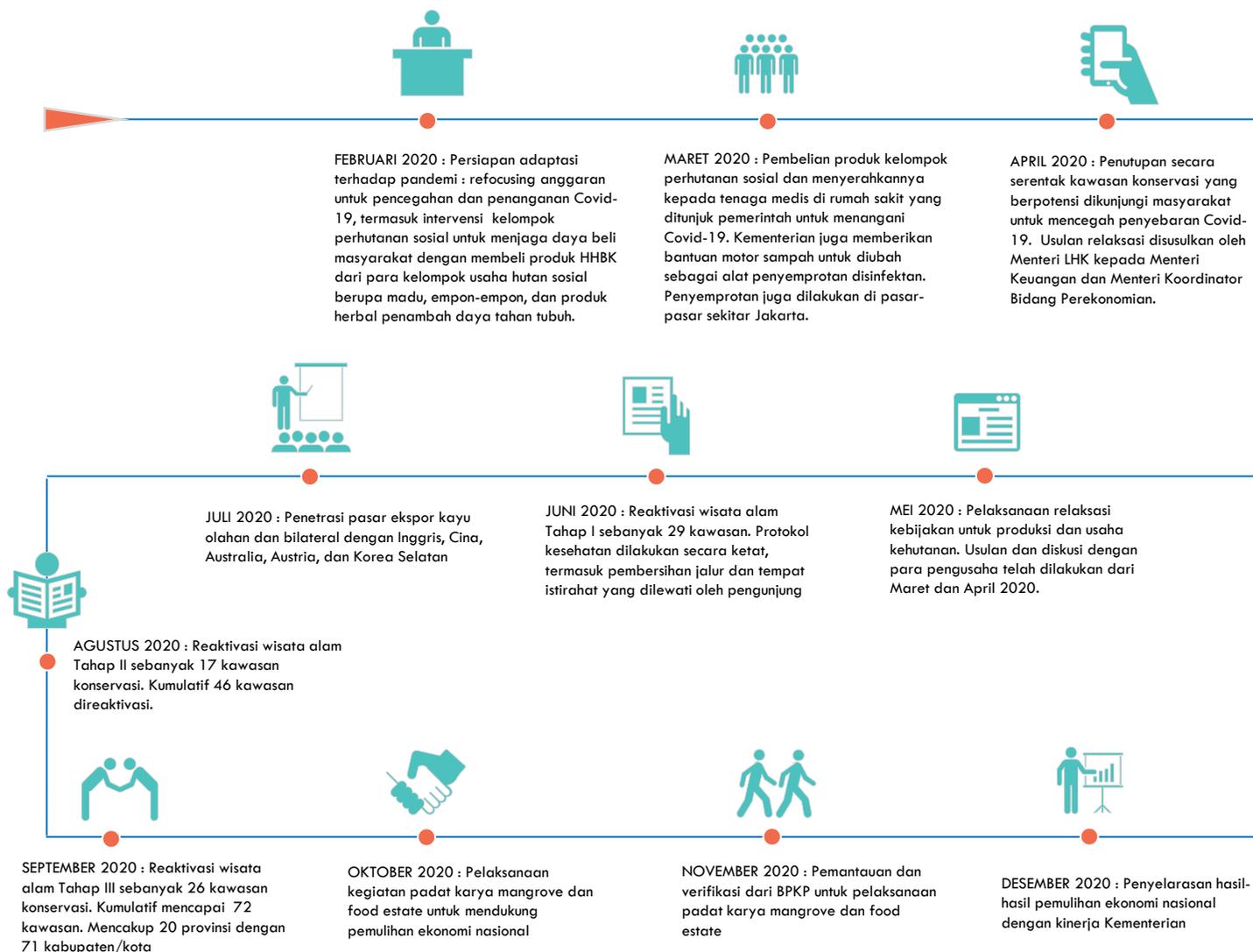
## D. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

*Menyiapkan lumbung pangan dan mangrove sebagai serambi depan pemulihan ekonomi nasional*

# LINI MASA

## PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengurai pemulihan ekonomi nasional dari mengubah struktur penganggaran yang lebih memanfaatkan teknologi informasi, menghindari kontak langsung dalam pelaksanaan tugas fungsi, berpihak pada kelompok masyarakat terdampak Covid-19, dan bergerak secara nyata di tengah masyarakat untuk mencegah penyebaran pandemi. Mencegah kerumunan dengan menutup dan mereaktivasi wisata alam sesuai kondisi wilayah terdampak pandemi. Hingga menata regulasi untuk tetap mempertahankan produktivitas hutan dan hasil hutan.





*Tersedia empati di balik pandemi*

Balai Taman Nasional Gunung Palung menyikapi kelangkaan hand sanitizer di awal pandemi, dengan membuat sendiri pembasuh tangan berdasarkan panduan tutorial terpercaya. Hasilnya dibagikan kepada penjaga pelayanan publik di garda terdepan.

Foto oleh Faizal Riza.

# KEBIJAKAN RELAKSASI UNTUK MEMPERTAHANKAN EKSPOR KAYU OLAHAN

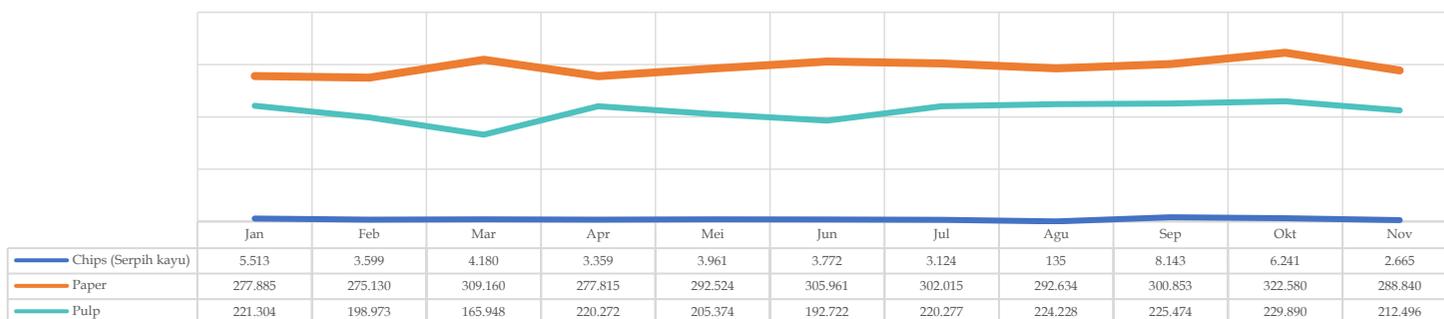
Target nilai ekspor Tahun 2020 (revisi) sebesar US\$ 7 Miliar. Angka ini terpenuhi sebesar US\$ 10,9 miliar, atau 155 persen. Dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, nilai ekspor tahun 2020 menurun 6,18 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan *lockdown* negara tujuan ekspor akibat pandemi COVID 19.

Secara umum, pandemi tidak memiliki dampak yang besar bagi nilai ekspor produk pulp and paper. Hal ini mengingat bahwa produk ini didukung bahan baku dari IUPHHK-HT. Sedangkan untuk produk furnitur, woodworking dan panel pada masa pandemi Covid-19, sempat mengalami relaksasi namun telah kembali pulih mulai bulan Juli 2020.

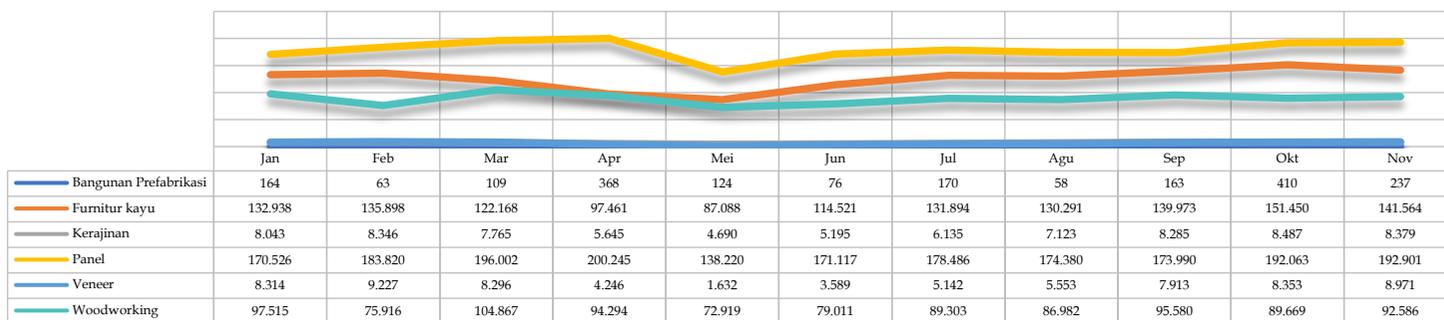
Upaya untuk mempertahankan ekspor kayu olahan, Kementerian melakukan intervensi kebijakan dalam bentuk : (1) penurunan tarif bea keluar veneer dari 15 persen menjadi 5 persen; (2) memperluas penampang ekspor untuk produk kayu olahan jenis non Merbau seluas 4.000 mm<sup>2</sup> dan jenis Merbau seluas 10.000 mm<sup>2</sup> menjadi 15.000 mm<sup>2</sup>; dan (3) penguatan kebijakan sistem verifikasi legalitas kayu dan keberterimaan dokumen V-legal dalam perdagangan kayu olahan.

Untuk mendorong peningkatan ekspor, pemerintah juga telah melakukan dialog bilateral dan multilateral dengan Pemerintah Inggris, China, Australia, Austria dan Korea Selatan.

Perkembangan Nilai Ekspor Tahun 2020  
Produk Chips-Pulp-Paper (angka dalam US\$ 000)



Perkembangan Nilai Ekspor Tahun 2020  
Produk Furnitur - Panel - Woodworking (angka dalam US\$ 000)



## Perbandingan Ekspor Kayu Olahan ke Berbagai Negara

Produk	Nilai ekspor (US\$)		Perubahan
	Jan-Nov 2019	Jan-Nov 2020	
<b>CHINA</b>			
Bangunan prefabrikasi	459.026,23	-	Turun 100%
Serpih kayu	20.150,66	1.631.227,90	Naik 7995%
Furniture kayu	26.083.326,86	18.817.402,51	Turun 28%
Kerajinan	685.082,71	480.123,41	Turun 30%
Panel	36.356.236,26	47.147.916,00	Naik 30%
Paper	272.579.384,59	629.784.942,52	Naik 131%
Pulp	1.853.109.580,51	1.869.259.378,66	Naik 0,9%
Veneer	1.872.669,94	958.408,90	Turun 49%
Woodworking	448.227.166,72	374.841.561,66	Turun 16%
Total	2.639.392.624,47	2.942.920.961,56	Naik 11%

Produk	Nilai ekspor (US\$)		Perubahan
	Jan-Nov 2019	Jan-Nov 2020	
<b>AMERIKA SERIKAT</b>			
Bangunan prefabrikasi	2.689.850,10	62.492,86	Turun 98%
Serpih kayu	1,00	817,00	Naik 100%
Furniture kayu	609.485.296,66	738.368.177,45	Naik 21%
Kerajinan	39.094.195,84	33.943.623,31	Turun 13%
Panel	291.022.670,44	453.831.000,48	Naik 56%
Paper	243.302.926,02	186.305.401,69	Turun 23%
Pulp	-	5	Naik 100%
Veneer	201.789,53	2.859.289,87	Naik 1317%
Woodworking	41.785.417,43	36.353.846,24	Turun 13%
Total	1.227.582.147,02	1.451.724.653,92	Naik 18%

Produk	Nilai ekspor (US\$)		Perubahan
	Jan-Nov 2019	Jan-Nov 2020	
<b>UNI EROPA</b>			
Bangunan prefabrikasi	192.866,10	373.154,19	Naik 93%
Serpih kayu	3.622,90	312,00	Turun 91%
Furniture kayu	297.181.957,99	302.246.444,29	Naik 2%
Kerajinan	17.627.223,84	16.125.662,13	Turun 9%
Panel	279.143.506,97	251.838.569,29	Turun 10%
Paper	281.959.826,47	245.023.834,60	Turun 13%
Pulp	542.511,62	63.100,42	Turun 88%
Veneer	8.081.251,79	7.464.892,46	Turun 8%
Woodworking	107.484.471,96	99.025.218,99	Turun 8%
Total	992.217.239,64	922.161.188,37	Turun 7%

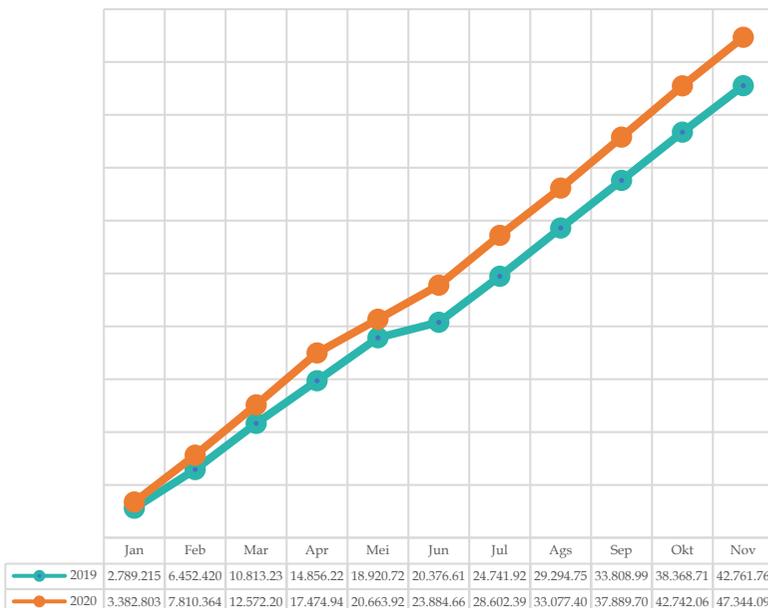
Produk	Nilai ekspor (US\$)		Perubahan
	Jan-Nov 2019	Jan-Nov 2020	
<b>JEPANG</b>			
Bangunan prefabrikasi	9.707,87	10.636,43	Naik 10%
Serpih kayu	46.767.633,80	39.286.426,45	Turun 16%
Furniture kayu	132.684.018,08	128.010.211,80	Turun 4%
Kerajinan	15.067.434,72	12.156.190,35	Turun 19%
Panel	572.312.351,59	489.016.762,67	Turun 15%
Paper	357.020.909,19	307.247.810,52	Turun 14%
Pulp	24.634.439,09	10.646.142,70	Turun 57%
Veneer	8.450.119,82	4.980.443,46	Turun 41%
Woodworking	88.047.160,51	68.519.459,95	Turun 22%
Total	1.244.993.774,67	1.059.874.084,34	Turun 15%

# KEBIJAKAN RELAKSASI UNTUK MENDORONG PRODUKSI KAYU BULAT DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pada triwulan I, produksi kayu 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Namun demikian, menginjak triwulan kedua, kecenderungan produksi kayu tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi mulai terlihat. Langkah antisipasi dengan menerbitkan insentif fiskal dengan pembayaran dana rebosiasi dalam bentuk rupiah, pengangsuran pembayaran provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi, penghapusan pajak pertambahan nilai sebesar 10% untuk kayu bulat, menyediakan insentif pajak PPh dan penjadwalan kembali pembayaran pinjaman perusahaan selama satu tahun. Telah berhasil meningkatkan produksi kayu bulat.

Hasilnya adalah produksi kayu bulat tahun 2020 meningkat 9,5 persen dibanding periode yang sama di tahun 2019. Angka produksinya pada tahun 2020 sebesar 52.0269.071 meter kubik, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 48.756.107 meter kubik. Sebuah langkah adaptasi di masa pandemi yang terbukti mampu menjaga dan meningkatkan produksi kayu bulat Indonesia. Peningkatan produksi ini juga didorong dengan adanya tingginya permintaan masker yang berbahan dasar selulosa dari hutan tanaman.

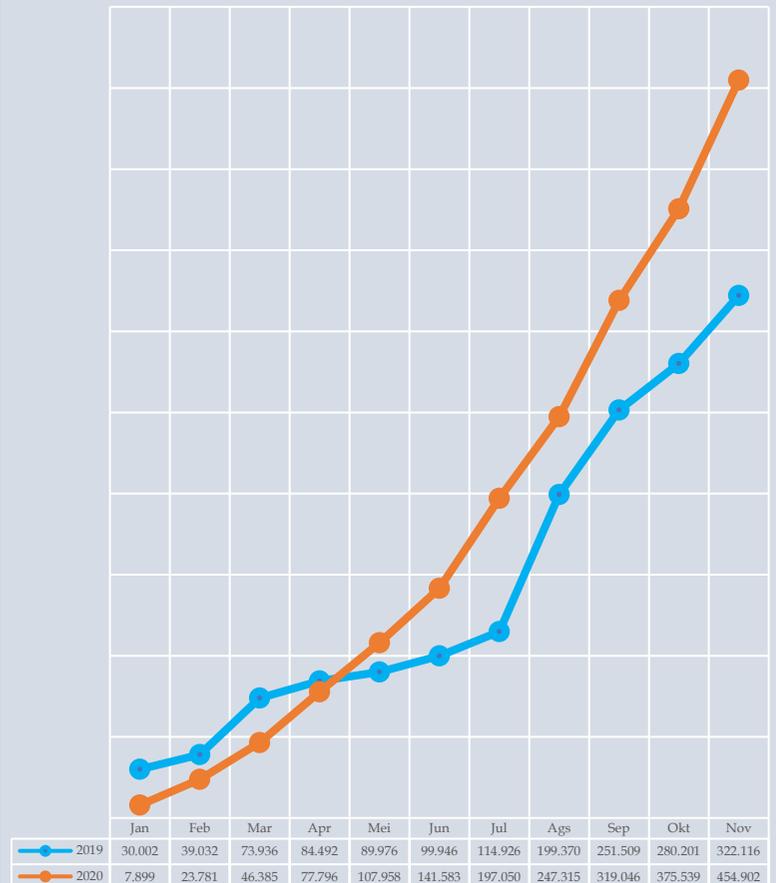
Perbandingan Produksi Kayu Bulat Tahun 2019 dan 2020



Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) tahun 2020 mengalami peningkatan 41,2 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penataan anggaran untuk memberikan sarana ekonomi produktif, menunjukkan hasilnya.

Pada periode awal tahun, produksi HHBK yang berkarakter melibatkan masyarakat secara luas mulai mengalami kontraksi. Namun dengan intervensi secara langsung di awal triwulan II, produksi mulai menunjukkan peningkatan hingga akhir tahun 2020.

Perbandingan Produksi HHBK Tahun 2019 dan 2020





*Petugas Balai Taman Nasional Gunung Merbabu membersihkan jalur pendakian dan tempat singgah para pendaki. Upaya ini untuk mencegah penyebaran virus corona, sebagai salah satu prosedur kesehatan yang dijalankan selama reaktivasi wisata di kawasan konservasi.*

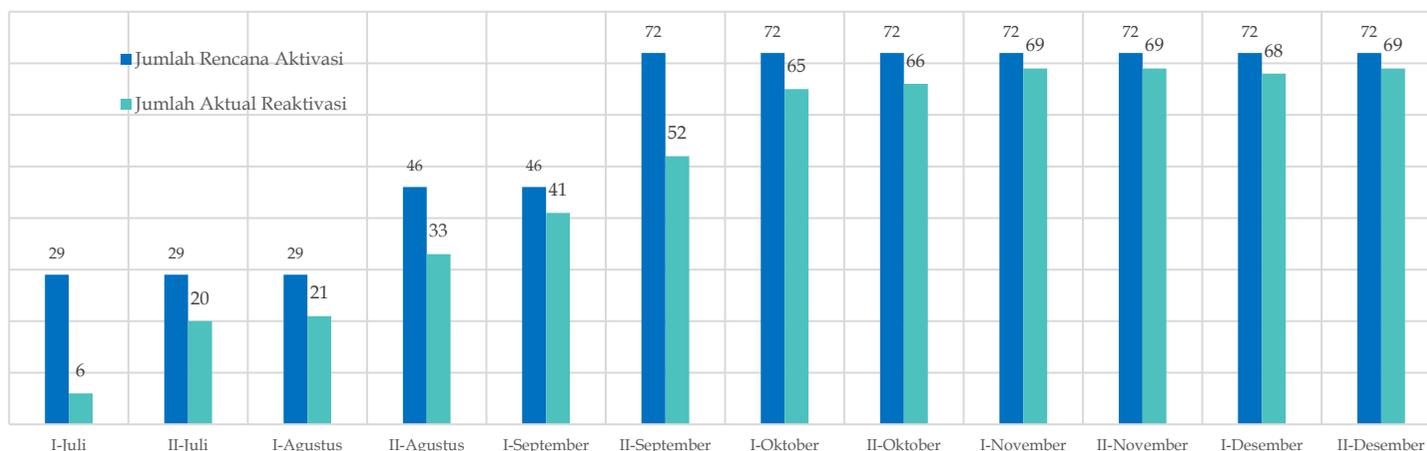
*Foto oleh Sumali.*

# REAKTIVASI WISATA ALAM

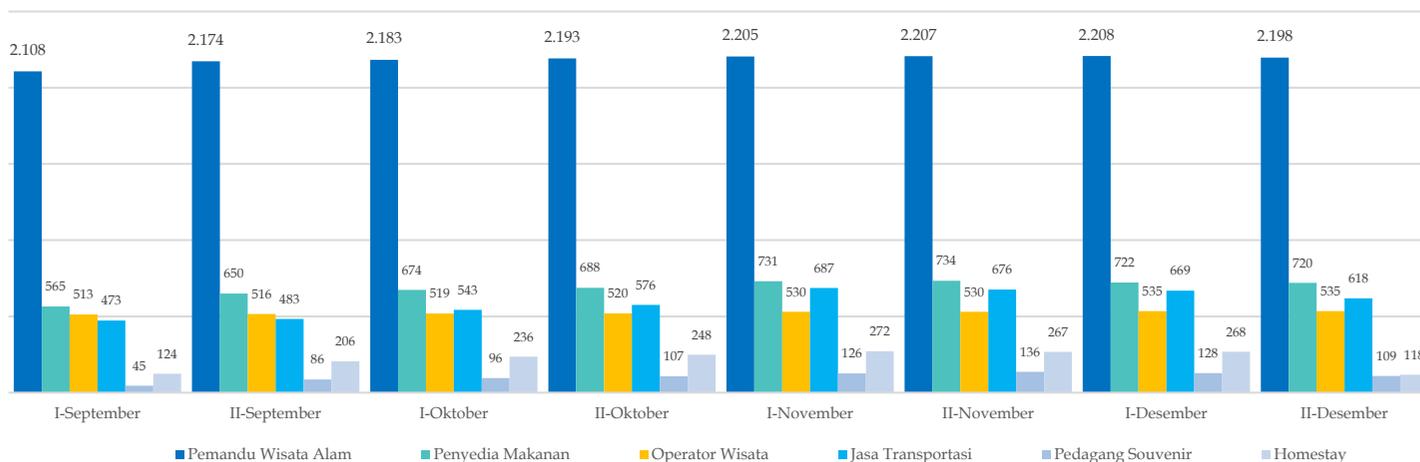
Jumlah kawasan konservasi yang direaktivasi sebanyak 72 unit. Namun demikian, kondisi kabupaten/kota yang terpapar pandemi menentukan aktivitas wisata alam dapat atau tidak dapat dilakukan. Beberapa kawasan seperti TN. Kepulauan Seribu dan TN. Tanjung Puting harus mengikuti keputusan Gubernur dan atau Bupati di wilayah tapaknya. Termasuk aktivitas penutupan ini adalah kondisi fisik kawasan dengan adanya bencana akibat aktivitas kegunung apian. Seperti TN. Gunung Merapi, TN. Bromo Tengger Semeru.

Secara keseluruhan reaktivasi ini mencakup 20 provinsi dengan 71 kabupaten/kota. Dari hasil pemantauan, setidaknya 4.650 unit usaha ikut bergeliat seiring jumlah kawasan yang direaktivasi. Angka paling tinggi tercatat pada Minggu I November (4.723 unit usaha). Unit-unit usaha paling tinggi adalah pemandu wisata, penyedia makanan, operator wisata, jasa transportasi, pedagang souvenir dan homestay. Khusus untuk pemandu wisata entitas yang dihitung adalah jumlah orang, sedang lainnya unit usaha.

Jumlah kawasan konservasi yang direaktivasi



Gambaran geliat ekonomi kawasan konservasi yang direaktivasi





*Petani memanfaatkan ladangnya untuk menanam buah tomat di kaki Gunung Merapi Desa Stabelan, Boyolali. Di lokasi yang berdekatan (foto halaman samping) terlihat petani mengusahakan tanaman cabe. Kesuburan kaki Gunung Merapi menjadi tumpuan masyarakat untuk mendapatkan pendapatan keluarga. Namun demikian, saat Merapi memuntahkan lahar panas (foto bawah), Kementerian mengambil sikap untuk menutup sementara kunjungan wisatawan ke TN. Gunung Merapi.*

*Foto oleh Arie Prasetyowati.*



# PADAT KARYA MANGROVE

Semangat dari kegiatan untuk mengembalikan pesisir sebagai serambi depan pemulihan ekonomi nasional. Menjangkau setidaknya 34 provinsi, 37 kabupaten/kota dengan 37 kecamatan. Jumlah masyarakat yang terlibat setidaknya 1.014 kelompok masyarakat, mencakup 39.970 orang pada areal seluas 17.704 hektare. Kelompok masyarakat yang dilibatkan berasal dari kelompok perhutanan sosial, kelompok tani hutan, kemitraan konservasi, dan kelompok dari kampung iklim. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Bank Rakyat Indonesia untuk memfasilitasi transaksi keuangan ke masyarakat. Jumlah rekening yang telah dibuat sebanyak 40.984, terdiri atas buku tabungan perseorangan sebanyak 39.970 rekening dan kelompok sebanyak 1.014 rekening.

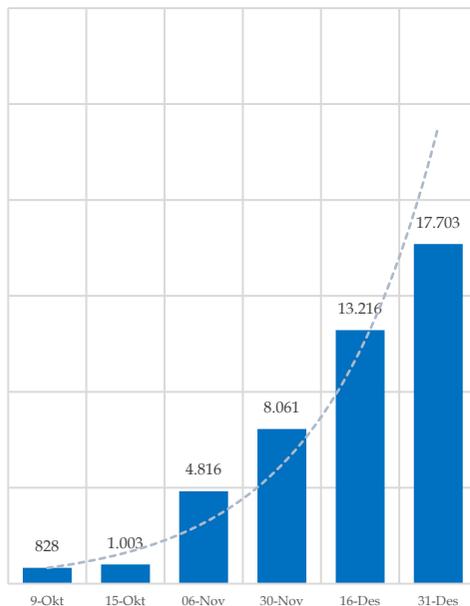
Berdasarkan pengamatan di lapangan, padat karya mangrove yang mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 ini mampu menumbuhkan kepedulian terhadap mangrove, merekatkan ikatan sosial, dan utamanya menjaga daya beli masyarakat selama pandemi. Jumlah hari orang kerja yang terserap sebanyak 1.727.549 atau setara dengan transformasi sebesar Rp. 376,07 miliar. Angka ini mengekspresikan 92,6 persen dari total anggaran padat karya mangrove ini. Animo masyarakat juga terlihat dari hasil survei yang mengetengahkan pendapat masyarakat betapa penting nya kegiatan ini.



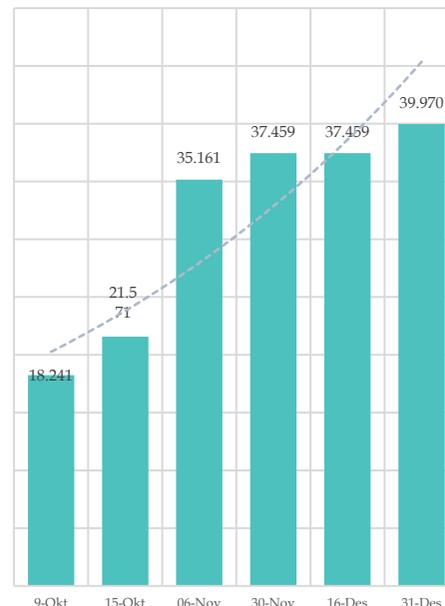
Ibu Metraneli, warga Kelurahan Tanjung Playu Batam. Sehari-hari berjualan makanan di depan sekolah. Akhir-akhir ini tidak bisa lagi berjualan karena sekolah belajar secara online. Dengan adanya pelaksanaan RHL yang melibatkan masyarakat, Ibu Metraneli akhirnya tetap mendapatkan tambahan penghasilan bagi keluarganya.

Foto oleh Bontor L Tobing.

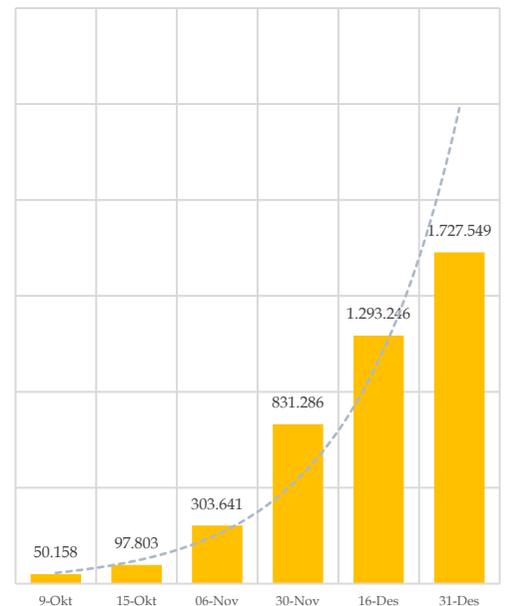
Perkembangan Penanaman Mangrove (hektare)



Perkembangan Pembuatan Rekening



Perkembangan Hari Orang Kerja





*Kelompok masyarakat Desa Tatangge antusias melaksanakan penanaman mangrove di Muara Labasi. Wilayah ini masuk ke dalam Resort Langkowal, Seksi Pengelolaan TN. Rawa Aopa Watumohai untuk Wilayah II.*

*Foto oleh Rahadin Saputra.*



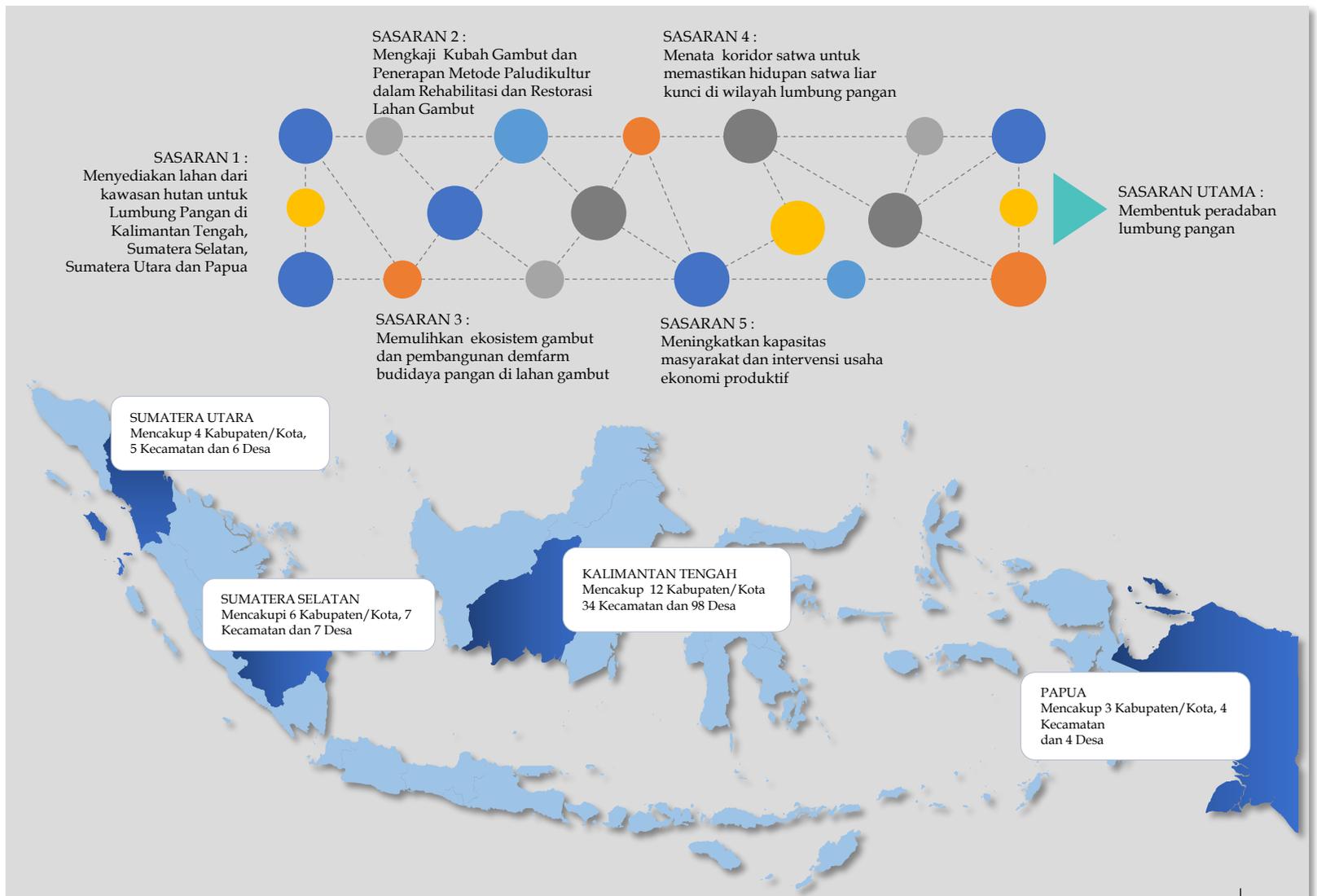
*Penanaman padi di lahan demfarm yang dibangun di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Hasil tanam ini telah dipanen pada awal Januari 2021. Demfarm ini bermanfaat untuk menyiapkan kondisi sosial masyarakat dan mengkaji informasi dan teknologi yang dapat diserap dan dikembangkan pada skala yang lebih besar dalam menjaga keberlangsungan ekosistem lumbung pangan nasional.*

*Foto oleh Musyafa Ahmad.*

# PENYIAPAN LUMBUNG PANGAN

Sasaran utama kegiatan penyiapan lumbung pangan (*food estate*) Kementerian adalah membentuk peradaban lumbung di Kalimantan Tengah, Papua, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Sasaran utama dipenuhi dengan 4 sasaran yaitu : menyediakan lahan dari kawasan hutan untuk lumbung pangan, mengkaji kubah gambut dan penerapan metode paludikultur, memulihkan ekosistem gambut dan pembangunan demfarm budidaya pangan di lahan gambut, menata koridor satwa untuk memastikan hidupan satwa liar kunci di wilayah lumbung pangan, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan intervensi usaha ekonomi produktif.

Pada tahun 2020, Kementerian tidak melaksanakan seluruh sasaran di 4 provinsi contoh, namun diberikan fokus pada Provinsi Kalimantan Tengah. Hanya beberapa keluaran dilaksanakan di 4 provinsi yaitu identifikasi penyiapan lahan untuk lumbung pangan dalam bentuk penataan batas, dan penyiapan kajian lingkungan hidup strategis (termasuk di dalamnya adalah penilaian dokumen lingkungan). Dari 4 provinsi ini, seluruh kegiatan food estate mencakup 115 Desa, 50 Kecamatan dan 25 Kabupaten/Kota



# PANGAN AGROFORESTRI

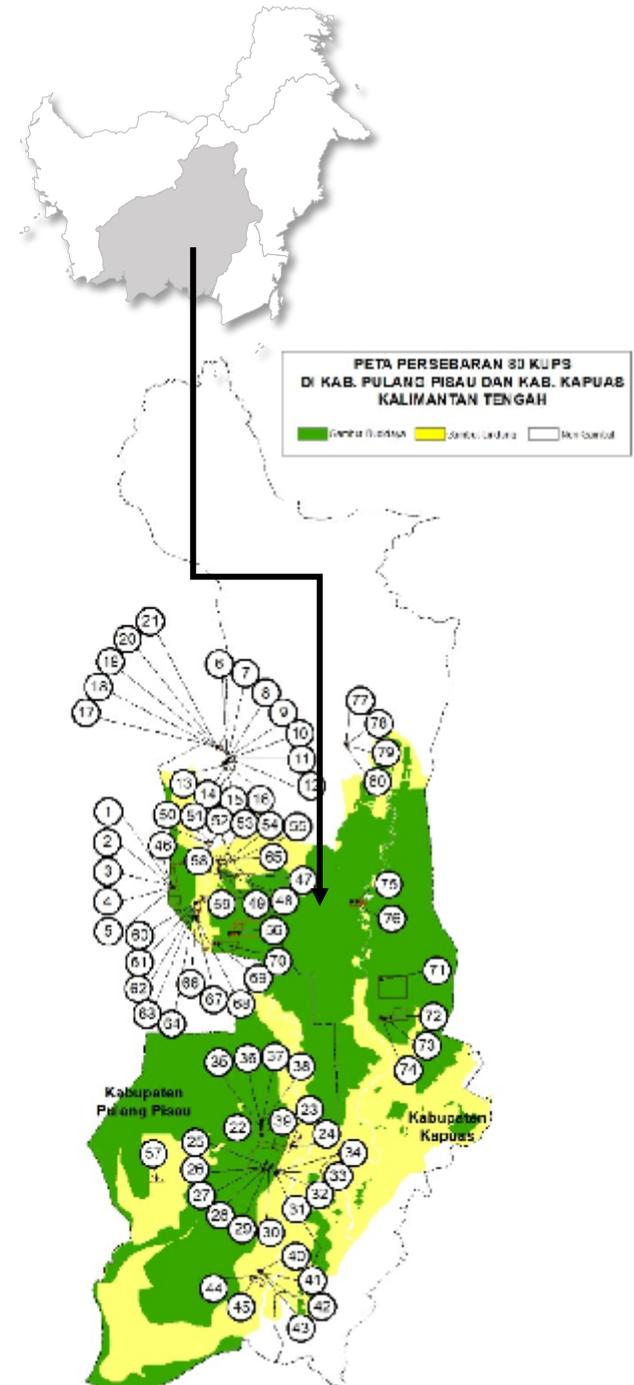
Pelaksanaan intervensi pangan agroforestri dilaksanakan pada 80 kelompok usaha perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebaran di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 70 kelompok yang mencakup 24 desa dan Kabupaten Kapuas mencakup 10 kelompok untuk 4 desa.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan pangan agroforestri dan pemberian alat ekonomi produktif. Dengan lokasi kegiatan di dalam kawasan hutan izin perhutanan sosial (*on farm*) dan di luar kawasan izin perhutanan sosial (*off farm*). Masing-masing diberikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- sehingga setiap kelompok akhirnya mendapatkan Rp. 200.000.000 yang ditransfer ke dalam rekening kelompok. Mekanisme pencairan dana dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama sebesar 60 persen untuk dana sebesar Rp. 120.000.000,- dan tahap kedua sebesar 40 persen untuk dana sebesar Rp. 80.000.000,-

Selanjutnya model pembangunan agroforestri disesuaikan dengan kondisi tanah yang ada. Secara umum terbagi atas kondisi tutupan hutan dan keberadaan sekat kanal.

Model Pembangunan Agroforestri

	KONDISI TUTUPAN		
	Sedang	Rendah	Tidak Ada Tutupan
Kanal	Agroforestry, silvofishery, silvopastura (tanaman hutan eksisting dengan pangan lokal sesuai kebutuhan masyarakat)	Agroforestry, silvofishery, silvopastura (tanaman hutan eksisting dengan pangan lokal sesuai kebutuhan masyarakat disertai pengkayaan tanaman hutan)	Agroforestry, silvofishery, silvopastura
Tidak ada kanal	Agroforestry (tanaman hutan eksisting dengan pangan lokal sesuai kebutuhan masyarakat) dan silvopastura	Agroforestry (tanaman hutan eksisting dengan pangan lokal sesuai kebutuhan masyarakat) disertai pengkayaan tanaman hutan dan silvopastura	Agroforestry melalui penanaman dan silvopastura



---

*Menumbuhkan peradaban lumbung pangan di Kalimantan Tengah*

---

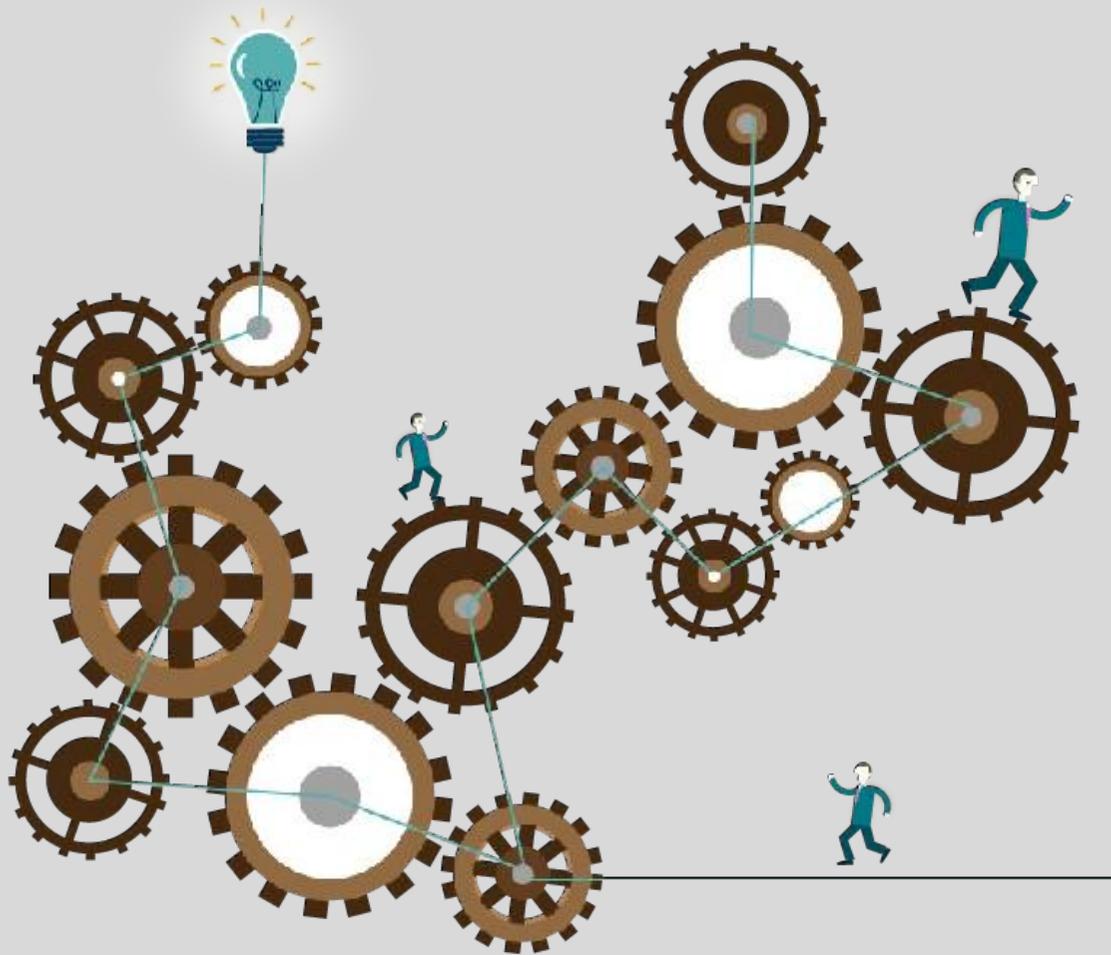
Bersanding dengan demfarm yang dibangun, peningkatan usaha petani juga didorong sesuai karakteristik tapaknya. Di Kecamatan Kapuas Tengah, Kapuas, kelompok perhutanan sosial ditingkatkan dan diberikan intervensi usaha peternakan (silvopastur). Sedangkan di Kahayan Tengah, Pulang Pisau diberikan usaha budidaya lebah madu yang melibatkan generasi muda. Jumlahnya sebanyak 94 usaha masyarakat dikembangkan untuk membangun peradaban lumbung pangan. Diantaranya 80 usaha kelompok perhutanan sosial, dan 14 kelompok tani hutan bersama kesatuan pengelolaan hutan di Kalimantan Tengah.





*Perjalanan dalam melaksanakan kegiatan pangan agroforestry lebih sering menggunakan perahu. Seperti terlihat di lokasi lembaga pengelola hutan desa Katimpun, Desa, Kecamatan Mantangai, Kapuas.*

*Foto oleh Agung Kriswiyanto. Foto halaman sebelumnya oleh Neny J Andin, pendamping LPHD Bahu Palawa, Kecamatan Kahayan Tengah, Pulang Pisau.*



# E. REALISASI ANGGARAN 2020



*Desir pasir putih membentang sepanjang bibir pantai memukau indah menarik para pelancong yang berkunjung di TN. Taka Bonerate. Kunjungan wistawasan yang semakin ramai menjadikan pendapatan negara dan perekonomian masyarakat bertambah.*

Foto oleh Asri



# IKHTISAR PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2020



**93,96%**

Anggaran yang terealisasi pada tahun  
2020

---

**95,77**

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran yang  
dipantau melalui SMART DJA

---

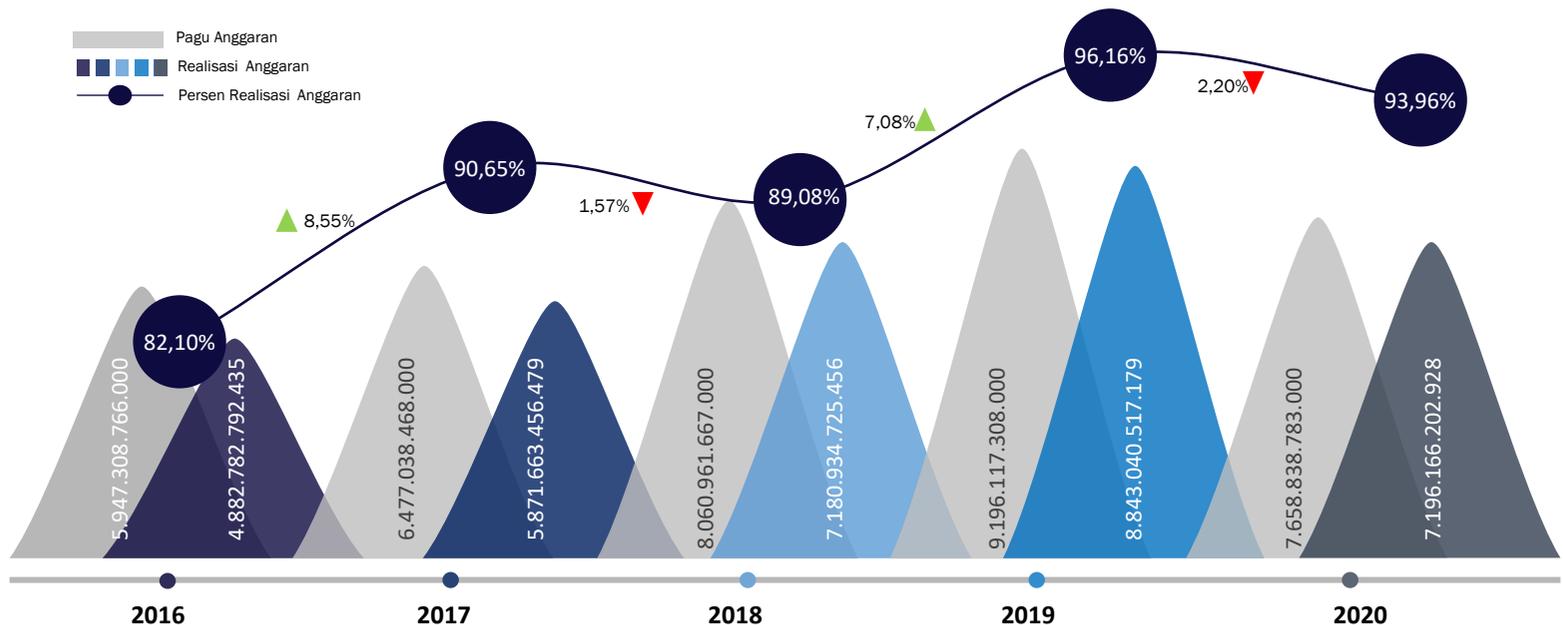
**92,98**

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan  
Anggaran yang dipantau melalui  
OMSPAN

---

# PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN KLHK PER TAHUN

Sumber : OMSPAN Kemenkeu  
Update 10 Februari 2021



Pagu anggaran awal kementerian LHK pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 9.319.325.816.000. Pada April 2021, Kementerian LHK mendapat mandat untuk penghematan pagu anggaran sebesar Rp. 2.539.710.862.000- yang difokuskan untuk kegiatan penanganan Covid-19.

Dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pada September 2021, Kementerian LHK kembali memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp. 812.435.436.000 yang dialokasikan untuk kegiatan Penanaman Mangrove dan Dukungan Ketahanan Pangan Terpadu (Food Estate) sehingga Pagu Tahun Anggaran 2020 Kementerian LHK menjadi Rp. 7.658.838.783.000.

Responsif terhadap berbagai kondisi dan kebijakan di masa pandemi, Kementerian LHK secara cepat melakukan identifikasi atas hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Melalui berbagai langkah strategis dan upaya percepatan pelaksanaan anggaran, Kementerian LHK berhasil mencapai realisasi anggaran sebesar 93,96% atau sebesar Rp. 7.196.166.202.928.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019, realisasi anggaran mengalami penurunan sebesar 2,20%. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2019, namun capaian realisasi anggaran Kementerian LHK menunjukkan tren kinerja yang semakin membaik jika dibandingkan dengan capaian 3 (tiga) tahun kebelakang (82,10% pada 2016; 90,65% pada 2017 dan 89,08% pada 2018).

Berdasarkan capaian tersebut, pada tahun 2020 Kementerian LHK menempati peringkat ke-47 dari 85 K/L dalam capaian realisasi anggaran, dengan realisasi anggaran nasional tahun 2020 mencapai 94,36%.

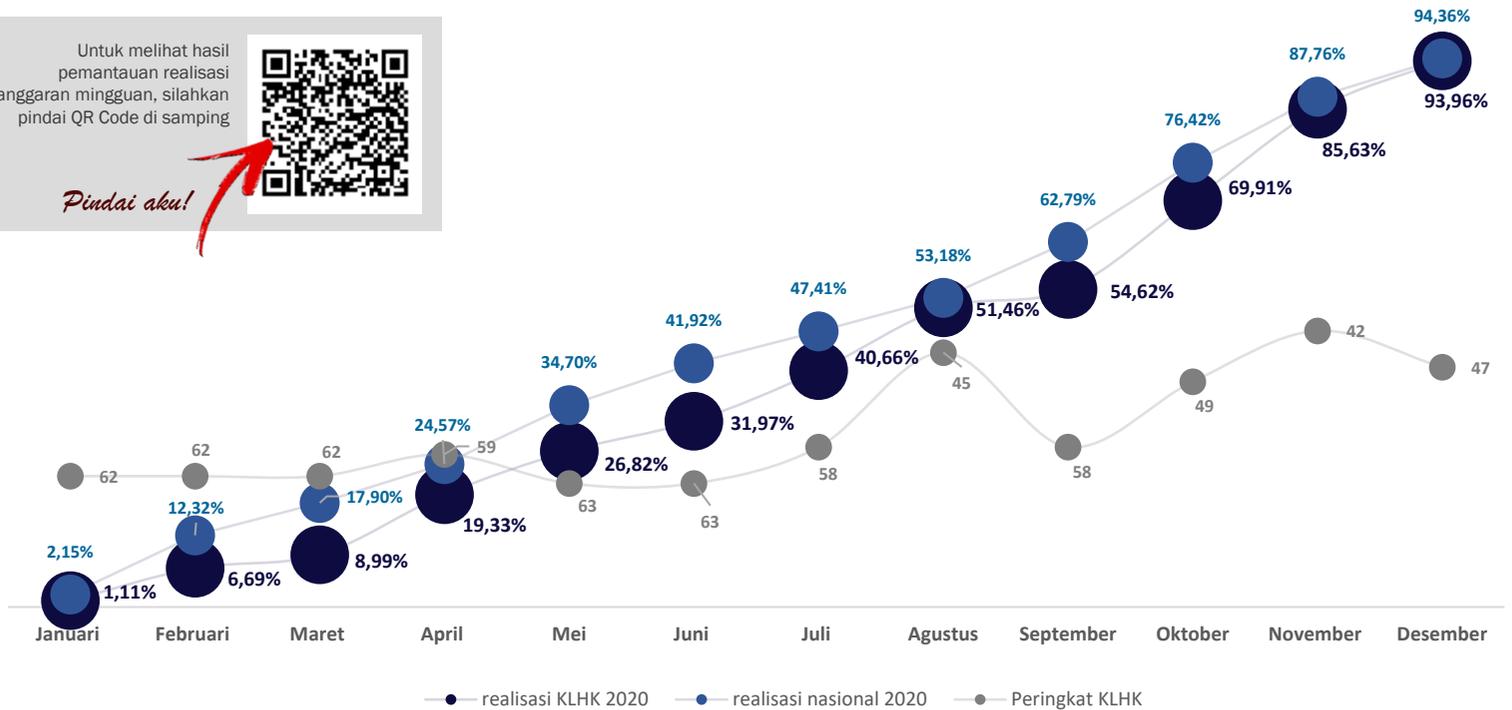
# PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN KLHK TA.2020 PER BULAN



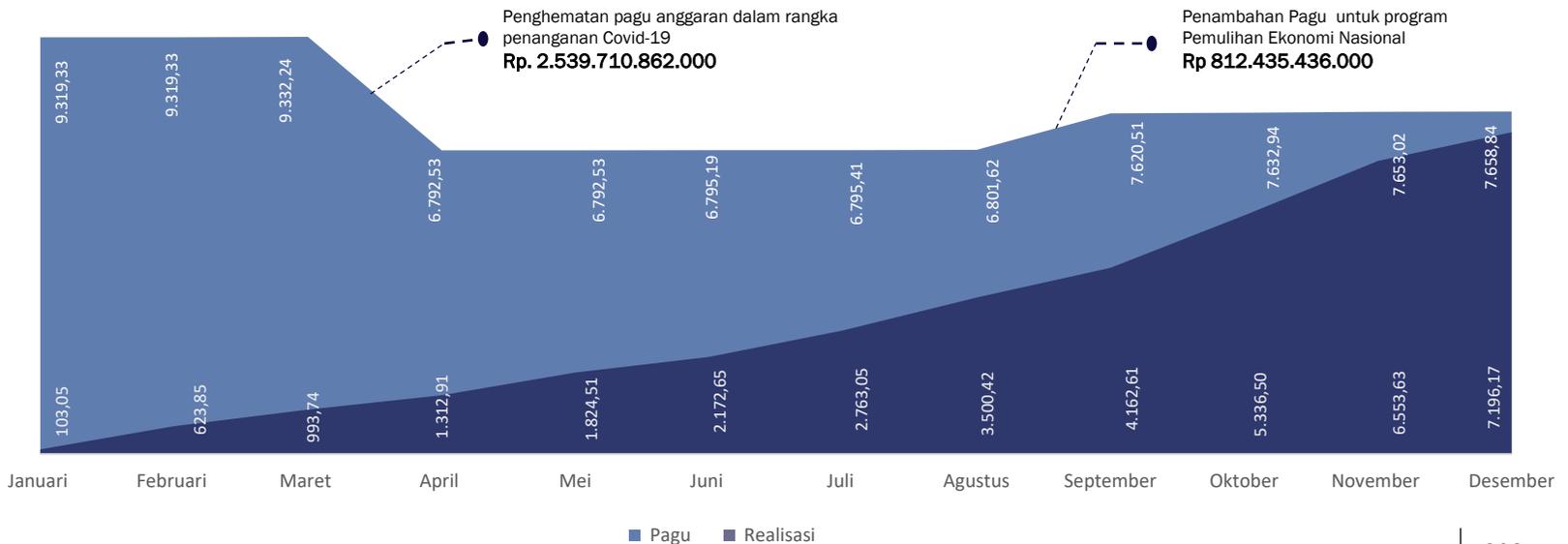
Untuk melihat hasil pemantauan realisasi anggaran mingguan, silahkan pindai QR Code di samping



*Pindai aku!*



## Pagu dan realisasi anggaran KLHK (dalam miliar rupiah)





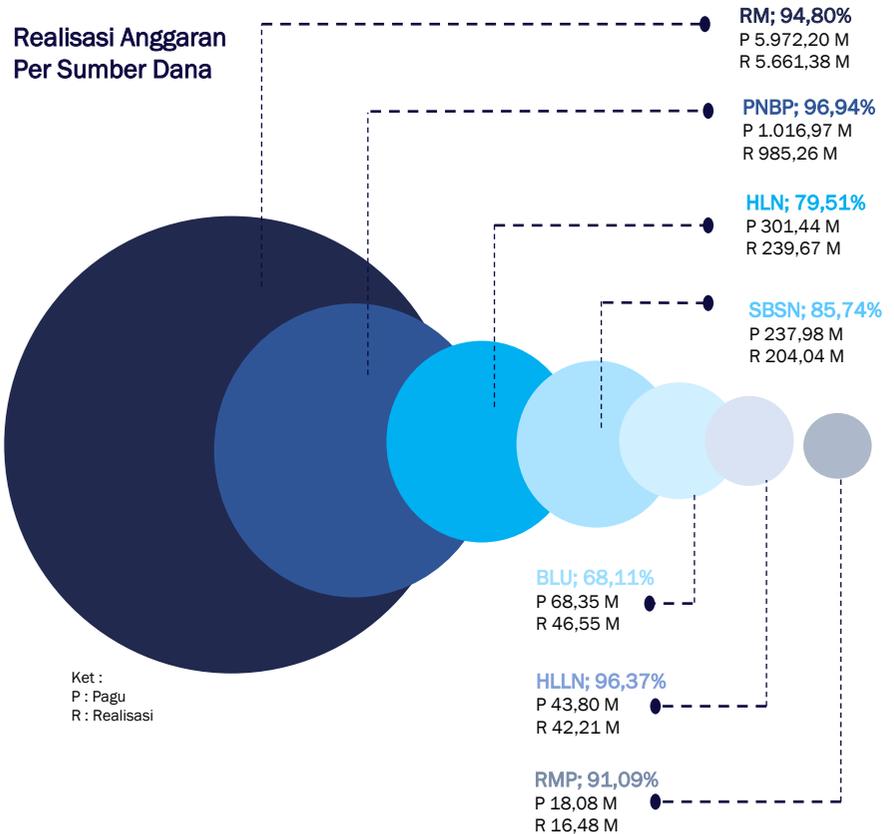
*Burung Elang Ular Sulawesi (Spilornis rufipectus) merupakan salah satu satwa endemik yang tersebar di TN. Lore Lindu.*

*Foto oleh Donny Heru Kristianto.*

Berdasarkan sumber dana, proporsi pagu anggaran tertinggi ke yang terendah berturut-turut yaitu Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Luar Negeri (HLN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Badan Layanan Umum (BLU), Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN), dan Rupiah Murni Pendamping (RMP).

Sumber dana PNBP dan HLLN merupakan sumber dana dengan capaian realisasi tertinggi berturut-turut sebesar 96,94% dan 96,37%. Capaian realisasi sumber dana terendah terdapat pada BLU, hal ini disebabkan *cut off* anggaran akibat adanya likuidasi satker Pusat Pembiayaan Pembangunan Kehutanan (BLUP3H) pada pertengahan tahun 2020 yang digantikan fungsinya oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPLDH) yang berkedudukan di Kementerian Keuangan

Realisasi anggaran Kementerian LHK sebesar 93,96% merupakan agregasi dari realisasi anggaran seluruh Eselon I pelaksana di bawahnya. Bila dilihat realisasi anggaran per Eselon I, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Eselon I dengan realisasi anggaran tertinggi dengan realisasi mencapai 99,13%.



### Realisasi Anggaran Per Eselon I (dalam miliar Rupiah)



# EVALUASI KINERJA ANGGARAN (EKA SMART)

Nilai Evaluasi kinerja anggaran (EKA SMART) merupakan salah satu parameter untuk melihat kualitas kinerja anggaran. EKA menggambarkan kualitas unit kerja organisasi dalam melakukan perencanaan, penyerapan anggaran serta pencapaian target-target kinerja. Nilai EKA dihitung pada setiap entitas baik satker, Eselon I maupun Kementerian.

Nilai EKA di tingkat Kementerian dibangun oleh 50 persen Capaian Sasaran Strategis dan dan 50 persen Rata-rata Nilai EKA Eselon I.

Komponen pembentuk nilai EKA Unit Eselon I adalah: Capaian Keluaran Program, Capaian Sasaran Program, Serapan Anggaran, Konsistensi terhadap Rencana Penarikan Dana, Efisiensi, dan Rata-rata Nilai EKA Satker dibawahnya.

Sementara komponen pembentuk EKA Satker adalah : Serapan Anggaran, Konsistensi terhadap Rencana Penarikan Dana, Capaian Keluaran, dan Efisiensi.

Pada tahun 2020 Nilai EKA Kementerian LHK sebesar 95,77. Nilai tersebut terbentuk dari Capaian Sasaran Strategis sebesar 100 dan rata-rata Nilai EKA Eselon I sebesar 91,54.

Jika dibandingkan dengan Nilai EKA pada tahun 2019, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 0,48 poin yang disebabkan oleh menurunnya nilai rata-rata EKA Eselon I.

Tiga Eselon I dengan nilai EKA terbaik berturut-turut adalah Ditjen PHLHK sebesar 99,33; Ditjen PHPL sebesar 97,66 dan Ditjen PSKL sebesar 97,51.

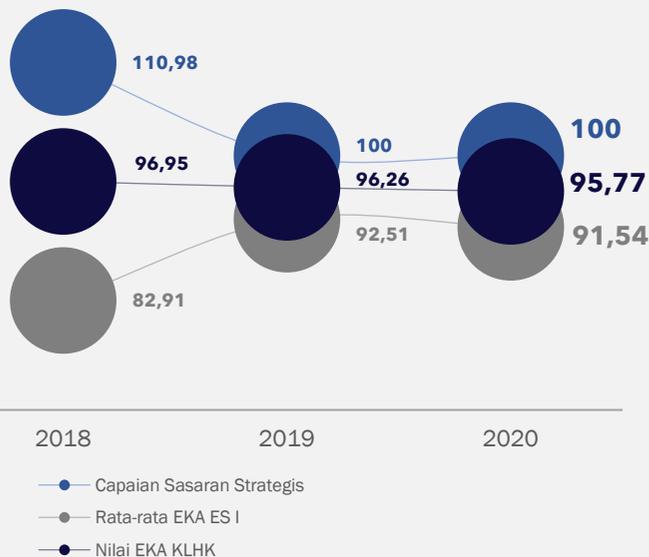
Nilai EKA bersama dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi dasar pembentuk Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Nilai EKA menyumbang sebesar 60 persen dalam pembentukan NKA.

Hasil perhitungan NKA kemudian menjadi dasar dalam penentuan peringkat kinerja anggaran terbaik Kementerian/Lembaga untuk setiap kategori pagu yang dikelola. 5 (lima) Kementerian/Lembaga dengan NKA terbaik pada setiap kategori pagu akan mendapatkan insentif anggaran yang besarnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.



Sumber : SMART DJA Kemenkeu  
Update 10 Februari 2021

Nilai EKA dan Komponen EKA KLHK per tahun



Nilai EKA SMART dan Nilai IKPA OMSPAN per ES I



# INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA OMSPAN)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencerminkan kualitas perbendaharaan suatu entitas kerja. Nilai IKPA dilihat berdasarkan 4 (empat) aspek yaitu kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Dari aspek tersebut kemudian diukur melalui 13 indikator penilaian. Indikator dengan bobot tertinggi dalam penilaian IKPA 2020 adalah data kontrak (15%), penyerapan anggaran (15%), penyelesaian tagihan (12%), dan konfirmasi capaian output (10%).

Nilai EKA dihitung pada setiap entitas baik satker, Eselon I maupun Kementerian dan dipantau melalui OMSPAN. Nilai IKPA merupakan hasil pembagian dari total nilai akhir ketiga belas indikator dibagi dengan konversi bobot.

Nilai IKPA KLHK tahun 2020 Sebesar 92,98 dari nilai maksimal 100. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai IKPA KLHK mengalami penurunan sebesar 0,29 poin dimana nilai IKPA tahun 2019 sebesar 93,27.

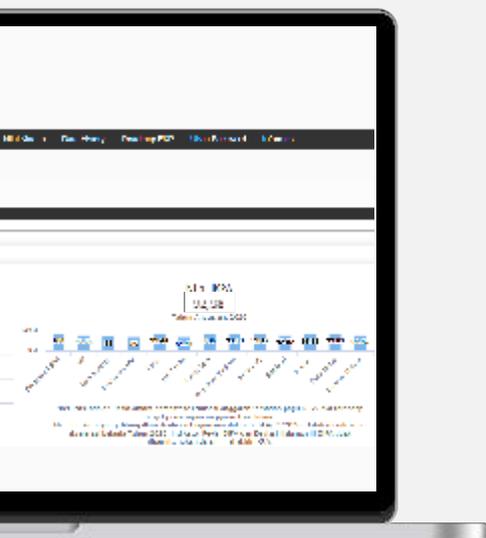
Tiga Unit Kerja Eselon I dengan nilai IKPA tertinggi berturut-turut adalah Badan P2SDM sebesar 97,66, Ditjen PPI sebesar 96,89 dan Ditjen KSDAE sebesar 96,52

Nilai IKPA menyumbang sebesar 40 persen dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) bersama dengan nilai EKA SMART

## Nilai IKPA KLHK Per Tahun



Sumber : OMSPAN Kemenkeu  
Update 10 Februari 2021



## Nilai Komponen IKPA 2020



# PENGHARGAAN 2020

## MENGHADIRKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dari waktu ke waktu. Beberapa penghargaan dan pengakuan dari berbagai pihak selama tahun 2020 menandakan bahwa di tengah pandemi, tata kelola birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, selalu menempatkan publik sebagai stakeholder utama yang harus dilayani dengan baik, cepat dan berkualitas.

Dari tekad inilah kemudian diakselerasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan kolaborasi antar pihak, maka terlahir beberapa inovasi dan *breakthrough* yang melahirkan produk-produk layanan publik yang berkualitas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.



### Teladan dan Peran Serta Mendorong Kepatuhan dan Kesadaran Pajak

Dalam rangka Hari Pajak 14 Juli 2020, Menteri LHK mendapatkan penghargaan atas keteladanan dan peran serta dalam mendorong kepatuhan dan kesadaran Pajak

### Bhumandala Rajata

KLHK memperoleh penghargaan Bhumandala Rajata dari Badan Informasi Geospasial (BIG) atas prestasinya dalam mengembangkan simpul jaringan dan meningkatkan pemanfaatan informasi geospasial.

### Opini WTP dari BPK

KLHK meraih Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" dari BPK-RI, tiga kali berturut-turut sejak 2017. Predikat WTP diserahkan BPK-RI pada Juli 2020

### Penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana

Menteri LHK menerima anugerah Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini adalah bintang penghargaan sipil yang tertinggi



Wakil Menteri LHK menerima penghargaan Bhumandala Rajata dalam Bhumandala Award yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)

Foto oleh Raysapta



### Anugerah Inovasi Indonesia 2020

Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan mendapatkan Anugerah Inovasi Indonesia 2020 dari Kemenristek/BRIN



### TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020

SIMONTANA, raih penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020 dari Kemen PAN&RB pada November 2020



### Penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

Empat Satuan Kerja (BPKH Yogyakarta, Balitek KSDA, Balitek STH dan Pusrenbang SDM) menerima penghargaan Zona Integritas menuju WBK dari Kemen PAN&RB



### Badan Publik "informatif"

KLHK sebagai Badan Publik memperoleh predikat "informatif" dari Komisi Informasi Pusat pada November 2020

Manggala Agni Daops Tinanggea sedang melatih pelajar untuk menggunakan masker selama pandemi. Hal ini merupakan salah satu tindakan KLHK dalam mencegah rantai penyebaran virus Covid-19

Foto oleh Samsir





## IV. PENUTUP

### Adaptasi di tengah pandemi, terus mengawal jaman yang berubah

*Sembalun, TN. Gunung Rinjani. Kawasan ini menyumbang keunikan bagi destinasi wisata Mandalika untuk mendulang devisa. Salah satu model adaptasi pengelolaan yang menentengahkan afirmasi terhadap pembangunan wilayah dalam mendukung prioritas nasional.*

*Foto oleh Haryadi.*

---

Menyelaraskan struktur penganggaran, menata regulasi sesuai kondisi tapak, untuk membantu mendetak produktivitas tapak sembari meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Pandemi mengajarkan kita cara untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan eksternal. Kementerian menyelaraskan cara bekerja mulai dari merubah struktur penganggaran yang lebih memanfaatkan teknologi informasi, menghindari kontak langsung dalam pelaksanaan tugas fungsi, berpihak pada kelompok masyarakat terdampak Covid-19, dan bergerak secara nyata di tengah masyarakat untuk mencegah penyebaran pandemi. Mencegah kerumunan dengan menutup dan mereaktivasi wisata alam sesuai kondisi wilayah terdampak pandemi. Hingga menata regulasi untuk tetap mempertahankan produktivitas hutan dan hasil hutan.

Tak surut semangat, Kementerian membantu pemerintah mengatasi kemiskinan, mendetak produktivitas dan nilai tambah sembari meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Di dalam pemenuhan prioritas nasional, Kementerian menyumbang capaian terbesar pada kinerja prioritas nasional ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup. Menyusul berikutnya adalah prioritas nasional pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Reforma agraria dan perhutanan sosial telah menyumbang program prioritas pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kemampuan penduduk miskin dan rentan untuk diberdayakan secara ekonomi. Prioritas nasional berikutnya adalah nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja. Sasaran prioritas nasional untuk mendetak produktivitas membuahkin kinerja pertumbuhan yang selalu positif sepanjang tahun 2020. Angka capaian persen pertumbuhan hingga triwulan III secara kumulatif (C to C) sebesar 6,98% sesuai harga berlaku dan 1,79% sesuai harga konstan. Angka ini lebih rendah dibanding target 2,70-2,90 di Rencana Kerja Pemerintah 2020.

Berkelindan dengan sumbangan prioritas nasional, Kementerian menyumbang 4 tema utama pemenuhan janji Presiden dan Wakil Presiden. Yaitu *delivery assurance unit*, *open government Indonesia*, aksi hak asasi manusia dan penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. *Delivery assurance unit* memiliki tingkat pemenuhan paling tinggi, menyusul berikutnya adalah aksi hak asasi manusia dan *open government Indonesia*.



Terkait dengan pemenuhan sasaran strategis Kementerian. Angkanya memberikan gambaran bahwa proses bisnis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bertolak dari perbaikan tata kelola selama masa pandemi. Beradaptasi menuju transformasi digital dan lebih berpihak kepada kondisi tapak, utamanya kondisi masyarakat selama pandemi. Hal ini tercermin dari pemenuhan Pilar Tata Kelola paling tinggi disusul oleh Pilar Sosial. Menguntai intervensi sosial langsung kepada masyarakat yang memberikan ekspresi penting setidaknya kepada dua hal utama, yaitu perbaikan lingkungan dan perbaikan ekonomi. Kedua hal ini beriringan tercermin dari pemenuhan Pilar Ekonomi dan Pilar Lingkungan.

Nilai kinerja pembangunan berada pada angka 98,66 persen. Angka ini dibangun dari nilai capaian sasaran strategis Pilar Lingkungan sebesar 88,92 persen, Pilar Ekonomi 97,96 persen, Pilar Sosial 102,49 persen dan Pilar Tata Kelola 105,28 persen. Bersanding dengan realisasi anggaran sebesar 93,96 persen untuk membentuk nilai efisiensi, Kementerian memperoleh nilai sebesar 0,95. Angka ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran dalam pemenuhan kinerja pembangunan dipandang efisien.

---

Salah satu anggota pramuka siaga saka wanabakti ikut serta menanam bibit mangrove di ekowisata mangrove Lantebung, Makassar.

Foto oleh Junaedi Sam.

Suasana pagi nan cerah dari Pulau Padar yang berada di kawasan Taman Nasional Komodo. Hiruk pikuk kegembiraan pelancong di Pulau Padar sebelum pandemi menyerang. Kini rindu tak terbendung untuk mengulang suasana indah itu di jaman yang berubah.

Foto oleh Mahardhika Cahaya Utama.



# GLOSSARIUM

## A

AKIP:	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APBN :	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APHI:	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
APL:	Areal Penggunaan Lain
AQMS:	<i>Air Quality Monitoring System</i>
ASN :	Aparatur Sipil Negara

## B

Bakamla:	Badan Keamanan Laut
BAU:	Business as Usual
BBKSDA:	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
BBPPEHD:	Balai Besar Litbang Ekosistem Hutan Dipterokarpa
BBPPBPTH:	Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
BCCPGL:	Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem
BDLHK:	Badan Dana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BioCF:	BioCarbon Fund
BMN:	Barang Milik Negara
BPK:	Badan Pemeriksa Keuangan
BKPM :	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKSDA:	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BLU :	Badan Layanan Umum
BLI:	Badan Litbang Inovasi
BMN:	Barang Milik Negara
BOD:	<i>Biochemical oxygen</i>
BP2SDM:	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BPDASHL:	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
BPD LH:	Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
BPK:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKB:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPPLHK:	Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BPPTA:	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestri
BPPTHHBK:	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu
BPPTKSDA:	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Konservasi Sumber Daya Alam
BPPTPDAS:	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
BPPTPTH:	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan
BPPTSTH:	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan
BRIN:	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BSP:	Benefit Sharing Plan
BTN:	Balai Taman Nasional
BUMDes:	Badan Usaha Milik Desa
B3:	Bahan Berbahaya dan Beracun

## C

CA:	Cagar Alam
CaLK:	Catatan atas Laporan Keuangan
CITES:	Convention on International Trade in Endangered Species
COP:	Conference of Parties

## D

DAK:	Dana Alokasi Khusus
DAS:	Daerah Aliran Sungai
Daops:	Daerah Operasi
DIPA:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen:	Direktorat Jenderal
Diklat:	Pendidikan dan Pelatihan
DK:	Dampak Kebakaran
DKK:	Dampak Kebakaran dan Kanal
DLH:	Dinas Lingkungan Hidup
DO:	<i>Dissolved oxygen</i>
DI-III:	Diploma

## E

EKA:	Evaluasi Kinerja Anggaran
ERPA:	<i>Emissions Reduction Purchase Agreement</i>

## F

FORCLIME:	<i>Forest and Climate Change Programme</i>
FCPF:	<i>Forest Carbon Partnership Facility</i>
FREL:	<i>Forest Reference Emission Level</i>

## G

GCF:	<i>Global Climate Fund</i>
GHG:	<i>Green House Gas</i>
GRK:	Gas Rumah Kaca

## H

Ha:	Hektare
HAM:	Hak Asasi Manusia
HCV:	<i>High Conservation Value</i>
HD:	Hutan Desa
HHBK:	Hasil Hutan Bukan Kayu
HLN:	Hibah Luar Negeri

HLLN:	Hibah Langsung Luar Negeri
HP:	Hutan Produksi
HPK:	Hutan untuk sektor non kehutanan
HPT:	Hutan produksi terbatas
HSA:	Hutan Suaka Alam
HTI:	Hutan Tanaman Industri
HTR:	Hutan Tanaman Rakyat
Humas:	Hubungan Masyarakat

## I

IIEPKH:	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan
IKEG:	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
IKLH:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKP:	Indikator Kinerja Program
IKPA :	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IKPS:	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
IKU:	Indikator Kinerja Utama
IPAL:	Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPTEK:	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Itjen:	Inspektorat Jenderal
IUPH:	Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan
IUPHHK-HA:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam
IUPHHK- HTI:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri
IUPJL:	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan

## J

Jakstrada:	Kebijakan Strategis Daerah
------------	----------------------------

## K

K/L:	Kementerian/Lembaga
Karhutla:	Kebakaran Hutan dan Lahan
KBD:	Kebun Bibit Desa
KBLI:	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KBR:	Kebun Bibit Rakyat
Kehati:	Keanekaragaman Hayati
Kementan:	Kementerian Pertanian
KemenPAN&RB:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KHDTK:	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
KHG:	Kawasan Hidrologi Gambut
KK:	Kepala Keluarga
KLHK:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KIP:	Keterbukaan Informasi Pusat
KKN:	Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KKP:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KSA:	Kawasan Suaka Alam
KSDA:	Konservasi Sumber Daya Alam
KSDAE:	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
KPA:	Kawasan Pelestarian Alam
KPH:	Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHL:	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KPHP:	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
KPPL:	Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan
KTH:	Kelompok Tani Hutan
KUPS:	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

## L

LAN:	Lembaga Administrasi Negara
LAT:	Lahan Akses Terbuka
Litbang:	Penelitian dan Pengembangan
LB3:	Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya
LH:	Lingkungan Hidup
LHK:	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LK:	Laporan Keuangan
LKJ:	Laporan Kinerja
LKPP:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LP2UKS:	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat
LRA:	Laporan Realisasi Anggaran

## M

MAP:	Mata Anggaran Penerimaan
Matalawa:	Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
Menhut:	Menteri Kehutanan
MenPAN&RB:	Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
MPA:	Masyarakat Peduli Api
MRV:	<i>Monitoring, Reporting, Verification</i>

## N

NDC:	<i>Nationally Determined Contribution</i>
NFMS:	<i>National Forest Monitoring System</i>
NKA :	Nilai Kinerja Anggaran
NTB:	Nusa Tenggara Barat
NTT:	Nusa Tenggara Timur

# GLOSSARIUM

## O

OGI : Open Government Indonesia  
OMSPAN: *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

## P

PAN&RB: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
PDASHL: Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung  
PDB: Produk Domestik Bruto  
PDRB: Produk Domestik Regional Bruto  
PEN: Pemulihan Ekonomi Nasional  
PermenLH: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  
PESK: Pertambangan Emas Skala Kecil  
PHBM: Pola Perum Perhutani  
PHLHK: Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
PHPL: Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
PK: Perjanjian Kinerja  
PKPM: Padat Karya Penanaman Mangrove  
PKTL: Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan  
PM: Penanaman Mangrove  
PMPRB: Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi  
PN: Prioritas Nasional  
Polhut: Polisi Kehutanan  
PNBP: Pendapatan Negara Bukan Pajak  
PNS: Pegawai Negeri Sipil  
PP: Peraturan Presiden  
PPI: Pengendalian Perubahan Iklim  
PPID: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
PJLHK: Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi  
PPh: Pajak Penghasilan  
PPLH: Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup  
PPKL: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan  
PPNPN: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri  
PPNS: Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
PPTKH: Penyelesaian Tanah dalam Kawasan Hutan  
PROPER: Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan  
Prokliim: Program Iklim  
PS: Perhutanan Sosial  
PSDH: Provisi Sumber Daya Hutan  
PSLB3: Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun  
PSKL: Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan  
PTSP: Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Pusdatin: Pusat Data dan Informasi  
P2SDM: Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
P3E: Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion  
P3H: Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

## R

RB: Reformasi Birokrasi  
RBP: *Result Based Payment*  
REDD: *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation*  
Renja: Rencana Kerja  
Renstra: Rencana Strategis  
RHL: Rehabilitasi Hutan dan Lahan  
RKA K/L: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lingkungan  
RKM: Rencana Kemandirian Masyarakat  
RKP: Rencana Kerja Pemerintah  
RKTN: Rencana Kerja Taman Nasional  
RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah  
RM : Rupiah Murni  
RMP : Rupiah Murni Pendamping  
RPP: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

## S

SAKIP: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Satker: Satuan Kerja  
SBSN: Surat Berharga Syariah Negara  
SD: Sekolah Dasar  
SDM: Sumber Daya Manusia  
Setjen: Sekretariat Jenderal  
SIMONTANA: Sistem Monitoring Hutan Nasional  
SK: Surat Keputusan  
SKW: Stasiun Karantina Wilayah  
SLTA: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas  
SLTP: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama  
SM: Suaka Margasatwa  
SMART: Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu  
SMKKN: Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan  
SNI: Standar  
SPBE: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPIP: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
SPM: Standar Pelayanan Minimum  
SPTN: Seksi Pengelolaan Taman Nasional  
SRAP: Strategi Rencana Aksi Propinsi  
SSPLT: Status Pemulihan Lahan Terkontaminasi  
SVLK: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu  
S1: Sarjana  
S2: Master  
S3: Doktor

## T

TA: Tahun Anggaran  
Tahura: Taman Hutan Rakyat  
TFCA: *Tropical Forest Conservation Act*  
TIK: Teknologi Informasi dan Komunikasi  
TMP: Tidak Menyatakan Pendapat  
TMKH: Tukar Menukar Kawasan Hutan  
TN: Taman Nasional  
TNI: Tentara Nasional Indonesia  
TNTBR: Taman Nasional Takwa Bonerate  
TSL: Tumbuhan dan Satwa Liar  
TORA: Tanah Objek Reformasi Agraria  
TUP: Tambahan Uang Persediaan  
TW: Tidak Wajar  
TWA: Taman Wisata Alam

## U

UKE: Unit Kerja Eselon  
UP: Uang Persediaan  
UPT: Unit Pelaksana Teknis  
USD: United States Dollar  
USK: Usaha Skala Kecil

## W

WBK: Wilayah Bebas Korupsi  
WDP: Wajar Dengan Pengecualian  
WTP: Wajar Tanpa Pengecualian

## Y

YoY: *Year on Year*



Tahun yang penuh berkah, mengajarkan kepada dunia bahwa di balik segala kesulitan yang dialami, terlahir kesempatan dan peluang baru bagi insan yang mampu beradaptasi pada perubahan peradaban. Kementerian LHK mengabdikan diri turut mengawal paradigma baru dalam mengelola lingkungan hidup dan hutan sebagai lompatan besar menuju bangsa pemenang.

ISBN 978-602-28446-1-0



9 786239 604820